



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023**

**K U A  
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ..... 1

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 5

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 5

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 8

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD ..... 11

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN ..... 11

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD ..... 12

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ..... 16

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2021 ..... 16

4.2 Target Pendapatan Daerah ..... 27

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ..... 29

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja ..... 29

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga ..... 40

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ..... 41

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ..... 41

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..... 42

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN ..... 43

BAB VIII PENUTUP ..... 46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan dan merupakan pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka dan acuan untuk manajemen keuangan dalam melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disinergikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan DPRD Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2023.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;



4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan yang meliputi perubahan dalam bidang teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kekuasaan dalam menyusun kebijakan-kebijakan untuk membangun sinergitas serta interaksi ekonomi antar pelaku ekonomi daerah. Pada Hakekatnya Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan tindakan Pemerintah dan Masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh satu sama lain. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya.

Arah Kebijakan Ekonomi tahun 2023 diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2023, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu – isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten.

##### **2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah**

###### **2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kabupaten Pinrang saat ini masih terdampak dengan adanya pandemic Covid-19, namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan propinsi Sulawesi Selatan dan nasional, terlihat pada capaian tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang berada pada posisi 5,04% diatas dari capaian pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan yang berada

pada posisi 4,65% dan capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada posisi 3,69%, Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang,**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017- 2021**

No	Pertumbuhan Ekonomi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan ekonomi
1	2	3	5	6	7	8	4	9
1	Kab.Pinrang	%	7,84	6,91	6,53	0,44	5,04	5,35
2	Sul Sel	%	7,21	7,06	6,92	-0,70	4,65	5,03
3	Nasional	%	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	3,38

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2022

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan mengalami pertumbuhan sebesar 5,04%. Dari 17 sektor lapangan usaha, 11 sektor mengalami pertumbuhan positif dan lainnya negatif. Sektor transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 9,16 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 8,16 persen serta engadaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,11 persen. Sementara yang menagalami penurunan yang paling drastic adalah sector kontruksi yang terkontranksi sebesar -0,19 persen. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2017 -2021**

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.65	4.69	3.37	0.28	5,13
2	Pertambangan dan penggalian	11.22	9.48	9.30	2.25	5,95
3	Industri pengolahan	8.26	2.80	10.17	-1.05	5,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.95	8.96	11.38	4.46	6,71

5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.27	8.25	2.45	5.84	4,58
6	Konstruksi	6.62	7.06	11.60	0.89	-0,19
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.82	12.19	9.29	-1.05	6,61
8	Transportasi dan Pergudangan	7.54	9.41	10.11	-11.58	9,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.59	12.75	9.73	-10.45	8,11
10	Informasi dan Komunikasi	9.79	11.41	10.96	13.41	6,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.23	5.53	2.19	0.34	4,77
12	Real Estate	6.58	5.51	5.70	4.58	2,33
13	Jasa Perusahaan	7.02	9.83	7.05	-7.97	5,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4.88	9.77	7.30	1.55	7,00
15	Jasa Pendidikan	8.92	9.81	8.36	5.70	3,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.21	9.82	9.71	9.23	6,78
17	Jasa Lainnya	9.56	13.09	6.17	-11.08	8,16
	<b>PDRB</b>	<b>7.84</b>	<b>6.91</b>	<b>6.53</b>	<b>0.44</b>	5,04

Sumber data : PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2017 -2021, BPS Kabupaten Pinrang

### 2.1.1.2 PDRB Perkapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pendapatan penduduk wilayah tersebut, dan PDRB Perkapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan tingkat pendapatan perkapita di suatu wilayah.

Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Pinrang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan gambaran pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional menurut harga berlaku Tahun 2017-2021**

No	PDRB Perkapita(ADHB)	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Pinrang	(Juta Rp)	43,95	48,28	52,05	52,93	53,41
2	Sul Sel	(Juta Rp)	47,82	52,64	57,03	56,51	59,66
3	Nasional	(Juta Rp)	51,89	55,99	59,06	56,93	62,20

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2022

Berdasarkan pada tabel diatas data menunjukkan meskipun PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang tiap tahunnya meningkat namun masih dibawah dari PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Pendapatan Perkapita Nasional.

**2.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, indikator ini diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan dari indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program ketenagakerjaan disamping menjadi bahan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan perekonomian selain angka kemiskinan. Besarnya tingkat pengangguran terbuka mempunyai dampak sosial yang luas dikarenakan mereka tidak mempunyai pendapatan.

**Tabel 2.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,41	2,80	2,91	4,19	4,06

Sumber Data : BPS 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Pinrang mengalami pasang surut lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Pinrang berada

pada 4,41% dan menurun di tahun 2018 menjadi 2,80% serta di tahun 2019 berada pada angka 2,91%. Akan tetapi ditahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,19 dan ditahun 2021 menurun disbanding tahun 2020 yaitu diangka 4,06. Hal ini masih merupakan imbas dari pandemi covid-19 yang menyerang seluruh aspek kehidupan di dunia ini.

2.1.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa indeks gini dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila indeks gini lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila indeks gininya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila indeks gininya lebih besar dari 0,5. Berikut gambaran perkembangan indeks gini Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2017-2021 pada table berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021**

No	Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	0,309	0,359	0,336	0,375	0,367
2	Sul Sel	0,407	0,397	0,390	0,389	0,377
3	Nasional	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2022

Bila diperhatikan table tersebut diatas dalam kurun waktu 2017 – 2021 Indeks Gini Kabupaten Pinrang terkategori ketimpangan **sedang**. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin tidak terlalu timpang. Untuk menciptakan pemerataan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di masing-masing kategori (17 Kategori).

2.1.1.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan

representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Penurunan Pertumbuhan Ekonomi dan kecenderungan masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka berdampak pada Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Dari segi keberhasilan untuk menurunkan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang Tahun 2021 sedikit bergeser kearah positif dengan terjadinya penurunan sebesar 0,05% dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan tahun 2020 sebesar 8,86%.

**Tabel 2.7**  
**Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	31,43	32,94	31,85	33,56	33,51
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,46	8,81	8,46	8,86	8,81
3	Garis Kemiskinan	256.054	280.746	294.349	338.731	345. 892

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang2022

### 2.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, akan tetapi seluruh aspek kehidupan dan salah satunya adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan elemen penting dana sangat perlu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Indikator dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah wilayah atau negara tergolong dalam negara maju, berkembang atau terbelakang.

Di Kabupaten Pinrang untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 hal yang paling mendasar dalam pembangunan manusia, yaitu Angka Harapan

Hidup, Pengetahuan dan standar hidup layak. Hasil perhitungan IPM ini menggambarkan secara umum pembangunan manusia Kabupaten Pinrang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Komponen IPM Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2017-20201**

Uraian Angka	2017	2018	2019	2020	2021
Harapan Hidup ( Tahun )	68,68	68,98	69,39	69,61	69,77
Harapan Lama Sekolah ( Tahun )	13,19	13,20	13,22	13,23	13,24
Rata – rata Lama Sekolah ( Tahun )	7,54	7,84	7,85	7,86	7,87
Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (Ribuan Rupiah)	11.279	11.508	11.828	11.844	11.956
<b>IPM</b>	<b>69,90</b>	<b>70,62</b>	<b>71,12</b>	<b>71,26</b>	<b>71,45</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2022

Gambaran dalam table diatas, Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang selama periode tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2017 dicapai 69,90 dan tahun 2018 dicapai 70,62 dan meningkat lagi sampai di tahun 2021 menjadi 71,45. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa indikator pendukung dalam penentuan nilai Indeks Pembangunan Manusia diantaranya : Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Perkapita Penduduk yang setiap tahun juga mengalami peningkatan.

**Tabel 2.9**  
**Perbandingan IPM Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021**

No	IPM	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	69,90	70,62	71,12	71,26	71,45
2	Daerah Setara (Kab. Sidrap)	69,84	70,60	71,05	71,93	71,54
3	Sul Sel	70,34	70,90	71,66	71,94	72,24
4	Nasional	70,81	71,39	71,92	71,21	72,29

Sumber data : BPS 2022



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IPM di Kabupaten Pinrang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 69,90 di tahun 2017 menjadi 71,45 di tahun 2021, namun nilai IPM Kabupaten Pinrang masih dibawah dari nilai IPM daerah setara seperti Kabupaten Sidrap yang memiliki nilai IPM 71,54 di tahun 2021 dan di bawah dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan yakni 72,24 di tahun 2021 IPM Nasional yakni 72,29. Ini tentu menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian sehingga setidaknya-tidaknya bisa bersaing dengan daerah setara.

### **2.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro**

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomidengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional mendevenisi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2023 dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan 2023, maka Strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan serta Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintahan secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi
5. Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta meningkatkan peran penyuluh dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan masyarakat guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan
7. Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu secara beriringan dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian
8. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan serta meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah
9. meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan perannya dalam pembangunan
10. Memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, budaya, ketiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial kemasyarakatan
11. Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan.
12. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
13. Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana

Adapun gambaran dari target indikator makro Kabupaten Pinrang dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 2.10**  
**Target Indikator Makro Kab. Pinrang Tahun 2023**

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023 Target Tahun		
		P-RPJMD Kabupaten Pinrang	RKPD Sulawesi Selatan	RKPD Kabupaten Pinrang 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,20	4,57–6,09	5,20
2	PDRB Per Kapita	64,22	-	64,22
3	Tingkat Pengangguran	3,23	3,06	3,23
4	Indeks Gini	0,325	0,321	0,325
5	Tingkat Kemiskinan	8,36	8,37	8,36
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,00	71,84	72,00

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Pinrang yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, diarahkan pada **“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia”**, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan
3. Penguatan Aksesibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
4. Pengembangan pariwisata serta produk unggulan daerah dan kewirausahaan sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan taraf hidup masyarakat.
5. Peningkatan nilai wawasan kebangsaan dengan optimalisasi partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan kaum perempuan dalam pembangunan daerah.
6. Peningkatan sistem kinerja pengolahan persampahan dan pemukiman layak huni serta penguatan mitigasi bencana dan kebakaran.

Peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan IPTEK, penguatan akses wilayah serta peningkatan infrastruktur pada setiap wilayah, pengembangan potensi pariwisata, pengembangan wawasan kebangsaan serta optimalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan local, Lembaga-lembaga keagamaan dan Lembaga kebudayaan serta peningkatan system

kinerja pengolahan persampahan dan pemukiman dan meminimalisir potensi bencana merupakan elemen yang akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2023.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan butuh pembiayaan yang sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengambilan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan kecermatan dan keakuratan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terlepas dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal dan menempatkan pengelolaan aset daerah yang potensial secara profesional dapat menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna mengatasi beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Pinrang Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang merupakan tahun ketiga, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ pada tanggal 27 Januari 2020, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Perkembangan Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah  
Tahun 2018-2022**

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2018	125.995.857.430,00	1.296.910.334.172,00	9,72%
2019	131.283.048.492,00	1.296.695.284.742,00	10,12%
2020	125.849.979.824,00	1.322.996.164.815,00	9,51%
2021	134,066,655,485,33	1.272.417.859.811,33	10,54%
2022	138.723.468.320,00	1.323.728.855.144,00	10,48%

Ditengah masa pemulihan ekonomi, Target pendapatan Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.405.014.142.371,- dimana Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp. 143.605.257.488,- atau sebesar 10,22% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Pinrang dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 yang memuat alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip –prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Selain itu kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama peningkatan produktifitas baik dalam bidang pertanian dan perdagangan sehingga pemulihan di bidang ekonomi dapat segera tercapai.

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

### **3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer).

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dalam mendukung tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** maka pemerintah menetapkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,4 – 6,0
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5 – 6,2%
3. Indeks Gini 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,44 – 73,48
5. Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca 26,8% - 27,1%
6. Nilai Tukar Petani 102 – 104
7. Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah melakukan revisi perubahan tema pembangunan menjadi “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan. Tema pembangunan tahun 2023 perlu *adaptif* dan *responsif* terhadap pandemic



COVID-19 dan proses pemulihannya pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2023.

### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Upaya Pemerintah dalam menggairahkan Kembali gerak laju roda perekonomian diperkirakan akan memacu meningkatnya konsumsi rumah tangga yang berkorelasi positif terhadap peningkatan arus perputaran uang sehingga akan mendorong pemulihan ekonomi.

Selaras dengan tema pembangunan tahun 2023, maka tema pembangunan Kabupaten Pinrang adalah **“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia”** Untuk mencapai tema pembangunan dimaksud maka Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pinrang akan dipacu melalui :

- 1) Peningkatan Infrastruktur sector Pertanian dan Perikanan sehingga dapat memaksimalkan hasil produksi;
- 2) Pembangunan Infrastruktur aksesibilitas untuk memperlancar arus distribusi produk unggulan daerah; dan
- 3) Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi untuk memacu perkembangan sector usaha ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian selain pembangunan ekonomi Kabupaten Pinrang kedepan adalah aspek lingkungan. Eksploitasi SumberDaya Alam secara berlebihan dapat merusak stabilitas dan keseimbangan lingkungan. Selain itu antisipasi terhadap perubahan iklim yang ekstrem dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan



masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Indikator-indikator makro yang bersifat ekonomi terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat/pendapatan per kapita.

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2022 dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menjadi indikator pendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten Pinrang pada tahun 2023 antara lain : Hasil Produksi sector pertanian dan perikanan pinrang tetap stabil bahkan pada saat pandemic covid-19, Sektor Usaha berbasis Teknologi dan Informasi mengalami peningkatan, serta pertumbuhan usaha komsumtif seperti bidang kuliner tumbuh pesat dan Iklim Usaha UMKM mulai bergeliat kembali sehingga memacu peningkatan konsumsi rumah tangga serta berlangsungnya proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan kerja dan usaha bidang konstruksi.

### **3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Kabupaten Pinrang didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan dengan besaran kontribusi 45,22% berdasarkan ADHB yang terbukti tidak terpengaruh terhadap kondisi yang terjadi pada masa pandemik covid-19 sehingga dapat menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan turunnya pertumbuhan beberapa sektor ekonomi lainnya akibat kebijakan PSBB.

Pada Tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang ditargetkan mampu tumbuh lebih tinggi dari tahun 2022 yang mencapai 5,045%.

### **3.2.2 PDRB Perkapita**

Salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB perkapita, walaupun angka yang dihasilkan belum dapat menggambarkan pendapatan masyarakat secara nyata dan merata karena angka tersebut merupakan rata – rata dari keseluruhan penduduk. PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 52,05 juta. Pada Tahun 2020 mencapai 52,93 juta dan tahun 2021 dapat mencapai 53,41 juta dan kemudian untuk tahun 2023 diproyeksikan menjadi 60,61 juta.

### **3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Dengan adanya pandemic Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada akhir tahun 2021. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang. Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang di tahun 2022 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,85 persen lebih rendah jika dibandingkan dari capaian tahun 2021 yang sebesar 4,06 persen. Adapun target tahun 2023 berdasarkan RKPD adalah 3,06 persen.

### **3.2.4 Tingkat Kemiskinan**

Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka berdampak pada Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2021 mencapai 8,81% mengalami penurunan 0,05% dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan tahun 2020 sebesar 8,86%. Berdasarkan Asumsi Pemulihan Ekonomi tahun 2022 dan 2023, maka Tingkat Kemiskinan 2022 diprediksi menurun 0,06% menjadi 8,75% dan Target tahun 2023 berdasarkan RKPD sebesar 8,37%.

### **3.2.5 Indeks Gini**

Indeks Gini merupakan suatu indicator untuk mengukur ketimpangan. Nilai Indeks Gini berkisar antar 0 – 1. Semakin tinggi nilai indeks gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai sebesar 0,375 atau berada dibawah capaian angka propinsi Sulawesi Selatan yaitu 0,389 dan capaian angka nasional yaitu 0,385. Untuk tahun 2021 Indeks Gini Kabupaten Pinrang mencapai 0,367 dan di tahun yang sama Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 0,377 dan Nasional indeks gini Indonesia capaian 0,381. Sedangkan Tahun 2022 diprediksi mencapai 0,330 dan di Tahun yang sama Propinsi Sulawesi Selatan memprediksi 0,381 dan Nasional Indeks Gini Indonesia diprediksi capaian 0,376 – 0,378 Sementara untuk tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Pinrang ditargetkan mencapai 0,321.

### **3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia**

Perkembangan pembangunan suatu Negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, akan tetapi seluruh aspek kehidupan salah satunya

adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia sangat penting dilakukan untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Indikator dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah wilayah atau Negara tergolong dalam wilayah atau Negara maju, berkembang atau terbelakang.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2017 - 2022), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

##### **4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk

mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan reformasi pendapatan dan reformasi kebijakan di bidang pendapatan dengan harapan dapat mendukung pemulihan dunia usaha, optimalisasi dengan melakukan inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;

Untuk itu, pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD provinsi Tahun 2022/23

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, adalah pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pajak daerah tahun 2023 meliputi :

- Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya
- Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB
- Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan Stakeholder yang terkait dalam hal penentuan potensi pajak daerah
- Peningkatan Kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah
- Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah

Kebijakan pengelolaan retribusi daerah tahun 2023 :

- Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi daerah yang berpotensi meningkatkan PAD
- Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagai bagian dari pelayanan Retribusi, maka retribusi Perizinan dan non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kebijakan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2023 :

- Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan – lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga

## *2. Pendapatan Transfer*

### *a. Transfer Pemerintah Pusat*

#### *1) Dana Perimbangan*

##### *a) Dana Transfer Umum*

*(1) DBH; dan*

*(2) DAU.*

##### *b) Dana Transfer Khusus*

*(1) DAK Fisik;*

*(2) DAK Non Fisik.*

#### *2) Dana Insentif Daerah;*

#### *3) Dana Desa.*

- b. Transfer Antar-Daerah
  - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - 2) Bantuan Keuangan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  - a. Hibah;
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai Target Pendapatan Daerah, diantaranya :

- Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penetapan sesuai Zonasi dan bekerjasama dengan BPN
- Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2
- Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam hal membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah**

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain – Lain pendapatan daerah yang sah.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada realisasi Pendapatan 2021 dan Kebijakan Keuangan Daerah yang termuat Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian 2022 – 2023 dan realisasi pendapatan daerah sampai 31 Desember 2021 serta kebijakan umum pendapatan, maka rencana Pendapatan Daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1,405,014.142.371,-. Secara rinci target Pendapatan Daerah pada anggaran pokok tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Target Pendapatan Daerah APBD**  
**Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	<b>PENDAPATAN</b>	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>143.605.257.488</b>
4.1.01	Pajak daerah	39.073.842.200
4.1.02	Retribusi Daerah	3.598.072.800
4.1.03	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	7.904.977.448
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.028.365.000
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.257.133.884.923</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.182.528.959.923
4.2.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.604.925.000
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>4.275.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.275.000.000
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-Undangan	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.405.014.142.371</b>

Sumber : BKPKD Kabupaten Pinrang, 2022

*Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

**1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

- Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah meliputi :
  - Pajak Restoran;
  - Pajak Hotel;



- c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
  6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
  7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
9. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
10. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
  - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - b. Menghambat mobilitas penduduk;
  - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
  - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

## **2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
  - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sawitto dan PD Karya.

### **3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. Pendapatan denda pajak daerah;
  - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. Pendapatan dari pengembalian;
  - o. Pendapatan dari BLUD; dan
  - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer**

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

##### **1) Dana Bagi Hasil Pajak**

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada

Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## **2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
  - a. DBH-Kehutanan;
  - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
  - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
  - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
  - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023<sup>2</sup> dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **3) Dana Alokasi Umum (DAU)**

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum



dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **4) Dana Alokasi Khusus (DAK)**

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana



Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **5) Dana Insentif Daerah (DID)**

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

### **1) Pendapatan Bagi Hasil**

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **2) Pendapatan Bantuan Keuangan**

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
  - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

- (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
  - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
  3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah**

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

##### **1) Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan

hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

**2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan kabupaten/kota yang mana penyalurannya tidak melalui RKUD namun langsung ke sekolah-sekolah yang telah ditentukan besarnya.

**4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.405.014.142.371,- meningkat sebesar Rp. 81.285.287.227,- atau sebesar 6,14% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD Pokok sebesar Rp. 1.323.728.855.144,-. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pinrang Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
	POKOK 2022	TARGET 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>138.723.468.320,00</b>	<b>143.605.257.488,00</b>	<b>4.881.798.168,00</b>
Hasil Pajak daerah	35.159.864.000,00	39.073.842.200,00	3.913.978.200,00
Hasil Retribusi Daerah	3.588.000.000,00	3.598.072.800,00	10.072.800,00
Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	7.729.102.620,00	7.904.977.448,00	175.874.828,00
Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	92.246.501.700,00	93.028.365.000,00	781.863.300,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.181.291.942.824,00</b>	<b>1.257.133.884.923,00</b>	<b>75.841.942.099,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.121.086.763.000,00</b>	<b>1.182.528.959.923,00</b>	<b>61.442.196.923,00</b>
Dana Perimbangan	1.048.374.599.000,00	1.089.216.226.423,00	40.841.627.423,00
Dana Insentif Daerah (DID)	10.730.536.000,00	26.600.000.000,00	15.869.464.000,00
Dana Desa	61.981.628.000,00	66.712.733.500,00	4.731.105.500,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>60.205.179.824,00</b>	<b>74.604.925.000,00</b>	<b>14.399.745.176,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	55.962.779.824,00	69.832.225.000,00	13.869.445.176,00

Bantuan Keuangan	4.242.400.000,00	4.772.700.000,00	530.300.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	<b>3.713.444.000,00</b>	<b>4.275.000.000,00</b>	<b>561.556.000,00</b>
Pendapatan Hibah	3.713.444.000,00	4.275.000.000,00	561.556.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	-
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1.323.728.855.144,00</b>	<b>1.405.014.142.371,00</b>	<b>81.285.287.227,00</b>

Adanya peningkatan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022. Target pendapatan diasumsikan dapat ditingkatkan berasal dari semua pendapatan yaitu pajak daerah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.913.978.200,- atau sebesar 3,52%, retribusi daerah diproyeksikan naik sebesar Rp. 10.072.800,- atau sebesar 0,28%. Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan terget sebesar Rp. 781.863.300,- atau sebesar 0,85%. Sedangkan untuk target pendapatan transfer tahun 2023 meningkat sebesar Rp. 75.841.942.099,- atau sebesar 6,42% jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Pokok Tahun 2022. Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 61.442.196.923,- atau sebesar 5,48%. Pencantuman Plafon pada Pendapatan Transfer masih memungkinkan untuk berubah setelah adanya penetapan besaran dana transfer kedaerah oleh Pemerintah Pusat dan hal tersebut dapat terjadi setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 14.399.745.176,- dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2022 atau sebesar 23,92%. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah di asumsikan meningkat sebesar Rp. 530.300.000,- atau sebesar 12,50% dari anggaran pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2022.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman dalam rangka penanganan COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah

dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman terhadap COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
  - a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f) sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
  - a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c) pangan;
  - d) pertanahan;
  - e) lingkungan hidup;
  - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i) perhubungan;
  - j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan
- Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
  - 2) pariwisata;
  - 3) pertanian;
  - 4) kehutanan;
  - 5) energi dan sumber daya mineral;
  - 6) Perdagangan;
  - 7) perindustrian; dan
  - 8) transmigrasi.
- c. Unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat Daerah; dan
  - 2) sekretariat DPRD.
- d. Unsur penunjang, meliputi:
- 1) perencanaan;
  - 2) keuangan;
  - 3) kepegawaian;
  - 4) pendidikan dan pelatihan;
  - 5) penelitian dan pengembangan;
  - 6) penghubung; dan
  - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. Unsur kewilayahan, meliputi:
- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
  - 2) kecamatan.
- g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan



h. Unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Struktur Belanja Daerah

##### 1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

##### 2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja modal aset tetap lainnya.

##### 3. Belanja Tidak Terduga

##### 4. Belanja Transfer

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

*Struktur belanja daerah diatas diuraikan sebagai berikut:*

### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, Belanja Operasi dirinci atas jenis :

- 1) **Belanja Pegawai** digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
  - a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
  - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
  - c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 2) **Belanja Barang dan Jasa** digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub

kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

- b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
  - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
  - 3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada: 1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical checkup dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- h) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan domestic Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun

2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- i) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- j) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- m) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan



substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

n) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari omset hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarannya ditetapkan dalam Perkada. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

o) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- pimpinan dan anggota DPRD; serta
- unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang



bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- p) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
  - q) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.
- 3) **Belanja Bunga** digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut

objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) **Belanja Subsidi**, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal kepala daerah menetapkan omest lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus

menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

5) **Belanja Hibah** berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan omes Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - o kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

- 6) **Belanja Bantuan Sosial** berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan omest dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai omes tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan omest serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - 1) Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 2) Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 5) Belanja aset tetap lainnya; belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja

dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

### **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan omest.

#### 4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- 1) **Belanja Bagi Hasil** digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
  - a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
    - (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
    - (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
    - (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- 2) **Belanja Bantuan Keuangan** dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan



tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72



ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

**5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

Total Perkiraan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran sebesar **Rp. 1.440.014.142.371,-** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rencana Target Belanja Daerah**  
**Tahun 2023**

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	<b>BELANJA</b>	
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.022.609.237.040</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	626.337.082.293
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.984.315.713
5.1.04	Belanja Hibah	101.553.136.037
5.2	Belanja Bantuan Sosial	2.734.702.997
5.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>258.573.127.181</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.198.181.502
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.668.002.924
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.735.726.589
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	625.000.000
5.3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>9.737.500.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.737.500.000
5.4	<b>Belanja Transfer</b>	<b>135.440.494.315</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.267.191.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	131.173.302.815
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.440.014.142.371</b>

Sumber data : BKPKD Kab. Pinrang, 2022

**BAB VI**  
**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Pinrang dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah.

**Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Untuk SILPA Tahun 2022 diperkirakan akan mencapai Rp. 35.000.000.000,00 sementara untuk Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Sebesar Rp. Nihil.

**6. 1.1 Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan**

Berikut ini disajikan data proyeksi target Pembiayaan periode 2023

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Target Pembiayaan**  
**Kabupaten Pinrang**

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.000.000.000
	Pembiayaan Netto	35.000.000.000

Sumber data : BKUD Kab. Pinrang, 2022

**Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. Pembentukan Dana Cadangan;
- c. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- d. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah sebesar Rp. – ( Nihil ).

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Pinrang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Operasi merupakan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah dan Bansos pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Operasi yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien

dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pinrang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan mengenai: 1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan PPAS APBD Tahun 2023, substansi keduanya saling melengkapi, dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan nasional, Dokumen Perencanaan Propinsi Sulawesi Selatan dan Dokumen Perencanaan Kabupaten Pinrang. 2. Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 merupakan proyeksi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Pinrang, Juli 2022  
BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID





PEMERINTAH KABUPATEN  
PINRANG

# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA



TA 2023





## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 075/1562/Setda/VIII/2022

NOMOR: 171/03/NK/VIII/2022

TANGGAL 12 AGUSTUS 2022

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRWAN HAMID  
Jabatan : Bupati Pinrang  
Alamat Kantor : Jalan Bintang Nomor 1 Pinrang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten

2. a. Nama : MUHTADIN  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pinrang  
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Pinrang  
b. Nama : Ir SYAMSURI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang  
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Pinrang  
c. Nama : AHMAD JAYA BARAMULI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang  
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Pinrang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggran 2023.

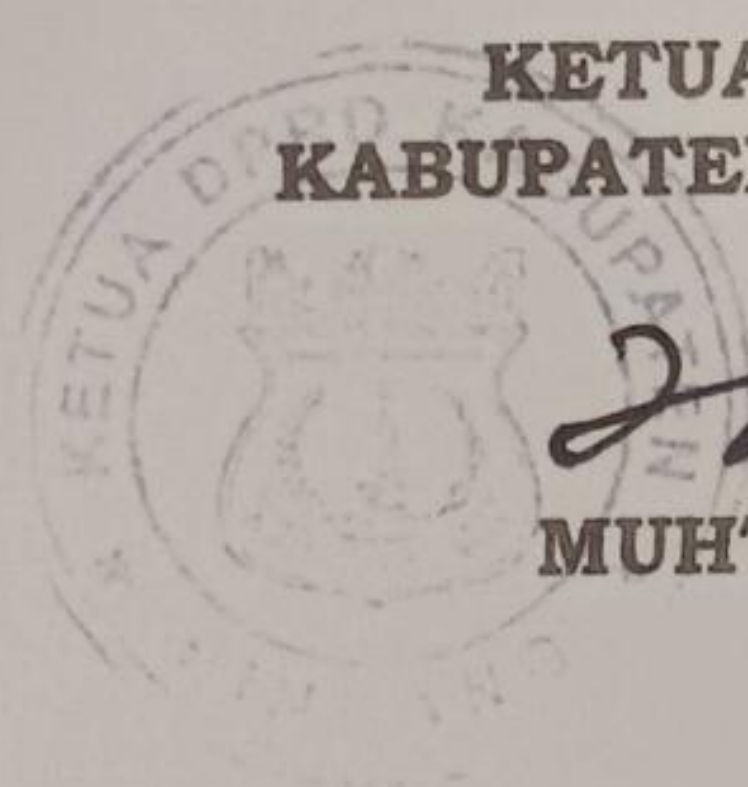
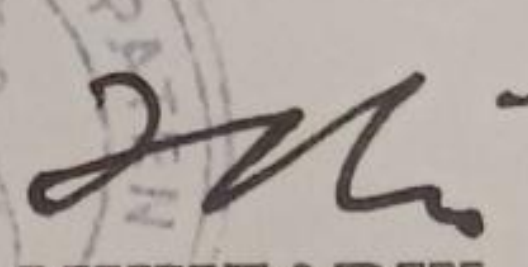


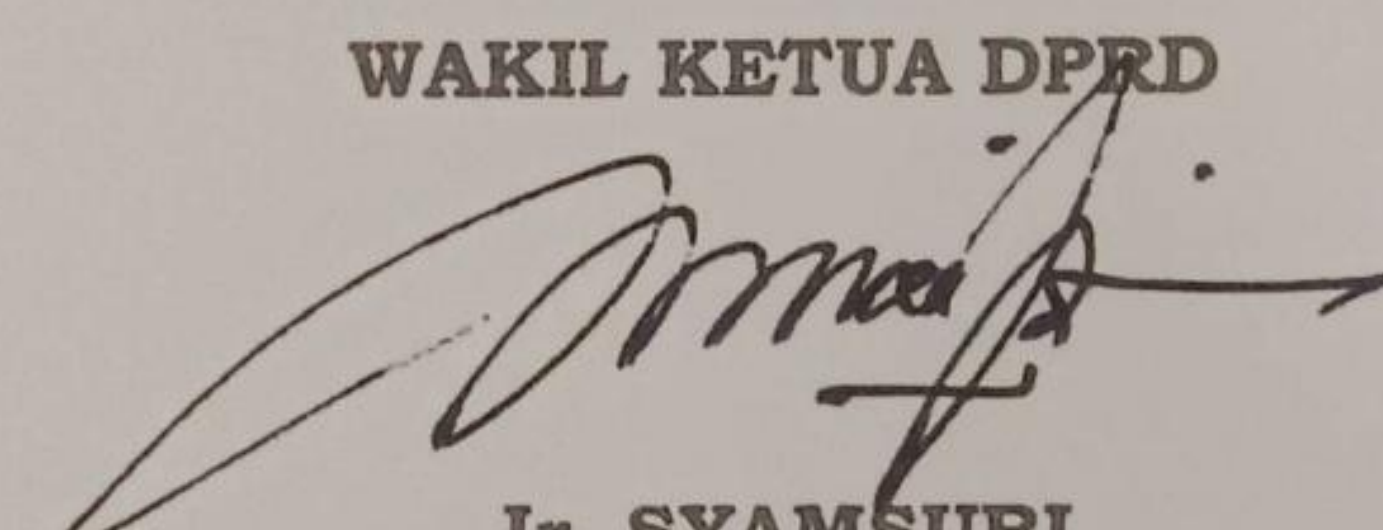
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Pinrang, 12 Agustus 2022

  
**BUPATI PINRANG**  
  
**IRWAN HAMID**

  
**KETUA DPRD  
KABUPATEN PINRANG**  
  
**MUHTADIN**

**WAKIL KETUA DPRD**  
  
**Ir. SYAMSURI**

**WAKIL KETUA DPRD**

**AHMAD JAYA BARAMULI**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	Bab I Hal. 1
1.1	Latar Belakang.....	Bab I Hal. 1
1.2	Tujuan.....	Bab I Hal. 1
1.3	Dasar Hukum . ....	Bab I Hal. 2
1.4	Sistematika Penulisan .....	Bab I Hal. 3
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.....	Bab II Hal. 1
2.1	Rencana Pendapatan Daerah.....	Bab II Hal. 1
2.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	Bab II Hal. 1
2.1.2	Pendapatan Transfer.....	Bab II Hal. 2
2.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	Bab II Hal. 3
2.2	Rencana Pembiayaan Daerah.....	Bab II Hal. 4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	Bab III Hal. 1
3.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	Bab III Hal. 2
3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	Bab III Hal. 34
3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	Bab III Hal. 59
3.4	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	Bab III Hal. 97
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023.....	Bab IV Hal. 1
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.....	Bab V Hal. 1
BAB VI	PENUTUP.....	Bab VI Hal. 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023.....	Bab II	Hal. 2
Tabel 2.1.2	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2023.....	Bab II	Hal. 2
Tabel 2.1.3	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2023.....	Bab II	Hal. 3
Tabel 2.2	Target Penerimaan Daerah Tahun 2023.....	Bab II	Hal. 4
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap Pembangunan Nasional.....	Bab III	Hal. 3
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	Bab III	Hal. 35
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.....	Bab III	Hal. 60
Tabel 3.4	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja.....	Bab III	Hal. 98
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	Bab IV	Hal.
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022.....	Bab IV	Hal.
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan	Bab V	Hal. 1

[Pick the date]

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/ kegiatan yang terkait dengan nama program. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, OPD, program/kegiatan dan belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pinrang tahun 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

#### **1.2 Tujuan**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan untuk acuan bagi seluruh instansi/Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di Kabupaten Pinrang



dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

### 1.3 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan PPAS kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;



11. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daera Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 -2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024;
18. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Pinrang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I.	Pendahuluan	Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2023.
Bab II.	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023	Menguraikan tentang Rencana Pendapatan Daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Rencana Pembiayaan Daerah.
Bab III.	Prioritas Belanja Daerah menguraikan hal-hal sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap Pembangunan Nasional dalam bentuk tabulasi;</li><li>• Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dalam bentuk tabulasi,</li><li>• Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam bentuk tabulasi,</li></ul>

- Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja dalam bentuk tabulasi.
- Bab IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Kabupaten Pinrang Tahun 2023 menguraikan hal-hal sebagai berikut :
- Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan tahun anggaran 2023 dalam bentuk tabulasi.
  - Plafon Anggaran Sementara berdasarkan jenis belanja dalam bentuk tabulasi.
- Bab V. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2023 Menguraikan tentang rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan.
- Bab VI. Penutup Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan DPRD Kabupaten Pinrang terhadap PPAS.



## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas: Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

#### **2.1. Rencana Pendapatan Daerah**

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar Rp.143.605.257.488,- dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022 sebesar 138.723.468.320,-. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 diharapkan pandemi Coronavirus-2019 (Covid-19) sudah mereda sehingga perekonomian baik di Indonesia maupun di daerah mulai menggeliat membaik sehingga berdampak adanya kenaikan pendapatan asli daerah.

Adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2023 Pajak Daerah mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 7.821.362.420,-. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 35.159.864.000,-, pada tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp. 42.981.226.420,- Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan penerimaan pada semua jenis pajak daerah.
- b. Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,957,880,080,- dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022 yang sebesar Rp. 3.588.000.000,- .
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar sebesar Rp 8,037,963,238,- mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 308.860.618,- bila dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022.

- d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp. 97,029,585,000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.783.083.300,- dibandingkan dengan tahun 2022.

Secara rinci pendapatan asli daerah tersebut disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1.  
REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH  
TA. 2022 dan 2023

PP 12/2019		Realisasi	Rencana Capaian	Proyeksi
No Rekening	Uraian (Sesuai PP 12/2019)	2021	2022	2023
4	Pendapatan Daerah	1,272,417,859,811.33	1,323,728,855,144.00	1,405,014,142,371
4.1	Pendapatan Asli Daerah	134,066,655,485.33	138,723,468,320.00	143,605,257,488
4.1.01	Pajak Daerah	35,439,158,745.00	35,159,864,000.00	42,981,226,420
4.1.02	Restribusi Daerah	2,558,134,604.00	3,588,000,000.00	3,957,880,080
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	8,170,957,229.00	7,729,102,620.00	8,037,963,238
4.1.04	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah	87,898,404,907.33	92,246,501,700.00	97,029,585,000

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan. Pendapatan Transfer pada tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp. 1.203.848.287.501,-. Proyeksi Pendapatan Transfer pada tahun 2022 sudah termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik tetapi akan menyesuaikan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Berikut rincian pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.2  
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer  
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

PP 12/2019		Realisasi	Rencana Capaian	Proyeksi
No Rekening	Uraian (Sesuai PP 12/2019)	2021	2022	2023
4.2	Pendapatan Transfer	1,080,037,744,405.00	1,181,291,942,824.00	1,203,848,287,501
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,006,479,710,276.00	1,121,086,763,000.00	1,129,243,362,501
4.2.01.01	Dana Perimbangan	909,026,705,876.00	1,048,374,599,000.00	1,092,207,715,138
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum	685,331,224,249.00	677,825,338,000.00	707,928,946,964
4.2.01.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	23,895,614,249.00	16,389,728,000.00	16,016,802,638
4.2.01.01.01.02	Dana Alokasi Umum	661,435,610,000.00	661,435,610,000.00	691,912,144,326
4.2.01.01.02	Dana Transfer Khusus	223,695,481,627.00	370,549,261,000.00	384,278,768,174
4.2.01.01.02.01	Dana Alokasi Khusus	89,064,370,665.00	174,850,375,000.00	177,777,330,010
4.2.01.01.02.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	134,631,110,962.00	195,698,886,000.00	206,501,438,164
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	27,713,245,000.00	10,730,536,000.00	26,600,000,000
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	0	
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	0	
4.2.01.05	Dana Desa	69,739,759,400.00	61,981,628,000.00	66,712,733,500
4.2.02	Transfer Antar Daerah	73,558,034,129.00	60,205,179,824.00	74,604,925,000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	59,702,535,129.00	55,962,779,824.00	64,529,225,000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13,855,499,000.00	4,242,400,000.00	4,772,700,000

2.1.3. Lain – lain Pendapatan Yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang- Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah kondisinya sangat fluktuatif. Pada tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp.53.285.597.382,- dimana pada tahun sebelumnya nilai untuk Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah nihil.

Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam table 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3  
Target dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

PP 12/2019		Realisasi		Rencana Capaian	Proyeksi
No Rekening	Uraian (Sesuai PP 12/2019)	2021	2022	2023	
4.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	58,313,459,921.00	3,713,444,000.00	57,560,597,382	
4.3.01	Hibah	58,313,459,921.00	3,713,444,000.00	4,275,000,000	
4.3.02	Dana Darurat	-	-		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	53,285,597,382	

2.2. Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Tahun 2023 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya diprediksikan sebesar Rp.35.000.000.000,-.

Tabel 2.4  
TARGET PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	143,605,257,488	
4.1.01	Pajak Daerah	42,981,226,420	
4.1.02	Retribusi Daerah	3,957,880,080	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,037,963,238	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	97,029,585,000	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,203,848,287,501	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,129,243,362,501	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74,604,925,000	



4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57,560,597,382
4.3.01	Pendapatan Hibah	4,275,000,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53,285,597,382
JUMLAH PENDAPATAN		1,405,014,142,371
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		35.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		1.440.014.142.371

### **BAB III**

## **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019. Perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, hasil evaluasi RKPD tahun 2021, capaian kinerja RPJMD tahun 2021, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperhatikan dalam RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Belanja Daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima oleh daerah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai Pendapatan daerah dipergunakan sesuai dengan urusan wajib dan mengikat dan pemenuhan pelayanan dasar, Prioritas Pembangunan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dalam menentukan besaran belanja senantiasa mengacu atas pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang direncanakan akan dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Dengan demikian setiap dana yang digunakan dalam APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam Kebijakan Umum APBD.

3. Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam Kebijakan Umum APBD.
4. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dimaksud adalah kegiatan utama yang dominan sudah ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD. Rincian kegiatan utama yang lebih operasional direncanakan dan diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah dalam mekanisme RKA-SKPD yang dilaksanakan pada tahap setelah penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.

### **3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.**

Dalam upaya mencapai Tema Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas dan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, sehingga ada 8 arah kebijakan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 antara lain :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan ekonomi dunia
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibukota Nusantara

Selanjutnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan wakil presiden melalui 8 (Delapan) arahan utama Presiden tersebut.

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2023 adalah Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter. Yang mana tema tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 diarahkan kepada Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

- 2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan
- 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
- 4. Pengembangan pariwisata serta produk unggulan daerah dan kewirausahaan sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan taraf hidup masyarakat.
- 5. Peningkatan nilai wawasan kebangsaan dengan optimalisasi partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan kaum perempuan dalam pembangunan daerah.
- 6. Peningkatan sistem kinerja pengolahan persampahan dan pemukiman layak huni serta penguatan mitigasi bencana dan kebakaran.

Untuk itu dalam penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 melakukan sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID 19 di berbagai aspek kehidupan. Berikut sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023, meliputi :

**Tabel 3.1**  
**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			

			Persentase Pemulangan WNI Migran		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian SPM Bidang Sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Jumlah Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan		
				Dinas Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			

			Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )		
				Dinas Ketahanan Pangan	
			Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)		
				Dinas Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang tertangani		
				Dinas Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang		
				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang		
				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing		
				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			persentase peningkatan kuantitas produk usaha koperasi		
				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			

			Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro		
				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kab.Pinrang		
				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Investasi PMDN dan PMA		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Pinrang		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			



			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Volume Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Volume Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Volume Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Volume Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Kunjungan Wisatawan		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase Zona Ekonomi Kreatif		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
			Persentase Tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi SDM pariwisata	
			Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
			Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)	
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Presentase Meningkatnya Produksi nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan pertahun	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Presentase Meningkatnya Produksi/Produktivitas nilai tambah dan daya saing komoditas p[eternakan dan perkebunan pertahun	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Presentase Meningkatnya produktivitas nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
			prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
			Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)	

				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman perkebunan		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Nilai Tukar Petani (NTP)		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase kelompoktani penerima bantuan (%)		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Meningkatnya Sumber Daya Petani Perkebunan dan Peternakan		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
			Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			

			Persentase Pasar Rakyat ber-SNI		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase Barang Produksi Dalam Negeri Lokal yang diperdagangkan di Toko Swalayan		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		

				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase Penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase partisipasi warga, pemerintah setempat dan instansi terkait yang mengikuti Musyawarah penetapan kawasan		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase pembangunan kawasan transmigrasi yang terpenuhi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	

		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
			Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	
			Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	
			Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	
			Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	
			Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
			Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	
			Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
			Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	
			Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
			Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	
			Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		

			Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawitto dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Watang Sawitto	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Paleteang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Paleteang	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Tiroang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Tiroang	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Mattiro Bulu	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi		
				Kecamatan Suppa	



			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Suppa	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Sompe dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Mattiro Sompe	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lanrisang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Lanrisang	
			ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Kecamatan Patampanua	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Patampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Patampanua	
			Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Patampanua	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Duampanua	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Batu Lappa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Batulappa	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Cempa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Cempa	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lembang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Lembang	

3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
			Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	
			Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	
			Dinas Kesehatan	
			Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan	
			Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
			Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	

				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil		
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			TFR (Angka Kelahiran Total)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			TFR(Angka Kelahiran Total)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		

				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keluarg		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Daerah		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Jumlah prestasi olahraga		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase keterpenuhan Sarana dan Prasarana olahraga Kabupaten/Kota		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase keterpenuhan prinsip dasar kepramukaan		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase keterpenuhan prinsip Dasar kepramukaan		

				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Kunjungan Wisatawan		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Jumlah prasarana Zona Kreatif yang tersedia		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
			presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman perkebunan	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	
			Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Persentase Capaian Tugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	
			Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Kecamatan Mattiro Bulu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
			Kecamatan Mattiro Sompe	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
			Kecamatan Cempa	

			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Kecamatan Lembang	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Watang Sawitto	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi		
				Kecamatan Suppa	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Suppa	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Duampanua	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase pengelolaan taman makam pahlawan		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Indeks Pembangunan Gender		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			persentase perlindungan perempuan		

				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase terlestariannnya cagar budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			
			Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan Kesenian Tradisional		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Prosentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase cakupan sosialisasi pendidikan politik		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			



			persentase Ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase ketercapaian pembinaan dan pengembangan ketahanan,ekonomi,sosial dan budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
				Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		

				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		

				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Terselenggaranya penataan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Persentase kerjasama Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase pengentasan desa tertinggal		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	
			Rasio konektivitas Kabupaten/Kota		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

				Kecamatan Lembang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase ketercapaian pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik		
				Kecamatan Suppa	
			persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan		
				Kecamatan Lembang	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lembang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Lembang	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pengawasan Pengelolaan Anggaran Desa		
				Kecamatan Suppa	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran		
				Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			

			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase pengelolaan KEHATI		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Pengendalian LB3 yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup		

				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

			Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara		
				Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Sosial	
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Ketahanan Pangan	
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
			Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang		

			terpenuhi		
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase penduduk yang terdaftar dalam database		
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil		
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase data kependudukan yang akurat		
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			persentase penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	



			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase SKPD yang memanfaatkan e-government		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
			Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Pinrang		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			persentase SKPD pengguna layanan tingkat kematangan keamanan informasi		

				Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
			Dinas Perikanan	
			Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Presentase Ketercapaian Pelauyanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	
			Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
			Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sekretariat Daerah	

		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
			Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	
			Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD	
			Sekretariat DPRD	
			persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	
			Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Persentase Capaian Tugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	
			Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

			Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase SKPD yang dalam pelaporan Pengelolaan barang milik daerah selesai tepat waktu dan akurat		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase peningkatan Pendapatan asli Daerah naik 5 % dengan memperhatikan keadilan untuk semua		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik		

				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi		
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN		
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pengembangan kompetensi, manejarial dan fungsional		
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
			Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		
				Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			

			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Kecamatan Watang Sawitto	
			persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Kecamatan Paleteang	
			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan		
				Kecamatan Paleteang	
			presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan		
				Kecamatan Paleteang	
			presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Kecamatan Paleteang	
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Kecamatan Paleteang	
				Kecamatan Tiroang	
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Kecamatan Mattiro Bulu	
			Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Kecamatan Suppa	
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Kecamatan Suppa	
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Kecamatan Mattiro Sompe	

			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Kecamatan Lanrisang	
			ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Kecamatan Patampanua	
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Kecamatan Patampanua	
			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan pemeritah daerah		
				Kecamatan Patampanua	
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Kecamatan Duampanua	
				Kecamatan Batulappa	
				Kecamatan Cempa	
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Kecamatan Lembang	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan		
				Kecamatan Paleteang	
			Persentase ketercapaian pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik		
				Kecamatan Suppa	
			persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan		
				Kecamatan Lanrisang	
			Presentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik		
				Kecamatan Patampanua	
			Persentase Usulan Musrembang Kecamatan DuampanuaYang terakomodir		
				Kecamatan Duampanua	



			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik		
				Kecamatan Batulappa	
			persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan		
				Kecamatan Lembang	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran Desa		
				Kecamatan Mattiro Bulu	
			Persentase Pengawasan Pengelolaan Anggaran Desa		
				Kecamatan Suppa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.

Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter ”. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah :

- 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan brdaya saing.
- 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3. Peningkatan kualitas insfrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan.
- 4. Percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi perlidungan sosial.
- 5. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis kelestarian daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim.

**Tabel 3.2**  
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan**  
**Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
61	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	332.421.756.243
			Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Kesehatan	49.888.126.728
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan		
				Dinas Kesehatan	24.076.867.836
			Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	13.804.823.893
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12.291.152.410
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	11.725.335.878
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.260.889.378
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.084.844.272
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara		
				Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.487.485.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	732.988.200
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran		
				Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.239.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Sosial	4.141.397.881
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina		
				Dinas Sosial	18.720.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	173.600.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Indeks Pembangunan Gender		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	165.815.000
			---		

				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47.650.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			persentase perlindungan perempuan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.900.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Ketahanan Pangan	4.113.621.237
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	7.254.445.400
			Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.869.900.654
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase penduduk yang terdaftar dalam database		
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.493.000.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil		
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	176.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase data kependudukan yang akurat		
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	206.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		

				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.409.508.716
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Terselenggaranya penataan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	314.973.600
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Persentase kerjasama Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.634.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase pengentasan desa tertinggal		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.523.773.310
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	981.954.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.321.539.680
			persentase penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.849.712.289
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.800.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	6.388.040.593
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.350.924.694
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.301.276.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase SKPD yang memanfaatkan e-government		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	2.720.250.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.705.014.400
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Investasi PMDN dan PMA		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	489.925.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Pinrang		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84.300.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	6.421.808.269

		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
			Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Pinrang	
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	76.340.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
			persentase SKPD pengguna layanan tingkat kematangan keamanan informasi	
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	61.430.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.495.689.308
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.347.015.720
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
			Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan	
			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	18.564.250
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	
			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	139.529.750
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
			Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	
			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	136.157.530
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	

			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14.350.979.441
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	395.435.000
			Presentase Ketercapaian Pelauyanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	225.016.300
			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	16.484.000
			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	5.851.753.259
			---	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	32.500.000
			Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	
			Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	6.869.315.914
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
			Sekretariat Daerah	38.881.209.077
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sekretariat Daerah	9.003.467.930
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
			Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	
			Sekretariat Daerah	1.629.575.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		



			persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Sekretariat DPRD	62.402.000
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.351.059.576
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	902.682.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.196.348.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.909.053.010
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	132.655.061.834
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.854.618.723

		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	
			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	998.656.655
			Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi	
			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	998.656.655
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	
			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	998.656.655
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pengembangan kompetensi, manejarial dan fungsional	
			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.416.333.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.710.046.530
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		
			Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota	
			Sekretariat Daerah	102.914.100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
			Inspektorat	8.144.827.627
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
			Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	
			Inspektorat	4.739.825.000

		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	
			Inspektorat	437.100.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			---	
			Kecamatan Paleteang	489.321.000
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
			Kecamatan Tiroang	10.410.000
			---	
			Kecamatan Tiroang	956.965.000
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Kecamatan Mattiro Bulu	3.325.308.228
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
			Kecamatan Mattiro Sompe	2.893.561.396
			---	
			Kecamatan Mattiro Sompe	350.000
			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Kecamatan Lanrisang	2.632.849.308
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	
			Kecamatan Patampanua	175.216.000
			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan pemeritah daerah	
			Kecamatan Patampanua	8.000.000
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
			Kecamatan Duampanua	72.088.600

				Kecamatan Batulappa	3.119.952.388
				Kecamatan Cempa	1.223.379.800
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Kecamatan Lembang	3.810.972.822
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan		
				Kecamatan Mattiro Bulu	12.151.000
			Persentase ketercapaian pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik		
				Kecamatan Suppa	14.890.000
			persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan		
				Kecamatan Lanrisang	11.670.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Mattiro Bulu	23.188.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Cempa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Cempa	376.151.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran Desa		
				Kecamatan Mattiro Bulu	31.900.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.055.085.481
62	2. Penguatan infrastruktur wilayah				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		

				Dinas Kesehatan	90.559.840.356
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
				Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	19.562.554.430
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	7.441.980.225
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	798.236.682
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	6.702.250.007
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	7.316.224.736
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	390.949.900
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah		

				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	2.238.377.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	49.446.968.642
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi		
				Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	212.922.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	840.635.030
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	2.071.240.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1.620.000.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	5.300.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	3.630.000.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			

			Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.860.000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	20.800.000
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	1.711.219.043
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			---		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	20.800.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42.379.270
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase pengentasan desa tertinggal		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70.832.757.688
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2.371.850.500
			Rasio konektivitas Kabupaten/Kota		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2.371.850.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga		
				Dinas Perhubungan dan Pertanahan	134.736.530

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Kecamatan Lanrisang	174.061.140
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Tiroang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	
			Kecamatan Tiroang	758.832.100
			---	
			Kecamatan Tiroang	1.460.985.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	
			Kecamatan Mattiro Bulu	700.000.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi	
			Kecamatan Suppa	350.000.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	
			Kecamatan Suppa	375.000.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Sompe dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	
			Kecamatan Mattiro Sompe	700.000.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lanrisang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	
			Kecamatan Lanrisang	333.750.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Patampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	
			Kecamatan Patampanua	17.973.000



			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Duampanua	720.000.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Batu Lappa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Batulappa	350.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Lanrisang	1.020.000
63	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah		
				Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	25.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.427.040.700
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.712.820.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	268.251.250
			---		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	53.081.880
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			

			Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	501.495.000
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Nilai Tukar Petani (NTP)		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	102.958.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase kelompoktani penerima bantuan (%)		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.767.398.500
64	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina		
				Dinas Sosial	202.461.000
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Persentase Pemulangan WNI Migran		
				Dinas Sosial	6.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian SPM Bidang Sosial		
				Dinas Sosial	438.665.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial		
				Dinas Sosial	40.189.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
				Dinas Sosial	191.843.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			

			Persentase pengelolaan taman makam pahlawan		
				Dinas Sosial	184.270.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Kunjungan Wisatawan		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	77.279.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	234.474.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase Tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi SDM pariwisata		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	137.959.000
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase partisipasi warga, pemerintah setempat dan instansi terkait yang mengikuti Musyawarah penetapan kawasan		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.080.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	60.373.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Mattiro Bulu	23.182.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lanrisang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Lanrisang	17.490.000

			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Batu Lappa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		
				Kecamatan Batulappa	20.000.000
65	5. Pembangunan manusia				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.027.719.857
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.027.719.857
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.027.719.857
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.027.719.857
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	507.759.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.848.966.260
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	2.503.720.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		
				Dinas Kesehatan	324.213.000

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
			Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional	
			Dinas Kesehatan	170.294.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	
			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	490.509.100
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	
			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	157.565.800
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
			Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	
			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12.790.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	250.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
			TFR (Angka Kelahiran Total)	
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	130.895.000
			TFR(Angka Kelahiran Total)	
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.900.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.175.843.576

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.162.504.091
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang	
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50.740.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	70.555.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
			persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing	
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	47.581.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
			persentase peningkatan kuantitas produk usaha koperasi	
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75.450.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
			Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	112.130.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
			Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kab.Pinrang	
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.176.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		

			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.550.665.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Jumlah prestasi olahraga		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.143.575.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase keterpenuhan prinsip dasar kepramukaan		
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	30.700.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase terlestariannya cagar budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.253.654.240
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan Kesenian Tradisional		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	645.541.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Prosentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.250.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	42.008.950
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Meningkatnya Sumber Daya Petani Perkebunan dan Peternakan		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	400.880.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

			Kecamatan Suppa	8.762.500
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Kecamatan Suppa	25.936.000
			Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Kecamatan Lanrisang	55.000.000
			Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
			Kecamatan Duampanua	4.368.879.462
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Sompe dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	
			Kecamatan Mattiro Sompe	50.000.000
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	
			Kecamatan Duampanua	350.000.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
			Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.448.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
			Persentase cakupan sosialisasi pendidikan politik	
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.287.612.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
			persentase Ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.010.044.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		



			Persentase ketercapaian pembinaan dan pengembangan ketahanan,ekonomi,sosial dan budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.669.060
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	299.050.000
69	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Jumlah Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan		
				Dinas Ketahanan Pangan	374.950.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )		
				Dinas Ketahanan Pangan	887.750.000
			Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)		
				Dinas Ketahanan Pangan	286.775.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang tertangani		
				Dinas Ketahanan Pangan	135.850.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	34.804.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Perikanan	5.816.971.691

		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
			Volume Produksi Perikanan Tangkap	
			Dinas Perikanan	373.371.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
			Volume Produksi Perikanan Budidaya	
			Dinas Perikanan	3.141.952.317
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
			Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	
			Dinas Perikanan	499.435.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
			Presentase Meningkatnya Produksi nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan pertahun	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	814.851.000
			Presentase Meningkatnya Produksi/Produktivitas nilai tambah dan daya saing komoditas p[eternakan dan perkebunan pertahun	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	917.964.440
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
			prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	641.775.400
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
			presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman perkebunan	
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	103.497.600
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
			Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota	
			Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	4.490.000
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		

			Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	26.662.100
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Pasar Rakyat ber-SNI		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	1.733.499.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	57.350.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	224.570.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	117.017.500
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase Barang Produksi Dalam Negeri Lokal yang diperdagangkan di Toko Swalayan		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	5.340.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		

				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	1.514.190.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	16.950.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase Penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	10.800.000
70	7. Pelestarian lingkungan hidup				
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	500.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	501.775.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	4.208.687.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase pengelolaan KEHATI		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	400.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Pengendalian LB3 yang dilakukan sesuai analisa		

			kebutuhan		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	50.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	125.000.000
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	250.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	30.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten		
				Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	7.761.815.000

3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

Rencana prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja disajikan pada table berikut ini ;

Tabel 3.4  
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi 100 %		1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dan dokumen 100 % perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu		1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
							1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		Kab. Pinrang		
							1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD 1 Dokumen		Kab. Pinrang		
							1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD		Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
							1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD 1 Dokumen		Kab. Pinrang		
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan		Kab. Pinrang		
							1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan		Kab. Pinrang		
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan 97 %		1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3394 Orang		Kab. Pinrang		

					1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Pinran g	
					1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah 100 % yang tercatat dalam daftar pengguna barang tersusun tepat waktu	1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 2 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinran g	
			1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur 100 % yang mencapai nilai SKP baik	1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 150 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 3 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti 22 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinran g	
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan 100 % administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen 12 Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan 45 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinran g	

					n			
					1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 12 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan 100 % prasarana aparatur yang terpenuhi	1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 10 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang50 Disediakan	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 55 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 1 Unit yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana7 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana0 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinran g	
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan layanan100 % jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan 100 % pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas10 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 0 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 47 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang 0 Unit Dipelihara Jumlah Aset Tak Berwujud yang 1 Unit Dipelihara	Kab. Pinran g	
					1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 4 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	



					1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 12 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi usia 7-18 99,31 % tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga98,01 % negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga98,20 % negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga98,82 % negara usia 7-12 tahun yang berparticipas i dalam pendidikan sekolah dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD Yang Terakreditasi 87 % Minimal B	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang 8 Ruang Bertambah	Kab. Pinran g	
					1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala 0 Ruang Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala 3 Ruang Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Pinran g	
					1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah 3 Ruang yang Telah Dibangun	Kab. Pinran g	
					1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan 10 Unit Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Pinran g	
					1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala1 Unit Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Pinran g	
					1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang 30 Ruang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Pinran g	
					1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah4 Ruang yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Pinran g	

					1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan 11 Unit Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala3 Unit Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang 17 Paket Tersedia	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan 327 Satuan yang Menyenggarakan Pendidikan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan 327 Satuan Dasar yang Siap Dievaluasi Pendidikan dan Melaksanakan Rekomendasi  Jumlah Satuan Pendidikan 0 Satuan Dasar yang Siap Dievaluasi Pendidikan dan Melaksanakan Rekomendasi	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang 160 Peserta Mengikuti Ajang Didik Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga100 Orang Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga0 Orang Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi  Jumlah Pendidik dan Tenaga100 Orang Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah 327 Satuan Dasar yang Dilaksanakan Pendidikan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Pinrang	

					1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar 327 Satuan yang Mengelola Dana Pendidikan BOS	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang 0 Orang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang 327 Orang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Pinrang	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP Yang 73.68 % Terakreditasi Minimal B	1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah 2 Ruang yang Telah Dibangun	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium 5 Ruang yang Telah Dibangun	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan 8 Unit Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah 15 Ruang yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah 7 Ruang yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan 5 Unit Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang 8 Paket Tersedia	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah 9 Paket yang Tersedia	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik 4049 Peserta yang Mengikuti Proses Didik Belajar dan Ujian	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan 58 Satuan Menengah Pertama yang Pendidikan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang 160 Peserta Mengikuti Ajang Didik Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Pinrang	

					1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga100 Orang Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah 58 Satuan Pertama yang Pendidikan Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah 58 Satuan pertama yang Mengelola Pendidikan Dana BOS	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat 58 Orang Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Pinrang	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD Yang terakreditasi 95 %	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang3 Unit Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan 3 Unit Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang3 Unit Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga 5 Paket PAUD yang Tersedia	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga0 Orang Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga100 Orang Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang 223 Satuan Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang 223 Satuan Mengelola Dana BOP Pendidikan	Kab. Pinrang	
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf (AMH) 15-24 100 %	1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal /	Jumlah Alat Praktik dan Peraga0 Paket Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kab. Pinrang	

					Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga3 Paket Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia		
					1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan 0 Satuan Nonformal/Kesetaraan Siap Pendidikan Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kab. Pinrang	
						Jumlah Satuan Pendidikan 22 Satuan Non Formal/Kesetaraan Siap Pendidikan Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		
					1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah 0 Satuan Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Non 22 Satuan Formal/Kesetaraan yang Pendidikan Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Pinrang	
					1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah 21 Satuan Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan Mengelola Dana BOP	Kab. Pinrang	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki 50 % sertifikat pendidik	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tenaga Kependidikan 90 % yang lulus pelatihan untuk bidang tugasny	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Pinrang		
					1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Kab. Pinrang	

						dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi 100 % perkantoran yang terpenuhi	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan 100 % yang terselesaikan Tepat waktu	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian4 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian5 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi2 Laporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi3 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	

			1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi 100 % Jasa keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 348 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 650 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinran g	
					1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen1 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen2 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinran g	
					1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan1 Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Pinran g	
					1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Asset 1 laporan terselesaikan tepat waktu	1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi 2 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinran g	
			1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen 2 dokumen kepegawaian dibuat tepat waktu	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 200 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinran g	
					1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 2 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan 4 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinran g	
					1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, 3 Dokumen Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinran g	
					1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti100 Orang Sosialisasi Peraturan	Kab. Pinran g	

					PerundangUndangan	Perundang-Undangan		
					1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti12 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti15 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang	
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan 100 % administrasi umum yang terpenuhi	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket Tangga yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan30 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan40 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 1 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 20 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan 100 % dinas, Peralatan dan Mesin lainnya	1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 2 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 18 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang4 Unit Disediakan Jumlah Paket Mebel yang10 Unit Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 1 Unit Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 9 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	



					1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 10 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Umum 100 % kantor terpenuhi	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 2 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 2 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang 100 % yang terpelihara	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas19 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Jumlah Kendaraan Dinas50 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 5 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase meningkatnya 100 % pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Pelayanan dan Penunjang Kerja Pelayanan	Kab. Pinrang	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Peningkatan capaian SPM 100 % bidang kesehatan Persentase capaian pelaksanaan 100 % kegiatan pelayanan kesehatan	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya tata 100 % kelola pelayanan kesehatan yang baik	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang 1 Unit Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Pinrang		

	MASYARAKAT							
					1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan 1 Unit Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit yang Dibangun	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga 1 Unit Kesehatan yang Dibangun	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang0 Unit Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit yang1 Unit Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang 5 Unit Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
					1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Unit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan 3 Gedung Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 5 Unit Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Pinrang	

					1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat 2 Unit Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas3 Unit Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas 1 Paket Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Prasarana Fasilitas 5 Unit Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat 1 Paket Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat 17 Unit Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan 17 Unit Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang 1 Paket Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang 1 Paket Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan1 Unit Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas 3 Unit Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat 1 Paket Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat 10 Unit Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, 1 Paket Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan	Kab. Pinrang	

					Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan 100 % penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang7215 Orang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang 6726 Orang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang 6740 Orang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang 12587 Orang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 69404 Orang Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia 232011 Orang Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia 54247 Orang Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi 69870 Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes 9078 Orang Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang 1037 Orang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga 629 Orang Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang Terduga7531 Orang Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Pinrang	

					dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan 1037 Orang Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA 0 Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan terselenggaranya pelayanan 1 Paket kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Pinrang	

					1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang0 Orang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah terselenggaranya deteksi 485 Sekolah dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen1 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen1 Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen1 Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 18 Unit Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 1 Unit 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang87286 Keluarga Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Pinrang	
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dokumen Standarisasi data 1 dokumen informasi pelayanan kesehatan yang disusun tepat waktu	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem 1 Unit Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Kab. Pinrang	

			1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Izin 18 PKM/RS Rumah sakit Kelas C dan D dan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten	1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan 1 RS Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Pinrang	
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 1 Unit Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan  Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 17 Unit Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Pinrang	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu 100 % dan kualitas Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan 12 kecamatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan	1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Pinrang		
		1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan 17 PKM kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pinrang		
				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia 550 Orang Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Pinrang		
				1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pinrang		
		1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan 17 PKM mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia 50 Orang Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Pinrang		
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan Sediaan 100 % Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian 12 kecamatan izin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,	Kab. Pinrang		

					Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
					1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, 103 Sarana Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Pinrang	
					1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, 103 Sarana Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Kab. Pinrang	
			1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tersedianya sertifikat 12 kecamatan produksi untuk sarana produksi alat kesehatan	1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Pinrang	
			1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya kegiatan 12 kecamatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Pinrang	
			1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya kegiatan 12 kecamatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		



						terlaksananya pengendalian 94 Unit dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan		
			1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase kegiatan 12 kecamatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana 0 Unit Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan terselenggaranya post market 1 Paket pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Kab. Pinrang	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Jaminan Pelayanan 100 % Kesehatan Nasional	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan 100 % advokasi,pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten kota	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi 1 Dokumen Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Pinrang		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan 82,06% penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi Presentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan yang 9 0 diselesaikan Persentase dokumen 100 % perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
				1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang		
				1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang		
				1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
				1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang		

					1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian17 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan dokumen 1 dokumen yang diselesaikan	Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi2 Laporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan yang 2 laporan diselesaikan	Kab. Pinran g	
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan 2 laporan yang diselesaikan Jumlah pegawai yang 107 pegawai menerima gaji dan tunjangan Persentase ATK dan honor 2 item yang dibayarkan Persentase terpenuhinya 99 % laporan administrasi keuangan sesuai target dan berkualitas	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan 12 Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersusun tepat waktu Jumlah orang yang 103 orang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang 73 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah item ATK yang 38 item diadakan Jumlah tenaga teknis yang 3 orang dipekerjakan SPPD ASN UPTD 160 kali	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah jasa pelaksanaan 14 jasa transaksi keuangan Persentase terpenuhinya 98.2 % laporan administrasi keuangan sesuai target dan berkualitas	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinran g	

					1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan 17 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik 100 % daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang sesuai analisa jumlah kebutuhan	1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan 2 Dokumen Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 2 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinran g	
			1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kepegawaian 6 laporan perangkat daerah Persentase pelaksanaan 100 % administrasi kepegawaian sesuai aturan	1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga 160 pasang yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas 3 Paket beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas 120 pasang beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 6 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan 12 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndanga n	Jumlah Orang yang Mengikuti15 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti30 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinran g	
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan 32 bahan peraturan per-UU-an yang bacaan diadakan Persentase pelaksanaan 100 % administrasi umum sesuai rencana kebutuhan Persentase penyediaan 100 persen peralatan dan	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi 81 buah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	

				perlengkapan kantor yang diselesaikan				
					1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan 34 buah Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan 6 Paket dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan 21 buah dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan2 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan32 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 1 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 94 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah perjalanan dinas yang 30 sppd dilaksanakan	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pinrang	
		1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan100 % pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas 1 kendaraan operasional yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan 3 Unit Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang		
					1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan 16 unit sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Mebel yang4 Unit Disediakan Jumlah Paket Mebel yang16 Unit Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan AC, printer 5 unit dsb Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2 Unit Lainnya yang	Kab. Pinrang	

						Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 28 Unit Lainnya yang Disediakan		
					1.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1 Unit Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana2 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana dan sarana2 Sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Sarana dan2 Unit Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan kebersihan 25 unit dan bahan pembersih Jumlah surat yang 2500 surat didistribusikan Persentase jasa komunikasi, 100 persen SDA dan listrik yang disediakan Persentase pemenuhan jasa 100 % penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terdistribusi 1056 Surat secara efektif dan efisien Jumlah surat yang 6601 surat terdistribusi	Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan 7 Bangunan listrik sesuai kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan telepon dan 12 bulan listrik setiap bulannya	Kab. Pinrang	
					1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa telepon dan 4 item listrik Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan jasa 32 laporan pelayanan umum kantor sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	

			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan 25 unit peralatan,mesin dan sarpras yang diadakan Persentase pelaksanaan100 % pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM 12000 liter Jumlah Kendaraan Dinas 31 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah laporan pemenuhan 12 Laporan jasa pemeliharaa n, biaya pemeliharaa n, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasiona pemeliharaan kendaraan 2 unit dinas pejabat STNK escavator 3 unit STNK kendaraan dinas39 unit	Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan peralatan dan 2 Laporan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 20 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 122 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah servis AC dan komputer 20 unit	Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 4 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
					1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi 93,80 % kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan &95 % pembangunan sungai dan Pantai	1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana 2 Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Pinran g		
					1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung 3 Unit Air Lainnya yang Dibangun	Kab. Pinran g	
					1.03.02.2.01.08 Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah unit air baku yang 2 paket terbangun Panjang Unit Air Baku yang 440 M Dibangun	Kab. Pinran g	
					1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang 100 M Dibangun	Kab. Pinran g	
					1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan 200 M Tebing yang Dibangun	Kab. Pinran g	
					1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung dan	Jumlah Embung dan Penampung 2 Unit Air Lainnya yang	Kab. Pinran g	

					Penampungan Air Lainnya	Direhabilitasi		
					1.03.02.2.01.24 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang 150 m Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.01.31 Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang 1 Unit Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.01.43 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan100 M Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang 130 KM Dinormalisasi/Direstorasi	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti50 Orang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil 3 dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti 75 Orang peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota.asitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan dan 100 % pengembangan Sistem Irigasi	1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi 500 M Permukaan yang Dibangun		
					1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi 2.6 KM Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.02.11 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak 400 M yang Ditingkatkan	Kab. Pinrang	

					1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi 3.2 KM Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang 3 Bendung Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.02.16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa 2000 KM yang Direhabilitasi	Semua Kab/Kota	
					1.03.02.2.02.17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak 0 KM yang Direhabilitasi		
					1.03.02.2.02.20 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang 1 Kawasan Dipelihara	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa 800 M yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang 4 Unit Beroperasi	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang 2 DI Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Kab. Pinrang	
					1.03.02.2.02.29 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang 1 Kawasan Dipelihara	Semua Kab/Kota	
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga 100 % yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rumah tangga yang 100 % menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman Proporsi rumah tangga dengan 100 % akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen JAKSTRADA 1 Dokumen yang tersusun Jumlah dokumen 1 Dokumen perencanaan teknis SPAM Jumlah Rencana, Kebijakan, 2 Dokumen Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kab. Pinrang		
					1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah izin yang diberikan 1 Izin kepada badan usaha Jumlah kerja sama 1 Perjanjian penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain Jumlah kerja sama 17 Perjanjian penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain Jumlah Konsultasi Supervisi 3 Dokumen Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM	Kab. Pinrang	



					1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM 40 Liter/Detik IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kab. Pinrang	
					1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang 900 SR terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat Jumlah unit distribusi yang 17 Unit dibangun	Kab. Pinrang	
					1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas10 Liter/Detik SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kab. Pinrang	
					1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang 2241 SR dibangun	Kab. Pinrang	
					1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan 150 SR rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kab. Pinrang	
					1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang 75 Rumah Terlayani melalui Tangga Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Pinrang	
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA regional yang 75 % dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan TPA Regional sesuai 9.31 Ha kriteria pengelolaan persampahan regional	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, 1 Dokumen Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Pinrang		
					1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga 36953 Rumah yang Terlayani TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Luas TPA Regional yang 11 Ha dibangun direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1 Unit yang Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga 99 % yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang 87.42 % memiliki akses terhadap sanitasi layak Persentase rumah tangga yang 6.3 % terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja Persentase rumah tangga yang 0.44 % tersambung dengan SPALD-T Persentase rumah tinggal 99.42 %	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, 1 Dokumen Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Pinrang		

				bersanitasi				
					1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah 5 Rumah tangga yang terlayani melalui Tangga optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Kab. Pinrang	
					1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah 5 Rumah tangga yang terlayani melalui Tangga optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Kab. Pinrang	
					1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga 100 Rumah yang memiliki TangkiTangga Septik	Kab. Pinrang	
					1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah dengan akses 650 Rumah unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S Jumlah Unit Sistem 14 Unit Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Kab. Pinrang	
					1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah dengan akses 450 Rumah unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T Jumlah Rumah Tangga yang 450 Rumah Tersambung dengan Sistem Tangga Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Pinrang	
					1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga 5520 Rumah yang Terlayani Penyedotan Tangga Lumpur Tinja Jumlah rumah yang sudah 5520 Rumah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja Jumlah rumah yang sudah 5520 Rumah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Kinerja penyediaan100 % prasarana pengolahan lumpur tinja Kinerja penyediaan sarana 100 % pengangkutan lumpur tinja	Kab. Pinrang	

1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam 3,30 % kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Daerah yang Tidak terjadi 80.98 % genangan > 2 kali setahun	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, 1 Dokumen Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Kab. Pinrang	
					1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase 56950 M Perkotaan yang Dibangun	Kab. Pinrang	
					1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase 207000 M Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kab. Pinrang	
					1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang 500 M Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Pinrang	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permukiman di kawasan 70 % strategis daerah yang telah tertata	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen teknis 1 Dokumen infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Jumlah permukiman di 1 Permukiman Kawasan strategis daerah yang dibangun Jumlah Sistem Jaringan 3 Sistem Prasarana dan Sarana Jaringan Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per 0.075 Rasio satuan bangunan	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah IMB yang diberikan 250 IMB oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting Jumlah Penyelenggaraan 3 Dokumen Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Rasio bangunan gedung 0.00083 Rasio (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Kab. Pinrang	
					1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait 1 Dokumen Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun Penetapan Keputusan Bupati 1 SK tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Kab. Pinrang	

					1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung 624 Gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota Jumlah bangunan gedung 16 Gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan Jumlah Dokumen Monitoring 1 Dokumen dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio penataan bangunan 0,0192 Rasio dan lingkungannya di daerah	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan 80.58 % lingkungannya yang tertata di Daerah	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, 1 Dokumen Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
				1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung 3 Gedung yang dibangun Jumlah Penataan Bangunan 2 Kawasan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Penerangan jalan 624 Unit umum yang terpasang	Kab. Pinrang		
				1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan 2 Bangunan lingkungannya yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan 1 Kawasan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis	Kab. Pinrang		
					Lainnya Jumlah penerangan jalan 2671 Unit umum yang dipelihara			
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan 98 % Kabupaten / Kota	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten 94.2 % dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Persentase kawasan pemukiman 0 % yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 Proporsi panjang jaringan jalan 94.2 % dalam kondisi baik	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Kab. Pinrang		

					1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen1 Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen teknis leger 1 Dokumen jalan Persentase jalan yang52.83 % memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Persentase sempadan jalan 0.58 % yang dipakai pada bangunan rumah liargang kaki lima atau	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi 2 Dokumen Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Panjang jaringan jalan dalam 846.72 Km kondisi baik dan sedang Panjang jembatan dalam 8.044 Km kondisi baik	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun20 KM	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan0.1 KM Rekonstruksi Jalan	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi 70 KM	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan 8.82 KM Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jalan yang dipelihara5 Km	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan 3.5 KM Pemeliharaan Secara Rutin Panjang jalan yang ditingkatkan 35.39 Km (struktur/fungsi)	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun70 M	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan 15 M Penggantian	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan 430 M Rehabilitasi	Kab. Pinrang	
					1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan 100 M Pemeliharaan Secara Berkala	Kab. Pinrang	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/tehnisi 95100 % /analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelatihan tenaga 100 % trampil konstruksi	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi30 Kualifikasi Jabatan Operator dan Orang Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kab. Pinrang		
					1.03.11.2.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Pinrang	
			1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan	Persentase Penyelenggaraan 100 % sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota	1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi 2 Dokumen Profil Pekerjaan Konstruksi	Kab. Pinrang	

			Daerah Kabupaten/Kota					
			1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha 100 % Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil & kecil)i	1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti30 Orang Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kab. Pinrang	
					1.03.11.2.03.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti50 Orang Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional	Kab. Pinrang	
			1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib 100 % Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti50 Orang Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Pinrang	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang 100 % sesuai peruntukannya	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan penataan 80 % ruang yang diterbitkan sesuai aturan	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan 1 Dokumen Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
					1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen1 Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi 4 Rekomendasi TKPRD yang dikeluarkan	Kab. Pinrang	
					1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi 3 Dokumen Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Kab. Pinrang	
		1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tata guna 77 % lahan sesuai RTRW yang disusun	1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Guna 3 Dokumen Lahan sesuai RTRW	Kab. Pinrang		
		1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan 0.2305 Rasio tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Pinrang		
				1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Pinrang		

			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ruang publik yang berubah 0 % peruntukannya	1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah penertiban dan 4 Kasus penegakan hukum pelanggaran bidang penataan ruang	Kab. Pinrang	
					1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah ruang publik yang 0 Ha berubah fungsi	Kab. Pinrang	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi 100 % rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan 100 % Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota sesuai analisis kebutuhan	1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data 1 Dokumen Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Pinrang		
				1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kab. Pinrang		
		1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan 100 % Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban 800 Unit Bencana Kabupaten/Kota Rumah yang Terehabilitasi			
				1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi 50 Unit Relokasi Program Rumah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kab. Pinrang		
		1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan 100 % Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kab. Pinrang		
		1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan dokumen100 % terkait Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang tersusun sesuai analisa kebutuhan	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pinrang		
				1.04.02.2.06.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha	Kab. Pinrang		

					(KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	(KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum		
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	39,14%	1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pemenuhan dokumen100 % terkait Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan kawasan Permukiman yang tersusun sesuai analisa kebutuhan	1.04.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen1 Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pinrang	
					1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kab. Pinrang	
			1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pemenuhan dokumen100 % rencana strategis peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas di bawah 10Ha sesuai analisa kebutuhan	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kab. Pinrang	
					1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Pinrang	
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas 100 % kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10Ha sesuai analisa kebutuhan	1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kab. Pinrang	
					1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak 0 Unit Huni yang Diperbaiki Rumah		
					1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen1 Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Pinrang	
					1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Pinrang	
					1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan	Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Pinrang	



					Permukiman Kumuh			
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH 1,59 % (Rumah Tidak Layak Huni)	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan 100 % peningkatan kualitas rumah sesuai analisa kebutuhan	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 50 Unit untuk Pencegahan Terhadap Rumah Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Pinrang	
					1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen1 Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Pinrang	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan 100 % yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU 100 % Perumahan	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen1 Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Pinrang	
					1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang 46 Lokasi Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Pinrang	
					1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Pinrang	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen 100 % perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu sesuai aturan Persentase Tersedianya Dokumen100 % Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kab. Pinrang	

						Perubahan RKASKPD		
					1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian3 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi2 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinran g	
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah jasa administrasi 12 bulan keuangan yang terbayarkan tepat waktu Persentase Pelayanan100 % Administrasi Keuangan yang Akuntabel	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 11 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 86 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil 55 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen1 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinran g	

					1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laopran rekonsiliasi 5 laporan dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD Persentase Laporan Barang 100 % Milik Daerah yang tersedia	1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan 2 Dokumen Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 2 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinran g	
			1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pengelolaan 12 bulan administrasi kepegawaian Persentase Sumberdaya 100 % Aparatur yang mencapai Nilai SKP baik	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas 50 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 4 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan 5 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen 11 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinran g	
					1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti10 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti11 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinran g	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum 12 bulan perangkat daerah Persentase Kebutuhan Layanan 100 % Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi9 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	

					1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan 15 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan6 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan20 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 12 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 30 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan barang milik 3 unit daerah Persentase Pengadaan Barang 95 % Milik Daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1.05.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 1 Unit Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 2 Unit Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang 1 Unit Sesuai Analisa Kebutuhan Diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 0 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 3 Unit Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2 Unit Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 3 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang 7 org/bulan urusan pemerintahan daerah Persentase Layanan Jasa 100 % Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tersedia	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 10 Laporan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan 30 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 3 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	

					1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 8 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang 12 unit terpelihara Persentase Pemeliharaan Barang 95 % Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas6 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas12 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 0 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 10 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 17 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 8 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang 95 % memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan 95 % trantibum dalam Wilayah Kab.Pinrang	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan10 Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
					1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Jumlah Kasus Gangguan0 Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Kab. Pinrang	

					Kerusuhan Massa	Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Jumlah Kasus Gangguan10 Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		
					1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang 0 Dokumen Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pinrang	
					1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Pinrang	
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakkan Peraturan 100 % Daerah dalam Wilayah Kab. Pinrang	1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pinrang	
					1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Pinrang	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga100 % Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah daerah rawan 12 kecamatan bencana yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian5 Dokumen Risiko Bencana yang Dilegalisasi			

		Bencana						
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah daerah yang 12 kecamatan mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan 50 Orang Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		
					1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan 5 Unit Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kab. Pinrang	
					1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan 12 bulan Pascabencana yang terlaksana	Kab. Pinrang	
					1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang 15 Orang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Pinrang	
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah wilayah yang 12 kecamatan mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK 12 Dokumen Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Pinrang	
					1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang 12 kecamatan Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Pinrang	
					1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana 12 kecamatan yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota	
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pencegahan, 95 % Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM1 Dokumen Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Pinrang		
					1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	

							1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Pinrang	
							1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam 24 Orang Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.01	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
							1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang	
							1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen yang tersusun sesuai aturan	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
							1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian 2 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
							1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
				1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian 100 % pengelolaan administrasi keuangan SKPD	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32	Kab. Pinrang	
							1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	



					1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir 1 Laporan tahun yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pengelolaan barang milik daerah SKPD	1.06.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 2 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
			1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	1.06.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 7 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti12 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan administrasi umum SKPD	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 3 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan 1 Paket Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan10 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 1 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan 80 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab.	

					Konsultasi SKPD		Pinrang	
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian100 % pengadaan Barang MiliK Daerah	1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 5 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 1 Unit yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa 100 % Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian100 % pemeliharaan barang milik daerah SKPD	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan 11 Unit Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 15 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL	Cakupan Tenaga Kesejahteraan 100 % Sosial Yang Dibina	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sosial 100 % yang dilaksanakan	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat12 Orang Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
					1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan 12 Orang Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Tenaga 100 % Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	Kab. Pinrang	
					1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang 40 Keluarga Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Tenaga 100 % Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	Kab. Pinrang	

					1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga 1 Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari 12 Sertifikat Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan WNI 100 % Migran	1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pelaksanaan 100 % pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilaksanakan	1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran 5 Orang Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang 100 % Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase kegiatan rehabilitasi 100 % sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang 100 Orang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
					1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima 50 Orang Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang 15 Orang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang 10 Orang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan 100 Orang Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	

					1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan 100 Orang Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang 12 Kecamatan Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang 12 Kecamatan Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang 12 Kecamatan Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang 12 Kecamatan Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang10 Orang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan 10 Orang Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase kegiatan rehabilitasi 100 % sosial yang dilaksanakan	1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang 12 Kecamatan Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang 12 Kecamatan Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang 100 Orang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	Kab. Pinrang	

						Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
					1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima 50 Orang pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang 5 Orang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang15 Orang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan 100 Orang Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam 100 Orang Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang50 Orang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang 12 Kecamatan Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang 5 Orang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang 12 Kecamatan Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	

					1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan 100 % jaminan sosial	1.06.05.2.01 Pemeliharaan AnakAnak Terlantar	Persentase pelaksanaan kegiatan 100 % pemeliharaan anak-anak terlantar yang terlaksana	1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar 10 Orang yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
					1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar 10 Orang yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
					1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang 10 Orang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
			1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan 100 % pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin 12 Kecamatan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Pinran g	
					1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang 5 Keluarga Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
					1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima 10 Keluarga Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
					1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan 5 Orang Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam 100 % dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan100 % perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang50 Orang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
					1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang50 Orang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
					1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian 1 Unit Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	

					1.06.06.2.01.04	Jumlah Orang yang 12 Kecamatan Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.06.2.01.05	Jumlah Korban Bencana yang 100 Orang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
			1.06.06.2.02	Persentase penyelenggaraan 100 % pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota yang terlaksana	1.06.06.2.02.01	Jumlah Kampung yang 1 Kampung Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.06.2.02.02	Jumlah Orang yang 50 Orang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
1.06.07	Persentase pengelolaan taman 100 % makam pahlawan	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan 100 % pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terlaksana	1.06.07.2.01.01	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					1.06.07.2.01.02	Jumlah Makam yang 10 Makam Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2.07.01	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.01	Pemencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya 100 % Perencanaan dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	2.07.01.2.01.01	Jumlah Dokumen 2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.01.02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.01.03	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.01.04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.01.05	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kab. Pinrang	

						Perubahan DPASKPD		
					2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian4 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
			2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan administrasi keuangan	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 45 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan dan aset yang 100 % akuntabel	2.07.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 2 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
			2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumberdaya aparatur 100 % yang mencapai nilai SKP Baik dan Kelengkapa Lainnya	2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 3 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti10 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	



			2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya pelayanan 100 % administrasi umum perangkat Daerah	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi4 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan12 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan100 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang 100 % milik daerah terpenuhi	2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 1 Unit Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 2 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 5 Unit Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 7 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan layanan100 % administrasi perkantoran yang terpenuhi	2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 55 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana 100 % aparatur yang terpelihara	2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas11 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 26 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	

2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang 1,05 % dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase penyusunan RTK yang 100 % terpenuhi	2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang 10 Perusahaan Menyusun RTK Mikro	Kab. Pinrang	
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja2,50 % bersertifikat kompetensi	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pelaksanaan pelatihan 100 % berbasis kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang 80 Orang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Pinrang	
				2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan 6 Unit Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Pinrang	
		2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga pelatihan 100 % Kerja swasta yang dibina	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 42 Lembaga	Kab. Pinrang	
		2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase lembaga pelatihan100 % Kerja swasta yang mendapatkan ijin	2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya 10 Perizinan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Pinrang	
		2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase produktivitas 15 % perusahaan kecil yang terdata	2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil 20 Perusahaan yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Pinrang	
		2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Alumni Lembaga 55 % Pelatihan Ketenagakerjaan yang kompoten	2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Pinrang	
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang 60 % ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang 100 % terlayani	2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang 800 Orang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Pinrang	
				2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang 50 Orang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Pinrang	
				2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang 20 Orang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Pinrang	
		2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase LPTKS yang100 % mendapatkan Ijin	2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan 3 Lembaga Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kab. Pinrang	
		2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase penyebarluasan 100 % informasi pasar kerja yang disebarkan secara	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi	Jumlah Pencari dan Pemberi 200 Orang Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem	Kab. Pinrang	

				online	Pasar Kerja Online	Online (Karir Hub)		
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase PMI (Pra dan purna 80 % Penempatan) yang terlindungi	2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Puma Penempatan	Jumlah PMI Purna yang 20 Orang Diberdayakan	Kab. Pinrang	
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang 65 % menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS,Biparti t Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang 30 % menerapkan PP dan PKB	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang 5 Perusahaan Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Pinrang		
					2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang 1 Perusahaan Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Pinrang	
					2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi 4 Laporan Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Pinrang	
		2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase perselisihan hubungan 100 % industrial yang terselesaikan	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang 4 Perkara Dicegah	Kab. Pinrang		
					2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan 2 Perkara yang Terselesaikan	Kab. Pinrang	
					2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan 50 Orang Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Pinrang	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								

2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan 97,58 Indeks Gender	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemerintah Tingkat44 OPD Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah 1 Perangkat yang Mengikuti Sosialisasi Daerah Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
		2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi 6 Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
		2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi Kemasyarakatan 5 Kelompok yang bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan	2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi 1 Dokumen Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perlindungan 100 100% perempuan	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kekerasan 12 bulan terhadap perempuan	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kebijakan12 Kecamatan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kab. Pinrang	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian 100 Persen pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
				2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
				2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
				2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
				2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Pinrang	

						Dokumen Perubahan DPASKPD		
			2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian 100 Persen pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan 27 Orang/bulan Tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor yang 26 Jenis diadakan sesuai analisa kebutuhan	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa admistrasi 12 Orang keuangan dan perencanaan yang terbayarkan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian 100 Persen pelayanan urusan pemerintah daerah1	2.09.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan Barang 2 Orang yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinran g	
			2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian 100 Persen pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 50 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndanga n	Jumlah ASN yang mengikuti 15 Orang bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinran g	
			2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian 100 Persen penunjang urusan pemerintah daerah	2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan	Persentase Penggandaan Dokumen 100 % sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinran g	

					Penggandaan			
					2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundanga n	Jumlah Bahan Bacaan (Surat24 Buah Kabar dan Majalah yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas27 Pegawai Keluar Daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian 100 Persen pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan 100 % dan Mesin Lainnya yang Diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinran g	
			2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian 100 Persen pelayanan penunjang urusan daerah	2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perjalanan Dinas dalam 10 Orang daerah yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan 12 Bulan telepon yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan 12 Bulan dan Penjaga Malam yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinran g	
			2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian 100 Persen pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan 8 Unit Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 13 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinran g	
					2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Infrastruktur yang 2 Unit dibangun sesuai dengan kebutuhan	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Yang 2 Kelompok dibangun Sesuai dengan kebutuhan	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung2 Unit Pangan yang Tersedia Jumlah Lumbung Pangan yang 0 Unit Tersedia			
					2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan 1 Laporan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	38,70	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Perjalanan Dinas 16 Pegawai Dalam Daerah Pada Kegiatan Perberasan dan pemantauan Data Disetiap Penggilingan	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan 2 Laporan Neraca Bahan Makanan		
					2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi 1 Laporan dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		
					2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan 10 Dokumen dan Harga Pangan		
			2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Konsumsi Pangan 100 Persen Perkapita Tahunan	2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan 15 Ton Pemerintah Kabupaten/Kota		
					2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan 15 Ton Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara		
			2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase Konsumsi Pangan 100 Persen Perkapita Tahunan	2.09.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan 1 Laporan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor PPH Konsumsi Pangan 91 Skor Perkapita Tahunan	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per 1 Dokumen Kapita Per Tahun		
					2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berdasarkan Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan 1 Laporan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
					2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per	Jumlah Koordinasi dan 1 Laporan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		

					Tahun			
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penyaluran cadangan 100 % pangan pada suatu wilayah yang tertangani	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyaluran Cadangan 12 Pegawai Pangan Pada Suatu Wilayah Yang Tertangani	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan 1 Dokumen dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			
		2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyaluran Cadangan 16 Pegawai pangan pada Satu Wilayah Yang tertangani	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan 1 Laporan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan 100 Persen Pengawasan Keamanan Pangan	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan 1 Dokumen Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina			
				2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Dokumen Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian 20 Sengketa Sengketa Tanah Garapan Terlaksana Sesuai Kebutuhan	2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil 15 Berita Mediasi Penyelesaian Kasus Acara Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah Ganti Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Ganti 5 Paket Kerugian dan Santunan Tanah Terbayarkan Tepat Waktu	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH		2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen 100 % Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang disusun sesuai Analisa Kebutuhan	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
				2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang		



					2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian4 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi1 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan 100 % yang terpenuhi	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 57 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen1 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase kebutuhan sarana dan 100 % prasarana aparatur yang terpenuhi	2.11.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	

			Perangkat Daerah		SKPD			
			2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi 100 % Kepegawaian yang disusun sesuai analisa kebutuhan	2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti 20 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum 100 % yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi 2 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3 Paket Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan 15 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 0 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase asset yang diadakan 100 % sesuai analisa kebutuhan	2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 10 Unit Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1 Unit Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 10 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kab. Pinrang	

						Disediakan		
					2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian 100 % pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 100 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinran g	
					2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 10 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinran g	
					2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup	2.11.02.2.01 Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian 100 % Penyusunan Dokumen RPPLH	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil 1 Dokumen Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Pinran g		
			2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian 100 % penyusunan KLHS Kabupaten	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS 0 Dokumen RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun  Jumlah Dokumen KLHS 1 Dokumen RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Pinran g	
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan 70,2 % Hidup (IKLH) Kab	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan terhadap 100 % usaha dan/atau kegiatan (tanah,air,udara)	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas 1 Dokumen Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pinran g		
					2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Pinran g	
					2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh 1 Dokumen Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kab. Pinran g	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN	Persentase pengelolaan KEHATI 100 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ruang terbuka Hijau 100 % dengan kondisi baik	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup 8.2 Kewenangan Kabupaten/Kota Ha	Kab. Pinran g		

	HAYATI (KEHATI)							
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian LB3 100 % yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Limbah 100 % B3 yang terlaksana	2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Pinrang	
			2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah 100 % B3 yang terlaksana	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Pinrang	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab 100 % usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan 100 0 pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sesuai analisa kebutuhan	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari usaha 5 Laporan dan/atau kegiatan yang diawasi izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/K ota	
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase keterlibatan MHA 100 % dalam pengelolaan lingkungan hidup	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase terfasilitasinya 100 % kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Pinrang	

2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup	2.11.08.2.01 100% Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan 100 % pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok 1 Lembaga Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kab. Pinrang	
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten	2.11.11.2.01 100% Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang 100 % ditangani dan tertangani	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Pinrang	
				2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang 20374.14 ton Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
				2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, 1 Kelompok Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Pinrang	
				2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Pinrang	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan layanan 100 % administrasi perkantoran yang terpenuhi	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian 100 % Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen 2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
				2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pinrang	
				2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Alat tulis kantor yang 5 Jenis tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen RKA 1 Dokumen Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah makan minum lembur 135 Dos yang tersedia sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang	

					2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Alat tulis kantor yang 6 Jenis tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen DPA yang 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah makan minum lembur 135 Dos yang tersedia sesuai aturan dan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Alat tulis kantor yang 5 Jenis tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen DPA 1 Dokumen Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah makan minum lembur 135 Dos yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian6 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Alat tulis kantor yang 5 Jenis tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen hasil 1 Dokumen evaluasi yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinran g	
			2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji 95 % pegawai dan pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana tepat waktu dan sesuai aturan	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 32 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat tulis kantor yang 15 Jenis tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah iuran jaminan 82 orang kesehatan bagi Non ASN jumlah makan minum rapat 800 dos yang tersedia sesuai analisa kebutuhan jumlah makan minum tamu 250 orang yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	

					2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
			2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang dan asset 95 % daerah yang terinventaris sesuai aturan yang berlaku	2.12.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 2 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
			2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin 95 % sesuai aturan yang berlaku	2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 60 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					2.12.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 3 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					2.12.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang	
					2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bimbingan teknis yang 5 Bimtek dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Orang yang Mengikuti0 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang	
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase gedung kantor dalam 90 % kondisi baik	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan26 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.12.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 2 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang	

					2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 100 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah 90 % sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 7 Unit Disediakan	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinran g	
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang urusan 90 % Pemerintah daerah yang terbayarkan tepat wa ktu	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bangunan pemerintah 1 gedung yang fasilitasi komunikasi, sumber daya air, listrik, internet yang terpenuhi sesuai analisa kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah 90 % yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aplikasi yang 1 Aplikasi terupgrade sesuai versi yang berlaku Jumlah Pemeliharaan15 Unit Komputer yang tersedia sesuai analsia kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
					2.12.01.2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana 27 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kab. Pinran g	



					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang terdaftar dalam database	2.12.02.2.01 100% Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase tertibnya administrasi kependudukan 100 % kepemilikan KK, KTP , SKPWNI	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil100 Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Pinrang	
					2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil100 Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Pinrang	
					2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang1000 Orang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		
					2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pinrang	
					2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen 10000 Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Pinrang	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil	2.12.03.2.01 100% Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang 100 % memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil100 Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Pinrang	
					2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan 12 Layanan Sipil yang Ditingkatkan		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat 91,3%	2.12.04.2.01 91,3% Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan % yang akurat 89	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Alat tulis kantor yang 5 Jenis tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah perangkat siak yang 1 aplikasi terpelihara		
					2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Alat tulis kantor yang 12 Jenis tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah makan minum lembur216 dos yang tersedia sesuai analis kebutuhan Jumlah Perjalanan Dinas ke 50 kali Kecamatan yang terbayarkan tepat waktu		
			2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan % yang akurat 100	2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data 50 Dokumen Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.01 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja,Renja 4 Dokumen Perubahan,Rens tra dan Renstra Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan Tepat Waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g		
				2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinran g		
				2.13.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Kab. Pinran g		
					Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA 1 Dokumen Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu			
				2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g		
				2.13.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA 1 Dokumen Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinran g		
				2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian 4 Dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun sesuai aturan dan Tepat Waktu	Kab. Pinran g		
				2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan 2 Dokumen Renstra yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinran g		
		2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jasa Administrasi100 % Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 0 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji 12 Bulan yang tepat waktu	Kab. Pinran g		
				2.13.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g		
				2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan Pelaksanaan 12 Dokumen Verifikasi yang tersedia tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g		
				2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan	Kab. Pinran		

					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun yang tersusun tepat waktu	g	
					2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 3 Laporan Bulanan/Triwulan/Sem esteran yang tersusun tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD yang 1 Laporan tersusun tepat waktu	Kab. Pinran g	
			2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian 44 Pasang Olah Raga	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan 3 Dokumen ANJAB,EVJAB, dan SKJ yang tersusun sesuai aturan tepat waktu	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen SKP 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndanga n	Jumlah ASN yang ditingkatkan 20 Orang Sumber dayanya Jumlah Orang yang Mengikuti0 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinran g	
			2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan100 % administrasi perkantoran yang terpenuhi	2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi 1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan 34 Buah Komputer	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan 2 Paket Rumah Tangga	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Pengandaan 4 Paket yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundanga n	Jumlah Surat Kabar/Majalah dan 45 buah Tabloid	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material untuk 4 Paket pameran pembangunan	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas Luar 12 Bulan Daerah	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	

			2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	2.13.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan 2 Unit Dinas	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Meja dan 10 Buah Kursi Kerja	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan cetak,Komputer 10 Unit PC dan Lattop Jumlah sarana dan Prasarana 3 Unit Pendukung Gedung Kantor (AC dan Sound System)	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana1 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinran g	
			2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian100 % Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pendistribusian Surat 2025 Surat menyurat terkirim	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan jasa 12 Bulan telepon,internet,air dan listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Pinran g	
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian100 % pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit Operasional yang dipelihara sesuai analisis Kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan 18 Unit dan Mesin	Kab. Pinran g	
					2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehab 1 Paket Gedung Kantor	Kab. Pinran g	
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Terselenggaranya penataan 100 % Desa	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang 69 Orang ditingkatkan Kapasitasnya	2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang akan di 2 Desa mekarkan Jumlah Desa yang Melakukan 0 Desa Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			
					2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang 69 Orang mengikuti sosialisasi		

						Jumlah Desa yang Terfasilitasi 0 Desa Penataan Wilayahnya		
					2.13.02.2.01.04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi 1 Dokumen Jumlah Desa yang 0 Desa Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa		
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kerjasama Desa 12	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi 12 Desa dalam kerjasama antar desa	2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Kawasan Perdesaan 3 Kawasan yang terfasilitasi			
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa 70 % tertinggal	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan 100 % Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang 612 Orang terdaftar sebagai Peserta			
				2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Naskah Rancangan 11 Perbub Perbub yang tersusun dan tersosialisasi			
				2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Desa dan 355 Orang masyarakat yang dilatih Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
				2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Semua Kab/Kota		
				2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang 69 Desa dibina/Evaluasi Pengelolaan,Admini strasi Keuangan Desa,Profil Desa dan administrasi Lainnya Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			
				2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Aparatur 69 Orang Desa/Masyaraka t yang mengikuti pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik desa Jumlah Aparatur 24 Orang Desa/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan/Penguatan Administrasi dan Pelaporan BUNDESMA Jumlah Desa yang 9 Kecamatan mengikuti Lomba BUNDESMA terbaik tingkat kabupaten			

						Jumlah Dokumen Hasil0 Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Monitoring 9 Kecamatan Kawasan BUMDESMA Jumlah Penerima Bantuan 44 Kelompok Bagi Kelompok Usaha Mikro		
					2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan 9 Desa Pemilihan Kepala Desa		
					2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Aparatur Desa yang 142 Orang mengikuti Pelatihan Penyusunan Profil Desa  Jumlah Dokumen Profil Desa 0 Dokumen yang tersusun		
					2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
					2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang mengikuti 13 Desa Lomba Desa Tingkat Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Pinrang	
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas 90 % kelembagaan	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas 90 % lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa	2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader PKK yang100 Orang mengikuti Pelatihan Jumlah Kader Posyandu yang138 Orang mengikuti Pelatihan Jumlah Lembaga Adat yang 100 Orang mengikuti pelatihan Jumlah Lembaga 0 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah LPM yang mengikuti 100 Orang Pelatihan			
						Jumlah RT/RW yang 100 Orang mengikuti Pelatihan		

					2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah peningkatan Desa 100 Orang yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		
					2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Gelar TTG 1 kali Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 0 Laporan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
					2.13.05.2.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Aparatur yang 100 Orang mengikuti pelatihan LINMAS untuk pengamanan Pilkades		
					2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK 12 Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitasnya		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen 12 Dokumen Perencanaan	2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
				2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang 1 dokumen Tersusun	Kab. Pinrang		
				2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKPA yang 1 dokumen Tersusun	Kab. Pinrang		
				2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang 1 dokumen Tersusun	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
				2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA yang 1 dokumen Tersusun	Kab. Pinrang		

					2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LKJIP, 3 dokumen dan perjanjian Kinerja yang Tersusun	Kab. Pinrang	
					2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi 2 dokumen renstra dan Evaluasi Renja yang Tersusun	Kab. Pinrang	
			2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen 5 dokumen administrasi keuangan yg tersusun	2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 40 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen0 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Honorarium PA, KPA, 12 bulan PPTK, Honorarium Administrasi yang Terbayarkan Tepat Waktu	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan1 laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	Kab. Pinrang	
					2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan laporan 1 laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya peningkatan 2 Dokumen kualitas pengelolaan Aset yang lebih transparan dan akuntabilitas	2.14.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan RKB 1 dokumen yang Tersusun Jumlah Rencana Kebutuhan 0 Dokumen Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinrang	
					2.14.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 0 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Penyusunan Laporan1 dokumen Aset yang Tersusun	Kab. Pinrang	
			2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mewujudkan Managemen 12 Bulan Kepegawaian yang Berkualitas	2.14.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 0 Paket beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pengadaan Pakaian 152 pasang Olahraga	Kab. Pinrang	
					2.14.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 0 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Penyusunan 2 dokumen ANJAB dan EVJAB yang Tersusun	Kab. Pinrang	



					2.14.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndanga n	Jumlah Bimbingan Teknis Yang 12 bulan Terlaksana	Kab. Pinran g	
			2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan jasa 12 Bulan Administrasi dalam Penyelenggaraan Managemen dan Operasional Kantor	2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Kantor 4 Jenis Yang Tersedia	Kab. Pinran g	
					2.14.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan 7 unit	Kab. Pinran g	
					2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundanga n	Jumlah Exemplar Minat Baca 13 Exemplar Aparatur	Kab. Pinran g	
					2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan 12 bulan Konsultasi yang Terintegritas dan sesuai Analisa Kebutuhan Yang Terlaksana Jumlah Laporan 0 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Sarana dan2 Unit Prasarana Bagi Aparatur	2.14.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 0 Unit Disediakan Jumlah Pengadaan Meja Kerja 2 unit	Kab. Pinran g	
					2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinran g	
			2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Dukungan12 Bulan Administrasi dalam Penyelenggaraan Managemen dan Operasional Kantor	2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 12 bulan Daya Air, dan Listrik Yang Tersedia	Kab. Pinran g	
					2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Tenaga 12 bulan Pembersih, Satpam, Jasa Kebersihan Kantor, dan Retribusi Sampah Yang Tersedia	Kab. Pinran g	
			2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan 12 Bulan Dinas, AC dan Komputer	2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 0 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pajak dan STNK 12 bulan Kendaraan Dinas/Operasional terproses setiap Tahun, BBM, Service Kendaraan Dinas, Honorarium Supir	Kab. Pinran g	
					2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor 6 unit yang Terawat dan Terpelihara	Kab. Pinran g	

					2.14.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Gedung 10 unit Kantor Yang Terpelihara	Kab. Pinrang	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total) 2.08 % TFR(Angka Kelahiran Total)2.08 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	laju pertumbuhan Penduduk (LPP) 0.71 %		2.14.02.2.01.13 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Sosialisasi laju 12 Kecamatan pertumbuhan penduduk yang Terlaksana	Kab. Pinrang	
		2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian 12 Kecamatan Pertumbuhan Penduduk		2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Pengumpulan dan 12 Kecamatan Pengolahan data pelayanan KB/KS/dan PP	Kab. Pinrang	
					2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan 0 Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Pembinaan Tribina, 12 Kecamatan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS, Pelatihan Kader Keluarga Balita, Pemberdayaan PKK	Kab. Pinrang	
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB 10,54 % yang tidak terpenuhi (unmet need)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang Terpapar isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) 98 %		2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah promosi KB dan KIE 12 bulan melalui media yang terlaksana	Kab. Pinrang	
		2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB aktif (PA) 98 % Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		2.14.03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 240 Orang		

					2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kesertaan 12 Kecamatan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang0 Orang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pinrang	
					2.14.03.2.03.05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen0 Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Peningkatan 12 Kecamatan pelayanan KB ke setiap pelosok desa	Kab. Pinrang	
					2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang 100 persen Pelayanan KB yang Tersedia Jumlah Unit Sarana Penunjang 0 Unit Pelayanan KB	Kab. Pinrang	
					2.14.03.2.03.07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang0 Orang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah pembinaan pasca 12 Kecamatan pelayanan peserta KB	Kab. Pinrang	
					2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Kab. Pinrang	
						Jumlah Pembinaan 12 Kecamatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaring dan jejarangnya yang Terlaksana		
					2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peningkatan 12 Kecamatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Terlaksana Jumlah Tenaga Pelayanan 0 Orang yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Pinrang	
					2.14.03.2.03.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang0 Orang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Jumlah promosi dan 12 Kecamatan		

						konseling KB pasca persalinan dan keguguran Yang Terlaksana		
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Kapasitas 68 % Sumber Daya Keluarg	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Keluarga12 Bulan Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi 1 Laporan dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
				2.14.04.2.01.13 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang12 Dokumen Tersusun Tepat Waktu	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen4 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g		
				2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinran g		
				2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinran g		
				2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g		
				2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinran g		
				2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian 1 Dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinran g		

					2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi 1 Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran Yang 17 Laporan Terealisasi Tepat Waktu dan Kinerja Administrasi Keuangan Yang Terarah	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima 12 Bulan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 12 Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 14 Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Dukumen Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 14 Dukumen Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Pengelolaan Barang 9 unit dan Asset Yang Terbayarkan Tepat Waktu Serta Pengelolaan Barang dan Asset yang Tersusun Tepat Waktu	2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan 4 Dukumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
			2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan 61 Pegawai Administrasi Pegawai daerah Yang Terlaksana Secara Efektif dan Efesien	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 69 Pegawai beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Ls dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang 30 Pegawai Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan 13 Jenis Pelayanan Administrasi Publik Sesuai Analisa Kebutuhan	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen 3 Gedung Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 50 Buah Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan 37 Bacaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Kab. Pinrang	

					Perundangundangan	Disediakan		
					2.15.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 2 Kegiatan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 12 Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitas Umum Kantor Tersedia 6 Paket Secara Optimal	2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor 7 Jenis Yang Terlaksana Sesuai Kebutuhan	2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Umum Kantor Tersedia 6 Paket Secara Optimal	2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan 14 Unit Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 14 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
			2.15.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Publik 6 Jenis Yang Terpakai Sesuai Kebutuhan	2.15.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pinrang	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Kinerja Lalu Lintas0,44 Kabupaten Rasio konektivitas 1,3 Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang 37 Buah Terpakai Sesuai Kebutuhan	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di 14 Unit Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Pinrang		

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
					2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang 150 Unit Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Pinrang	
					2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang 150 Unit Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Pinrang	
		2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang 1 Jenis Tife-C Yang Terpakai Sesuai Kebutuhan	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana 6 Unit Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Kab. Pinrang		
		2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana 6 Paket Kendaraan Yang Terpakai Sesuai Kebutuhan	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana 7 Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Pinrang		
					2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus1 Dokumen Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Pinrang	
					2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana 12 Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Pinrang	
		2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen 5 Paket Dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Terlaksana Sesuai Kebutuhan	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, 150 Unit Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Pinrang		
					2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu 1 Laporan Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
		2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Honorer yang 130 Orang digaji dan Terdaftar sesuai Kebutuhan	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
		2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Angkutan Orang 4 Kegiatan Dalam Trayek Lintas Daerah Yang Terlaksana sesuai Kebutuhan	2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi 3 Laporan dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Demaga	2.15.03.2.04 100% Perencanaan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Yang 4 Paket Melayani Trayek Dalam Kab/Kota	2.15.03.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan 1 Dokumen Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pinrang	
				2.15.03.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi 2 Laporan dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
		2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyeberangan dan 1 Rute Pengoperasian Untuk Kapal Yang Terlayani Sesuai Kebutuhan	2.15.03.2.07.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi 2 Dokumen Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
				2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian 2 Laporan dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
		2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Izin Usaha Perawatan 4 Kegiatan Kapal Yang Diterbitkan Sesuai Kebutuhan	2.15.03.2.08.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan 2 Dokumen Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pinrang	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							



2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen13 Dokumen Perencanaan,Penga nggaran dan evaluasi kinerja	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian4 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi2 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinran g	
		2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen 1 Laporan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 38 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen1 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi 0 Dokumen dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pinran g	
				2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Pinran g	

						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
					2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Asset 2 Laporan tersusun Tepat waktu	2.16.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi 12 Bulan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 0 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 6 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, 0 Dokumen Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti 20 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Pelayanan 12 Bulan Administrasi Umum SKPD	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 30 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah 0 Paket Tangga yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan 0 Paket Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Kab. Pinrang	

					Perundangundangan	Disediakan		
					2.16.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 0 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen0 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pinrang	
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan46 unit Prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 0 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 0 Unit Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau 0 Unit Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana0 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana0 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang 12 bulan urusan pemerintah daerah	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah 44 Unit Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Pakai	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	

					Lapangan			
					2.16.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara0 Unit	Kab. Pinran g	
					2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 20 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinran g	
					2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	2.16.02.2.01 Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah Informasi Yang di 400 Informasi Publis	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Pinran g		
					2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Pinran g	
					2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Pinran g	
					2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Pinran g	
					2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Pinran g	
					2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pelayanan Informasi Publik	Kab. Pinran g	
					2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan 5 Layanan Media	Kab. Pinran g	
					2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan 0 Dokumen dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Pinran g	
					2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Pinran g	
					2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi 0 Orang Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pinran g	
					2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Pinran g	

					2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan 1 Dokumen dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Pinrang	
					2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang 100 % memanfaatkan e-government	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang terhubung 84 SKPD dengan akses internet yang disediakan oleh diskominfosandi	2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama 0 Domain Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
					2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen 0 Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra 84 Unit Pemerintah Daerah	Kab. Pinrang	
		2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi Publik dan 29 Alikasi Pemerintahan yang dimanfaatkan	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
					2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan 0 Unit Daerah yang Dikelola	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kab. Pinrang	

					Informasi			
					2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah 84 Perangkat yang Menerapkan Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis 0 Unit Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang 0 Layanan Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program 0 Dokumen Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen0 Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen0 Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Pinrang	
					2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, 0 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kab. Pinrang	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya 100 % perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen4 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
				2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang		
				2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang		
				2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Semua Kab/Kota Kab.		

						Dokumen DPASKPD	Pinrang	
					2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian4 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi 10 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
			2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan100 % administrasi keuangan perangkat daerah	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 30 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
			2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan100 % Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 4 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti10 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang	

			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan 100 % administrasi umum perangkat daerah	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan28 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 40 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang 100 % milik daerah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	2.17.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 3 Unit Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 8 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1 Unit Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana0 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan jasa100 % penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 24 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang 100 % milik daerah yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 7 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 15 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit Bangunan Lainnya yang	Kab. Pinrang	



					Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang	2.17.03.2.01 100% Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KSP/USP Koperasi 100 % yang diperiksa dan diawasi dalam lingkup kabupaten Pinrang	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah 50 Unit Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Usaha Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
				2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang 50 Unit Memenuhi Peraturan Perundang- Usaha Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kab. Pinrang		
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	2.17.04.2.01 100% Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan 100 % pinjam dan unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi 60 Unit yang Telah Dilakukan Penilaian Usaha Kesehatan	Kab. Pinrang		
				2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang3 Unit Mendapatkan Penghargaan Usaha Kesehatan	Kab. Pinrang		
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N	persentase koperasi yang 100 % terampil dan berdaya saing	2.17.05.2.01 100% Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan 100 % Pelatihan Koperasi yang dilaksanakan	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang 50 Orang Memahami 50 Orang Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Pinrang		
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan kuantitas produk usaha koperasi	2.17.06.2.01 100% Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kuantitas 100 % produk usaha koperasi	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang 50 Unit Produktif, Bernilai Tambah, Usaha Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Persentase pemberdayaan usaha 100 % menengah, usaha kecil dan usaha mikro	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,	Persentase pemberdayaan usaha 100 % menengah, usaha kecil dan usaha mikro	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan 100 Dokumen Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pinrang		

	DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
					2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah 50 Unit Melaksanakan Kemitraan Usaha Usaha Mikro	Kab. Pinrang	
					2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah 50 Unit Menerima Pembinaan dan Usaha Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Pinrang	
					2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah 10 Orang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Pinrang	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kab.Pinrang	2.17.08.2.01 100% Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase pengembangan usaha 100 % menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kab.Pinrang	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang 50 Unit Terfasilitasi dalam Usaha Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pinrang	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen 6 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen 0 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Kab. Pinrang	

						DPASKPD		
					2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian6 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian100 % Pelayanan Administrasi Keuangan.	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 36 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 7 item Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan 18 Jasa dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi 12 Laporan dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
			2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan 100 % SKPD	2.18.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Pinrang	
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Disiplin 100 % Mematuhi Aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkat Kecakapan dan Keterampilannya	2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 137 Pasang beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 8 Kegiatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	

					2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti6 Bimtek Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang	
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan 3 paket Administrasi Umum Yang Terlaksana Sesuai Analisa Kebutuhan	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 8 Jenis Perlengkapan Kantor yang Barang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 55 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang 70 %	2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 5 Jenis Disediakan Barang	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan 5 Jenis Mesin Lainnya yang Barang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor 2 Paket atau Bangunan Lainnya yang pekerjaan Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Umum Kantor 100 %	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 4 Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5 Jenis Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan 3 Kendaraan Barang Milik DaerahDinas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Analisa Kebutuhan	2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 4 Kendaraan Operasional atau Lapangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 4 Jenis Lainnya yang Dipelihara Barang	Kab. Pinrang	
					2.18.01.2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Paket Pendukung Gedung Kantor pekerjaan atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN	Meningkatnya Investasi 2357 Investasi iklim penanaman modal	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Investasi 1 Paket Daerah Pekerjaan	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang	Jumlah Peta Potensi Investasi 2 Dokumen dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			

	IKLIM PENANAMAN MODAL				Usaha Kabupaten/Kota			
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN 2900 Perizinan dan PMA	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan 6 Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah 2 Dokumen yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		
					2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen0 Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen 4 Dokumen/pameran Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Pinrang	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas100 % Pengelolaan Perizinan Penanaman Modal Yang Akuntabel	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berkas Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang 0 Pelaku Mendapatkan Pelayanan Usaha Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang 1800 Non Mendapatkan Pelayanan Usaha Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang 2900 pelaku Mendapatkan Pelayanan usaha Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
					2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari 5 Kegiatan Pelaku Usaha yang Mendapat Usaha Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		
					2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh 0 Orang Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		
					2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Kegiatan Usaha dari 0 Kegiatan Pelaku Usaha yang Usaha Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif		

					Daerah	Daerah		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya 2.042.064.013.975 PMDN pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian 10 Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari 3 Kegiatan Pelaku Usaha yangUsaha. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		
					2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang 70 Pelaku Mendapatkan Pembinaan Usaha Pelaksanaan Penanaman Modal		
					2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari 70 Kegiatan Pelaku Usaha yangUsaha Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase penyediaan data dan 90 % informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi100 % Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat/Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi 12 Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian100 % Pelayanan Penunjang Urusan Daerah	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	

					2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian3 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinran g	
					2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi2 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinran g	
			2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi 81 Nilai Pemerintah	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 65 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinran g	
					2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen5 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinran g	
					2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 3 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi 81 Nilai Pemerintah	2.19.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinran g	
					2.19.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinran g	
					2.19.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 2 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinran g	
			2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi 81 Nilai Pemerintah	2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 65 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinran g	

					2.19.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 5 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, 5 Dokumen Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti 20 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang	
		2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas 81 Nilai Kinerja Instansi Pemerintah		2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 Paket Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan 15 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 6 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 150 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen 2 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pinrang	
		2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik 3 Buah Daerah		2.19.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 4 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 3 Unit Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 7 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
		2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas 81 Nilai Kinerja Instansi Pemerintah		2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 15 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	



			Daerah					
					2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 3 Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas 81 Nilai Kinerja Instansi Pemerintah	2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 5 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 15 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					2.19.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda 90 % dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data 1 Laporan Potensi Kepemudaan Yang termutakhirkan	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor35 Orang Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Pinrang		
					2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda 60 Orang Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Pinrang	
					2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Kader 35 Orang Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Pinrang	

					Kabupaten/Kota			
					2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi 70 Orang Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Pinrang	
					2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa 40 Orang dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Kab. Pinrang	
					2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader 70 Orang Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Kab. Pinrang	
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pembinaan 70 % organisasi kepemudaan	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil 10 Dokumen Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab. Pinrang	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Jumlah prestasi olahraga24 Cabor	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang dibina dan 50 Atlet dikembangkan	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Pinrang		
		2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan2 Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen2 Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		
				2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen2 Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		

					2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang 60 Orang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Pinrang	
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabor yang dibina 5 dan Atlet/Cabor dikembangkan	2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang 50 Orang Diseleksi	Kab. Pinrang	
					2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan 10 Pelatda Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaaan (Sport Science)	Kab. Pinrang	
					2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan 25 Orang Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Kab. Pinrang	
					2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Pinrang	
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan 65 % Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan 6 Unit Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Kab. Pinrang	
					2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil 1 dokumen Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Pinrang	
					2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kab. Pinrang	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keterpenuhan prinsip 100 % dasar kepramukaan	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi 14 organisasi Kepramukaan Yang Dibina	2.19.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Pinrang		
				2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi 4 Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pinrang		
				2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan 40 Orang Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pinrang		

					2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan 3 Laporan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Pinrang	
					2.19.04.2.01.06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana 3 Unit Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Pinrang	
					2.19.04.2.01.08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 4	Kab. Pinrang	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Pinrang	2.20.02.2.01 100% Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data statistik Sektoral 45 SKPD terintegrasi	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah data /informasi 10 item pembangunan daerah yang tersedia dalam bentuk buku Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Kegiatan dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Pinrang		
				2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat 0 Orang Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Pinrang		
				2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik 45 Dokumen Sektoral yang Dihimpun Jumlah Meta Data Statistik 45 SKPD Sektoral yang tersedia dalam aplikasi	Kab. Pinrang		
				2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang 0 Orang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kab. Pinrang		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase SKPD pengguna 100 % layanan tingkat kematangan keamanan informasi	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Memiliki 45 SKPD sistem Keamanan data dan Informasi	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola 0 Dokumen Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Pinrang		
				2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis 0 Laporan Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		

					2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Pinrang	
					2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah 0 Perangkat yang Telah Menggunakan Daerah Layanan Keamanan Informasi	Kab. Pinrang	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase terlestarikannya 100 % cagar budaya	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah benda 47 Benda dan situs budaya yang dipelihara/ dilestarikan	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan 0 Objek Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan 1 Objek Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Pinrang		
				2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan 200 Orang Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Pinrang		
		2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase kesenian 80 % daerah dan nilai budaya kearifan lokal kebudayaan yang dimanfaatkan	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi 31 Objek Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Pinrang		
		2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan SDM 100 % kebudayaan	2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, 60 Orang Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Kab. Pinrang		
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Kelompok 80 % masyarakat terhadap kegiatan Kesenian Tradisional	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase 80 % Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia 200 Orang Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Pinrang		
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase Pengelolaan, 100 % pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah koleksi 16 Koleksi museum	2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang 1 Unit Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kab. Pinrang		
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase dokumen 100 % perencanaan, pengan ggaran dan evaluasi perangkat kerja daerah yang tersedia	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen 2 Dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		

	KABUPATEN/KOTA		Daerah					
					2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD1 Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD yang terusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD1 Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD yang terusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja 3 Laporan dan realisasi kinerja yang tersusun sesuai aturan dann tepat waktu	Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi 2 Dokumen kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai aturandan tepat waktu	Kab. Pinrang	
			2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan yang terbayarkan seacara tepat waktu	Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang tersedia 12 Bulan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Cetak penggandaan 12 Bulan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah iuran jaminan30 Non kesehatan Non ASN yang ASN terbayarkan secara tepat waktu Jumlah makan minum 12 Bulan Rapat/Tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi 19 jasa keuangan yang terbayarkan secara tepat waktu	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir 1 Laporan tahun yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang	

					2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan 1 Laporan semesteran tersusun secara akurat dan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian 100 % pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2.23.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBUs- SKPD 1 Laporan yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinran g	
					2.23.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengurus barang 2 jasa dan asset yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah laporan barang dan 1 Laporan asset yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinran g	
			2.23.01.2.05 Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian 100 % pemenuhan administrasi kepengawasan perangkat daerah	2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju batik layanan 66 Baju yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Pakaian olah raga yang 66 pasang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.23.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	Jumlah dokumen pendataan 4 Dokumen dan pengolahan administrasi kepengawasan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinran g	
					2.23.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti 15 ASN Bimbingan Teknis dan Implementasi peraturan perundang- undangan	Kab. Pinran g	
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan 100 % administrasi umum perangkat daerah	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi 12 Bulan listrik yang tersedia sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinran g	
					2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan 12 Bulan perlengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan /surat 12 Bulan kabar bulletin yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.23.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan bahan 1 Paket material pameran yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinran g	
					2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang 20 kegiatan terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efisien	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	

			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan 50 % prasarana penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan4 unit kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa 100 % penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang 200 surat terdistribusikan secara tepat waktu	Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah iuran rekening telepon 12 Bulan yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah iuran TV kabel yang 12 Bulan terbayarkan secara tepat waktu Jumlah rekening listrik yang 12 Bulan terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan pembersih yang 12 Bulan diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah iuran retribusi sampah 12 Bulan yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah jasa Front office yang 2 jasa terbayarkan secara tepat waktu Jumlah jasa pembersih yang 4 jasa terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah 100 % Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM ,Oli ,Suku cadang 12 Bulan dan service kendaraan mobil Dinas /Operasional yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah jasa sopir kendaraan 1 jasa mobil dinas yang terbayarak secara tepat waktu Jumlah unit kendaraan dinas 7 unit /operasional yang laik jalan	Kab. Pinrang	
					2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan 12 Bulan peralatan kantor yang terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi 34 % Masyarakat	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang 45 % memiliki pengunjung	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah bahan pustaka 200 Eksamplar yang direstorasi Jumlah judul bahan80 Buah pustaka yang dialihmediaka n dalam bentuk digital	Kab. Pinrang		
					2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung 5000 pemustaka perpustakaan dititik layanan Terpeliharanyan aplikasi 1 Unit pengolahan perpustakaan	Kab. Pinrang	



					2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan bahan 100 Eksamplar pustaka koleksi budaya nusantara dan koleksi konten lokal yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
					2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan 12 Perpustakaan sekolah yang dibina sekolah dan diasistensi tentang pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar perpustakaan Terlaksananya Lomba12 Perpustakaan Perpustakaan Sekolah/Desa	Kab. Pinrang	
					2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimbingan 30 peserta teknis tenaga perpustakaan /pustakawan	Kab. Pinrang	
					2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan 2000 Eksamplar bahan pustaka (buku Umum )untuk perpustakaan umum daerah	Kab. Pinrang	
					2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka 2000 Eksamplar yang terkelola	Kab. Pinrang	
					2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perpustakaan 1 Database yang tersedia	Kab. Pinrang	
		2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran 73.15 Nilai Membaca		2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah jasa petugas 12 Bulan layanan perpustakaan yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah kunjungan layanan 80 Kunjungan perpustakaan keliling dititik layanan	Kab. Pinrang	
					2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah taman baca yang diadakan 1 unit sesuai analisa kebutuhan Jumlah taman baca yang direhab 1 unit sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
					2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba 50 Siswa bercerita Tingkat SD SD sekabupaten Pinrang Terlaksananya survey nilai 1 kegiatan tingkat kegemaran membaca	Kab. Pinrang	

					2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan 2 Perpustakaan Desa Replikasi yang Desa diberikan bimbingan teknis SPP dan TIK  Jumlah Perpustakaan 8 Perpustakaan Desa yang dibina Desa sebagai pusat berkegiatan masyarakat	Kab. Pinrang	
					2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Ekspo 1 kegiatan perpustakaan	Kab. Pinrang	
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan 5 % koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno yang 5 % dilestarikan	2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang 10 Naskah dialihmediakan dalam kuno bentuk elektronik  Jumlah naskah kuno yang 5 Naskah ditelusuri dan ditemukan Kuno	Kab. Pinrang		
		2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang 50 dialihmediakan dalam Eksamplar bentuk elektronik	2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah bahan pustaka 10 Eksamplar koleksi budaya nusantara yang dikelola	Kab. Pinrang		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip 80 % sebagai bahan akuntabilitas kinerja	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang 75 % dikelola	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang diklasifikasi 8500 Arsip sesuai dengan pola klasifikasi arsip	Kab. Pinrang		
				2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah data arsip yang 1 Depot terpelihara keamananya dari arsip hama dan serangga	Kab. Pinrang		
				2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah arsip OPD/Desa 15 Lembaga /kelurahan (Lembaga pemerintah /yang diawasi pelaksanaan pengelolaan/penataan secara prosedural dan sistematis	Kab. Pinrang		
		2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang 50 % dikelola	2.24.02.2.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah data arsip OPD dan 10 Lembar sekolah yang dikumpulkan Arsip	Kab. Pinrang		
				2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah dokumen/arsip 10 Lembar statis yang diakuisisi Arsip	Kab. Pinrang		
		2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Presentase data arsip yang 23 % dimasukan dalam JIKN dan SIKN	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar arsip dimasukan 1 Daftar dalam JIKN Arsip Jumlah sarana layanan 2 Sarana informasi kearsipan yang diadakan sesuai	Kab. Pinrang		

			Tingkat Kabupaten/Kota		Melalui JIKN	analisa kebutuhan		
					2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/Desa 15 Lembaga /Kelurahan(Lembaga Pemerintah yang diasistensi dan dibina tentang tata kelola arsip yang sesuai standar kearsipan	Kab. Pinrang	
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan arsip sebagai 37 % bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan 5 % pemusnahan arsip dengan NSPK	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah OPD/Desa 15 Lembaga /Kelurahan(Lembaga Pemerintah yang dimonev untuk penilaian arsip yang akan dimusnahkan	Kab. Pinrang		
				2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah data arsip 15 Lembaga OPD/Desa/Kelurahan yang Pemerintah memiliki retensi dibawah 10 Tahun yang harus dimusnahkan Jumlah Peraturan Bupati 2 Perbup (Perbup)tentang kearsipan yang terusun sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Pinrang		
		2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan 100 % autentifikasi dan alih media yang sesuai NSPK	2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang 100879 Arsip disahkan(Autentifikasi arsip)sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku	Kab. Pinrang		
				2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang 40000 Arsip dialihmediakan dalam bentuk elektronik	Kab. Pinrang		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen DPA yang disusun 1 dokumen tepat waktu Dokumen LKIP, IKM, LPPD, PK 4 dokumen Dokumen RKA yang disusun 1 dokumen Jumlah dokumen 2 dokumen perencanaan yang disusun	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
				3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang		

					3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian4 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi2 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
			3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan 17 laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 47 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 17 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	

			3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 dokumen dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.25.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
			3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas 60 paket beserta Atribut Kelengkapan	3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 60 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 3 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian tertatanya data administrasi 3 laporan kepegawaian	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti 20 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang	
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan 1 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat komponen instalasi 3 Jenis listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi 0 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	bahan dan material pameran 3 jenis	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 6 unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 6 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 4 Unit Pendukung Gedung Kantor atau	Kab. Pinrang	

					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan		
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan 1 laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 36 rekening Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin 15 unit Lainnya yang Dipelihara	3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas47 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara10 Unit	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 20 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					3.25.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 15 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan 15672 Ton Tangkap	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan data dan4 laporan informasi sumberdaya ikan yang tersedia	3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi 4 Dokumen Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Pinrang		
					3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan 7 Unit Tangkap yang Tersedia	Kab. Pinrang	
					3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan70 Unit Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Pinrang	
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang 10 kelompok Meningkatkan Kapasitasnya	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang 120 Orang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pinrang	

					3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan 10 Kelompok Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		
			3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka 1 Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka1 Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pinran g	
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan 71828 Ton Budidaya	3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan6 izin Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	3.25.04.2.01.02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi 10 Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Kab. Pinran g		
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi 10 kelompok Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi 12 Kelompok Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Pinran g	
					3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi 10 Kelompok Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		
					3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha 15 Kelompok yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pinran g	
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luas Lahan untuk 1 dokumen Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi 4 Dokumen Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan 2 Unit Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

					Daerah Kabupaten/Kota			
					3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan 5 Unit Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan 1 Dokumen Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Pinrang	
					3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang 3 Orang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pinrang	
					3.25.04.2.04.06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan 10 Ha Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		
					3.25.04.2.04.07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang 10 Orang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pinrang	
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan 1235 Ton perikanan konsumsi	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar pengolahan 9 izin hasil perikanan bagi usaha mikro dan kecil yang diterbitkan kano dan kec	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan 4 laporan informasi usaha dan pemasaran yang tersedia			
			3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha 8 Kelompok pengolah dan pemasar yang dibina	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklashar yang 8 kelompok mendapat bimbingan dan penerapan persyaratan pengolahan dan pemasaran		
			3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri 8 Jenis pengolahan ikan yang diadakan	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha 22 Pelaku Perikanan Skala Mikro dan Usaha Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Pinrang	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN	Kunjungan Wisatawan 75.000 Orang	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya	Jumlah daya Tarik wisata 6 lokasi baru yang dikelola wisata	3.26.02.2.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata 3 Lokasi Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang		



DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
				3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen4 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
				3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata4 Lokasi Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Pinran g	
				3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen3 Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan 4 kawasan kawasan strategis strategis pariwisata yang diunggulkan	3.26.02.2.02.01 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen 7 Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
				3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen 7 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
				3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata 7 Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Pinran g	
				3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemelih araan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang 1 Unit Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
				3.26.02.2.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
				3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	
				3.26.02.2.02.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan 7 Lokasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinran g	

			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Destinasi 6 Kawasan Pariwisata yang dikelola Jumlah kawasan destinasi 6 kawasan pariwisata yang dikelola	3.26.02.2.03.01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata 7 Lokasi Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Pinrang	
					3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen7 Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
					3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata 7 Lokasi Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Pinrang	
					3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana 8 Unit Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Pinrang	
			3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengajuan tanda daftar 26 jasa usaha pariwisata yang ditindaklanjuti	3.26.02.2.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda 22 Dokumen Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata 1,72 % terhadap PDRB Kabupaten	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata4 Destinasi yang terpublikasikan di dalam dan di luar negeri	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pinrang		
					3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan 2 Laporan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pinrang	
					3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pinrang	
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Zona Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana Zona 1 Zona Kreatif yang tersedia Kreatif	3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah penyediaan sarana dan 1 Unit prasarana kota kreatif	Kab. Pinrang		

3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga kerja 100 % pariwisata yang dibina memiliki kompetensi SDM pariwisata	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan SDM 2 Kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang terlaksana	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan 40 Orang Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Kab. Pinrang	
					3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti 40 Orang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Pinrang	
					3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti 40 Orang Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Pinrang	
					3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif 40 Orang yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Pinrang	
					3.26.05.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil 3 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Pinrang	
			3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan pengembangan 1 Pelatihan kompetensi sdm pariwisata	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti 40 Orang Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Pinrang	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan layanan 100 % administrasi perkantoran yang terpenuhi Persentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) 74 Poin Presentase ketercapaian 100 % Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen 2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	

					3.27.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian 5 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian 6 Dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi2 Laporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi5 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
			3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi 9 Paket keuangan yang terbayarkan tepat waktu Presentase ketercapaian100 % pelayanan urusan pemerintahan daerah	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan 12 Bulan tunjangan ASN yang dibayarkan sesuai ketentuan dan tepat waktu Jumlah Orang yang 55 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 132 Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil 12 Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen1 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen5 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	

					3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
			3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik 4 laporan Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Presentase ketercapaian 100 % pelayanan Administrasi barang Milik Daerah	3.27.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan 2 Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi 5 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan 1 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil 1 Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinrang	
			3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi 12 bulan Kepegawaian daerah yang terlaksana Persentase sumberdaya100 % aparatur yang mencapai nilai SKP baik	3.27.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 55 Paket beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas 200 Orang beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 3 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan 4 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	

					3.27.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen5 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen 12 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndanga n	Jumlah Orang yang Mengikuti20 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti25 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinran g	
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kebutuhan layanan100 % administrasi perkantoran yang terpenuhi Presentase Ketercapaian100 % Pelayanan Administrasi Umum	3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen10 Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen12 paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 8 paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan 10 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan 6 paket dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan 10 Paket dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundanga n	Jumlah Dokumen Bahan17 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan43 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 1 Paket yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 20 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 21 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang yang 10 unit tersedia Presentase Ketercapaian Barang 100 % Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	3.27.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 2 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinran g	

					3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang3 paket Disediakan Jumlah Paket Mebel yang4 Unit Disediakan	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2 Unit Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 4 Unit Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 12 unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana6 unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinran g	
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan 3 Paket pemerintahan daerah yang tersedia Presentase ketercapaian100 % penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 5 Laporan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 5 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang 12 bulan terbayarkan Jumlah jasa pelayanan umum 4 Orang kantor yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Laporan Penyediaan 3 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah paket penyediaan alat 3 Paket kebersihan kantor	Kab. Pinran g	
			3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang3 Paket Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara Presentase Ketercapaian100 % pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan 18 Unit Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pinran g	

					3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas21 unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 18 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinran g	
					3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
						Jumlah Gedung Kantor dan 6 unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
					3.27.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 12 unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	Presentase Meningkatnya 9 % Produksi/Produk tivitas nilai tambah dan daya saing komoditas pjeternakan dan perkebunan pertahun Produksi pertanian tanaman 2149 Ton hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi 1 % Tanaman Hortikultura Utama (cabe merah) per tahun (%) Presentase Meningkatnya Mutu dan 25 % Niali Tambah	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan 5 Laporan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan 12 Laporan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Meningkatnya Mutu dan Nilai 25 % Tambah	Kab. Pinran g		
					3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan 12 Laporan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pinran g	
			3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya 2 % produktivitas tanaman perkebunan unggulan	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang 7 VUB Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		
					3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan 5 Dokumen Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
					3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG 5 Dokumen Hewan/Tanaman		
			3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman	Presentase meningkatnya mutu dan 90 % peredaran benih/bibi temak dan tanaman pakan ternak	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu 5 Laporan Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kecil		



			Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
					3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan 3 Laporan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar		
			3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya jumlah 50 % ternak layak bibit yang dibudidayakan	3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan 0 Ton Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia Jumlah Benih/Bibit Ternak dan 25 Ton Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia		
					3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi5 Laporan Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Meningkatnya 9 % produktivitas nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan Produktivitas pertanian 6,26 Ton/Ha tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya kualitas 15 % prasarana, sarana, kawasan komoditi peternakan dan perkebunan Produksi Tanaman Pangan 671262 Ton Utama (Padi) (Ton)	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Lahan Pertanian Pangan1 Dokumen Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B yang Dikelola	Kab. Pinrang		
					3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan 1 Dokumen Berkelanjutan/LP2B	Kab. Pinrang	
					3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan 12 Laporan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pinrang	
					3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan 2 Dokumen Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		
		3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Presentaase Meningkatnya 5 % Prasarana Pertanian sektor Peternakan dan Perkebunan Produksi Tanaman Palawija 109787 Ton (Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat 60 unit Usaha Tani (JITUT)Yang Terbangun Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani 5 Unit yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Kab. Pinrang		

				Kayu, Ubi Jalar) (Ton)		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani 60 unit yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara		
					3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang 8 unit Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Embung Pertanian yang 10 Unit Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Pinrang	
					3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, 10 Unit Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Jalan Usaha Tani yang 122 unit Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Pinrang	
					3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, 10 unit Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Pinrang	
					3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, 11 unit Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Pinrang	
					3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan 1 Unit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
					3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di 10 unit Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Pinrang	
					3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian 5 Unit Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Prasarana Pertanian 45 unit Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Pinrang	
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Presentase menurunnya prevalance 2 % penyakit Helminthiasis dan Brucellosis	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ketersediaan vaksin 2 paket ST19 dan antrax yang tersedia Jumlah Wilayah Pengendalian 0 Laporan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian 5 Laporan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			

					3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan vaksin AI 2 paket dan Obat Vitamin Ternak Jumlah Wilayah yang 0 Laporan Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah yang 10 Laporan Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya20 % Kesejahteraan pada Hewan	3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko 5 Laporan Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		
					3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas 3 Laporan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		
			3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan jasa 12 bulan pelayanan petugas peternakan dan kesehatan hewan	3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah ketersediaan 5 Paket obat/bahan kimia dan bahan material laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa 0 Laporan Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa 4 Laporan Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa 5 Laporan Laboratorium		
					3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ketersediaan jasa 12 bulan pelayanan medik veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik 0 Laporan Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik 10 Laporan Veteriner		
			3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Kualitas Produk 40 % Hewan	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemeriksaan ante 2200 ekor mortem dan post mortem yang dilaksanakan Jumlah Pendampingan Unit 0 Laporan Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pendampingan Unit 1 Laporan Usaha Hewan dan Produk Hewan		

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah PDRB4345113 Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-) presentase 4 % menuru nnya seranga n hama dan opt tanaman perkebu nan	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pengendalian 100 % dan penanggulangan Bencana Tersedianya sarana pengendalian 100 % serangan hama OPT	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Anggota kelompok tani yang ikut pendampingan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan Jumlah luasan pengendalian 107313 Ha dan penanggulangan bencana sesuai dengan analisis kebutuhan Jumlah Luas Serangan0 Ha Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah Luas Serangan10 Ha Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Pinran g	
				3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak 107313 Ha Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Pinran g	
				3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca 1 Laporan Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Pinran g	
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)108 %	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah uslan izin yang 100 % terselesaikan (%)	3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik 12 Dokumen Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Pinran g	
				3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan 12 Dokumen dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Pinran g	
				3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian 12 Laporan yang Dibina dan Diawasi	Kab. Pinran g	
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Sumber Daya Petani Perkebunan dan Peternakan Persentase kelompoktani penerima bantuan (%)	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan100 % penyuluhan terhadap jumlah kelompoktani per tahun (%) Presentase meningkatnya jumlah 30 % cakupan binaan kelompok tani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan 12 unit Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pinran g	

					3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di 30 klp Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di 420 unit Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pinrang	
					3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana 12 unit Penyuluhan Pertanian	Kab. Pinrang	
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota	3.29.05.2.01 100% Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan 100 % pemanfaatan langsung panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota	3.29.05.2.01.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Dokumen Pesaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Kab. Pinrang	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha yang 100 % memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat pembelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dokumen Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	Kab. Pinrang	
		3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang telah 25 % memiliki izin sesuai aturan	3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda7 Dokumen Daftar Gudang		Semua Kab/Kota	
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana 86.76 % perdagangan sesuai analisa kebutuhan	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi 7 Unit Perdagangan		Semua Kab/Kota	
		3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pasar rakyat yang 95.83 % dikelola dengan standar mutu pasar sehat	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Kab. Pinrang	
				3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Kab. Pinrang	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	Koefisien variasi harga barang <9 % kebutuhan pokok dan penting antar waktu	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Persentase laporan ketersediaan 100 % barang kebutuhan pokok dan penting yang disampaikan tepat waktu	3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah Laporan Koordinasi 48 Laporan dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			

	DAN BARANG PENTING		Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
			3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan 48 Laporan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Pinrang	
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk 60 %	3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan 12 Laporan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Pinrang	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Eskpor Barang dan-406,67 Milyar Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk lokal yang 90.38 % dipromosikan sebagai produk komoditi bernilai ekspor	3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang 20 Pelaku Difasilitasi dalam Pameran Usaha Dagang Lokal	Kab. Pinrang	
					3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor 4 Pelaku yang Dibina Usaha	Kab. Pinrang	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar Rakyat Tertib 67 % Ukur	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, 92.42 % timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, 1914 Unit Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Semua Kab/Kota	
					3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di 680 Orang Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Pinrang	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Barang Produksi 1,5 % Dalam Negeri Lokal yang diperdagangkan di Toko Swalayan	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pemenuhan sosialisasi 76 % peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai analisa kebutuhan	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang 20 UMKM Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dan dokumen 100 % perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	3.31.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen1 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	

					3.31.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian18 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
			3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran96 % secara tepat waktu dan sesuai aturan	3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 53 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 48 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
			3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah 100 % yang tercatat dalam daftar pengguna barang	3.31.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan 1 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	

			3.31.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan100 % retribusi daerah sesuai aturan	3.31.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan12 Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah		
			3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur 100 % yang mencapai nilai SKP baik	3.31.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti24 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang	
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan 90 % administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	3.31.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan 5 item peralatan gedung	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan 5 Paket Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan12 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 85 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pinrang	
			3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan 80 % prasarana aparatur yang terpenuhi	3.31.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 4 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat 11 Unit Tak Bermotor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang2 Paket Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 12 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana4 Unit Pendukung Gedung Kantor atau	Kab. Pinrang	



					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan		
			3.31.01.2.08	Persentase kebutuhan layanan100 % jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	3.31.01.2.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			3.31.01.2.09	Persentase kebutuhan 80 % pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	3.31.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas26 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.09.06	Jumlah Peralatan dan Mesin 35 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					3.31.01.2.09.10	Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran 60 % pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	3.31.02.2.01	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 11 %	3.31.02.2.01.01	Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen Pembangunan Industri	Kab. Pinrang	
					3.31.02.2.01.03	Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Pinrang	
					3.31.02.2.01.04	Jumlah Dokumen Hasil 20 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
					3.31.02.2.01.05	Jumlah Dokumen Hasil 100 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Kab. Pinrang	

					Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
					3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi 1 Dokumen Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pinrang	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil 7 % dan menengah di Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil 90 % pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil 530 Dokumen Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Pinrang	
					3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil 500 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan informasi 60 % industri secara lengkap dan terkini	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pemegang 20 % IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI dalam penyampaian data ke SIINas	3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil 219 Dokumen Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Pinrang	
					3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil 436 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Pinrang	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase partisipasi warga, 100 % pemerintah setempat dan instansi terkait yang mengikuti Musyawarah penetapan kawasan	3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Besaran pemerataan 100 % pembanunan berbasis kawasan	3.32.02.2.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Kab. Pinrang	

3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi yang terpenuhi	3.32.03.2.01 100% Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan persebaran penduduk 100 % yang berasal dari satu daerah Kab/Kota yang terserap	3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran 100 Kepala yang Mendapatkan Keluarga Penyuluhan	Kab. Pinrang	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi	3.32.04.2.01 100% Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan pemukiman Yang 2 % Mandiri	3.32.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman 2 Satuan yang Dikembangkan dalam Permukiman rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Pinrang	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.01 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan 210 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen 3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan 6 Laporan/dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan 2 Laporan/dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen terkait administrasi 50 keuangan yang tersusun sesuai aturan	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 156 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.02.02 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 156 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	

							g	
					4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 7550 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan terkait 20 administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan 105 rencana Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 40 perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	4.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana 2 Unit dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 4 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti270 Orang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti42 Orang Bimbingan Teknis Implementasi	Kab. Pinrang	

					PerundangUndangan	Peraturan Perundang-Undangan		
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terkait administrasi 9 0 umum yang tersedia	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah 3 Paket Tangga yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan 3 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan1 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 2 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan Kunjungan Tamu	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan 2 Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan terkait barang 2 0 milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 3 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang4 Paket Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 7 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang 4 0 urusan pemerintahan daerah yang tersedia	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 5 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	

					4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik 4 0 daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan 83 kendaraan/Unit Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang 5 mebel/Unit Dipelihara	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan 5 peralatan/Unit Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor 1 gedung/unit dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah data terkait peningkatan 2 0 pelayanan BLUD	4.01.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang 19 blud/unit Menyediakan Pelayanan kerja dan Penunjang Pelayanan	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi terkait administrasi 4 0 keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang 2 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan 4 Paket Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti2 Orang Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang 2 Orang/Bulan Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi Kerumahtanggaan 4 0 Sekretariat Daerah yang tersedia	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah3 Paket Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah3 Paket Tangga Wakil Kepala Daerah yang	Kab. Pinrang	

					Wakil Kepala Daerah	Disediakan		
					4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 1 Paket Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah dokumen/laporan terkait 21 0 penataan organisasi yang tersusun	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen8 Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 7 Laporan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen5 Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, 2 Dokumen Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pinrang	
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi terkait pelaksanaan 3 0 protokol dan komunikasi pimpinan	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan Keprotokolan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan Komunikasi Pimpinan	Kab. Pinrang	
					4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan 1 Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Pinrang	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kualitas 100 % data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen/laporan terkait 5 0 administrasi tata pemerintahan yang tersusun	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pinrang		
					4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pinrang	
					4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pinrang	
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen/laporan terkait 2 0 pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang tersusun	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pinrang	

					4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Pinran g	
					4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Pinran g	
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi 2 0 hukum yang tersedia	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum 500 produk Daerah yang Disusun hukum	Kab. Pinran g	
					4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan 5 Kasus Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pinran g	
					4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan 500 produk Pengelolaan Informasi hukum Hukum yang Didokumentasi	Kab. Pinran g	
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah 2 0 yang tersedia	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pinran g	
					4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 Laporan Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Pinran g	
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas 100 % data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen/laporan terkait 4 0 pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pinran g		
					4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pinran g	
					4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pinran g	



					4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kab. Pinrang	
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen/laporan terkait 3 0 pelaksanaan administrasi pembangunan yang tersusun	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Pinrang	
					4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan 1 Laporan/dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pinrang	
					4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan 1 Laporan/dokumen Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pinrang	
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengelolaan pengadaan2 0 barang dan jasa yang tersedia	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah 125 Dokumen/pengadaan Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pinrang	
					4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen 125 Dokumen/layanan Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pinrang	
					4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti200 Orang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pinrang	
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen terkait pemantauan 3 0 kebijakan sumber daya alam yang tersusun	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Pinrang	
					4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Pinrang	
					4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Pinrang	
4.02 SEKRETARIAT DPRD								

4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan perencanaan 6 laporan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen5 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian3 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
			4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan 12 bulan administrasi keuangan	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 38 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 1 kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen1 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	

					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	g	
						Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		
			4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya pengamanan 2 kegiatan barang milik daerah	4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen2 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan 12 bulan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinran g	
			4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian100 % administrasi kepegawaian perangkat daerah	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 117 pasang beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 2 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan PerundangUndanga n	Jumlah Orang yang Mengikuti40 Orang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndanga n	Jumlah Orang yang Mengikuti20 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinran g	
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi 12 bulan umum	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket Tangga yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundanga n	Jumlah Dokumen Bahan39 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan Kunjungan Tamu	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang milik 12 bulan daerah	4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang20 Unit Disediakan	Kab. Pinran g	

					4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 12 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian100 % penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 2 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik 100 % daerah	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas40 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara0 Unit Jumlah Mebel yang Dipelihara1 Unit	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 0 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 50 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1 paket Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase ketercapaian layanan 100 % keuangan dan kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang 40 orang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan 240 pasang Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti 40 Orang Medical Check Up DPRD	Kab. Pinrang	
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya layanan 12 bulan administrasi DPRD	4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Pinrang	

					4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan Fraksi DPRD	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pinran g	
					4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 1 Paket Tangga DPRD yang Disediakan	Kab. Pinran g	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase CapaianTugas Fungsi 100 % DPRD yang Terlaksana	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase terlaksananya 100 % pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pinran g		
					4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 17 Dokumen Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pinran g	
					4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian 1 Dokumen Perundang-Undangan	Kab. Pinran g	
					4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. Pinran g	
					4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib 1 Dokumen DPRD yang Disusun	Kab. Pinran g	
		4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	terlaksananya pembahasan 6 kegiatan kebijakan anggaran	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pinran g		
					4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pinran g	
					4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pembahasan APBD	Kab. Pinran g	
					4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pinran g	
					4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kab. Pinran g	
					4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pinran g	
		4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	terlaksananya pengawasan 12 bulan pemerintahan	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Kab. Pinran g		

					Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pemerintahan dan Hukum		
					4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan 1 Laporan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil 1 Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pinrang	
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	persentase meningkatnya 100 % kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.01 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya bimbingan 1 Kegiatan teknis DPRD	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan 13 kegiatan dokumentasi dewan yang tersedia	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	terlaksananya pengadaan 1 kegiatan kelompok pakar dan tim ahli	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 Orang	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen Kerja DPRD	Kab. Pinrang	

			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan 100 % penghimpunan aspirasi masyarakat yang terlaksana	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- 1 Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil 1 Dokumen Pelaksanaan Reses	Kab. Pinrang	
			4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	terlaksananya pelaksanaan dan 12 bulan pengawasan kode etik	4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata 1 Dokumen Beracara DPRD	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pinrang	
			4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	terlaksananya fasilitasi 2 kegiatan pembahasan kerja sama	4.02.02.2.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen1 Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan1 Dokumen Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Kab. Pinrang	
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	terfasilitasinya tugas DPRD 12 bulan dengan baik	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat 1 Laporan Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pinrang	
					4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pinrang	
5.01 PERENCANAAN								
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Persentase dokumen yang dibuat 100 % tepat waktu	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	

					5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinran g	
					5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian4 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinran g	
					5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi2 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinran g	
			5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan 100 % yang dibuat tepat waktu	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran 12 Bulan gaji yang terbayarkan Jumlah Orang yang 0 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinran g	
					5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat kelengkapan 2 Jenis komputer yang tersedia Jumlah alat tulis kantor 37 jenis yang tersedia Jumlah Dokumen Hasil0 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah makan minum500 dos rapat yang tersedia Jumlah 15000 lembar penggandaan/fotocopy yang tersedia Jumlah premi asuransi BPJS 16 orang ketenagakerjaan yang terbayarkan	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen0 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah jasa penatausahaan 32 Jasa dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 0 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir 1 Laporan tahun yang	Kab. Pinran g	



						tersusun			
					5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 13 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik 100 % Daerah yang disusun	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang dan 2 Laporan aset yang tersusun Jumlah Laporan Rekonsiliasi 0 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang
			5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang 100 % memiliki nilai SKP Baik	5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana 2 Unit dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pinrang
						5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pinrang
						5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 6 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang
						5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti 15 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang
			5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan 100 % administrasi kantor yang dilaksanakan	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi 3 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang
						5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang
						5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3 Paket Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang
						5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang
						5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 1 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang
						5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 220 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang

			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah 100 % yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor yang 4 Jenis tersedia Jumlah Paket Mebel yang0 Unit Disediakan	Kab. Pinrang	
					5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor 5 Jenis yang tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa layanan kantor 100 % yang terpenuhi	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang tersedia 300 surat	Kab. Pinrang	
					5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah iuran TV Kabel yang 1 iuran terbayarkan Jumlah jasa kebersihan kantor 6 orang yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening kawat 1 rekening faksimile/internet yang terbayarkan Jumlah rekening layanan1 rekening telepon yang terbayarkan	Kab. Pinrang	
					5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah 100 % yang dipelihara	5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan bakar 2240 Liter minyak/gas yang tersedia Jumlah jasa sopir yang 1 Kali terbayarkan Jumlah Kendaraan Dinas 0 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas 6 Unit operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan Jumlah STNK untuk kendaraan 11 Unit dinas/operasional yang terbayarkan	Kab. Pinrang	
					5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang 3 Jenis terpelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara0 Unit	Kab. Pinrang	

					5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung4 jenis kantor yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 0 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinran g	
					5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor yang 1 gedung direhabilitasi	Kab. Pinran g	
					5.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana1 sarana gedung kantor yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, 100 % pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase jumlah dokumen 100 % perencanaan yang dibuat	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis 1 Dokumen kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah Jumlah Dokumen Rancangan 0 Dokumen Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Pinran g		
					5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah penelaahan dokumen 1 Dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya Jumlah Telaahan Dokumen 0 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Pinran g	
					5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara 0 Berita Konsultasi Publik Acara Jumlah kegiatan konsultasi 1 kegiatan publik yang dilaksanakan	Kab. Pinran g	
					5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum 0 Berita Perangkat Daerah/Lintas Acara Perangkat Daerah Jumlah kegiatan forum 1 Kegiatan SKPD/lintas SKPD yang dilaksanakan	Kab. Pinran g	
					5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara 1 Berita Musrenbang Kabupaten/Kota Acara	Kab. Pinran g	
					5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan 1 Dokumen koordinasi musrenbang kecamatan yang tersedia Jumlah Usulan yang 0 Usulan Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Pinran g	

					5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/R PJMD /RKPD) Jumlah dokumen 2 Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	Kab. Pinran g	
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dan 100 % pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data 5 Analisis untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Pinran g	
					5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah aplikasi data dan 1 Aplikasi informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan oleh SKPD Jumlah Orang yang Dibina 43 Orang dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Pinran g	
					5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan 1 Buku Daerah yang Diterbitkan	Kab. Pinran g	
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah indikator 86 % program yang memenuhi target	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pinran g	
					5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen 1 Dokumen pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah yang tersusun Jumlah Kerja Sama Daerah 1 Kerja yang DikoordinasikanSama Pelaksanaannya	Kab. Pinran g	
					5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 4 Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Pinran g	
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan 100 % Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Yang Digunakan	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah laporan kemiskinan 2 Laporan dan SDGs yang tersusun	Kab. Pinran g		

					5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi 2 Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring 2 Laporan bidang pemerintahan yang tersusun Jumlah Laporan Monitoring 0 Laporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan/dokumen 2 Dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah laporan perencanaan 1 Laporan bidang pembangunan yang tersusun	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah asistensi penyusunan 2 Kali dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi 0 Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah laporan monitoring 2 Laporan bidang pembangunan manusia	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah laporan bidang 4 Laporan pembangunan manusia yang tersusun Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan	Kab. Pinrang	

					Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan 100 % pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang digunakan	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah informasi dokumen pembangunan Kabupaten Pinrang 1 buku Jumlah dokumen monitoring, 1 Laporan evaluasi dan pelaporan pajak rokok Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen rencana 1 Dokumen kerja tahunan bidang perekonomian yang disusun Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen/laporan 1 Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitasi 1 Laporan kerjasama dengan dunia usaha Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi 1 Dokumen dan monev pembangunan ekonomi kreatif Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pinrang	

					5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen rencana 1 Dokumen kerja perangkat daerah yang diasistensi Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen dan peta 1 dokumen pengembangan kawasan agropolitan yang tersusun Jumlah dokumen 1 dokumen pengembangan ekonomi kreatif Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kab. Pinrang	
			5.01.03.2.03	Persentase dokumen perencanaan 100 % pembangunan bidang infrastruktur dan kewilauahan yang digunakan	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah 5 Perangkat yang MendapatkanDaerah Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah 5 Perangkat yang mendapatkanDaerah monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan DAK yang 4 Laporan dihasilkan Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Pinrang	

					5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen 3 Dokumen perencanaan terkait kewilayahan yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah pelaksanaan 4 Kali monitoring dan evaluasi terkait bidang kewilayahan	Kab. Pinrang	
					5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan data terkait 5 Laporan perumahan dan permukiman yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Pinrang	
5.02 KEUANGAN								
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100% 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen 9 dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia dan memenuhi ketentuan	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen 3 Dokumen perencanaan yang berhasil disusun tepat waktu	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rencana 1 Dokumen kerja yang berhasil disusun tepat waktu Jumlah Dokumen RKA- SKPD 0 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen rencana 1 Dokumen kerja perubahan yang berhasil disusun tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen1 Dokumen Pelaksanaan anggaran yang berhasil disusun tepat waktu	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	



					5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran yang berhasil disusun tepat waktu Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan 3 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang berhasil disusun tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi 1 Dokumen kinerja yang berhasil disusun tepat waktu dan sesuai aturan Jumlah Laporan Evaluasi 0 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
			5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen terkait 100 % dengan administrasi Keuangan terselesaikan tepat waktu dan dalam penatausahaan /pengarsipan yang baik	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 0 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase jumlah ASN 100 % pada SKPD BKuD yang dibayarkan gajinya dalam kurun waktu 1 Tahun	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi terkait 100 % pelaksanaan tugas ASN terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase proses pelaksanaan 100 % penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan 1 Dokumen akhir tahun SKPD tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan 17 Dokumen Bulanan Triwulanan dan semesteran tersusun dengan baik dan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
			5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen 3 dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada SKPD berhasil disusun tepat waktu	5.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana 2 Dokumen Kebutuhan barang milik Daerah SKPD terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang	

					5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang milik 1 Dokumen Daerah SKPD yang tersusun denga baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
			5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administasi terkait 100 % dengan kepegawaian terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pengadaan pakaian 100 % batik dan pakaian olahraga terealisasi dengan baik	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen terkait 3 Dokumen dengan administrasi kepegawaian berhasil disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, 0 Dokumen Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase Pegawai yang 100 % dapat dimonitoring, dievaluasi dan nilai kinerjanya	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Peraturan Perundang-1 Paket undangan yang berhasil disosialisasikan	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti0 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Persentase bimbingan teknis 90 % peraturan perundang- undangan yang dalam skala prioritas dapat dilaksanakan/diikuti dengan baik	Kab. Pinrang	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan 100 % administasi umum ditindaklanjuti dengan baik	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi0 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan persentase penyediaan 100 % komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi dengan baik	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	persentase keterpenuhan atas 100 % kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah event yang berhasil 1 event diikuti/dilaksanakan dengan baik	Kab. Pinrang	
					5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase keterpenuhan atas 100 % kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	

			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan 100 % pengadaan atas kebutuhan barang milik daerah	5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda dua yang 1 Unit berhasil diadakan	Kab. Pinran g	
					5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 0 Unit Disediakan Persentase keterpenuhan atas 100 % kebutuhan mebel	Kab. Pinran g	
					5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase keterpenuhan atas 100 % kebutuhan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pinran g	
					5.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Presentase ketersediaan Software 100 % pendukung/Aplikasi dalam pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Kab. Pinran g	
					5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keterpenuhan atas 100 % sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor	Kab. Pinran g	
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa 100 % Penunjang urusan penunjang urusan Pemerintah Daerah terpenuhi dengan baik	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat surat masuk dan 1000 Surat keluar terregistraasi secara baik dan sesuai penatausahaan kearsipan	Kab. Pinran g	
					5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase terbayarkannya tagihan 100 % atas pemakaian kebutuhan listrik, komunikasi dan sumber daya air	Kab. Pinran g	
					5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa/tenaga pembersih 4 Orang yang selalu siap dalam menjamin kebersihan taman dan taman	Kab. Pinran g	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah 100 % pada SKPD yang dalam kondisi baik dan laik pakai	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas 35 Kendaraan roda dua dan roda empat dalam cakupan pemeliharaan dan laik jalan	Kab. Pinran g	
					5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 0 Unit Lainnya yang Dipelihara Persentase kecakupan atas 100 % pemeliharaan peralatan/perlengkapan dan mesin lainnya	Kab. Pinran g	
					5.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Asset tak berwujud 100 % dalam kondisi yang baik dan beroperasi secara normal	Kab. Pinran g	
					5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung kantor dalam 100 % kondisi yang terpelihara dan laik pakai	Kab. Pinran g	

					Bangunan Lainnya			
					5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan Prasarana 100 % gedung Kantor dalam kondisi baik	Kab. Pinrang	
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap W Pelaporan Keuangan daerah	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen perencanaan 100 % penganggaran sesuai aturan dan tepat waktu		5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS 2 Dokumen tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan 2 Dokumen KUA PPAS tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang dapat 43 SKPD diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA 43 Perubahan SKPD yang dapat RKA SKPD diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang dapat 43 DPA diverifikasi tepat waktu dan SKPD akurat	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD 43 DPPA yang dapat diverifikasi tepat SKPD waktu dan akurat	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penetapan APBD tepat 30 November Waktu (30 Nov )	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Peraturan 2 Dokumen Daerah dan Peraturan Bupati terkait APBD Perubahan tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi 0 Dokumen serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah dokumen terkait 2 Dokumen penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang	

			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah SKPD yang proses 44 SKPD pengajuan berkas terkait Laporan Keuangannya dapat diselesaikan secara benar dan akurat	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Kas 100 % Daerah terlaksana secara benar dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah SKPD yang dapat 43 SKPD diverifikasi pengajuan SPDnya	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah SKPD yang dapat 43 SKPD proses penatausahaan Pembiayaannya dalam kurun 1 tahun Anggaran	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang berhasil 43 SKPD diverifikasi penatausahaan keuangannya secara benar dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Pelaksanaan 100 % Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat diselesaikan secara akurat dan tepat waktu	5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	umlah SKPD yang dalam44 SKPD koordinasi dan penataan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	jumlah SKPD yang dapat 44 SKPD direkonsiliasi dan diverifikasi secara benar laporan keuangannya	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan 0 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Pinrang	
						Jumlah Laporan17 Dokumen Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, triwulanan, dan Semesteran terselesaikan dengan baik dan tepat waktu		
					5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan100 % SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat	Kab. Pinrang	

					Pemerintah Daerah	dikonsolidasi dengan baik		
					5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Peraturan 31 maret Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD terselesaikan tepat waktu (31 Maret)	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD	Jumlah SKPD yang dapat43 SKPD dianalisa secara benar dan akurat Laporan Pertanggungjawabannya	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabann Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pencatatan akuntansi 100 % dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan SKPD yang memenuhi standar akuntansi Pemerintah	Kab. Pinrang	
					5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD di Kabupaten 19 Unit yang dpat dibina dalam Kerja pengelolaan Keuangan	Kab. Pinrang	
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase bantuan keuangan100 % dapat tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran bantuan100 % keuangan dapat tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu	Kab. Pinrang	
			5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data dan 100 % Implementasinya dalam sistem informasi terkelola secara sinkronisasi	5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Pinrang	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang dalam 100 % pelaporan Pengelolaan barang milik daerah selesai tepat waktu dan akurat	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Aset//barang 100 % milik Daerah dalam tingkat akurasi yang baik dan tepat waktu	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen tentang 2 Dokumen standar harga yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang		
					5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dapat44 SKPD menyusun RKBUnya selesai tepat waktu dan terverifikasi dengan baik	Kab. Pinrang	
					5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen Inventaris barang	Kab. Pinrang	

						Kabupaten tersusun dengan baik		
					5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah Persentase barang/aset milik 100 % daerah terlindungi secara administrasi dan fisik	Kab. Pinrang	
					5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang 100 % milik dalam pengawasan dan pengendalian yang benar dan sesuai ketentuan	Kab. Pinrang	
					5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase tingkat akurasi dokumen 80 % Laporan terkait pemanfaatan, pemindahtanganan, pemindahan dan penghapusan barang milik daerah tersajikan dengan akurat	Kab. Pinrang	
					5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang berhasil 44 SKPD menyusun laporan barang milik daerah tepat waktu	Kab. Pinrang	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan asli Daerah naik 5 % dengan memperhatikan keadilan untuk semua	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan 5 % asli Daerah dari Tahun sebelumnya	5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah perencanaan 1 Paket/dokumen terkait pengelolaan Pajak daerah yang berhasil dilaksanakan dengan baik	Kab. Pinrang		
					5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis 0 Dokumen Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah  Jumlah Produk Hukum terkait 1 Dokumen dengan pengelolaan pajak yang berhasil disusun dengan baik	Kab. Pinrang	
					5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan 0 Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  Jumlah lokasi yang 12 Kecamatan menjadi titik penyebarluasan informasi terkait pajak daerah	Kab. Pinrang	
					5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit Pengelolaan Pajak Daerah Persentase jumlah 100 % sarana/prasarana terkait perpajakan dalam rencana pengadaan terlaksana dengan baik	Kab. Pinrang	
					5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase atas permohonan 100 % pendataan dan pendaftaran objek pajak terselesaikan dengan tuntas	Kab. Pinrang	

					5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Persentase pengelolaan, 100 % pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak terpelihara dengan aman (Database dan scanner)	Kab. Pinrang	
					5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan 0 Dokumen Pajak Daerah Persentase jumlah 100 % permohonan wajib pajak daerah berhasil ditetapkan	Kab. Pinrang	
					5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi 0 Layanan Pajak Daerah Persentase permohonan100 % pelayanan dan konsultasi terkait pajak daerah berhasil diselesaikan/difasilit asi	Kab. Pinrang	
					5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase verifikasi atas dokumen 100 % pelaporan pajak daerah daerah terselesaikan dengan baik dan akurat	Kab. Pinrang	
					5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Persentase /penagihan 5 % /pemungutan pajak daerah yang tertagih/terrealisasi naik dari tahun sebelumnya	Kab. Pinrang	
					5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Persentase jumlah pajak 100 % berada dalam pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan	Kab. Pinrang	
5.03 KEPEGAWAIAN								
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.01 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang 100 % tersedia	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang		
				5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang		
				5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen yang RKA- 1 Dokumen SKPD perubahan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang		



					5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen yang DPA- 1 Dokumen SKPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen yang DPA- 1 Dokumen SKPD Perubahan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja 4 Laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinran g	
			5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan 100 % dan laporan keuangan yang tersedia	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima 45 Orang Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 8 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
			5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jasa layanan dan 100 % laporan pengelolaan barang milik daerah	5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 12 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinran g	
			5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jasa penunjang urusan 100 % pemerintah daerah	5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 58 Pasang beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.05.05 Monitoring,	Jumlah Dokumen 12 Dokumen	Kab. Pinran	

					Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	g	
					5.03.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang 280 Orang Dipulangkan		
					5.03.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		
					5.03.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang 225 Orang dipindahtugaskan		
					5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan 10 Orang Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
					5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti98 Orang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	
					5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti15 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan12 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan160 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik 15 Unit/Buah daerah/asset yang bertambah/tersedia	5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang5 Paket Disediakan	Kab. Pinrang	
					5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan 100 % pemerintah daerah	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan12 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	

					5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinran g	
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang 100 % milik daerah, tersedia dan layak pakai untuk menunjang dan urusan/kegiatan pekerjaan	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas18 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara1 Paket	Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 7 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinran g	
					5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinran g	
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN berkinerja baik 75 % dan sangat baik Persentase ASN yang75 % menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	79,01 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil250 Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
					5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil5349 Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
					5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan1000 SK Pangkat ASN KP		
					5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen Pengelolaan Promosi ASN		
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		5.03.02.2.03.03 Administrtasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
					5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen Koordinasi dan Kerja Sama		

					Pelaksanaan Diklat	Pelaksanaan Diklat		
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		
					5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil 11 Laporan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus dan 95 % mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pengembangan kompetensi, manejarial dan fungsional	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.04.02.2.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi 40 Orang Lingkup Kabupaten/Kota		
					5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan 100 % yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kelitbangan 88 % bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder		5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan 2 Data Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kab. Pinrang	
					5.05.02.2.01.13 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas 3 Rekomendasi Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kab. Pinrang	
		5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kelitbangan 88 % bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder		5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab. Pinrang	
					5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kab. Pinrang	
					5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kab. Pinrang	

			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan 88 % bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Pinrang	
					5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Pinrang	
					5.05.02.2.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Pinrang	
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi 45 % yang dikembangkan	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Pinrang	
					5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah lomba kretivitas dan 1 lomba inovasi masyarakat yang diselenggarakan	Kab. Pinrang	
					5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Pinrang	
					5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Pinrang	
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN								
5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota	5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah data terkait pelaksanaan 3 0 kewilayahan perbatasan yang tersedia	5.06.02.2.02.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kab. Pinrang		
6.01 INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang		
				6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Pinrang		

					6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian1 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi2 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
			6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian 100 % Pelayanan Administrasi Keuangan	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang 65 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen1 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase ketercapaian 100 % pellayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen Barang Milik Daerah sesuai analisis Kebutuhan	Kab. Pinrang	

			Perangkat Daerah		SKPD			
					6.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 Dokumen dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	
			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 65 pasang beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan 4 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan 22 Kegiatan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
					6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti 2 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti40 orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang	
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Instalasi1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi1 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan 3 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak 15 Kegiatan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 5 jenis dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 1 Paket yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 55 Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang yang 100 % tersedia	6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 2 Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pinrang	

					6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 4 Unit Lainnya yang disediakan	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1 Unit Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan 100 % pemerintahan daerah yang tersedia	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan 1430 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 24 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan 27 Unit Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 12 Unit Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pinrang	
					6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Paket Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil 85 % pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Hasil temuan yang 85 % ditindak lanjuti	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil 71 Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
				6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil 70 Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota		
				6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu 20 lhp Laporan Kinerja	Kab. Pinrang		
				6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu 8 LHP Laporan Keuangan			
				6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil 20 LHP Pengawasan Desa	Kab. Pinrang		
				6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan 1 Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk			



					6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Temuan hasil85 % pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil 24 LHP Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pinrang	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan 50 % Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun			
					6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun		
		6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelenggaraan 50 % Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah 3 perangkat yang Dilakukan daerah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
					6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah 43 perangkat yang Dilakukan daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
					6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, 3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
					6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang 43 OPD dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
7.01 KECAMATAN								

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 % 50 % 100 % 100 % 50 % 100 %	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 10 Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dan terlapor sesuai dengan aturan Jumlah Dokumen 100 % Perencanaan yang Termutakhirkan Laporan/Dokumen yang 6 Kegiatan tersusun tepat waktu persentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Ketercapaian 100 % Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase 100 % Terselesaikannya Perencanaan, Pengganggaran ,dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah Pesentase Dokumen100 % Perencanaan Yang Tersusun Presentase Dokumen100 % Perencanaan Tepat Waktu Presentase Jumlah100 % Dokumen yang tersusun Tepat waktu Presentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dimutakhirkan Jumlah Dokumen yang 2 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Penyusunan Dokumen 2 dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terselesaikan dengan baik dan Tepat Waktu Laporan / Dokumen yang 2 Dokumen tersusun tepat waktu Laporan/Dokumen yang3 Kegiatan tersusun tepat waktu Penyusunan Dokumen 6 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan4 Dokumen Dokumen Perencanaan Efektif Dan Efesiens	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g
				7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD 0 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD1 Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen RKA 1 dokumen Tersusun dengan baik dan tepat waktu Jumlah Dokumen RKA yang 1 Dokumen	Kab. Pinran g

						termutakhirkan Jumlah Dokumen RKA yang 1 Kegiatan termutakhirkan Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Laporan / Dokumen yang 1 Dokumen tersusun tepat waktu Laporan/Dokumen yang 1 Dokumen tersusun tepat waktu Persentase Penyusunan1 Dokumen Dokumen Perubahan Anggaran Efektif Dan Efesiens Persentase Penyusunan1 Dokumen Dokumen RKA Efektif Dan Efesiens Tersedianya RKA Di 1 dokumen Kecamatan Cempa		
					7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 5 orang / RKA-SKPD dan Laporan kegiatan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen RKA SKPD yang tersusun dan tepat waktu Jumlah Dokumen perubahan 1 Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen Perubahan 1 Kegiatan RKA yang termutakhirkan Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Tersedianya Dokumen 1 dokumen Perubahan RKA Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang	
					7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen yang tersusun 1 Dokumen tepat waktu Jumlah Dokumen DPA- SKPD 0 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	

						Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 8 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD1 Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen DPA yang 1 Kegiatan termutakhirkan Jumlah Dokumen DPA yang 1 dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Persentase Penyusunan1 Dokumen Dokumen Perubahan Anggaran Efektif Dan Efesiens		
					7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen yang tersusun5 orang / kegiatan tepat waktu Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 9 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen DPA SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan 1 Kegiatan DPA yang termutakhirkan Jumlah Dokumen Perubahan 1 dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang	

					7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang 3 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 3 Kegiatan tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 5 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Laporan Capaian 0 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian 6 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian 2 laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Rencana Kerja yang 3 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Penyampaian Laporan 6 Dokumen Perencanaan,Penga nggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kab. Pinran g	
					7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen yang dievaluasi 1 Dokumen tepat waktu Jumlah Dokumen Evaluasi 1 Kegiatan Kinerja Perangkat Daerah yang termutakhirkan Jumlah Laporan Evaluasi 0 Laporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinran g	

			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran yang terealisasi 12 Bulan tepat waktu dan Kinerja administrasi Keuanga yang terarah Anggaran yang terealisasi 12 Bulan tepat waktu dan kinerja admnintrasi keuangan yang terarah Jumlah Gaji dan Tunjangan 12 Bulan ASN yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah Jasa Administrasi 12 Bulan Keuangan yang terbayarkan tepat waktu Pelayanan Administrasi 12 Bulan Perkantoran yang Terlaksana Secara efektif Persentase Ketercapaian 100 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan12 Bulan Administrasi Keuangan Persentase tercapainya100 % Administrasi Keuangan yang baik	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan Kecamatan Cempa Jumlah Gaji dan 12 Bulan Tunjangan ASN yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah Gaji dan 1 Tahun Tunjangan ASN yang termutakhirkan Jumlah Orang yang 0 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 10 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang12 Bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 12 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 23 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran 12 Bulan Gaji Dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Terbayarkan Tepat Waktu	Kab. Pinran g	
				Persentase Terlaksananya 100 % Administrasi keuangan perangkat daerah Presentase ketercapaian 100 % pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah Presentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Presentase Ketercapaian 100 % Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Terbayarnya biaya jasa tenaga 1 Tahun administrasi pelaksanaan tugas ASN		Terbayarnya Gaji dan 1 Tahun Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan 12 bulan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan 12 Bulan Tunjangan ASN		

					7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil 1 Tahun Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyediaan 12 bulan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Penyediaan 12 bulan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terpenuhi sesuai aturan dan tepat waktu Meningkatnya Administrasi 1 Tahun Pelaksanaan Tugas ASN Meningkatnya Administrasi 3 Kegiatan Pelaksanaan Tugas ASN Meningkatnya Administrasi 12 Bulan Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Ketercapaian 12 Bulan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaian 100 % Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terbayarnya biaya jasa 1 Tahun tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN Terbayarnya biaya jasa 12 bulan tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN Terbayarnya biaya jasa 12 Bulan tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN Terbayarnya jasa tenaga 12 Bulan administrasi pelaksanaan tugas ASN Terpenuhinya ATK dan 12 bulan Makan Minum Rapat Terpenuhinya ATK, Makanan 12 bulan dan Minuman Rapat dan Iuran BPJS Non ASN terpenuhinya barang dan 12 Bulan jasa administrasi tugas ASN Terpenuhinya makan minum 12 Bulan	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
--	--	--	--	--	---	---	--	--

						<div>rapat, ATK dan luran BPJS kesehatan bagi Non ASN</div> <div>tersedianya administrasi 12 Bulan</div> <div>perkantoran sesuai analisa kebutuhan</div> <div>Tersedianya Administrasi 12 Bulan</div> <div>Perkantoran sesuai Analisa Kebutuhan</div> <div>Tersedianya biaya jasa 12 Bulan tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN di Kecamatan Cempa</div> <div>Tersedianya biaya jasa 12 Bulan tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN di Kelurahan Cempa</div>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



					7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan Kecamatan Cempa jasa administrasi keuangan 12 Bulan yang terbayarkan tepat waktu Jasa administrasi keuangan 12 Bulan yang terbayarkan tepat waktu Jasa Administrasi keuangan 1 Tahun yang terbayarkan tepat waktu Jasa Administrasi keuangan 12 Bulan yang terbayarkan tepat waktu Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan yg terbayarkan tepat waktu Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan yg terbayarkan tepat waktu Jumlah Dokumen0 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen1 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen6 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen 50 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Honorarium12 bualn Pelaksanaan Keuangan yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Honorarium12 Bulan Pelaksanaan Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
						Jumlah jasa administrasi 12 Bulan keuangan yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah Pelaksana 12 bulan Penatausahaan Keuangan terbayarkan dan tepat waktu Terbayarnya biaya jasa 1 Tahun tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN Terlaksananya Laporan1 Kegiatan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan tepat waktu Terlaksananya 12 Bulan Penatausahaan Keuangan yang Baik Terlaksananya 1 Tahun Penatausahaan Keuangan		

						Yang Baik Tersedianya Pelayanan 12 Bulan Administrasi Perkantoran Di Kelurahan Cempa		
					7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 1 Tahun tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 12 Bulan tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Laporan Akhir Tahun 1 Laporan terselesaikan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan 0 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen akhir tahun yang tersusun tepat waktu Terlaksananya Laporan Akhir 1 LS Tahun SKPD Tersedianya Laporan Akhir 1 dokumen Tahun SKPD Tersusunnya Dokumen 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun Secara Efektif Dan Efesiens	Kab. Pinrang	

					7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang12 Bulan tersusun Bulanan/Triwulan /Semesteran dengan akuntabel Jumlah Dokumen yang 1 dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 1 Tahun tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang12 Bulan tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen yang 12 Dokumen tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan 0 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan 3 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan 17 Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan 4 Doumen Semesteran yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah Laporan Semesteran 2 Laporan terselesaiakn sesuai aturan dan tepat waktu Persentase Penyusunan100 % Dokumen Laporan Secara Efektif Dan Tepat Waktu Terlaksananya Laporan1 Kegiatan Keuangan dengan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	
					7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen 2 Dokumen Laporan Realisasi Semesteran SKPD		

			7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset yang dikelola 12 Bulan dengan baik Jumlah Jasa Pengelolaan 5 Laporan Barang dan Asset yang terbayarkan tepat waktu serta laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun tepat waktu Jumlah laporan Barang Milik 1 Laporan Daerah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tersusunnya 100 Pesersen Perencanaan Barang Milikdaerah sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang	
				Jumlah Persentase Barang dan 12 Bulan Aset Daerah yang Terinventarisasi Persentase Ketercapaian 100 % Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Ketercapaian 100 % Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Terlaksananya 100 % Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah Terbayarnya biaya jasa tenaga 12 Bulan administrasi pelaksanaan tugas ASN Terpenuhinya Jasa Pejabat 12 bulan Pengadaan, Pengurus dan Penyimpan Barang Tersusunnya Laporan Barang3 Laporan Milik Daerah Tepat Waktu				

					<div>7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</div>	<div>Jumlah Dokumen yang12 Bulan tersusun Bulanan/Triwulan /Semesteran dengan akuntabel  Jumlah jasa pengelolaan 12 bulan dan laporan pengelolaan dan barang dan asset yang tersusun dan terbayarkan sesuai aturan dan tepat waktu  Jumlah laporan Barang Milik 12 Dokumen Daerah yang terlapor sesuai aturan dan tepat waktu  Jumlah Laporan Barang 12 Bulan Milik Daerah yang tersusun  Jumlah Laporan Rekonsiliasi 0 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  Jumlah Laporan Rekonsiliasi 4 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  Jumlah Laporan Rekonsiliasi 12 bulan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  Jumlah Laporan Rekonsiliasi 12 Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  Jumlah Persentase barang 12 Bulan dan aset daerah yang terinventarisasi sesuai aturan yang berlaku  Jumlah Persentase Barang 12 Bulan dan Aset Daerah yang terinventarisasi  terpenuhinya Jasa Pejabat 12 Bulan Pengadaan, Pengurus dan Penyimpan Barang Terpenuhinya Jasa pengurus 12 bulan barang pembantu Terpenuhinya Jasa pengurus 12 Bulan barang pembantu Tersusun Administrasi12 Bulan Barang Milik Daerah Tersusunnya Administrasi 1 Tahun Barang Milik Daerah</div>	<div>Kab. Pinrang</div>	
					<div>7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</div>	<div>Tersedianya Penatausahaan 2 Orang Barang Milik Daerah Tersedianya Penatausahaan 12 Bulan</div>	<div>Kab. Pinrang</div>	

						Barang Milik Daerah		
			7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti 10 Orang Bimtek dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen Administrasi 100 % Kepegawaian yang Termutakhirkan Jumlah Presentase Pelayanan 100 % Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien JUmlah Presentase Pelayanan 12 Bulan Administrasi Kepegawaian Daerah Yang terlaksana secara efektif dan efisien persentase administrasi100 % kepegawaian perangkat daerah Persentase Ketercapaian 100 % Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pelayanan100 % Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien Persentase Pemenuhan 100 % Administrasi Terpenuhi Pesentase Pelaksanaan 100 % Administrasi kepegawaian perangkat daerah Presentase Pelayanan100 % Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien Presentase Pelayanan 12 Bulan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien tersedianya aparatur Sipil 100 % Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Batik yang 1 LS di adakan sesuai analisa kebutuhan 1. Jumlah Pakaian Batik yang 12 Bulan di adakan sesuai analisa kebutuhan jumlah pakaian batik dan 12 Pasang olahraga yang tersedia sesuai analisis kebutuhan Jumlah pakaian dinas beserta 10 Stel perlengkapannya yang diadakan Jumlah pakaian dinas beserta 25 Stel perlengkapannya yang diadakan jumlah pakaian hari-hari 100 % tertentu sesuai kebutuhan Jumlah pakaian seragam yang 10 Buah diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah pakaian seragam yang 35 Buah diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Pakaian Dinas 0 Paket beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas 3 Paket beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas 7 Paket beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pengadaan Baju14 Pasang Olahraga Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah Pengadaan Baju23 Pasang Olahraga Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah pengadaan Pakaian 90 Pasang Dinas yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Presentase Pemenuhan Sarana 1 LS Pakaian Olah Raga Presentase Pemenuhan Saran 1 Ls Pakaian Olahraga ASN	Kab. Pinran g	
						Tersediannya Pakaian Dinas 1 LS ASN Tersedianya Pakaian Dinas 2 kegiatan ASN Di Kecamatan Cempa Tersedianya Pakaian Dinas 2 Kegiatan ASN Di Kecamatan Cempa		

					7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi 2 Dokumen kepegawaian yang tersusun Jumlah Dokumen Pendataan 0 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan 2 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan 12 bulan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Laporan 12 bulan Kepegawaian yang tersusun Terlaksananya Laporan 1 Kegiatan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Ketercapaian 100 % Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen 2 Dokumen Laporan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, 0 Dokumen Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase ASN Kinerja 1 LS Kepegawaian	Kab. Pinrang	

					7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1. Jumlah Bimbingan Teknis 1 LS Implementasi Peraturan Perundang- undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan 1. Jumlah Bimbingan Teknis 12 Bulan Implementasi Peraturan Perundang- undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan 1. Jumlah Pakaian Batik 12 Bulan yang di adakan sesuai analisa kebutuhan Bimbingan Teknis 12 Bulan Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kelurahan Cempa Jumlah Aparatur Sipil 2 Orang Negara Yang Memiliki Kecakapan Jumlah aparatur Sipil 2 Orang Negara Yang Memiliki Kecapan Jumlah ASN yang mengikuti 6 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan sesuai analisa kebutuhan Jumlah ASN yang mengikuti 3 Orang Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Perundang- undangan sesuai analisa kebutuhan Jumlah ASN yang mengikuti 10 Orang Bimtek dan implementasi peraturan perundangundangan Jumlah Bimbingan Teknis 2 kali Implementasi Peraturan perundang undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan Jumlah Bimbingan Teknis 2 kali Implementasi Peraturan Perundang undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan Jumlah Bimtek yang 1 kegiatan	Kab. Pinran g	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--



						<div>dilaksanakan secara efektif dan efisien Jumlah Bimtek yang 1 Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien Jumlah Bimtek yang 6 Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien jumlah bimtek yang2 kali terlaksana sesuai kebutuhan Jumlah Orang yang0 Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang2 Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang3 Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang7 Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang9 Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang10 Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang20 Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah perjalanan dinas 2 kali yang terlaksana sesuai kebutuhan jumlah perjalanan dinas 15 Kali yang terlaksana sesuai kebutuhan Peningkatan SDM Aparatur 12 Bulan</div>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Persentase Aparatur Sipil 100 % Negara Yang Memikat Kecakapan Dan Keterampilan Persentase ASN yang 10 Kegiatan meningkat kecakapan dan keterampilannya Persentase Bimbinga Teknis 100 Pesersen dilaksanakan sesuai kebutuhan Presentase Aparatur Sipil 12 Bulan Negara yang Meningkatkan Kecakapan dan Keterampilan Presentase Aparatur Sipil 1 Tahun Negara Yang Meningkatkan Kecakapan dan Keterampilannya tersedianya aparatur Sipil 100 % Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan</p>		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>Jumlah Administrasi Umum 12 Bulan Terpenuhi Tepat Waktu Jumlah Kegiatan yang100 % Terkoordinasikan Secara Efektif dan Efesien Pemenuhan Pelayanan 12 Bulan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan Persentase Ketercapaian 100 % Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan100 % pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan Persentase Pemenuhan100 % Pelayanan Administrasi Publik sesuai analisa kebutuhan Persentase Tersedianya100 % Pelayanan Administrasi umum perangkat Daerah Presentase Pemenuhan100 % pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan Presentase Pemenuhan100 % Pelayanan admnistrasi publik sesuai analisa kebutuhan Tersedianya alat kelengkapan 1 Tahun komputer sesuai kebutuhan Tersedianya peralatan dan 12 Bulan perlengkapan kantor</p>	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<p>Jumlah Bangunan Gedung 2 Bangunan Kantor yang terpenuhi Penerangannya Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah gedung kantor yang 2 Bangunan memiliki instalasi listrik yang memadai Jumlah Komponen instalansi 1 Kegiatan listrik / penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai kebutuhan jumlah komponen instalasi 5 buah listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah komponen instalasi 5 buah Listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Komponen instalasi 3 buah Listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Komponen 0 Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen 1 Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Persentase 12 Bulan Pemenuhan Penerangan Gedung Pemenuhan Kebutuhan12 Bulan</p>	Kab. Pinrang	

				sesuai analisa kebutuhan		Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket penyediaan 3 buah peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan Presentase Peralatan dan 12 Bulan Perlengkapan Kantor Tersedian Persentase Peralatan 12 Bulan dan Perlengkapan Kantor tersedianya alat kelengkapan 3 buah komputer sesuai kebutuhan Tersedianya alat kelengkapan 1 Tahun komputer sesuai kebutuhan kantor	Kab. Pinrang	
					7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah 0 Paket Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket Tangga yang Disediakan Terlaksananya Persentase 1 LS Peralatan Rumah tangga Terlaksananya Persentase 1 LS Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah 1 Kegiatan Tangga sesuai kebutuhan Tersedianya peralatan rumah 1 Paket tangga yang memadai	Kab. Pinrang	

					7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang 0 Paket Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang 2 Paket Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang 3 Paket Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang 5 Paket Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah paket cetakan dan 1 Ls penggandaan penunjang administrasi umum sesuai rencana kebutuhan Jumlah paket cetakan dan 5 paket penggandaan penunjang administrasi umum sesuai rencana kebutuhan Persentase Ketercapaian 100 % Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhinya bahan cetak 7562 Lembar dan penggandaan sesuai analisa kebutuhan Terpenuhinya bahan cetak 12 Bulan dan penggandaan sesuai analisa kebutuhan Terpenuhinya Bahan cetak 12 bulan dan penggandaan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
						Terpenuhinya Bahan cetak 12 Bulan dan penggandaan sesuai analisa kebutuhan Terpenuhinya Bahan Cetak 12 bulan dan Penggandaan sesuai analisa kebutuhan Tersedianya Barang Cetakan 12 Bulan dan Penggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Tersedianya jumlah barang 1 LS cetakan dan penggandaan secara efektif		

					7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundanga n	Jumlah Bahan Bacaan Surat 12 bulan Kabar disediakan sesuai kebutuhan Jumlah bahan bacaan yang 12 Bulan tersedia sesuai analisa Jumlah Bahan Bacaan yang 12 Bulan Tersedia Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah Bahan Bacaan Yang 1 Tahun Tersedia Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen Bahan0 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan1 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan2 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan12 Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan12 Ekslamper Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan meningkatkan wawasan12 Eksemplar Aparatur Sipil Negara meningkatnya wawasan 12 Eksemplar aparatur Tersedianya bahan bacaan 1 Kegiatan ASN DI Kelurahan Cempa tersedianya bahan bacaan 12 Eksemplar dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan 1 Tahun dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan 12 Bulan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bulan Surat Kabar/Majalah	Kab. Pinran g	
					7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material 0 Paket yang Disediakan Persdentase Penyediaan100 % Bahan/Material Sesuai Analisa Kebutuhan Persentase Penyediaan Bahan 100 % Material Untuk Gedung Kantor Perswnatse Pelayanan	Kab. Pinran g	

						Publik 100 % Secara Efektif Dan Efesiens Tersediannya Persentase12 Bulan Bahan/Material secara efektif		
					7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparat Kelurahan 1 Ls dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Kegiatan yang 12 Bulan terkoordinasikan secara efektif dan efesien Jumlah Keikutsertaan Aparat 25 Kegiatan Kecamatan dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Laporan 0 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 3 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 10 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 30 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan Dinas 12 bulan yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan Jumlah Perjalanan Dinas 12 Bulan yang terkoordinasi Sesuai Analisa Kebutuhan Secara Efektif Dan Efesiens Jumlah Perjalanan Dinas 12 Bulan yang terkoordinasi SEsuai Analisa Kebutuhan Secara Efektif Dan Efesiens Jumlah Perjalanan dinas 1 Tahun yang terlaksana Jumlah perjalanan dinas 1 Tahun yang terlaksanan sesuai kebutuhan Jumlah perjalanan dinas 12 Bulan yang terlaksanan sesuai kebutuhan jumlah perjalanan dinas 2 paket yang terlaksana	Semua Kab/K ota Kab. Pinran g	

						sesuai kebutuhan		
						jumlah perjalanan dinas 40 kali yang terlaksana sesuai kebutuhan jumlah perjalanan dinas 50 kali yang terlaksana sesuai kebutuhan jumlah perjalanan dinas 50 Kali yang terlaksana sesuai kebutuhan Jumlah perjalanan dinas 12 bulan yang terlaksana sesuai kebutuhan Jumlah Perjalanan Dinas 12 Bulan yang terlaksana sesuai kebutuhan Jumlah Perjalanan Dinas 12 Bulan yang terlaksana sesuai kebutuhan di Keluarahan Cempa Terlaksananya kegiatan yang 12 Bulan terigisterasi dan terkoordinasi sesuai dengan analisa kebutuhan Terlaksananya Rapat 12 BULan Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat 1 Tahun Koordniasi dan Konsultasi		

			<div>7.01.01.2.07</div> <div>Pengadaan</div> <div>Barang</div> <div>Milik Daerah</div> <div>Penunjang</div> <div>Urusan</div> <div>Pemerintah</div> <div>Daerah</div>	<div>Jumlah barang milik daerah</div> <div>yang 4 Unit diadakan</div> <div>Jumlah Pengadaan</div> <div>Peralatan dan 17 Unit</div> <div>Mesin kantor yang</div> <div>diadakan sresuai</div> <div>analisa kebutuhan</div> <div>Jumlah peralatan dan mesin</div> <div>100 % yang diadakan sesuai</div> <div>analisa</div> <div>kebutuhan</div> <div>Jumlah Persentase</div> <div>Pemenuhan 100 %</div> <div>Peralatan Gedung</div> <div>Pemenuhan Pengadaan</div> <div>Barang 100 %</div> <div>Kantor sesuai analisa</div> <div>Kebutuhan</div> <div>Persentase ketercapaian100</div> <div>%</div> <div>pelayanan penunjang</div> <div>urusan pemerintahan</div> <div>daerah</div> <div>Persentase Ketercapaian100</div> <div>%</div> <div>Pengadaan Barang Milik</div> <div>Daerah</div> <div>Penunjang Urusan</div> <div>Pemerintahan</div> <div>Daerah</div> <div>Persentase Ketercapaian100</div> <div>%</div> <div>Pengadaan Barang Milik</div> <div>Daerah</div> <div>Penunjang Urusan</div> <div>Pemerintah</div> <div>Daerah</div> <div>Persentase Pengadaan</div> <div>barang 100 %</div> <div>milik daerah penunjang</div> <div>urusan</div> <div>pemerintah daerah</div> <div>Pesentase Pengadaan</div> <div>Barang100 %</div> <div>Milik Daerah Terpenuhi</div> <div>Sesuai</div> <div>Analisa Kebutuhan</div> <div>Presentase ketercapaian100</div> <div>%</div> <div>pelayanan penunjang</div> <div>urusan pemerintahan</div> <div>daerah</div>	<div>7.01.01.2.07.02</div> <div>Pengadaan</div> <div>Kendaraan Dinas</div> <div>Operasional atau</div> <div>Lapangan</div>	<div>Jumlah Unit Kendaraan</div> <div>Dinas 1 Unit</div> <div>Operasional atau Lapangan</div> <div>yang</div> <div>Disediakan</div>	<div>Kab.</div> <div>Pinran</div> <div>g</div>	
--	--	--	---	---	--	---	--	--



					7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan 1 Kegiatan Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah Mebel Yang Diadakan 1 Kegiatan Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah Meubelair yang1 Unit diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Meubelair yang5 Unit diadakan sesuai analisa kebutuhan jumlah meubeler yang3 buah diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah meubeler yang 12 Bulan diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah meubeler yang100 % diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Meubeler yang 1 Kegiatan diadakan sesuai analisa Kebutuhan di Kecamatan Cempa Jumlah Meubeler yang 1 Kegiatan diadakan sesuai analisa Kebutuhan di Kelurahan Cempa Jumlah Paket Mebel yang 0 Unit Disediakan Jumlah Paket Mebel yang 1 Unit Disediakan Jumlah Paket Mebel yang 2 Unit Disediakan Jumlah Paket Mebel yang 3 Unit Disediakan Jumlah Paket Mebel yang 5 Unit Disediakan Jumlah Paket Mebel yang 7 Unit Disediakan Jumlah Pengadaan Mebel 20 Unit yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Pengadaan Meubeler 4 Unit yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Pengadaan Yang 1 Ls Diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan jumlah peralatan dan mesin 5 unit yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Persentase Pemenuhan 1 LS Peralatan Gedung Kantor Jumlah tercapainya laporan 1 Ls	Kab. Pinrang	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	-----------------	--

						Barang Milik Daerah yang di susun		
					7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan barang milik 1 Ls daerah yang di susun jumlah meubeler yang5 buah diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Pengadaan Peralatan 1 Is dan Mesin lainnya diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Pengadaan Peralatan 1 Is dan Mesin Lainnya sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	

						Jumlah Pengadaan Peralatan 2 Unit dan Mesin Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah Pengadaan Yang 3 Unit Diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah peralatan dan mesin 12 Bulan yang diadakan sesuai analisa kebutuha jumlah peralatan dan mesin 2 kegiatan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan jumlah peralatan dan mesin 4 buah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan jumlah peralatan dan mesin 5 buah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah peralatan dan mesin 100 % yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Peralatan dan Mesin 1 Unit yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Peralatan dan Mesin 5 Unit yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Persentase Pemenuhan 1 LS Peralatan Gedung Kantor Jumlah Unit Peralatan dan 0 Unit Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan 1 Ls Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan 1 Unit Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan 2 Unit Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan 3 Unit Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan 5 Unit Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan 25 Unit Mesin Lainnya yang Disediakan Tersediaanya Persentase 12 Bulan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Persentase1 Tahun Peralatan dan Mesin Lainnya		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

					7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana 12 bulan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana 5 buah Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan jumlah sarana dan prasarana2 buah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Sarana dan 0 Unit Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan 1 Unit Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tersedia dan terpeliharanya 2 buah sarana dan prasarana yang baik	Kab. Pinrang	
					7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor 1 LS diadakan sesuai analisa kebutuhan jumlah sarana dan prasarana12 Bulan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana 12 bulan Pendukung Gedung Kantor diadakan sesuai dengan Analisa Kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Sarana dan 0 Unit Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan 1 Unit Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan 3 Unit Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Pengadaan Sarana 1 LS dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab. Pinrang	

			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum 12 Bulan Kantor tersedia secara optimal Fasilitas Pelayanan Umum 100 % Kantor tersedia secara optimal Jumlah Bulan ketersediaan jasa 12 Bulan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Rekening Listrik dan 12 Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu Jumlah Rekening yang 12 Bulan Terbayarkan Persentase Ketercapaian Jasa 100 % Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaian Jasa 100 % Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah rekening Layanan 12 Bulan Internet yang terbayarkan tepat waktu 8000000 12 Bulan Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Layanan Rekening 1 Tahun Listrik Yang Terbayarkan Tepat Waktu Jumlah Listrik terbayarkan 12 bulan setiap bulan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
				Persentase Terbayarnya jasa 100 % penunjang urusan pemerintah daerah Presentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Terpenuhinya Jasa Kantor 12 Bulan Tersedianya bahan dan Jasa 12 Bulan Penunjang Urusan Pemerintah Tersedianya Bangunan Kantor 12 Bulan yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi		Jumlah Pembayaran 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening Layanan 12 Bulan Listrik dan Internet yang terbayarkan Tepat Waktu Jumlah rekening Layanan 2 rekening Listrik yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Rekening Layanan 12 Bulan Listrik yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Rekening Layanan 12 Bulan Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu jumlah rekening listrik dan 12 Bulan internet yang terbayarkan Jumlah rekening Listrik dan 12 bulan Internet yg dibayarkan Jumlah Rekening Listrik yang 1 Gedung Terbayarkan Tepat Waktu Jumlah Rekening Listrik yang 1 Rekening Terbayarkan Tepat Waktu Jumlah Rekening Listrik yang 2 Rekening Terbayarkan Tepat Waktu Jumlah rekening listrik yang 12 Bulan terbayarkan tepat waktu		

						di Kelurahan Lanrisang Jumlah Rekening yang12 Bulan terbayarkan Jumlah Rekening yang 100 % terbayarkan Jumlah Rekening yang 12 Rekening terbayarkan tepat waktu Jumlah yang terbayarkan 12 Bulan listrik di kantor camat		
					7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Jasa Peralatan dan 12 Bulan Perlengkapan kantor	Kab. Pinrang	

					<div>7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div>	<div>1. Jumlah alat kebersihan dan 12 Bulan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan jumlah alat kebersihan dan 12 Bulan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan jumlah alat kebersihan dan 12 bulan jasa tenaga pembersih yang terbayarkan tepat waktu jumlah alat kebersihan dan 12 Bulan jasa tenaga pembersih yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Jasa pelayanan 12 Bulan Kantor Terbayarkan Tepat Waktu jumlah jasa pelayanan umum 12 Bulan kantor yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 2 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 9 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah paket pembayaran 12 bulan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan Jumlah paket pembayaran 12 Bulan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan Jumlah Penyediaan Jasa 12 bulan Pelayanan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu terlaksananya jasa pelayanan 12 Bulan umum kantor Terlaksananya Jasa Pelayanan 1 Tahun Umum Kantor</div>	<div>Kab. Pinrang</div>	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

						<p>Terlaksananya Jasa Pelayanan 12 Bulan Umum Kantor</p> <p>Tersedianya Bangunan Kantor 12 Bulan yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi</p> <p>Tersedianya Jasa Pelayanan 12 Bulan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu</p>		
			<p>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Fasilitas Pelayanan Umum 12 Bulan Kantor tersedia secara optimal</p> <p>Fasilitas Pelayanan Umum 15 Buah Kantor tersedia secara optimal</p> <p>Fasilitas Pelayanan Umum 100 % Kantor tersedia secara optimal</p> <p>Jumlah Kendaraan Dinas 12 Bulan Operasional yang Layak Jalan</p> <p>Persentase ketercapaian 100 % pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>Persentase Ketercapaian 100 % pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah</p> <p>Persentase Ketercapaian 100 % Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>	<p>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit</p> <p>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit</p> <p>tersedia dan terpeliharanya 12 bulan kendaraan dinas / operasional dengan baik</p>	<p>Kab. Pinrang</p>	



				<div>Persentase Pemeliharaan 100 % Barang Milik Daerah Terpelihara PersentaseTerpeliharanya 100 % barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Presentase Ketercapaian 100 % barang milik daerah yang terpelihara Presentase Ketercapaian 100 % Pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Kendaraan 3 Kegiatan Dinas dan Bangunan Gedung Kantor Tersedia dan terpeliharanya 100 % kendaraan dinas operasional yang baik</div>				
					<div>7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</div>	<div>Jumlah Kendaraan Dinas 0 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan 5 Unit dinas/operasional yang tepelihara dengan baik Jumlah Kendaraan Operasional 1 Tahun yang layak jalan jumlah tercapainya 12 bulan pemeliharaan,bia ya pemeliharaan,paj ak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Terpeliharanya Kendaraan Dinas 1 Tahun Operasional atau Lapangan Terpeliharanya Kendaraan</div>	<div>Kab. Pinrang</div>	

						Dinas 12 Bulan Operasional atau Lapangan tersedia dan terpeliharanya 12 bulan kendaraan dinas / operasional dengan baik tersedia dan terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas operasional yang baik tersedia dan terpeliharanya 12 Bulan kendaraan dinas operasional yang baik Tersedia dan terpeliharanya 100 % kendaraan dinas operasional yang baik tersedia dan terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas yang baik tersedia dan terpeliharanya 1 unit kendaraan yang baik Tersedianya dan terpeliharanya 12 Bulan kendaraan dinas operasional yang baik		
					7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peningkatan 2 Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Peralatan dan Mesin 0 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 1 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 2 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 3 Unit Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin 5 Unit Lainnya yang Dipelihara Persentase Jumlah 100 % Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara Persentase Pemeliharaan 100 % Barang Milik Daerah Terpeliharanya peralatan dan 12 Bulan mesin lainnya Terpeliharanya Peralatan dan 12 Bulan Mesin Lainnya tersedia dan terpeliharanya 12 bulan peralatan dan mesin dengan baik tersedia dan terpeliharanya 5 buah	Kab. Pinrang	

						peralatan dan mesin kantor yang baik tersedia dan terpeliharanya 2 buah peralatan dan mesin yang baik tersedia dan terpeliharanya 2 buah peralatan dan mesin yang baik tersedia dan terpeliharanya 12 Bulan Peralatan dan Mesin yang baik		
					7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap 12 Bulan lainnya		
					7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung 1 Bangunan Kantor Yang Terpeliharaan Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung kantor yang 2 Gedung terpelihara secara rutin Jumlah Gedung Kantor yang 12 Bulan Terpelihara Secara Rutin jumlah 2 bangunan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya tersedia dan terpeliharanya 1 kegiatan gedung kantor dengan baik	Kab. Pinrang	
						tersedia dan terpeliharanya 12 bulan gedung kantor dengan baik tersedia dan terpeliharanya 1 unit gedung kantor yang baik Tersedia dan terpeliharanya 100 % gedung kantor yang baik Tersedia dan Terpeliharanya 12 Bulan Gedung Kantor yang baik		

					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang 1 Tahun Terpelihara Secara Rutin Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlahsarana dan prasarana 7 Unit gedung kantor yang tepelihara dengan baik Persentase Pemeliharaan Sarana 100 % Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persentase Pemeliharaan Sarana 100 % Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Kab. Pinrang	
					7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tersedia dan terpeliharanya 12 bulan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kab. Pinrang	
			7.01.01.2.13 Penataan Organisasi		7.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Analisa 1 Kegiatan Jabatan	Kab. Pinrang	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan Persentase ketercapaian 100 % pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan 100 % Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan 1 Kegiatan Musrenbang terlaksana dengan baik Koordinasi penyelenggaraan 1 Kegiatan kegiatan tingkat kecamatan terlaksana secara optimal Pelaksanaan Musrembang 1 Kegiatan Persentase Pelaksanaan 100 % Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan 100 % Koordinasi Kegiatan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan 100 % Koordinasi Kegiatan Pemerintah ditingkat	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan 1 Kegiatan Musrenbang terlaksana dengan baik Jumlah kegiatan yang 1 Kegiatan terkoordinasi sesuai analisa kebutuhan Jumlah Kegiatan yang 12 Bulan terkoordinasi sesuai analisa kebutuhan Jumlah Laporan 0 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan 1 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Kab. Pinrang		

		dengan baik Persentase Usulan40 % Musrenbang Kecamatan DuampanuaY ang terakomodir Presentase Ketercapaian 100 % Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik		Kecamatan Persentase Tercapaiannya 100 % Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Tersedianya Dana Koordinasi 100 % Sinergi Perencanaan		Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Musyawarah 1 Laporan Perencanaan Pembangunan terlaksana dengan baik dan tepat waktu Persentase Pelaksanaan 100 % Musrenbang Tingkat Kecamatan Terpenuhi Terpenuhinya kegiatan 1 Kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Tersedianya Dana Koordinasi 1 Kegiatan Sinergi Perencanaan pada penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Batu Lappa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Cempa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi Persentase Pemberdayaan Masvarakat	100 % 100 % 100 % 50 % 50 % 50 %	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 50 % 50 % 50 %	Evaluasi Kelurahan 1 Kegiatan terlaksana secara optimal Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan Pemberdayaan yang diadakan Jumlah Kegiatan 29 Kegiatan Pemberdayaan yang diadakan Jumlah Peningkatan SDM 100 % Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan 100 % Kelurahan Persentase Pemberdayaan 50 % Masyarakat Desa Dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik Dan Ekonomi Persentase Pemberdayaan 100 % Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Persentase Pemberdayaan 100 % Masyarakat Kelurahan dalam pembangunan Fisiik maupun pemberdayaan Ekonomi Persentase Peningkatan 100 % Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100 % 100 % 50 % 50 % 50 %	Jumlah Kegiatan 12 bulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kassa sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Pembangunan Sarana 30 Kegiatan dan Prasarana Kelurahan yang diadakan Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Sarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana 3 kegiatan umum yang tersedia sesuai analisis kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Kegiatan umum yang tersedia sesuai analisis kebutuhan Jumlah sarana dan prasarana 2 Kegiatan umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Ls Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana 100 %	Kab. Pinrang	

		Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		Penyelesaian 100 % Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lanrisang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Presentase Pemberdayaan 100 % Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik maupun Pemberdayaan Presentase Pemberdayaan 100 % Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik maupun Pemberdayaan ekonomi		Pembangunan Fisik Skala 1 Paket Kecil di tingkat Kelurahan Pemenuhan sarana dan 4 Paket prasarana pembangunan skala kecil di Kelurahan Terpenuhi Peningkatan Sarana dan1 Kelurahan Prasarana Kelurahan Peningkatan Sarana dan 5 paket Prasarana Kelurahan		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lembang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50					
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %					
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Sompe dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan	50 %					

		Ekonomi		Tersedianya Sarana dan		Terlaksananya Kegiatan 1		
		Persentase		100 %		LS		
		Pemberdayaan	50 %	Prasarana umum serta SDM		Sarana dan Prasarana		
		Masyarakat		yang berkualitas		Infrastruktur Kelurahan		
		Desa dan		Tersedianya Sarana		Terlaksananya Kegiatan 1		
		Kelurahan		dan 100 %		LS		
		Lingkup		Prasarana Umum serta		Sarana dan Prasarana		
		Kecamatan		SDM yang berkualitas		Insfrastruktur Kelurahan		
		Paletang						
		dalam						
		Pembangunan						
		Fisik dan						
		Pemberdayaan						
		Ekonomi						
		Persentase						
		Pemberdayaan	50 %					
		Masyarakat						
		Desa dan						
		Kelurahan						
		Lingkup						
		Kecamatan						
		Patampunua						
		dalam						
		Pembangunan						
		Fisik dan						
		Pemberdayaan						
		Ekonomi						
		Persentase						
		Pemberdayaan	50 %					
		Masyarakat						
		Desa dan						
		Kelurahan						
		Lingkup						
		Kecamatan						
		Suppa dalam						
		Pembangunan						
		Fisik dan						
		Pemberdayaan						
		Ekonomi						
		Persentase						
		Pemberdayaan	50 %					
		Masyarakat						
		Desa dan						
		Kelurahan						
		Lingkup						
		Kecamatan						
		Tiroang dalam						
		Pembangunan						
		Fisik dan						
		Pemberdayaan						
		Ekonomi						
		Persentase						
		Pemberdayaan	50 %					
		Masyarakat Desa						
		dan Kelurahan						
		Lingkup Kecamatan						
		Watang						
		Sawittodalam						
		Pembangunan						
		Fisik dan						
		Pemberdayaan						
		Ekonomi						
		Presentase						
		Pemberdayaan	100 %					
		Masyarakat Desa						
		dan Kelurahan						
		dalam						
		Pembangunan						
		Fisik dan						
		Pemberdayaan						
		Ekonomi						

					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jumlah Pelatihan Masyarakat di Kelurahan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan 1 kegiatan Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan 1 Kegiatan Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan 100 % Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas 1 Pokmas / yang Melaksanakan Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas 2 Pokmas / yang Melaksanakan Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas 3 Kegiatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas 4 Kegiatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Sumber Daya 1 Kelurahan Masyarakat Kelurahan Persentase Pemberdayaan 100 % Masyarakat Terpenuhi presentase pemberdayaan 1 Kelurahan masyarakat desa dan kelurahan Terlaksananya 1 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terlaksananya 1 LS Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kab. Pinrang	
					7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan			
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pengawasan Pengelolaan Anggaran Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan 100 % Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Kegiatan Pembinaan 100 % dan Pengawasan Terhadap Penggunaan Desa	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan pembinaan 6 Desa dan pengawasan terhadap	0	Kab. Pinrang	



		Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran Desa	100 %	Persentase Ketercapaian Fasilitasi, 100 % Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		penggunaan desa Persentase Pengawasan 12 Bulan Penggunaan Dana Desa		
					7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi 0 Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Persentase Pelaksanaan 1 LS Pemilihan Kepala Desa	Kab. Pinrang	
					7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa Yang Terkoordinis 7 Desa Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Terlaksananya Persentase 12 Bulan Pendampingan Desa	Kab. Pinrang	
					7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Persentase Pembangunan 1 LS Kawasan Perdesaan diwilayah Kecamatan	Kab. Pinrang	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.01 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen0 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja yang1 dokumen tersusun tepat waktu	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA yang 1 dokumen tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang 1 dokumen tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD jumlah dokumen DPA yang 1 dokumen tersusun tepat waktu	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA 1 dokumen perubahan yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang	

					8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LKJIP LPPD 3 dokumen dan perjanjian kinerja yang tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Capaian 0 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi 2 dokumen renja dan renstra yang tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Evaluasi 0 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang	
			8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pengelolaan administrasi keuangan SKPD	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang 25 ASN terbayarkan gajinya tepat waktu Jumlah Orang yang 0 Orang/bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen0 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah jasa keuangan yang 20 jasa terbayarkan tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan1 dokumen akhir tahun yang tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan 0 Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan 1 dokumen keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Semua Kab/K ota Kab. Pinrang	
			8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pengelolaan barang milik daerah SKPD	8.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang 2 jasa yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang	
			8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang 40 pasang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	

					8.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen datan 2 dokumen kepegawaian yang tersusun Jumlah Dokumen Pendataan 0 Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang0 Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah sumber daya manusia 10 aparatur aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian100 % pelayanan administrasi umum SKPD	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan kantor 7 jenis yang tersedia sesuai kebutuhan Jumlah Paket Komponen Instalasi0 Paket Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan 10 jenis perlengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis spanduk yang7 jenis tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah jenis bahan bacaan yang 17 jenis tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 0 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah program kegiatan 5 program yang terkoordinasikan	Semua Kab/Kota Kab. Pinrang	
			8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian100 % pengadaan Barang Milik Daerah	8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan 12 buah sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang 2 unit diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 Unit Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang 1 unit diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pinrang	

			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa 100 % Penunjang pemerintahan SKPD urusan daerah	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terdistribusi 100 surat	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah rekening listrik dan 24 rekening telepon yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa petugas 6 orang administrasi yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pinrang	
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian100 % pemeliharaan barang milik daerah SKPD	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 0 Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan dinas 2 unit operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang 6 unit dipelihara sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang	
					8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung 6 unit kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pinrang	
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipasi lembaga/organi sasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase ketercapaian100 % pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang pembinaan wawasan kebangsaan	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pendidikan bela 40 orang negara			
					8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah fasilitasi forum kebangsaan 1 kali		

					8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pemantauan 12 laporan politik daerah		
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan sosialisasi 100 % pendidikan politik	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase ketercapaian100 % pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti0 Orang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah jumlah pendidikan politik12 kali			
				8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah bantuan keuangan 11 parpol parpol yang tersalurkan Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pinrang		

8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKA TAN	persentase Ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakat	8.01.04.2.01 100% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang aktif	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah fasilitasi organisasi 4 kali kemasyarakatan Jumlah Ormas mendapat 11 Ormas bantuan hibah		
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase ketercapaian 100 % pembinaan dan pengembangan ketahanan,ekonomi, sosial dan budaya	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase ketercapaian 100 % pembinaan dan pengembangan ketahanan,ekonomi,sosial dan budaya	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah fasilitasi forum kerukunan 1 kali beragama Jumlah Orang yang Mengikuti0 Orang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
				8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah fasilitasi penyalahgunaan 1 kali narkotika Jumlah Orang yang Mengikuti0 Orang Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian 100 % peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase ketercapaian deteksi 100 % dini dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan kejadian12 laporan		
				8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	jumlah fasilitasi forum 1 kali kewaspadaan dini		

					Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;



- 16. Kebudayaan;
- 17. Perpustakaan; dan
- 18. Kearsipan.

Sementara Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah. Urusan pilihan pemerintahan daerah terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan, terdiri dari:

- 1. Kelautan dan perikanan;
- 2. Pariwisata;
- 3. Pertanian;
- 4. Kehutanan;
- 5. Energi dan sumber daya mineral;
- 6. Perdagangan;
- 7. Perindustrian; dan
- 8. Transmigrasi.

Khusus untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 25 pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditempatkan ke dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Rekapitulasi plafon anggaran menurut urusan pemerintahan adalah sebagaimana Tabel 4.1. berikut :

**Tabel 4.1**  
**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	424.957.235.100	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	424.957.235.100	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	424.957.235.100	

1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	332.421.756.243	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	541.699.765	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.486.115	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.953.220	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.804.475	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.195.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.450.000	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124.356.955	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.454.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	328.655.819.028	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	327.448.444.828	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.207.000	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	908.800.000	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.081.600	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.285.600	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.370.725	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	95.370.725	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	668.135.010	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000	

1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	100.959.590	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	249.675.420	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>609.550.375</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.810.375	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.200.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	135.540.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>562.800.000</b>	
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.300.000	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	301.500.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	
1.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>332.548.560</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.773.560	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.775.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>955.832.780</b>	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.130.000	

1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.300.000	
1.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	18.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	756.402.780	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>92.027.719.857</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>50.326.862.834</b>	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.999.974.400	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.044.015	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7.762.655.864	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.000.183.950	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	990.350.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.479.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	303.900.980	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	347.526.625	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	92.366.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	254.299.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	168.943.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	36.734.300.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	171.840.000	

1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28.176.671.555	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	221.735.790	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.668.910.240	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	221.735.790	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.073.580	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	440.050.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	400.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	43.007.085	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	74.034.070	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	454.509.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	62.716.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.189.900.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.067.344.808	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	884.166.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	604.272.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	559.292.938	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	550.400.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	182.628.650	

1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	902.348.220	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.384.237.000	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>5.456.840.660</b>	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	68.993.260	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.826.365.400	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	243.470.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.318.012.000	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>507.759.000</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>507.759.000</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	322.946.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	184.813.000	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>277.372.028.180</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>277.372.028.180</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>125.417.879.988</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>49.888.126.728</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>200.870.600</b>	

1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.200.000	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.400.000	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.950.000	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.090.000	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.575.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.180.600	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.475.000	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>45.358.261.128</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.652.674.128	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.417.000	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	592.020.000	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.900.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	71.250.000	
<b>1.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.900.000</b>	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.900.000	
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>439.540.000</b>	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97.500.000	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.980.000	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.060.000	

1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>400.338.000</b>	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.988.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.100.000	
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.800.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.450.000	
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>378.200.000</b>	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	191.200.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>261.200.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.837.817.000</b>	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.330.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.200.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.675.287.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>72.531.526.260</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.964.904.110</b>	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	2.158.704.000	



1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.149.474.000	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.675.287.000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.720.842.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.635.500.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.845.358.110	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.550.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.000.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80.375.000	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	149.364.000	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.462.498.150</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.609.670.980	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	334.670.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	369.920.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.773.682.380	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.749.215.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	996.670.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	607.871.880	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	297.570.000	

1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	212.824.060	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	142.070.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	347.970.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	281.180.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.773.267.990	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	867.364.700	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	777.900.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.002.615.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.146.577.610	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	245.580.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	912.165.800	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	23.845.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	245.620.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	36.660.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.844.622.950	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.442.004.800	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	239.870.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	205.800.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	62.000.000	

1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	913.290.000	
1.02.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>44.124.000</b>	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	44.124.000	
1.02.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000</b>	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	60.000.000	
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>2.503.720.000</b>	
1.02.03.2.01	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.830.000</b>	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.830.000	
1.02.03.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.486.890.000</b>	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.486.890.000	
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>324.213.000</b>	
1.02.04.2.01	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>49.980.000</b>	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	32.640.000	
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17.340.000	

1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	34.000.000	
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	34.000.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	115.325.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	115.325.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	124.908.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	124.908.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	170.294.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170.294.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	170.294.000	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang	104.364.664.249	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.559.840.356	

1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.260.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.820.000	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.155.000	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.205.000	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.155.000	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.205.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.720.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.220.157.796	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.221.057.796	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.982.760.000	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.670.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.670.000	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.410.000	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.410.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	309.645.000	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.645.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.320.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.320.000	

1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.667.050.000</b>	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	460.100.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	119.450.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	621.000.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	466.500.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.097.247.560</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.197.247.560	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>29.750.000</b>	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.750.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>55.000.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	55.000.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>13.804.823.893</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.754.823.893</b>	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	583.060.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	974.140.000	

1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.997.623.893	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	
1.02.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	50.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	<b>Rumah Sakit Umum Madising</b>	<b>22.589.483.943</b>	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>22.589.483.943</b>	
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.989.483.943</b>	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	6.717.440.000	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	10.272.043.943	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.000.000.000</b>	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.000.000.000	
1.02.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>600.000.000</b>	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	600.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	<b>Puskesmas Mattiro Bulu</b>	<b>2.000.000.000</b>	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.000.000.000</b>	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.000.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.000.000.000	

1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Leppangang	600.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	600.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Tuppu	2.650.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.650.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.650.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.650.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Suppa	1.150.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.150.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.150.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.150.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Lanrisang	1.100.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.100.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.100.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Mattombong	1.600.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.600.000.000	



1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.600.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sulili	1.200.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.200.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.200.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Salo	2.250.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.250.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.250.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.250.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Lampa	1.750.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.750.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.750.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.750.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Cempa	1.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.000.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.000.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Mattiro Deceng	1.300.000.000	

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.300.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.300.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.300.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Teppo	2.100.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.100.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.100.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Bungi	1.650.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.650.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.650.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.650.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Salimbongang	1.550.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.550.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.550.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.550.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Batulappa	1.200.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.200.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	

1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.200.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Tadang palie	650.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	650.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	650.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Ujung Lero	1.250.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.250.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.250.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	119.002.285.440	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	87.491.775.132	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	87.491.775.132	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.291.152.410	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.725.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.875.000	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.975.000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.500.000	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.375.000	

1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.560.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.440.000	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.863.893.663</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.965.095.878	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	285.591.785	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	570.500.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.220.000	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.486.000	
<b>1.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.680.000</b>	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.380.000	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.300.000	
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>284.569.995</b>	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.200.000	
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.370.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	199.999.995	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>481.715.000</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.015.000	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.100.000	

1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	52.100.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	95.000.000	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.141.927.750</b>	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	966.947.000	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.150.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.650.750	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.180.000	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.197.879.000</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.424.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.041.405.000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.261.762.002</b>	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.634.412.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.000.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	281.600.002	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.750.000	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>7.441.980.225</b>	

1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.441.980.225	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	242.850.000	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	194.270.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.654.494.230	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.650.000.000	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.700.365.995	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	798.236.682	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	798.236.682	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	219.355.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	578.881.682	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.702.250.007	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.702.250.007	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	343.850.007	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.000.000.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	39.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.319.400.000	

1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.316.224.736	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.316.224.736	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	5.896.194.736	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.120.030.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25.000.000	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	390.949.900	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	390.949.900	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	390.949.900	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.238.377.500	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.238.377.500	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	125.000.000	

1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	832.625.000	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.280.752.500	
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>49.446.968.642</b>	
1.03.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>49.446.968.642</b>	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	123.350.200	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	7.540.350.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	28.882.000.005	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.963.500.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.144.650.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	3.538.000.000	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	5.155.118.437	
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>840.635.030</b>	
1.03.12.2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>130.720.000</b>	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	68.320.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	62.400.000	
1.03.12.2.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>140.275.000</b>	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	140.275.000	
1.03.12.2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>490.040.030</b>	



1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	232.910.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	257.130.030	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>79.600.000</b>	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	55.800.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	23.800.000	
<b>1.03.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi</b>	<b>31.510.510.308</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi</b>	<b>31.510.510.308</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.735.033.878</b>	
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>80.057.000</b>	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.976.000	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.058.000	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.245.000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.390.000	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.802.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.039.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.547.000	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.432.122.538</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.373.207.938	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	337.474.600	

1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	683.690.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.700.000	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.050.000	
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>378.875.000</b>	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87.200.000	
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28.130.000	
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.545.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>398.939.700</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.521.700	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.048.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.050.000	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.320.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.086.292.000</b>	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.090.000	
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	892.202.000	

1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.197.640	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.395.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.537.640	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.265.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.550.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.900.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.650.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.562.554.430	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.302.606.000	
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	106.370.000	
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	815.095.000	
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	642.040.000	
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	14.340.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.187.044.000	
1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	51.695.000	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	423.005.000	
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53.530.000	

1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	9.487.000	
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.259.948.430</b>	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.398.544.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.422.320.000	
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	448.275.000	
1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	4.590.265.000	
1.03.02.2.02.20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	512.551.900	
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	607.216.000	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	1.246.460.000	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	19.220.000	
1.03.02.2.02.29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	15.096.530	
1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>212.922.000</b>	
1.03.11.2.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>75.722.000</b>	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	65.232.000	
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	10.490.000	
1.03.11.2.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.600.000</b>	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	27.600.000	
1.03.11.2.03	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>35.410.000</b>	

1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	24.430.000	
1.03.11.2.03.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	10.980.000	
1.03.11.2.04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>74.190.000</b>	
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	74.190.000	
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>13.121.240.000</b>	
1.04.2.11.0.00.01.0000	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup</b>	<b>13.121.240.000</b>	
1.04.2.11.0.00.01.0000	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup</b>	<b>13.121.240.000</b>	
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.071.240.000</b>	
1.04.02.2.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>61.240.000</b>	
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	51.240.000	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	10.000.000	
1.04.02.2.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>1.800.000.000</b>	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.500.000.000	
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	300.000.000	
1.04.02.2.05	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>50.000.000</b>	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	50.000.000	

1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	160.000.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150.000.000	
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	10.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.120.000.000	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	150.000.000	
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000	
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	50.000.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	160.000.000	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	150.000.000	
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.810.000.000	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	300.000.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.000.000.000	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	500.000.000	

1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5.000.000	
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	5.000.000	
1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>5.300.000.000</b>	
1.04.04.2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.300.000.000</b>	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	300.000.000	
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.000.000.000	
1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>3.630.000.000</b>	
1.04.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>3.630.000.000</b>	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	20.000.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.600.000.000	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10.000.000	
1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>15.949.638.850</b>	
1.05.0.00.0.00.01.0000	<b>Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>	<b>11.987.374.378</b>	

1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.987.374.378	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.260.889.378	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.820.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.260.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.915.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.540.000	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.490.000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.865.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.780.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.970.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.051.292.378	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.733.683.018	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.489.360	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.920.000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.130.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.070.000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.810.000	
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	730.000	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.080.000	



1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.810.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	73.100.000	
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.710.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.750.000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.530.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.220.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.500.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.500.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.968.000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.040.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.608.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.320.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.939.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	413.439.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.487.485.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.392.825.000	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.329.405.000	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	52.580.000	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10.840.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	94.660.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	52.640.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	42.020.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.239.000.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.239.000.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.141.600.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	97.400.000	

1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.962.264.472	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.962.264.472	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.084.844.272	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.470.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.560.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.760.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.940.000	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.500.000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.010.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.440.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.260.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.469.842.272	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.142.569.272	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.223.000	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.000.000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.160.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.890.000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.150.000	
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.890.000	

1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.260.000	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>186.470.000</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.500.000	
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38.250.000	
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	720.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>196.060.000</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.070.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.790.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>667.726.600</b>	
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	583.874.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.852.600	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>111.515.400</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.270.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.570.400	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.675.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>382.610.000</b>	

1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.380.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.230.000	
1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>877.420.200</b>	
1.05.03.2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>467.000.000</b>	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	467.000.000	
1.05.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>224.390.200</b>	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	28.572.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60.058.200	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	42.460.000	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	93.300.000	
1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>186.030.000</b>	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	36.680.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	33.490.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	115.860.000	
1.06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>5.225.245.881</b>	
1.06.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Sosial</b>	<b>5.225.245.881</b>	
1.06.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Sosial</b>	<b>5.225.245.881</b>	

1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.141.397.881	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.670.000	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.015.000	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.455.000	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.470.000	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.455.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.880.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.395.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.096.315.881	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.839.645.881	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.000.000	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.480.000	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.790.000	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.400.000	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.870.000	
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.140.000	
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.730.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.675.000	
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.075.000	

1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.600.000	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98.000.000	
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>253.910.000</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.750.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.660.000	
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>259.500.000</b>	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.700.000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.800.000	
1.06.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99.542.000</b>	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.792.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.750.000	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>279.915.000</b>	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.925.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.990.000	

1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	221.181.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	221.181.000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18.720.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	53.186.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	73.535.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45.600.000	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30.140.000	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	6.000.000	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6.000.000	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	438.665.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	237.440.000	



1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	57.165.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	47.155.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	56.245.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.250.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.650.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	4.275.000	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.100.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.780.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.920.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	30.000.000	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.250.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	6.650.000	
1.06.04.2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>201.225.000</b>	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.490.000	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	20.000.000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	57.090.000	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	47.240.000	
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	14.140.000	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	4.675.000	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.785.000	

1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	7.265.000	
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.100.000	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.550.000	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.250.000	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	7.650.000	
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	14.990.000	
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>41.889.000</b>	
1.06.05.2.01	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>27.363.000</b>	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	7.467.000	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	14.260.000	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	5.636.000	
1.06.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.526.000</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.400.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.440.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.986.000	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.700.000	
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>191.843.000</b>	
1.06.06.2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>121.093.000</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	35.548.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	46.555.000	

1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	18.990.000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10.000.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000	
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>70.750.000</b>	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	10.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	60.750.000	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>184.270.000</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>184.270.000</b>	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	84.270.000	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>5.577.837.956</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</b>	<b>5.577.837.956</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</b>	<b>5.577.837.956</b>	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.138.847.456</b>	
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.880.000</b>	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.395.000	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.850.000	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.990.000	

2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.300.000	
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.180.000	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.165.000	
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.285.318.076</b>	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.911.256.616	
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.482.460	
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	298.619.100	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.264.900	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.695.000	
<b>2.07.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.440.000</b>	
2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.440.000	
<b>2.07.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>171.090.000</b>	
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.400.000	
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.690.000	
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000	
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>189.865.000</b>	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.105.000	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.760.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	

2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.739.500	
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.040.000	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.500.000	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.199.500	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.625.380	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.050.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.249.380	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.326.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.889.500	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.869.500	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.420.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	173.600.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	8.225.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	8.225.000	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	8.225.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	247.796.900	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	199.465.800	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	157.565.800	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	41.900.000	

2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	24.970.100	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	24.970.100	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	7.270.000	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	7.270.000	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.091.000	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	16.091.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	88.573.600	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	39.739.200	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	8.020.000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	11.430.000	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	20.289.200	
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.500.000	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	8.500.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	21.605.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	21.605.000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	18.729.400	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	18.729.400	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	94.395.000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	48.620.000	

	Kabupaten/Kota		
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	29.540.000	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	7.875.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	11.205.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	45.775.000	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.790.000	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	22.985.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	263.365.000	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	263.365.000	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	263.365.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	213.465.000	

2.08.02.2.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>104.575.000</b>	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	104.575.000	
2.08.02.2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>47.650.000</b>	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	47.650.000	
2.08.02.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>61.240.000</b>	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.240.000	
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>49.900.000</b>	
2.08.03.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.900.000</b>	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.900.000	
2.09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>5.546.975.237</b>	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	5.546.975.237	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	5.546.975.237	
2.09.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.113.621.237</b>	
2.09.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.500.000</b>	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.300.000	



2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.300.000	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.300.000	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.300.000	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.300.000	
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.739.945.237</b>	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.565.030.000	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.924.237	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	133.491.000	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.300.000	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.200.000	
<b>2.09.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>22.800.000</b>	
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.800.000	
<b>2.09.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>220.860.000</b>	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.460.000	
2.09.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.400.000	
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>199.140.000</b>	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.520.000	

2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.820.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	
<b>2.09.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>406.186.000</b>	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	406.186.000	
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90.780.000</b>	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.580.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.200.000	
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>417.410.000</b>	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.050.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.360.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	336.000.000	
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>374.950.000</b>	
<b>2.09.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>374.950.000</b>	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	361.700.000	
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	13.250.000	

2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	887.750.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	394.800.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	164.800.000	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	85.850.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	144.150.000	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	197.000.000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190.000.000	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7.000.000	
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	9.175.000	
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	9.175.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	286.775.000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.800.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	264.575.000	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	11.400.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	135.850.000	

2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	77.200.000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	77.200.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.650.000	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	58.650.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	34.804.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	34.804.000	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	29.100.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5.704.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.752.819.043	
2.15.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	1.752.819.043	
2.15.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	1.752.819.043	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20.800.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.800.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.800.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.711.219.043	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.711.219.043	

2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.711.219.043	
2.10.10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>20.800.000</b>	
2.10.10.2.01	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.800.000</b>	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	20.800.000	
2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>21.429.722.400</b>	
1.04.2.11.0.00.01.0000	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup</b>	<b>21.429.722.400</b>	
1.04.2.11.0.00.01.0000	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup</b>	<b>21.429.722.400</b>	
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.102.445.400</b>	
2.11.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>88.075.000</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.000.000	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.125.000	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.125.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.900.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	925.000	
2.11.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.675.908.900</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.106.952.000	

2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.606.900	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	437.000.000	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.550.000	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.800.000	
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.600.000</b>	
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.600.000	
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>261.725.000</b>	
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.725.000	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>387.907.500</b>	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.757.500	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.750.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>868.000.000</b>	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	57.000.000	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.000.000	
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	

2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>232.329.000</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.860.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.619.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.850.000	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>582.900.000</b>	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.225.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.675.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>501.775.000</b>	
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>141.205.000</b>	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	141.205.000	
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>360.570.000</b>	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	360.570.000	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>4.208.687.000</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>4.208.687.000</b>	

2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4.000.000.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	106.130.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	102.557.000	
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>400.000.000</b>	
2.11.04.2.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>400.000.000</b>	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	400.000.000	
2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>50.000.000</b>	
2.11.05.2.01	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>25.000.000</b>	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	25.000.000	
2.11.05.2.02	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.000.000	
2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>125.000.000</b>	
2.11.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>125.000.000</b>	



2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	
2.11.07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>250.000.000</b>	
2.11.07.2.01	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>250.000.000</b>	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	250.000.000	
2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>30.000.000</b>	
2.11.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>7.761.815.000</b>	
2.11.11.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>7.761.815.000</b>	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.987.205.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.617.000.000	

2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	57.610.000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>6.745.400.654</b>	
2.12.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>6.745.400.654</b>	
2.12.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>6.745.400.654</b>	
2.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.869.900.654</b>	
2.12.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>53.200.000</b>	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.200.000	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.000.000	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.000.000	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	
2.12.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.218.700.654</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.995.700.654	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000	

2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000	
<b>2.12.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>27.000.000</b>	
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000	
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>211.500.000</b>	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	
2.12.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.500.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>271.000.000</b>	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.000.000	
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>215.000.000</b>	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	70.000.000	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>405.500.000</b>	

2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>468.000.000</b>	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1.493.000.000</b>	
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.493.000.000</b>	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	11.000.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.000.000.000	
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	17.000.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	380.000.000	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	85.000.000	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>176.000.000</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>176.000.000</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.000.000	

2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	144.000.000	
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>206.500.000</b>	
2.12.04.2.01	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>171.500.000</b>	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	41.500.000	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	130.000.000	
2.12.04.2.03	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>35.000.000</b>	
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	35.000.000	
2.13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>78.153.980.584</b>	
2.13.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>78.153.980.584</b>	
2.13.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>78.153.980.584</b>	
2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.451.887.986</b>	
2.13.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>116.195.000</b>	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.045.000	
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.650.000	
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.400.000	
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.850.000	
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.400.000	

2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.600.000	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.250.000	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.308.145.486</b>	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.884.291.216	
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.379.270	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	363.925.000	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.450.000	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.100.000	
<b>2.13.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.750.000</b>	
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.750.000	
<b>2.13.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>153.925.000</b>	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.250.000	
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31.650.000	
2.13.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.025.000	
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>378.022.500</b>	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.938.000	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.840.000	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.332.000	

2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.500.000	
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.412.500	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>163.800.000</b>	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.300.000	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.500.000	
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.330.000</b>	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.680.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.650.000	
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>256.720.000</b>	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.480.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.450.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.790.000	
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>314.973.600</b>	
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>314.973.600</b>	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	85.040.000	

2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	117.735.000	
2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	112.198.600	
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>48.634.000</b>	
2.13.03.2.01	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>48.634.000</b>	
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	48.634.000	
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>72.356.530.998</b>	
2.13.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>72.356.530.998</b>	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.952.967.688	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	178.887.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	199.365.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	68.501.538.000	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	126.723.870	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	402.995.000	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	498.607.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	266.890.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	80.672.440	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	147.885.000	
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>981.954.000</b>	



2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	981.954.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	294.857.000	
	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	58.150.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	199.042.000	
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	79.850.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	350.055.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.528.790.545	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.528.790.545	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.528.790.545	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.171.251.969	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.060.000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.100.000	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.350.000	

2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.180.000	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.350.000	
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.180.000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.970.000	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.930.000	
<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.849.712.289</b>	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.510.757.529	
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.044.760	
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	174.100.000	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.750.000	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.060.000	
<b>2.14.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>17.617.500</b>	
2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.617.500	
<b>2.14.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>160.650.000</b>	
2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.650.000	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>474.722.000</b>	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.072.000	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.290.000	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.240.000	

2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.120.000	
<b>2.14.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>164.743.500</b>	
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.186.000	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.557.500	
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>82.786.680</b>	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.786.680	
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>294.960.000</b>	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.410.000	
2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.550.000	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>130.895.000</b>	
<b>2.14.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas</b>	<b>14.900.000</b>	
	<b>Penduduk</b>		
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	14.900.000	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115.995.000</b>	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	73.995.000	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	42.000.000	

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.226.643.576	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	40.200.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	40.200.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	6.186.443.576	
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	50.800.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28.550.000	
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	5.924.195.976	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	72.647.600	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	43.550.000	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	66.700.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.894.627.623	
2.15.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	8.894.627.623	
2.15.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	8.894.627.623	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.388.040.593	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.693.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.780.000	

2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.960.000	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.390.000	
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.384.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.619.000	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.560.000	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.865.314.193</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.410.558.393	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183.472.400	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	262.253.400	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.030.000	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>73.302.000</b>	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	73.302.000	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>353.570.000</b>	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	186.500.000	
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.070.000	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>245.868.400</b>	

2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.100.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.949.150	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.170.000	
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.649.250	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>123.265.000</b>	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.265.000	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>178.410.000</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.050.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.340.000	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.020.000	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>392.958.000</b>	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.058.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.900.000	
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.000.000	
<b>2.15.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>94.660.000</b>	
2.15.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	94.660.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>2.371.850.500</b>	

2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	203.759.500	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	179.759.500	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	24.000.000	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	43.756.000	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	43.756.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.193.020.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.041.000.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	91.520.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.500.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20.660.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	20.660.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	843.350.000	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	843.350.000	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.305.000	
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	67.305.000	

2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	134.736.530	
2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	11.899.530	
2.15.03.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8.005.000	
2.15.03.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	3.894.530	
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.343.000	
2.15.03.2.07.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.230.000	
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.113.000	
2.15.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	95.494.000	
2.15.03.2.08.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	95.494.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.372.450.694	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	8.372.450.694	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	8.372.450.694	



2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.350.924.694</b>	
2.16.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39.029.000</b>	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.949.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.911.000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.870.000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.143.000	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.836.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.150.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.170.000	
2.16.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.452.664.694</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.972.668.694	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.014.000	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	361.602.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.310.000	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.070.000	
2.16.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.891.000</b>	
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.311.000	
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.580.000	
2.16.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>87.510.000</b>	
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.510.000	

2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>135.280.000</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.780.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>537.255.000</b>	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.640.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332.615.000	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96.295.000</b>	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.500.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.795.000	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.301.276.000</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.301.276.000</b>	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	11.190.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3.790.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	112.240.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	33.210.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.116.508.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	24.338.000	

2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.720.250.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.505.690.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.505.690.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	214.560.000	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	214.560.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.561.286.091	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.561.286.091	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.561.286.091	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.163.654.091	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.211.000	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.145.000	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.716.000	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.100.000	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.210.000	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.460.000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.580.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.240.339.601	

2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.947.306.001	
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.461.600	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.352.000	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.220.000	
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>147.370.000</b>	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.500.000	
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.720.000	
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.150.000	
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>275.854.000</b>	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.154.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.700.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.200.040.000</b>	
2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.040.000	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.000.000	
2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.048.000.000	
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>101.094.490</b>	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.734.490	
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.800.000	

2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.560.000	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.745.000</b>	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.745.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.000.000	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>50.740.000</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>50.740.000</b>	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	32.580.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.160.000	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>70.555.000</b>	
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.555.000</b>	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	32.655.000	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	37.900.000	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>47.581.000</b>	

2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.581.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	47.581.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	75.450.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.450.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.450.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	112.130.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	112.130.000	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12.000.000	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	27.190.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30.000.000	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	42.940.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	41.176.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	41.176.000	

2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	41.176.000	
2.18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>6.719.548.805</b>	
2.18.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>6.719.548.805</b>	
2.18.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>6.719.548.805</b>	
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.644.094.805</b>	
2.18.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.625.000</b>	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.540.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.890.000	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.265.000	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.140.000	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.640.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.150.000	
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.324.228.405</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.397.843.405	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425.258.000	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	481.800.000	
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.607.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.540.000	

2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.180.000	
<b>2.18.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.500.000</b>	
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.500.000	
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>145.455.000</b>	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.800.000	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.655.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125.000.000	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>198.580.000</b>	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.580.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>490.200.000</b>	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	21.000.000	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	363.600.000	
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.600.000	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>133.805.000</b>	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.920.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.885.000	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>282.701.400</b>	



2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.501.400	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000	
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.200.000	
2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>66.040.000</b>	
2.18.02.2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>66.040.000</b>	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	66.040.000	
2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>489.925.000</b>	
2.18.03.2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>489.925.000</b>	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	43.300.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	446.625.000	
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>273.636.000</b>	
2.18.04.2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>273.636.000</b>	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	189.336.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	84.300.000	
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>49.700.000</b>	

2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49.700.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.700.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	196.153.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.153.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	196.153.000	
	Elektronik		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.146.748.269	
3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	9.146.748.269	
3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	9.146.748.269	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.421.808.269	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.780.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.340.000	
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.715.000	
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.180.000	
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.918.000	
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.948.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.679.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.096.502.444	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.485.351.184	

2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.336.060	
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	497.735.200	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.640.000	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.440.000	
<b>2.19.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7.384.750</b>	
2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.761.875	
2.19.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.622.875	
<b>2.19.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>193.497.000</b>	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000	
2.19.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.487.000	
2.19.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.010.000	
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>2.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>366.200.075</b>	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.100.000	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.675.075	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	
2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	37.250.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.935.000	
2.19.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.640.000	
<b>2.19.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>916.306.000</b>	

2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	697.806.000	
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	63.500.000	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.000.000	
<b>2.19.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.838.000</b>	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.650.000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.200.000	
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.250.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.738.000	
<b>2.19.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>627.300.000</b>	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.700.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.600.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000	
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.550.665.000</b>	
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>1.000.665.000</b>	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	23.190.000	

2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	29.640.000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	22.190.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	925.645.000	
2.19.02.2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>550.000.000</b>	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	550.000.000	
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>1.143.575.000</b>	
2.19.03.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.377.000</b>	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	47.377.000	
2.19.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>978.322.000</b>	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	116.480.000	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	572.042.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	289.800.000	
2.19.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>104.499.000</b>	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	44.975.000	
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	30.800.000	

2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	8.724.000	
2.19.03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>13.377.000</b>	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	13.377.000	
2.19.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>30.700.000</b>	
2.19.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>30.700.000</b>	
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	15.200.000	
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	15.500.000	
2.20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>76.340.000</b>	
2.16.2.20.2.21.01.0000	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b>	<b>76.340.000</b>	
2.16.2.20.2.21.01.0000	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b>	<b>76.340.000</b>	
2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>76.340.000</b>	
2.20.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>76.340.000</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	25.830.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	50.510.000	
2.21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>61.430.000</b>	
2.16.2.20.2.21.01.0000	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b>	<b>61.430.000</b>	
2.16.2.20.2.21.01.0000	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b>	<b>61.430.000</b>	

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	61.430.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.430.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	61.430.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.942.445.240	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.942.445.240	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.942.445.240	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.253.654.240	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	641.593.240	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	341.436.240	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	300.157.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	356.585.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	356.585.000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	255.476.000	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	255.476.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	645.541.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	645.541.000	

2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	645.541.000	
2.22.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>43.250.000</b>	
2.22.06.2.01	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>43.250.000</b>	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	43.250.000	
2.23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>5.952.038.228</b>	
2.23.2.24.0.00.01.0000	<b>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</b>	<b>5.952.038.228</b>	
2.23.2.24.0.00.01.0000	<b>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</b>	<b>5.952.038.228</b>	
2.23.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.544.449.308</b>	
2.23.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>94.680.000</b>	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.295.000	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.250.000	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.885.000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.000.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.000.000	
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.250.000	
2.23.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.644.718.748</b>	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.389.518.098	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.256.750	



2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185.263.900	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.750.000	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.930.000	
<b>2.23.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>23.330.000</b>	
2.23.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.430.000	
2.23.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.900.000	
<b>2.23.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>219.550.000</b>	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.800.000	
2.23.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.750.000	
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>249.236.500</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.796.500	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.440.000	
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
<b>2.23.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>41.000.000</b>	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>171.864.060</b>	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.724.060	

2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.380.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.760.000	
2.23.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.070.000</b>	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.120.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.950.000	
2.23.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>1.389.024.670</b>	
2.23.02.2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>478.255.610</b>	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	17.502.150	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.506.800	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	28.943.860	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.840.000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	300.000.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	16.843.800	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.619.000	
2.23.02.2.02	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>910.769.060</b>	

2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	199.259.060	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	64.215.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	20.270.000	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.025.000	
2.23.03	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>18.564.250</b>	
2.23.03.2.01	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.613.800</b>	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	12.613.800	
2.23.03.2.02	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.950.450</b>	
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	5.950.450	
2.24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>275.687.280</b>	
2.23.2.24.0.00.01.0000	<b>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</b>	<b>275.687.280</b>	
2.23.2.24.0.00.01.0000	<b>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</b>	<b>275.687.280</b>	
2.24.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>139.529.750</b>	
2.24.02.2.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.658.000</b>	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	22.386.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	14.040.000	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23.232.000	

2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	26.790.000	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	11.630.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	15.160.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	53.081.750	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	22.381.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	30.700.750	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	136.157.530	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	95.945.530	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	23.258.000	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	72.687.530	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	40.212.000	
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25.452.000	
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	14.760.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.841.059.008	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	9.841.059.008	

3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	9.841.059.008	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.826.300.191	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.826.900	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.900.000	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.198.000	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.255.000	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.614.000	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.648.000	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.535.500	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.676.400	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.779.508.791	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.427.084.291	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.256.000	
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	269.592.000	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.328.500	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.248.000	
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.386.000	
3.25.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.626.000	
3.25.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.760.000	

3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.160.500	
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.150.000	
3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.590.500	
3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.420.000	
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.148.000	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.540.000	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.788.000	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.820.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.800.000	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.800.000	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.865.000	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.490.000	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.375.000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.605.000	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.175.000	

3.25.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000	
3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.930.000	
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>373.371.500</b>	
3.25.03.2.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>225.841.500</b>	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	55.875.000	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	109.317.500	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	60.649.000	
3.25.03.2.02	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>109.796.500</b>	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	72.697.000	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	37.099.500	
3.25.03.2.03	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>37.733.500</b>	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	37.733.500	
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>3.141.952.317</b>	
3.25.04.2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.044.000</b>	

3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	26.044.000	
3.25.04.2.02	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>645.290.000</b>	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	162.922.000	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	27.408.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	454.960.000	
3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>2.470.618.317</b>	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.261.800	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.430.837.817	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	609.180.000	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.934.500	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	133.528.200	
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	37.438.000	
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	184.438.000	



3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	499.435.000	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	175.415.500	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.415.500	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	65.332.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	65.332.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	258.687.500	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	258.687.500	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	449.712.000	
3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	449.712.000	
3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	449.712.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	77.279.000	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.500.000	
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.500.000	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	40.000.000	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	40.000.000	

3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	11.779.000	
3.26.02.2.04.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	11.779.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	234.474.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	234.474.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	223.834.000	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	10.640.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	137.959.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	96.925.000	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	28.015.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	31.160.000	
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	37.750.000	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	41.034.000	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	41.034.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	48.590.061.770	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	38.868.571.641	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	38.868.571.641	

3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.356.859.441	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.900.000	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.665.000	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.880.000	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.880.000	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.570.000	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.580.000	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.090.000	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.235.000	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.552.295.456	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.592.172.681	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	510.487.775	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	433.125.000	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.940.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.570.000	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.657.565	
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.055.000	
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	107.602.565	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	347.705.000	

3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	148.600.000	
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.105.000	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>399.059.150</b>	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.739.150	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.500.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.820.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.565.000</b>	
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.565.000	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.000.000	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>432.144.620</b>	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.940.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.104.620	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.100.000	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>283.532.650</b>	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.952.650	
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.580.000	

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.427.040.700	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.427.040.700	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.667.620.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	759.420.700	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19.712.820.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	2.778.705.000	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1.243.700.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.535.005.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	16.934.115.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.382.357.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.883.988.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.667.770.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	501.495.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	501.495.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	422.840.000	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	78.655.000	

3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	102.958.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	102.958.000	
3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	5.858.000	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	76.440.000	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	20.660.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.767.398.500	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.767.398.500	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	531.939.600	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	310.810.900	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	924.648.000	
3.27.0.00.0.00.02.00	Dinas Peternakan dan Perkebunan	9.721.490.129	
3.27.0.00.0.00.02.00	Dinas Peternakan dan Perkebunan	9.635.908.249	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.488.688.559	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.114.000	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.517.000	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.031.000	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.977.000	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.256.000	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.746.000	

3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.571.000	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.016.000	
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.291.474.259</b>	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.971.494.599	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.599.660	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.400.000	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.835.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.145.000	
<b>3.27.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>16.484.000</b>	
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.319.000	
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.165.000	
<b>3.27.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>240.572.000</b>	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.750.000	
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.418.000	
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22.404.000	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>225.016.300</b>	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.320.300	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.946.000	

3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.950.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.800.000	
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>319.707.000</b>	
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.707.000	
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	57.500.000	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.500.000	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.185.000</b>	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.640.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.800.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.745.000	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147.136.000</b>	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.376.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.760.000	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>1.732.815.440</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>216.570.440</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	216.570.440	



3.27.02.2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>701.394.000</b>	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	289.855.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	310.949.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100.590.000	
3.27.02.2.03	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>369.140.000</b>	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	135.496.000	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	233.644.000	
3.27.02.2.05	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>445.711.000</b>	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	318.814.000	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	126.897.000	
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>910.026.650</b>	
3.27.04.2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>449.871.250</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	268.251.250	
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	181.620.000	
3.27.04.2.02	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.668.000</b>	

3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	55.668.000	
<b>3.27.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>379.627.400</b>	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	88.960.400	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	290.667.000	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>24.860.000</b>	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	24.860.000	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>103.497.600</b>	
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>103.497.600</b>	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	103.497.600	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>400.880.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>400.880.000</b>	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	400.880.000	
<b>3.27.0.00.0.00.02.0001</b>	<b>UPT Pusat Kesehatan Hewan</b>	<b>85.581.880</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>32.500.000</b>	
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>32.500.000</b>	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>53.081.880</b>	

3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.081.880	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	53.081.880	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.490.000	
3.31.3.30.3.29.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	4.490.000	
3.31.3.30.3.29.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	4.490.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	4.490.000	
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.490.000	
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.490.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.164.438.600	
3.31.3.30.3.29.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	2.164.438.600	
3.31.3.30.3.29.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	2.164.438.600	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	26.662.100	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	19.262.100	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19.262.100	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.400.000	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.400.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.733.499.000	

3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	889.780.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	889.780.000	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	843.719.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	44.719.000	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	799.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	57.350.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	17.600.000	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	17.600.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	20.750.000	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.750.000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.000.000	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	19.000.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	224.570.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	224.570.000	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	31.750.000	

3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	192.820.000	
3.30.06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>117.017.500</b>	
3.30.06.2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>117.017.500</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	62.942.500	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	54.075.000	
3.30.07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>5.340.000</b>	
3.30.07.2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>5.340.000</b>	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5.340.000	
3.31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>8.411.255.914</b>	
3.31.3.30.3.29.01.00	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>8.411.255.914</b>	
3.31.3.30.3.29.01.00	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>8.411.255.914</b>	
3.31.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.869.315.914</b>	
3.31.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>41.445.000</b>	
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.500.000	
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.665.000	
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.250.000	
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.655.000	
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.255.000	

3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.120.000	
<b>3.31.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.100.477.714</b>	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.766.585.894	
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.891.820	
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.600.000	
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.330.000	
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.070.000	
<b>3.31.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>16.725.000</b>	
3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.725.000	
<b>3.31.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.250.000</b>	
3.31.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8.250.000	
<b>3.31.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>177.300.000</b>	
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.300.000	
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>3.31.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>489.565.000</b>	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.235.000	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.400.000	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.350.000	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.580.000	

3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	55.000.000	
<b>3.31.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>293.920.000</b>	
3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.500.000	
3.31.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	49.870.000	
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	51.250.000	
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.800.000	
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.500.000	
<b>3.31.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>260.535.000</b>	
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.250.000	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.630.000	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.655.000	
<b>3.31.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>481.098.200</b>	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.348.200	
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.650.000	
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209.100.000	
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.514.190.000</b>	

3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.514.190.000	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	14.845.000	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	212.710.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	25.000.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.250.385.000	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	11.250.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	16.950.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	16.950.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.150.000	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	5.800.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	10.800.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	10.800.000	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5.000.000	



3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5.800.000	
3.32	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>105.563.000</b>	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	105.563.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	105.563.000	
3.32.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>25.080.000</b>	
3.32.02.2.01	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>25.080.000</b>	
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	25.080.000	
3.32.03	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>20.110.000</b>	
3.32.03.2.01	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.110.000</b>	
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	20.110.000	
3.32.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>60.373.000</b>	
3.32.04.2.01	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>	<b>60.373.000</b>	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	60.373.000	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>49.514.252.707</b>	
4.01.5.06.5.07.01.00	Sekretariat Daerah	49.514.252.707	
4.01.5.06.5.07.01.00	Sekretariat Daerah	49.514.252.707	
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>38.881.209.077</b>	
4.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>399.845.200</b>	

4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.140.140	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32.055.000	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.407.000	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.809.000	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.738.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	138.710.060	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.986.000	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.143.737.911</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.452.844.381	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.608.786.300	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.023.565.900	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.751.530	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.789.800	
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>79.822.000</b>	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.630.000	
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	78.192.000	
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>521.306.650</b>	
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.996.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	69.000.000	

4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.793.000	
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	19.105.000	
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.470.000	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	127.942.650	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	280.000.000	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.090.840.000</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	230.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.500.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	496.650.000	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	250.000.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	266.820.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.658.840.000	
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.030.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>951.500.000</b>	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	97.500.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.000.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.398.705.810</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000	

4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.688.805.810	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	562.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.900.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.889.512.500</b>	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.824.950.000	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.981.562.500	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>889.912.946</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	167.512.946	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72.400.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.250.000.000</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	840.000.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	330.000.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	80.000.000	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>573.594.060</b>	

4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	155.347.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	119.670.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	89.017.060	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	110.410.000	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	99.150.000	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>692.432.000</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	169.821.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	93.425.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	429.186.000	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>9.003.467.930</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>364.996.880</b>	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	158.210.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	106.939.880	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	99.847.000	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>7.855.281.400</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.397.755.400	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	45.847.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	411.679.000	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>713.334.650</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	384.005.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	296.362.650	

4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	32.967.000	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>69.855.000</b>	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	47.057.000	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	22.798.000	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.629.575.700</b>	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>324.084.000</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	159.784.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	129.030.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30.770.000	
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4.500.000	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>358.944.000</b>	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	74.599.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	183.515.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100.830.000	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>769.369.000</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	568.572.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	103.486.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	97.311.000	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>177.178.700</b>	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	157.128.700	

4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8.580.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	11.470.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	43.139.029.455	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	43.139.029.455	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	43.139.029.455	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.386.103.055	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.838.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.860.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.978.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.012.362.667	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.179.514.867	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.452.000	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	801.875.800	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.520.000	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175.000.000	
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	175.000.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	302.296.800	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.950.000	

4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.910.000	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	2.436.800	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.199.590.000</b>	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.010.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	374.080.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	296.500.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>94.440.000</b>	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.440.000	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>456.072.750</b>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	109.156.730	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.229.020	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.687.000	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.264.745.450</b>	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.055.450	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.370.000	



4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	710.320.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>19.330.466.088</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.627.466.088	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	503.000.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	200.000.000	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>511.291.300</b>	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	35.880.800	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	5.485.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52.420.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	417.505.500	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>15.752.926.400</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>1.168.209.000</b>	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.666.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	847.570.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian PerundangUndangan	189.940.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	122.880.000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	2.153.000	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>371.322.300</b>	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	15.665.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.760.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	148.507.300	

4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	153.330.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	12.020.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	25.040.000	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>157.016.500</b>	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	23.090.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9.000.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	11.878.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	11.970.000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	10.953.400	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	11.250.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	9.720.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	69.155.100	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>937.565.400</b>	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	764.840.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	149.555.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13.360.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	9.810.400	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>2.074.280.400</b>	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	10.000.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	8.270.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2.056.010.400	
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>22.250.000</b>	

4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	22.250.000	
<b>4.02.02.2.07</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>4.500.000</b>	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4.500.000	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>11.017.782.800</b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.000.000.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.636.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16.146.800	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>9.450.089.576</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>9.450.089.576</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>9.450.089.576</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.351.059.576</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91.663.000</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.154.000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.984.000	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.020.000	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.189.000	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.204.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.900.000	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.212.000	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.163.410.726</b>	

5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.744.736.526	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.174.300	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	294.801.900	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.703.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.995.000	
<b>5.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.092.000</b>	
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.092.000	
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>229.777.000</b>	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.000.000	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.000.000	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37.777.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>364.162.000</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.950.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.592.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.560.000	
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.060.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	

5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.301.250	
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.000.000	
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	16.500.000	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.801.250	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.078.600	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.238.600	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.580.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.260.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.575.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.950.000	
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.625.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	902.682.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	664.790.000	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	68.132.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.372.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	143.149.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	104.182.000	

5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	48.577.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	281.378.000	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>76.910.000</b>	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.760.000	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	22.100.000	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50.050.000	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>160.982.000</b>	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	48.385.000	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	10.000.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	102.597.000	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.196.348.000</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>849.775.000</b>	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	260.952.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.021.000	

5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	69.832.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	43.075.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	198.005.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.000.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41.560.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	210.330.000	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1.105.729.000</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	405.841.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.311.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.652.000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	377.110.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	162.014.000	

5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.390.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	57.749.000	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	42.662.000	
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>1.240.844.000</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	877.917.000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.556.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.240.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	94.509.000	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40.282.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.770.000	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	167.570.000	
5.02	<b>KEUANGAN</b>	<b>134.564.114.844</b>	
5.02.0.00.0.00.01.0000	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>	<b>134.564.114.844</b>	
5.02.0.00.0.00.01.0000	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>	<b>134.564.114.844</b>	



5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.909.053.010	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.381.825	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.347.570	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.273.000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.208.220	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.155.060	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.582.440	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.304.440	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.511.095	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.000.575.590	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	197.646.000	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	671.139.710	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.492.440	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	121.297.440	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.929.945	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.270.000	
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.659.945	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.158.000	

5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.800.000	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.158.000	
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.150.000	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	2.050.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>31.770.000</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.770.000	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>135.000.000</b>	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.000.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>533.237.650</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.077.650	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	518.160.000	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>132.655.061.834</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>255.993.000</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	114.175.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	106.300.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	24.010.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	11.508.000	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>979.608.620</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	35.662.180	

5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	744.031.440	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	199.915.000	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>131.419.460.214</b>	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	131.419.460.214	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>6.905.304.378</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>6.905.304.378</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>6.905.304.378</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.906.647.723</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>62.870.000</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.841.000	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.550.000	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.055.000	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.720.000	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.675.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.029.000	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.265.630.973</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.977.564.973	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.484.000	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	171.834.000	

5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.045.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.703.000	
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>26.121.000</b>	
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.121.000	
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>627.592.000</b>	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.200.000	
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.722.000	
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.377.000	
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	135.777.000	
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	32.481.000	
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	28.794.000	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	151.305.000	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	41.936.000	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>288.545.000</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.045.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	

5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.018.750	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	33.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.018.750	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.195.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.150.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.930.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.115.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.675.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.187.500	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.447.500	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.040.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	998.656.655	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	260.071.530	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	213.883.530	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	46.188.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	498.454.125	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	79.105.375	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	197.011.750	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	222.337.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	184.983.000	

5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	33.080.000	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	151.903.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	55.148.000	
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	31.491.000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	23.657.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.416.333.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.416.333.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.416.333.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.416.333.000	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.416.333.000	
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.545.393.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	870.940.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.710.046.530	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.710.046.530	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.710.046.530	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.710.046.530	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	233.350.000	

5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	20.000.000	
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	213.350.000	
5.05.02.2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>563.046.000</b>	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	175.000.000	
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	144.166.000	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	243.880.000	
5.05.02.2.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>541.363.530</b>	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	98.400.000	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	200.000.000	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	242.963.530	
5.05.02.2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>372.287.000</b>	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	137.920.000	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	88.735.000	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	94.862.000	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.770.000	
5.06	<b>PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>102.914.100</b>	
4.01.5.06.5.07.01.00	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>102.914.100</b>	
4.01.5.06.5.07.01.00	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>102.914.100</b>	

5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	102.914.100	
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	102.914.100	
5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	102.914.100	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	13.321.752.627	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	13.321.752.627	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	13.321.752.627	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.144.827.627	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.360.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.360.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.063.549.628	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.789.962.628	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.187.000	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153.000.000	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.300.000	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.600.000	
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.600.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	438.175.000	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.350.000	



6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.100.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175.000.000	
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	21.725.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>284.765.000</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.940.000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.205.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.500.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.120.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.000.000	
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.015.209.999</b>	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.000.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.649.999	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	648.560.000	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>156.718.000</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.040.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.728.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.950.000	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>141.450.000</b>	

6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.250.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>4.739.825.000</b>	
6.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>4.505.765.000</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.756.390.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.404.360.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	97.525.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	156.040.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	390.100.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	224.430.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	476.920.000	
6.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>234.060.000</b>	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	234.060.000	
6.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>437.100.000</b>	
6.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>34.000.000</b>	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	26.150.000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	7.850.000	
6.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>403.100.000</b>	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	78.020.000	

6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	91.020.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	156.040.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	78.020.000	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
7.01	<b>KECAMATAN</b>	<b>69.950.649.221</b>	
7.01.0.00.0.00.01.0000	<b>Kecamatan Watang Sawitto</b>	<b>10.763.024.160</b>	
7.01.0.00.0.00.01.0000	<b>Kecamatan Watang Sawitto</b>	<b>6.574.024.160</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.574.024.160</b>	
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.625.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.850.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.775.000	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.054.549.160</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.906.524.160	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.113.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.912.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.050.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.950.000	
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>14.400.000</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.400.000	

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.400.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.500.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	28.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.300.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.250.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.250.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Bentengnge	521.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.828.000	

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.788.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95.040.000	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>22.000.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.200.000</b>	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.800.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.800.000	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.172.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.672.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>375.000.000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>375.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0002	<b>Kelurahan Penrang</b>	<b>524.000.000</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>149.000.000</b>	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>106.900.020</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.500.020	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.400.000	

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.099.980	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.599.980	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Salo	521.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.680.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.430.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.250.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.220.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.100.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Macorawalie	539.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	122.320.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.160.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.160.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.280.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000	

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.500.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.900.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>375.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>375.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>Kelurahan Jaya</b>	<b>521.000.000</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>146.000.000</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>104.950.000</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.720.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.230.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>23.200.000</b>	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.250.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000	



7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Sipatokkong	521.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.250.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.748.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.502.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.600.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600.000	

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.150.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Sawitto	503.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.410.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.230.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.180.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.340.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.340.000	

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.800.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.800.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.100.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0008	Kelurahan Siparappe	539.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.600.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.950.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98.650.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.550.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.550.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Paleteang	8.640.790.004	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Paleteang	5.478.790.004	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.463.690.004	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.800.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.200.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.200.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.200.000	

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.200.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.800.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.800.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.179.626.619</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.034.634.619	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.792.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.200.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.200.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.200.000</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.200.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>75.000.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>115.153.000</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.053.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35.126.385</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	2.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.626.385	

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.384.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.384.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.100.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.100.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.100.000	
7.01.0.00.0.00.02.0001	Kelurahan Pacongang	521.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.500.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.700.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.800.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.590.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.590.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000	

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.910.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.410.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Benteng Sawitto	521.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.568.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.768.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.800.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.850.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.850.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.670.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	630.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.325.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.200.000	

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.125.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.587.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.087.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>375.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>375.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0003</b>	<b>Kelurahan Mamminasae</b>	<b>539.000.000</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>164.000.000</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>49.253.000</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.453.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.800.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>27.200.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.200.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12.462.375</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.300.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.162.375	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75.084.625</b>	



7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.084.625	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>375.000.000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>375.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0004	<b>Kelurahan Temmassarangnge</b>	<b>521.000.000</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>146.000.000</b>	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>47.373.000</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.573.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.800.000	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>26.750.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.750.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>11.232.000</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.252.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	900.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.600.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.600.000	

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.175.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.675.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.870.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.220.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0005	Kelurahan Laleng Bata	521.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.323.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.523.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.800.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.450.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.450.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.200.600	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.600.600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.800.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.376.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.996.400	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.380.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.850.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	750.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0006	Kelurahan Macinnae	539.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.545.000	

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.745.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.800.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>27.650.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.650.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.300.000</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.120.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	900.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.500.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.500.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.644.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.144.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.500.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.361.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.076.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.285.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>375.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>375.000.000</b>	

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Kecamatan Tiroang</b>	<b>7.407.152.344</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Kecamatan Tiroang</b>	<b>4.222.120.244</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.212.260.244</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.940.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.990.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.990.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.990.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.990.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.990.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.990.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.806.478.244</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.672.087.244	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.201.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.210.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.990.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.990.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7.420.000</b>	

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.420.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>73.150.000</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.150.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>82.745.000</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.475.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.750.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.017.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.050.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.967.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>128.510.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.710.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.800.000	

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>9.860.000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>9.860.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.860.000	
7.01.0.00.0.00.03.0001	<b>Kelurahan Fakkie</b>	<b>526.937.000</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>149.237.000</b>	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>45.327.000</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.927.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.400.000	
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.370.000</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.370.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30.180.000</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.450.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.650.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>26.400.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.400.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.460.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.205.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.255.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	377.700.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	377.700.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	370.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.700.000	
7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Marawi	521.000.100	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.868.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.912.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.131.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.781.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.326.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.326.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.420.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	720.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.700.000	



7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.710.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.675.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.035.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	381.132.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	381.132.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	370.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.132.100	
7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Mattiro Deceng	557.989.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	172.789.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.894.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.184.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.710.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.230.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.230.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.400.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	750.000	

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.650.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.250.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.250.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>46.015.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.675.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.340.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>385.200.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>385.200.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	360.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.200.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0004</b>	<b>Kelurahan Pammase</b>	<b>469.435.000</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>144.950.000</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>43.545.000</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.175.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.370.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.125.000</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.125.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>27.850.000</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	540.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.310.000	

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.700.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.700.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.920.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.940.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.980.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.810.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.310.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	324.485.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	324.485.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24.485.000	
7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Samaturue	552.671.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176.371.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.484.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.084.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.400.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.420.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.420.000	

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.650.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.850.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.800.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.300.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	21.300.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.517.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.027.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.490.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	376.300.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	376.300.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	370.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.300.000	
7.01.0.00.0.00.03.0006	Kelurahan Tiroang	557.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	182.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.645.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.010.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.635.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.235.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.235.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.480.000	

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	600.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.800.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.140.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.940.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Mattiro Bulu	4.116.619.228	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Mattiro Bulu	3.038.619.228	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.994.568.228	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.025.000	

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.600.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.450.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.050.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.925.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.665.752.228</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.619.228	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.780.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.953.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.400.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.900.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.900.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>78.050.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.050.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>114.415.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	890.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	36.245.000	

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.200.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.050.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.550.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41.520.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.520.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48.056.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.056.000	
<b>7.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>8.800.000</b>	
7.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8.800.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>12.151.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>12.151.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.151.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>31.900.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>31.900.000</b>	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	31.900.000	

7.01.0.00.0.00.04.0001	Kelurahan Manarang	539.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	165.818.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.943.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.943.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.200.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.200.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.675.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.675.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	373.182.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	373.182.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.182.000	
7.01.0.00.0.00.04.0002	Keluraha Padaidi	539.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	165.812.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.802.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.802.000	



7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.600.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.400.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.200.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.410.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.410.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	373.188.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	373.188.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.188.000	
7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Suppa	4.810.717.575	
7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Suppa	3.750.717.575	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.715.036.575	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.376.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.666.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.155.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.570.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.142.000	

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.141.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.835.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.867.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.145.756.575</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.997.080.675	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.998.900	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.326.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.351.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.712.000</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.712.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>90.582.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.582.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>218.713.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.376.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.242.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.125.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.530.000	

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.629.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.314.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.315.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.268.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.918.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.440.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.910.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.890.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.890.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.890.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.791.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.791.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.791.000	
7.01.0.00.0.00.05.0001	Kelurahan Watang Suppa	539.000.000	

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.697.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.497.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.200.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.180.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.180.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.200.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.200.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.480.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.480.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.943.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.528.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.415.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000	

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.0002	Kelurahan Tellumpanua	521.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.962.500	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.762.500	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.200.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.120.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.120.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.300.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.300.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.330.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.650.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.837.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.037.500	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.800.000	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Mattiro Sompe	3.643.911.396	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Mattiro Sompe	2.601.911.396	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.601.911.396	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.980.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.950.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.825.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.475.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.700.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.850.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.740.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.440.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.211.021.396	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.056.795.396	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.976.000	

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.800.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.450.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>95.250.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.250.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>117.100.000</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.400.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.100.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>33.700.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	21.550.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.150.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.750.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.085.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.665.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.110.000</b>	

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.130.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.140.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.840.000	
7.01.0.00.0.00.06.0001	Kelurahan Pallameang	521.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.395.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.095.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.300.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.710.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.210.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.395.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.205.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.190.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	



7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0002</b>	<b>Kelurahan Langnga</b>	<b>521.000.000</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>146.000.000</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>96.395.000</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.595.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.800.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.450.000</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	750.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.700.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.150.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.150.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.655.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.911.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.744.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>350.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>375.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>375.000.000</b>	

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Lanrisang	3.239.690.448	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Lanrisang	2.700.690.708	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.688.000.708	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.706.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.006.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.950.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.950.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	400.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	400.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.318.892.708	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.177.730.708	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.552.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.700.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.660.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.250.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.720.000	

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.720.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>55.360.000</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	360.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>96.780.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	380.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.050.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.350.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>33.000.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.642.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.442.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.200.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.900.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.850.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>11.670.000</b>	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.670.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.670.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.020.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.020.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.020.000	
7.01.0.00.0.00.07.0001	Kelurahan Lanrisang	538.999.740	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.759.740	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.514.800	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.314.800	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.200.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.770.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.800.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.970.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.474.940	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.619.140	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.855.800	

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	351.240.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	351.240.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	333.750.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.490.000	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Patampanua	6.794.652.272	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Patampanua	4.147.502.272	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.138.202.272	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.750.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.400.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.400.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.090.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.720.263.272	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.547.502.272	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.665.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.196.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.900.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.380.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.380.000	

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.700.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.700.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.486.300	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.166.300	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.520.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.800.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.125.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.125.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.612.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.127.500	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.485.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.595.200	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.870.800	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.130.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.594.400	

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.300.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.300.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.300.000	
7.01.0.00.0.00.08.0001	Kelurahan Tonyamang	670.787.500	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	203.677.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.589.900	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.639.900	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.950.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.600.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.600.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.588.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.088.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.500.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.600.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.600.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.710.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.440.200	

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.270.000	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.589.400</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.089.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>467.110.000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>467.110.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.110.000	
7.01.0.00.0.00.08.0002	<b>Kelurahan Teppo</b>	<b>658.787.500</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>191.677.500</b>	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>77.092.500</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.142.500	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.950.000	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24.500.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>20.880.000</b>	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.880.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>21.550.000</b>	



7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.550.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>46.696.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.116.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.580.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>959.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	959.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>467.110.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>467.110.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.110.000	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0003</b>	<b>Kelurahan Benteng</b>	<b>658.787.500</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>190.814.500</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>70.769.500</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.649.500	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.120.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24.050.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.050.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.440.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.440.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.205.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.205.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.350.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	467.973.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	467.973.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.973.000	
7.01.0.00.0.00.08.0004	Kelurahan Maccirinna	658.787.500	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.687.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.038.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.788.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.250.000	

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.400.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.200.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.940.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.940.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.109.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.109.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	463.100.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	463.100.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.100.000	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Duampanua	7.318.173.862	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Duampanua	4.631.908.862	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.624.043.762	

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.690.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	150.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	150.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	560.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	560.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.270.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.242.413.662	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.129.468.862	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.284.800	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.350.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.310.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.250.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.250.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.842.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	842.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.110.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	780.000	

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.330.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.187.300</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.927.300	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.260.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>186.550.800</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.110.800	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>7.865.100</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>7.865.100</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.865.100	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0001</b>	<b>Kelurahan Lampa</b>	<b>534.000.000</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>164.000.000</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>38.088.600</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.728.600	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.360.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.000.000</b>	

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>20.100.000</b>	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.100.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.450.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.675.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.775.000	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.361.400</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.361.400	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>370.000.000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>370.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.795.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.205.000	
7.01.0.00.0.00.09.0002	<b>Kelurahan Pekkabata</b>	<b>534.000.000</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>164.000.000</b>	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>47.914.000</b>	

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.384.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.530.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.000.000</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>26.950.000</b>	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.950.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.000.000</b>	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.136.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.236.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.900.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>370.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>370.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0003</b>	<b>Kelurahan Tatae</b>	<b>534.000.000</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>164.000.000</b>	

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.665.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.665.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.970.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.970.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.365.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.880.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.485.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	370.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	370.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	
7.01.0.00.0.00.09.0004	Kelurahan Bittoeng	533.265.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.265.000	



7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.725.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.791.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.934.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.800.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.800.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.240.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.740.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	370.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	370.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	

7.01.0.00.0.00.09.0005	Kelurahan Data	551.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.446.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.556.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.890.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.330.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.330.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.450.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.200.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.250.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.774.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.619.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.155.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	370.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	370.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>Kecamatan Batulappa</b>	<b>3.845.956.788</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>Kecamatan Batulappa</b>	<b>3.287.956.788</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.278.436.788</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>33.775.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.005.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.335.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.335.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.385.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.710.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.005.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.880.131.788</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.741.156.888	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.682.900	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.720.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.640.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.932.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>25.099.000</b>	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.335.000	

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.764.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>105.102.000</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.102.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>126.560.000</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.560.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>36.708.500</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.250.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.562.500	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.896.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>29.221.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.851.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.370.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41.839.500</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.276.500	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.563.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>9.520.000</b>	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.520.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.520.000	
7.01.0.00.0.00.10.0001	Kelurahan Kassa	558.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	188.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.247.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.547.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.700.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.170.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.170.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.190.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	540.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.650.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.050.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.300.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.250.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.205.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.205.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.138.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.138.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	370.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	370.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Cempa	3.964.750.822	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Cempa	3.434.050.822	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.434.050.822	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.240.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.120.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.120.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.470.050.022	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.253.566.022	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.764.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.600.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.120.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	

7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	280.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>312.700.000</b>	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.700.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>199.550.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	69.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.550.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>61.555.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.700.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.855.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.955.800</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.755.800	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.200.000	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0001</b>	<b>Kelurahan Cempa</b>	<b>530.700.000</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>154.549.000</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>52.834.000</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.934.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.900.000	

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.900.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.820.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.350.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	14.350.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.465.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.470.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.995.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	376.151.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	376.151.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	340.400.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.751.000	
7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Lembang	5.405.210.322	
7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Lembang	4.338.210.322	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.329.060.322	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.290.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	570.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000	



7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.470.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.833.737.822</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.722.772.822	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.555.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.400.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.010.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.500.000</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.500.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>120.950.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.700.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>56.017.500</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.017.500	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.025.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.700.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.325.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>125.540.000</b>	

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.250.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.290.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>9.150.000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>9.150.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.150.000	
7.01.0.00.0.00.12.0001	<b>Kelurahan Tadokkong</b>	<b>521.000.000</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>163.800.000</b>	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>62.601.000</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.601.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.000.000	
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.000.000</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>41.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.500.000	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.199.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.439.000	

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.760.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>357.200.000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>357.200.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.200.000	
7.01.0.00.0.00.12.0002	<b>Kelurahan Betteng</b>	<b>546.000.000</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>176.000.000</b>	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>95.500.000</b>	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.300.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.200.000	
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.000.000</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>13.600.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.600.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.900.000</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.400.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>47.500.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.000.000	

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.500.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>370.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>370.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>5.743.908.541</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>5.743.908.541</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>5.743.908.541</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.055.085.481</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.025.000</b>	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.525.000	

8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.613.571.981</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.403.691.151	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.660.830	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153.220.000	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.500.000	
<b>8.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.560.000</b>	
8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.560.000	
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>106.850.000</b>	
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.850.000	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>134.020.000</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.380.000	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.650.000	
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34.890.000</b>	

8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.890.000	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.755.000</b>	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.494.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.621.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.640.000	
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.413.500</b>	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.783.500	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.440.000	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>61.448.000</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>61.448.000</b>	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	46.050.000	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.398.000	

8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	1.287.612.000	
8.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan</b>	1.287.612.000	
	<b>Situasi Politik</b>		
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	86.812.000	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.200.800.000	
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	1.010.044.000	
8.01.04.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	1.010.044.000	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.010.044.000	
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	30.669.060	
8.01.05.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>	30.669.060	

	<b>Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.250.000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.419.060	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>299.050.000</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>299.050.000</b>	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	283.800.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.250.000	



4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.2  
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	625.552.613.122
2	Belanja Barang dan Jasa	372.687.604.369
3	Belanja Hibah	98.277.020.343
4	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000
5	BELANJA MODAL	182.166.914.937
	Belanja Modal Tanah	1.700.019.043
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.405.677.064
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.423.509.091
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.764.909.741
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	437.000.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	435.799.998
6	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	7.031.972.800
8	Belanja Bantuan Keuangan	135.998.016.800
	TOTAL	1.440.014.142.371

BAB V  
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dana atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kabupaten Pinrang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk anggaran pokok 2023 rencana pembiayaan Kabupaten Pinrang sebesar Rp. 35.000.000.000,- Yang berasal dari SiLPA tahun berjalan sebagai sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. – (Nihil).

Tabel 5.1  
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan  
Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	
	Pembiayaan Netto	35.000.000.000	

**BAB VI**  
**P E N U T U P**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Jika dalam proses pembahasan Rancangan PERDA APBD Tahun 2023 menjadi PERDA APBD Tahun 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pinrang,

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID

**LAMPIRAN**  
**RANCANGAN PRIORITAS**  
**DAN PLAFON ANGGARAN**  
**SEMENTARA KAB PINRANG**  
**TA. 2023**



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							332,421,756,243		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							541,699,765		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	70,486,115	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	34,953,220	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19,804,475	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,195,000	
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17,450,000	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	124,356,955	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	259,454,000	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							328,655,819,028		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3394 Orang/bulan	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	97 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	327,448,444,828	
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	97 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	257,207,000	
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	97 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	908,800,000	
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	97 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,081,600	
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	97 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,285,600	
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							95,370,725		
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	95,370,725	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							668,135,010		
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	67,500,000	
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100,959,590	
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	249,675,420	
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	250,000,000	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							609,550,375		
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	57,810,375	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,000,000	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	101,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	135,540,000	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	300,000,000	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							562,800,000		
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	183,300,000	
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	301,500,000	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	28,000,000	
1	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,000,000	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							332,548,560		
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	203,773,560	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	128,775,000	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							955,832,780		
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	113,130,000	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 47 Unit	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	58,300,000	
1	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit 1 Unit	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18,000,000	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	756,402,780	
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							92,027,719,857		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							50,326,862,834		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,999,974,400	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	400,044,015	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,762,655,864	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,000,183,950	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	17 Paket	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	990,350,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	327 Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100,479,000	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	327 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	303,900,980	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	160 Peserta Didik	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	347,526,625	



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	92,366,000	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 100 Orang	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	254,299,000	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	327 Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	168,943,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	327 Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	36,734,300,000	
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0 Orang 327 Orang	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	171,840,000	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									28,176,671,555	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595,79 Tahun	95,79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	221,735,790	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,668,910,240	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	221,735,790	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	400,073,580	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	440,050,000	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	9 Paket	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	400,000,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	40499 Peserta Didik	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	43,007,085	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	58 Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	74,034,070	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	160 Peserta Didik	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	454,509,000	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	58 Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	62,716,000	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	58 Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar Usia 13 - 1595.79 Tahun	95.79 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,189,900,000	
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									8,067,344,808	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	Persentase PAUD yang terakreditasi	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	884,166,000	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	Persentase PAUD yang terakreditasi	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	604,272,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	Persentase PAUD yang terakreditasi	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	559,292,938	
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	Persentase PAUD yang terakreditasi	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	550,400,000	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 100 Orang	Persentase PAUD yang terakreditasi	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	182,628,650	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	223 Satuan Pendidikan	Persentase PAUD yang terakreditasi	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	902,348,220	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	223 Satuan Pendidikan	Persentase PAUD yang terakreditasi	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,384,237,000	
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									5,456,840,660	
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket 3 Paket	Angka Melek Huruf (AMH) 15 - 24	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	68,993,260	

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase terlestarikannya cagar budaya	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	60 Orang	Persentase Lembaga Adat yang terbina	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralai	255,476,000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								645,541,000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								645,541,000	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan Kesenian Tradisional	80 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200 Orang	Persentase Kelompok Kesenian Yang Dibina	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralai	645,541,000	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								43,250,000	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								43,250,000	
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Prosentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	100 %	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	Persentase Museum yang dikelola	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralai	43,250,000	
TOTAL													426,899,680,340	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023																
Kabupaten Pinrang																
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									49,888,126,728		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									200,870,600		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase ketercapaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,200,000		
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,400,000		
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,950,000		
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,090,000		
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,575,000		
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Persentase ketercapaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25,180,600		
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Persentase ketercapaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	142,475,000		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									45,358,261,128		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 Orang/bulan	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,652,674,128		
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,417,000		
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	592,020,000		
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24,900,000		
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	71,250,000		
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									11,900,000		
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,900,000		
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									439,540,000		
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	97,500,000		
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,980,000		
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,060,000		
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									400,338,000		
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,988,000		
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	26,100,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	55,800,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	314,450,000	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								378,200,000	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Persentase ketercapaian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	191,200,000	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Persentase ketercapaian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		187,000,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								261,200,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Persentase ketercapaian pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	230,000,000	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	31,200,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,837,817,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	157,330,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,200,000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,675,287,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								72,531,526,260	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								30,964,904,110	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,158,704,000	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,149,474,000	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,675,287,000	
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,720,842,000	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,635,500,000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,845,358,110	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,550,000,000	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000,000	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,375,000	



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	Persentase ketercapaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,364,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							41,462,498,150		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7215 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,609,670,980	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6726 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	334,670,000	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6740 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	369,920,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12587 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,773,682,380	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69404 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,749,215,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	232011 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	996,670,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54247 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	607,871,880	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69870 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297,570,000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9078 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212,824,060	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1037 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,070,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	629 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	347,970,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7531 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	281,180,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,773,267,990	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	867,364,700	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	777,900,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,002,615,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,146,577,610	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245,580,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	912,165,800	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1037 Orang	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,845,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan terselenggaranya pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	0 Orang 1 Paket	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245,620,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,660,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,844,622,950	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,442,004,800	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,870,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18 Unit	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,800,000	
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,000,000	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	87286 Keluarga	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	913,290,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								44,124,000	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Persentase tercapainya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,124,000	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								60,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit	Persentase tercapainya penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								2,503,720,000	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								16,830,000	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,830,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								2,486,890,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	Persentase tercapainya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,486,890,000	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								324,213,000	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								49,980,000	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Persentase tercapainya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,640,000	
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 %	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	103 Sarana	Persentase tercapainya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,340,000	
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								34,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi ALKES dan PKRT	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,000,000	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								115,325,000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Persentase ketercapaian penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,325,000	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								124,908,000	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 %	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan terselenggaranya post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	0 Unit 1 Paket	Persentase tercapainya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,908,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								170,294,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								170,294,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional	100 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan advokasi pemberdayaan,kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,294,000	
TOTAL													125,417,879,988	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Umum Madising**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							22,589,483,943		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							16,989,483,943		
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Bungi	6,717,440,000	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	100 %		10,272,043,943	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							5,000,000,000		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Bungi	5,000,000,000	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							600,000,000		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	Persentase tercapainya penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Bungi	600,000,000	
TOTAL												22,589,483,943		

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Mattiro Bulu**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,000,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,000,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Mattiwo Bulu, Semua Kelurahan	2,000,000,000	
TOTAL													2,000,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Leppangang**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							600,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							600,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	600,000,000	
TOTAL													600,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Tuppeu**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,650,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,650,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	2,650,000,000	
TOTAL													2,650,000,000	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Suppa

	TOTAL	1,150,000,000	
--	-------	---------------	--



**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Lanrisang**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,100,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,100,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Lansirang, Semua Kelurahan	1,100,000,000	
TOTAL													1,100,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Mattombong**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,600,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,600,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	1,600,000,000	
TOTAL													1,600,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Sulili**

	TOTAL	1,200,000,000	
--	-------	---------------	--

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Salo**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,250,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,250,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	2,250,000,000	
TOTAL													2,250,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Lampa**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,750,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,750,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1,750,000,000	
TOTAL													1,750,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Cempa**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,000,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
TOTAL													1,000,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Mattiro Deceng**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,300,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,300,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	1,300,000,000	
TOTAL													1,300,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Teppo**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,100,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,100,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	2,100,000,000	
TOTAL													2,100,000,000	



Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Bungin

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,650,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,650,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Sernua Kelurahan	1,650,000,000	
TOTAL													1,650,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Salimbongang**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,550,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,550,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	1,550,000,000	
TOTAL													1,550,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Batulappa**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,200,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,200,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1,200,000,000	
TOTAL													1,200,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Tadang palie**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							650,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							650,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan daerah kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	650,000,000	
TOTAL													650,000,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Ujung Lero**

	TOTAL	1,250,000,000	
--	-------	---------------	--

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							90,559,840,356		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							54,260,000		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,820,000	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,155,000	
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,205,000	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,155,000	
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,205,000	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Persentase dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30,720,000	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							31,220,157,796		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/bulan	Persentase Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	29,221,057,796	
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Persentase Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,982,760,000	
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,670,000	
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,670,000	
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,410,000		
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Dokumen Asset terselesaikan tepat waktu	1 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,410,000	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							309,645,000		
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Jumlah dokumen kepegawaian dibuat tepat waktu	2 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,645,000	
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	Jumlah dokumen kepegawaian dibuat tepat waktu	2 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	300,000,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							178,320,000		
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	43,320,000	
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	35,000,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100,000,000	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,667,050,000		
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	460,100,000	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	119,450,000	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	621,000,000	
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	466,500,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,097,247,560		

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Jasa Pelayanan Umum kantor terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,197,247,560	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Jasa Pelayanan Umum kantor terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	900,000,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							29,750,000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang yang terpelihara	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	29,750,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							55,000,000,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Persentase meningkatnya pelayanan BLUD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	55,000,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							13,804,823,893		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							13,754,823,893		
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan  Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan	100 % 100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Gedung	Persentase terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	583,060,000	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan  Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan	100 % 100 %	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	Persentase terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	974,140,000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan  Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan	100 % 100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	Persentase terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,997,623,893	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan  Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan	100 % 100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Paket	Persentase terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200,000,000	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000		
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan  Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan	100 % 100 %	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 RS	Jumlah izin penyelenggaraan Rumah Sakit dibuat tepat waktu	1 Paket	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,000,000	
TOTAL													104,364,664,249	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang															
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang															
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang															
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,291,152,410		
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								52,725,000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	10,875,000		
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	6,000,000		
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	6,975,000		
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	5,500,000		
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	7,375,000		
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	14,560,000		
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	1,440,000		
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,863,893,663		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersusun tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan 73 Orang/bulan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang berkualitas	12 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	5,965,095,878		
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah laporan administrasi keuangan yang berkualitas	12 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	285,591,785		
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase terpenuhinya laporan administrasi keuangan sesuai target dan berkualitas	12 Dokumen 98.2 %	Jumlah laporan administrasi keuangan yang berkualitas	12 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	570,500,000		
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang berkualitas	12 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	16,220,000		
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang berkualitas	12 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	26,486,000		
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6,680,000		
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun sesuai aturani	4 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	1,380,000		
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun sesuai aturani	4 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	5,300,000		
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								284,569,995		
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang terlaksana sesuai aturan	3 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	65,200,000		
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang terlaksana sesuai aturan	3 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	19,370,000		
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang terlaksana sesuai aturan	3 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	199,999,995		
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								481,715,000		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	6 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	7,500,000		
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	6 Laporan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	7,015,000		



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	6 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	20,100,000	
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	6 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	52,100,000	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	6 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	300,000,000	
1	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	6 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	95,000,000	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,141,927,750	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 kendaraan 1 Unit	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan unit	4 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	966,947,000	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit 16 Unit	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan unit	4 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	19,150,000	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan unit	4 Laporan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,650,750	
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah prasarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Sarana 2 Unit	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan unit	4 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	36,180,000	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,197,879,000	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terdistribusi secara efektif dan efisien	12 Laporan 1056 Surat	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	1,050,000	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah jasa komunikasi dan listrik sesuai kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Bangunan 12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	155,424,000	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor sesuai analisa kebutuhan	12 Laporan 32 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	1,041,405,000	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,261,762,002	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah laporan pemenuhan jasa pemeliharaa n, biaya pemeliharaa n, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasiona	31 Unit 12 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan BMD sesuai rencana kebutuhan	4 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	1,634,412,000	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah laporan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Laporan 122 Unit	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan BMD sesuai rencana kebutuhan	4 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	240,000,000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan BMD sesuai rencana kebutuhan	4 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	281,600,002	
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan BMD sesuai rencana kebutuhan	4 Laporan	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	105,750,000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								7,441,980,225	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								7,441,980,225	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %	Jumlah dokumen JAKSTRADA yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan teknis SPAM Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun	103421 rumah tangga	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	242,850,000	

## Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %	Jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimasi SPAM	1 Perjanjian 1 Perjanjian 3 Dokumen	Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun	103421 rumah tangga	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	194,270,000	
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	40 Liter/Detik	Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun	103421 rumah tangga	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,654,494,230	
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 Liter/Detik	Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun	103421 rumah tangga	Kab. Pinrang, Suppa, Maritengngae, Kab. Pinrang, Duampanua, Kaliang	1,650,000,000	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	150 SR	Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun	103421 rumah tangga	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,700,365,995	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								798,236,682	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								798,236,682	
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	75 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Luas lahan TPA Regional sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	9.31 Ha	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	219,355,000	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	75 %	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Luas TPA Regional yang dibangun direhabilitasi	36953 Rumah Tangga 11 Ha	Luas lahan TPA Regional sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	9.31 Ha	Kab. Pinrang, Patampanua, Malimpung	578,881,682	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								6,702,250,007	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								6,702,250,007	
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak	90415 rumah tangga	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	343,850,007	
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Setempat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99 %	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	100 Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak	90415 rumah tangga	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000,000	
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99 %	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S  Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	650 Rumah 14 Unit	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak	90415 rumah tangga	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,000,000	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99 %	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T  Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	450 Rumah 450 Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak	90415 rumah tangga	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,319,400,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								7,316,224,736	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								7,316,224,736	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,30 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	Luasan daerah tergenang	331.22 Ha	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	300,000,000	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,30 %	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	56950 M	Luasan daerah tergenang	331.22 Ha	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,896,194,736	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,30 %	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	207000 M	Luasan daerah tergenang	331.22 Ha	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,120,030,000	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								25,000,000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	0,06 Rasio	Jumlah Dokumen teknis infastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Jumlah permukiman di Kawasan strategis daerah yang dibangun Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Permukiman 3 Sistem Jaringan	Jumlah permukiman di kawasan strategis daerah yang dibangun	7 Permukiman	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							390,949,900		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							390,949,900		
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100 %	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	250 IMB 3 Dokumen 0.00083 Rasio	Jumlah bangunan ber-IMB	6774 Bangunan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	390,949,900	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							2,238,377,500		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							2,238,377,500		
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	0,0192 Rasio	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah bangunan gedung yang dibangun serta PIU yang terpasang	2680 unit	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	125,000,000	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	0,0192 Rasio	Jumlah bangunan gedung yang dibangun Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Penerangan jalan umum yang terpasang	3 Gedung 2 Kawasan 624 Unit	Jumlah bangunan gedung yang dibangun serta PIU yang terpasang	2680 unit	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	832,625,000	
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	0,0192 Rasio	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara	2 Bangunan 1 Kawasan 2671 Unit	Jumlah bangunan gedung yang dibangun serta PIU yang terpasang	2680 unit	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,280,752,500	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							49,446,968,642		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							49,446,968,642		
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	98 %	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	Panjang jalan kondisi baik	811.72 Km	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	100,000,000	
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	98 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen teknis leger jalan Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Persentase sempadan jalan yang dipakai pada bangunan rumah lianggang kaki lima atau	1 Dokumen 1 Dokumen 52.83 % 0.58 %	Panjang jalan kondisi baik	811.72 Km	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,350,200	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	98 %	Panjang Jalan yang Dibangun	20 KM	Panjang jalan kondisi baik	811.72 Km	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,540,350,000	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	98 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0.1 KM	Panjang jalan kondisi baik	811.72 Km	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,882,000,005	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	98 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jalan yang dipelihara	8.82 KM 5 Km	Panjang jalan kondisi baik	811.72 Km	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,963,500,000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	98 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	3.5 KM 35.39 Km	Panjang jalan kondisi baik	811.72 Km	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,144,650,000	

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi														
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							11,735,033,878		
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							80,057,000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Laporan perencanaan yang diselesaikan	9 dokumen	Semua Kab/Kota, Watang Sawito, Maccoralaie	23,976,000	
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Laporan perencanaan yang diselesaikan	9 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12,058,000	
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Laporan perencanaan yang diselesaikan	9 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,245,000	
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Laporan perencanaan yang diselesaikan	9 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,390,000	
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Laporan perencanaan yang diselesaikan	9 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,802,000	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah laporan dokumen yang diselesaikan	1 dokumen	Laporan perencanaan yang diselesaikan	9 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,039,000	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah laporan yang diselesaikan	2 laporan	Laporan perencanaan yang diselesaikan	9 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	6,547,000	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,432,122,538		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	103 orang	Jumlah hasil laporan keuangan yang diselesaikan	2 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,373,207,938	
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah item ATK yang diadakan Jumlah tenaga teknis yang dipekerjakan SPPD ASN UPTD	38 item 3 orang 160 kali	Jumlah hasil laporan keuangan yang diselesaikan	2 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	337,474,600	
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah jasa pelaksanaan transaksi keuangan	14 jasa	Jumlah hasil laporan keuangan yang diselesaikan	2 laporan		683,690,000	
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah hasil laporan keuangan yang diselesaikan	2 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12,700,000	
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah hasil laporan keuangan yang diselesaikan	2 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25,050,000	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							378,875,000		
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 pasang 120 pasang	Jumlah laporan kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	6 laporan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,200,000	
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	Jumlah laporan kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	6 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	28,130,000	
1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah laporan kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	6 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13,545,000	
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Jumlah laporan kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	6 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	250,000,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							398,939,700		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	81 buah	Persentase hasil administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,521,700	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 buah	Persentase hasil administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,048,000	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 buah	Persentase hasil administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,050,000	
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32 Dokumen	Persentase hasil administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	31,320,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	30 sppd	Persentase hasil administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	350,000,000	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,086,292,000		
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	60,000,000	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit			Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,000,000	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah pengadaan AC, printer dsb Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit 2 Unit			Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	84,090,000	
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	892,202,000	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							151,197,640		
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah surat yang terdistribusi	6601 surat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan	100 persen		18,395,000	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah tagihan telepon dan listrik setiap bulannya	12 bulan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	110,537,640	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah jasa telepon dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 item 0 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	22,265,000	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							207,550,000		
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	BBM pemeliharaan kendaraan dinas pejabat STNK escavator STNK kendaraan dinas	12000 liter 2 unit 3 unit 39 unit	Persentase pengadaan barang milik daerah yang disediakan	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	202,900,000	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah servis AC dan komputer	20 Unit 20 unit	Persentase pengadaan barang milik daerah yang disediakan	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,650,000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							19,562,554,430		
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							7,302,606,000		
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Pemeliharaan / normalisasi sungai yang dilaksanakan	20000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,370,000	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	Pemeliharaan / normalisasi sungai yang dilaksanakan	20000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	815,095,000	
1	03	02	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah unit air baku yang terbangun Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	2 paket 440 M	Pemeliharaan / normalisasi sungai yang dilaksanakan	20000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	642,040,000	
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	150 m	Pemeliharaan / normalisasi sungai yang dilaksanakan	20000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,340,000	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	130 KM	Pemeliharaan / normalisasi sungai yang dilaksanakan	20000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,187,044,000	
1	03	02	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Pemeliharaan / normalisasi sungai yang dilaksanakan	20000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,695,000	
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Pemeliharaan / normalisasi sungai yang dilaksanakan	20000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	423,005,000	
1	03	02	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 dokumen	Pemeliharaan / normalisasi sungai yang dilaksanakan	20000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,530,000	
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota.asitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Pemeliharaan / normalisasi sungai yang dilaksanakan	20000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,487,000	

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								12,259,948,430		
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2.6 KM	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi Primer dan sekunder	10000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,398,544,000	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3.2 KM	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi Primer dan sekunder	10000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,422,320,000	
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi Primer dan sekunder	10000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	448,275,000	
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	2000 KM	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi Primer dan sekunder	10000 m	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,590,265,000	
1	03	02	2.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	1 Kawasan	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi Primer dan sekunder	10000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	512,551,900	
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	800 M	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi Primer dan sekunder	10000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	607,216,000	
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	4 Unit	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi Primer dan sekunder	10000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,246,460,000	
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	2 Di	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi Primer dan sekunder	10000 m	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,220,000	
1	03	02	2.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	1 Kawasan	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi Primer dan sekunder	10000 m	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,096,530	
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								212,922,000		
1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								75,722,000		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	95100 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang	Persentase peserta pelatihan konstruksi yang trampil	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,232,000	
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	95100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Dokumen	Persentase peserta pelatihan konstruksi yang trampil	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,490,000	
1	03	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								27,600,000		
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	95100 %	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	2 Dokumen	Persentase penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi yang dihasilkan	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,600,000	
1	03	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)								35,410,000		
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	95100 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	30 Orang	Persentase penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,430,000	
1	03	11	2.03	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	95100 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional	50 Orang	Persentase penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,980,000	
1	03	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								74,190,000		
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	95100 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50 Orang	Persentase pengawasan tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib pemamfaatan bina konstruksi	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,190,000	
TOTAL												31,510,510,308		

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,59 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,59 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000,000	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							3,630,000,000		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							3,630,000,000		
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Terselenggaranya Urusan PSU Perumahan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	46 Lokasi	Terselenggaranya Urusan PSU Perumahan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000,000	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	Terselenggaranya Urusan PSU Perumahan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							8,102,445,400		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							88,075,000		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %		56,000,000	
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,500,000	
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,125,000	
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,500,000	
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,125,000	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,900,000	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	925,000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,675,908,900		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,106,952,000	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,606,900	
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	437,000,000	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,550,000	
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,800,000	
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,600,000		
2	11	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,600,000	

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							261,725,000		
2	11	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,725,000	
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							387,907,500		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,757,500	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,750,000	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,400,000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		350,000,000	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							868,000,000		
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	57,000,000	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	191,000,000	
2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	600,000,000	
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,000,000	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							232,329,000		
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,860,000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	143,619,000	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		83,850,000	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							582,900,000		
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	170,225,000	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,675,000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	400,000,000	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							501,775,000		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							141,205,000		
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141,205,000	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							360,570,000		
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RP/JP/RP/JMD	Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Dokumen KLHS RP/JP/RP/JMD Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RP/JP/RP/JMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan KLHS RP/JMD Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360,570,000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							4,208,687,000		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							4,208,687,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup														
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	70,2 %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Tercapainya Pencegahan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000,000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	70,2 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Tercapainya Pencegahan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,130,000	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	70,2 %	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Tercapainya Pencegahan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,557,000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								400,000,000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								400,000,000	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pengelolaan KEHATI	100 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.2 Ha	Terlaksananya Pengelolaan akan KeHati/RTH Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								50,000,000	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3								25,000,000	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pengendalian LB3 yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	Persentase VerLap yang dilakukan utnuk memastikan Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Penyimpanan Sementara	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								25,000,000	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Pengendalian LB3 yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Jumlah Koordinasi dan Sinkorinisasi Penyimpanan Sementara Limbah B3	2 Kali	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								125,000,000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								125,000,000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan dibina oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	3 kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								250,000,000	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								250,000,000	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	Tercapainya Inventarisasi dan Penetapan MHA	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								30,000,000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30,000,000	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup	100 %	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga	Terselenggaranya Pendidikan/Pelatihan/Penyuluhan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								7,761,815,000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								7,761,815,000	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	12 Laporan	Terlaksananya Penanganan dan Pengelolaan Sampah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,987,205,000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten	100 %	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	20374.14 ton	Terlaksananya Penanganan dan Pengelolaan Sampah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,617,000,000	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten	100 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	Terlaksananya Penanganan dan Pengelolaan Sampah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,610,000	

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

	TOTAL	34,550,962,400	
--	-------	----------------	--

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan														
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,260,889,378	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								21,820,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Persentase ketercapaian tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,260,000	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,915,000	
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,540,000	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Persentase ketercapaian tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,780,000	
1	05	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Persentase ketercapaian tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		1,970,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,051,292,378	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,733,683,018	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,489,360	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201,920,000	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,130,000	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,070,000	
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15,810,000	
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Persentase ketercapaian laporan barang milik daerah yang tersedia	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	730,000	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Persentase ketercapaian laporan barang milik daerah yang tersedia	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,080,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								202,810,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Persentase ketercapaian sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,100,000	
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Persentase ketercapaian sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %		9,710,000	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Persentase ketercapaian sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %		120,000,000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								226,750,000	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase ketercapaian kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Persentase ketercapaian kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,530,000	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Persentase ketercapaian kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		5,220,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Persentase ketercapaian kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %		200,000,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,500,000	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	95 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,500,000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61,968,000	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %		2,040,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %		46,608,000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,320,000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								619,939,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Persentase ketercapain pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	95 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	413,439,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 10 Unit	Persentase ketercapain pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	95 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,500,000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase ketercapain pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	95 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								1,487,485,000	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1,392,825,000	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	95 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	10 Kasus	Persentase ketercapaian penanganan gangguan trantibum dalam wilayah Kab. Pinrang	95 %		1,329,405,000	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	95 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus 10 Kasus	Persentase ketercapaian penanganan gangguan trantibum dalam wilayah Kab. Pinrang	95 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,580,000	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase ketercapaian penanganan gangguan trantibum dalam wilayah Kab. Pinrang	95 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,840,000	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								94,660,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	Persentase ketercapain penegakan peraturan daerah dalam wilayah Kab. Pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,640,000	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	95 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	Persentase ketercapain penegakan peraturan daerah dalam wilayah Kab. Pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,020,000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								2,239,000,000	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								2,239,000,000	

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	84 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Persentase ketercapaian layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota	95 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,141,600,000	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	84 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	Persentase ketercapaian layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota	95 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,400,000	
TOTAL													11,987,374,378	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang																
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,084,844,272	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										55,470,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,560,000			
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,760,000			
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,940,000			
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,500,000			
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,010,000			
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25,440,000			
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,260,000			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,469,842,272	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,142,569,272			
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55 Dokumen	persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	155,223,000			
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	152,000,000			
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,160,000			
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,890,000			
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										15,150,000	
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	persentase ketercapaian pengelolaan barang milik daerah SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,890,000			
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	persentase ketercapaian pengelolaan barang milik daerah SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13,260,000			
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										186,470,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	47,500,000			
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	38,250,000			
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dokumen	persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	720,000			
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100,000,000			
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										196,060,000	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	peersentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,070,000			
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	peersentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,790,000			



**Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	peersentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13,200,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	peersentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	180,000,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								667,726,600	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		583,874,000	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	83,852,600	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								111,515,400	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	persentase ketercapaian jasa penunjang urusan npemerintahana daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	22,270,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	persentase ketercapaian jasa penunjang urusan npemerintahana daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,570,400	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	persentase ketercapaian jasa penunjang urusan npemerintahana daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	38,675,000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								382,610,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	174,380,000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	190,000,000	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18,230,000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								877,420,200	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								467,000,000	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	5 Dokumen	persentase ketercapaian pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota	100 %		467,000,000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								224,390,200	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		28,572,000	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	60,058,200	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Jumlah Penanganan Pascabencana yang terlaksana	12 bulan	persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	42,460,000	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang	persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	93,300,000	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								186,030,000	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	persentase jumnlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	36,680,000	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 kecamatan	persentase jumnlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,490,000	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 kecamatan	persentase jumnlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,860,000	
TOTAL													3,962,264,472	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,141,397,881		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							14,670,000		
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dansesuai aturan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,015,000	
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dansesuai aturan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,455,000	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dansesuai aturan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,470,000	
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dansesuai aturan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,455,000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dansesuai aturan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,880,000	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dansesuai aturan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,395,000	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,096,315,881		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,839,645,881	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	181,480,000	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,790,000	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,400,000	
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							15,870,000		
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Persentase pengelolaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,140,000	
1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Persentase pengelolaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,730,000	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							121,675,000		
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	Pesentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,075,000	
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Pesentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,600,000	
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	Pesentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,000,000	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							253,910,000		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,750,000	

## Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,660,000	
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								259,500,000	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,700,000	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,800,000	
1	06	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								99,542,000	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,792,000	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,750,000	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								279,915,000	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114,925,000	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,990,000	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								221,181,000	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								221,181,000	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	100 %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,720,000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	100 %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	12 Orang 100 %	Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,186,000	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	100 %	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	40 Keluarga 100 %	Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,535,000	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	100 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,600,000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	100 %	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,140,000	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								6,000,000	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								6,000,000	

**Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial**  
**Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan WNI Migran	100 %	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Persentase Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								438,665,000	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								237,440,000	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Pemakanan	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,165,000	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,155,000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,245,000	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,250,000	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,650,000	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,275,000	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,100,000	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,780,000	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,920,000	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,250,000	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,650,000	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								201,225,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,490,000	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,090,000	
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,240,000	
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,140,000	
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,675,000	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,785,000	
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,265,000	
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,100,000	
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,550,000	
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,250,000	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,650,000	
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,990,000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							41,889,000		
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							27,363,000		
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar yang terlaksana	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,467,000	
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar yang terlaksana	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,260,000	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar yang terlaksana	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,636,000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							14,526,000		
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12 Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,400,000	

**Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial**  
**Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi														
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,138,847,456		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							36,880,000		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,395,000	
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,850,000	
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,990,000	
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,300,000	
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,180,000	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Persentase tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,165,000	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,285,318,076		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,911,256,616	
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	67,482,460	
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	298,619,100	
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,264,900	
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,695,000	
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,440,000		
2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Persentase laporan barang dan aset yang akuntabel	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,440,000	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							171,090,000		
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Persentase sumber daya Aparatur yang Mencapai nilai SKP baik Dan Kelengkapan lainnya	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	46,400,000	
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Persentase sumber daya Aparatur yang Mencapai nilai SKP baik Dan Kelengkapan lainnya	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,690,000	
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Persentase sumber daya Aparatur yang Mencapai nilai SKP baik Dan Kelengkapan lainnya	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	115,000,000	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							189,865,000		
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Persentase tercapainya pelayanan administrasi umum	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,105,000	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Persentase tercapainya pelayanan administrasi umum	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,760,000	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Persentase tercapainya pelayanan administrasi umum	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	175,000,000	
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							119,739,500		
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	persentase kebutuhan barang milik daerah terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	43,040,000	
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	persentase kebutuhan barang milik daerah terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	persentase kebutuhan barang milik daerah terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	69,199,500	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							85,625,380		
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,050,000	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	61,249,380	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,326,000	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							248,889,500		
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	60,869,500	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,420,000	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	173,600,000	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							8,225,000		
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							8,225,000		
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	1,05 %	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	10 Perusahaan	Persentase penyusunan RTK yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,225,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							247,796,900		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							199,465,800		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	2,50 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 Orang	Besaran Pelaksanaan Pelatihan berbasis kompetensi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	157,565,800	
	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	2,50 %	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6 Unit	Besaran Pelaksanaan Pelatihan berbasis kompetensi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	41,900,000	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							24,970,100		
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	2,50 %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	42 Lembaga	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang dibina	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,970,100	
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil							7,270,000		
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	2,50 %	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	Persentase produktivitas perusahaan kecil yang terdata	15 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,270,000	
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							16,091,000		
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	2,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	persentase Alumni Lembaga pelatihan ketenagakerjaan yang kompeten	55 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,091,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							88,573,600		
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							39,739,200		
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	60 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	800 Orang	Persentase pencari kerja yang terlayani	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,020,000	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	60 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	Persentase pencari kerja yang terlayani	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,430,000	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	60 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Persentase pencari kerja yang terlayani	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,289,200	
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							8,500,000		
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	60 %	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	3 Lembaga	Persentase LPTKS yang mendapatkan Izin	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,500,000	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							21,605,000		
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	60 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	Presentase penyebaran informasi pasar kerja yang disebarakan secara online	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,605,000	



## Kabupaten Pinrang

**Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	07	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								18,729,400		
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	60 %	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	Persentase PMI (Pra dan purna penempatan yang terlindungi	80 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,729,400	
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								94,395,000		
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								48,620,000		
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PPPKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	65 %	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	persentase perusahaan yang menerapkan PP dan PKB	30 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,540,000	
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PPPKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	65 %	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	persentase perusahaan yang menerapkan PP dan PKB	30 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,875,000	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PPPKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	65 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	persentase perusahaan yang menerapkan PP dan PKB	30 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,205,000	
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								45,775,000		
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PPPKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	65 %	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	persentase Perselisihanhubungan industrial yang terselesaikan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PPPKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	65 %	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 Perkara	persentase Perselisihanhubungan industrial yang terselesaikan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,790,000	
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PPPKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	65 %	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	persentase Perselisihanhubungan industrial yang terselesaikan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,985,000	
3	32	02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI								25,080,000		
3	32	02	2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi								25,080,000		
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Persentase partisipasi warga, pemerintah setempat dan instansi terkait yang mengikuti Musyawarah penetapan kawasan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	Besaran pemerataan pembangunan berbasis kawasan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,080,000	
3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								20,110,000		
3	32	03	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								20,110,000		
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi yang terpenuhi	100 %	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 Kepala Keluarga	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 daerah kab/kota yang terserap	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,110,000	
3	32	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								60,373,000		
3	32	04	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian								60,373,000		
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi	100 %	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	Jumlah satuan pemukiman yang mandiri	2 SP	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,373,000	
TOTAL												5,683,400,956		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							213,465,000		
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							104,575,000		
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Indeks Pembangunan Gender	97,58 Indeks	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	Presentase Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/kota	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,575,000	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							47,650,000		
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Organisasi			Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	47,650,000	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							61,240,000		
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender	97,58 Indeks	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Presentase Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	100 %		61,240,000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							49,900,000		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							49,900,000		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase perlindungan perempuan	100 100%	Pelaksanaan Kebijakan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	12 Kecamatan	persentase pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten / kota	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,900,000	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,171,251,969		
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							126,060,000		
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,100,000	
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	1 dokumen	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,350,000	
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Dokumen RKPA yang Tersusun	1 dokumen	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,180,000	
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	1 dokumen	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,350,000	
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Dokumen DPPA yang Tersusun	1 dokumen	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,180,000	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Dokumen LPPD, LKJIP, dan perjanjian Kinerja yang Tersusun	3 dokumen	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,970,000	
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Dokumen Evaluasi renstra dan Evaluasi Renja yang Tersusun	2 dokumen	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,930,000	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,849,712,289		
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Presentase Administrasi Kuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,510,757,529	
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Presentase Administrasi Kuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	145,044,760	
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Honorarium PA, KPA, PPTK, Honorarium Administrasi yang Terbayarkan Tepat Waktu	0 Dokumen 12 bulan	Presentase Administrasi Kuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,100,000	
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	1 laporan	Presentase Administrasi Kuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,750,000	
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Penyusunan laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	1 laporan	Presentase Administrasi Kuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,060,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							17,617,500		
2	14	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Aset yang Tersusun	0 Laporan 1 dokumen	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,617,500	
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							160,650,000		
2	14	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Penyusunan ANJAB dan EVIAB yang Tersusun	0 Dokumen 2 dokumen	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,650,000	
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Bimbingan Teknis Yang Terlaksana	12 bulan	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							474,722,000		
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Komponen Listrik Kantor Yang Tersedia	4 Jenis	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,072,000	
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan	7 unit	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,290,000	
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Examplar Minat Baca Aparatur	13 Examplar	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,240,000	
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Terintegritas dan sesuai Analisa Kebutuhan Yang Terlaksana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan 0 Laporan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	433,120,000	
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							164,743,500		
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Meja Kerja	0 Unit 2 unit	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,186,000	
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,557,500	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							82,786,680		
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Tersedia	12 bulan	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,786,680	
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							294,960,000		
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pajak dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional terproses setiap Tahun, BBM, Service Kendaraan Dinas, Honorarium Supir	0 Unit 12 bulan	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,410,000	
2	14	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	10 unit	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,550,000	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							130,895,000		
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							14,900,000		
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	TFR (Angka Kelahiran Total) TFR(Angka Kelahiran Total)	2,08 % 2.08 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Sosialisasi laju pertumbuhan penduduk yang Terlaksana	0 Organisasi 12 Kecamatan	laju pertumbuhan Penduduk	0.71 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,900,000	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							115,995,000		
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,08 %	Jumlah Pengumpulan dan Pengolahan data pelayanan KB/KS/dan PP	12 Kecamatan	Presentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,995,000	

## Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,08 %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga  Jumlah Pembinaan Tribina, BKB, BKR, BKL, dan UPPKS, Pelatihan Kader Keluarga Balita, Pemberdayaan PKK	0 Laporan 12 Kecamatan	Presentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,000,000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								6,226,643,576	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								40,200,000	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,54 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang  Jumlah promosi KB dan KIE melalui media yang terlaksana	0 Dokumen 12 bulan	Presentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	98 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,200,000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								6,186,443,576	
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,54 %	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	240 Orang	Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	98 %		50,800,000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,54 %	Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 Kecamatan 0 Orang	Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	98 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,550,000	
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,54 %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB  Jumlah Peningkatan pelayanan KB ke setiap pelosok desa	0 Dokumen 12 Kecamatan	Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	98 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,924,195,976	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,54 %	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Tersedia  Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	100 persen 0 Unit	Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	98 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,647,600	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,54 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya  Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaring dan jejaringnya yang Terlaksana	0 Laporan 12 Kecamatan	Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	98 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,550,000	
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,54 %	Jumlah Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Terlaksana  Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	12 Kecamatan 0 Orang	Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	98 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,700,000	
TOTAL													11,792,155,545	

## Kabupaten Pinrang

**Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,113,621,237		
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,500,000		
	2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	Persentase Ketercapaian pengelolaan Perencanaan dan penganggaran	100 %	3,300,000	
	2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Ketercapaian pengelolaan Perencanaan dan penganggaran	100 %	3,300,000	
	2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Ketercapaian pengelolaan Perencanaan dan penganggaran	100 %	3,300,000	
	2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Ketercapaian pengelolaan Perencanaan dan penganggaran	100 %	3,300,000	
	2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Ketercapaian pengelolaan Perencanaan dan penganggaran	100 %	3,300,000	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,739,945,237		
	2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	27 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang dibayarkan tepat waktu	100 %	2,565,030,000	
	2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	26 Jenis	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang dibayarkan tepat waktu	100 %	36,924,237	
	2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah jasa admistrasi keuangan dan perencanaan yang dibayarkan tepat waktu	12 Orang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang dibayarkan tepat waktu	100 %	133,491,000	
	2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang dibayarkan tepat waktu	100 %	3,300,000	
	2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang dibayarkan tepat waktu	100 %	1,200,000	
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							22,800,000		
	2	09	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah jasa pengelolaan Barang yang dibayarkan tepat waktu	2 Orang	Jumlah Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dibayarkan tepat waktu	2 Orang	22,800,000	
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							220,860,000		
	2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	Persentase Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	50,000,000	
	2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Persentase Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	11,460,000	
	2	09	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Persentase Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	9,400,000	
	2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan sesuai analisa kebutuhan	15 Orang	Persentase Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	150,000,000	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							199,140,000		
	2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	100 %	4,520,000	
	2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Persentase Penggandaan Dokumen sesuai analisa kebutuhan	100 %	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	100 %	1,800,000	
	2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar dan Majalah yang Disediakan	24 Buah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	100 %	17,820,000	
	2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	27 Pegawai	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	100 %	175,000,000	
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							406,186,000		
	2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	100 %	406,186,000	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							90,780,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan														
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan	10 Orang	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	100 %		12,000,000	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	100 %		59,580,000	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	100 %		19,200,000	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								417,410,000	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara oleh SKPD sesuai analisa kebutuhan	100 %		56,050,000	
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara oleh SKPD sesuai analisa kebutuhan	100 %		25,360,000	
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara oleh SKPD sesuai analisa kebutuhan	100 %		336,000,000	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								374,950,000	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								374,950,000	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	2 Unit	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang Tersedia Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	2 Unit 0 Unit	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	2 Unit		361,700,000	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	2 Unit	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	2 Unit		13,250,000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								887,750,000	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								394,800,000	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	38,10 %	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	Persentase ketersediaan pangan dan data harga pangan pokok	95 %		164,800,000	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	38,10 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	Persentase ketersediaan pangan dan data harga pangan pokok	95 %		85,850,000	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	38,10 %	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10 Dokumen	Persentase ketersediaan pangan dan data harga pangan pokok	95 %		144,150,000	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								197,000,000	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	38,10 %	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Ton	Persentase cadangan pangan kabupaten/kota yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	95 %		190,000,000	
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	38,10 %	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	15 Ton	Persentase cadangan pangan kabupaten/kota yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	95 %		7,000,000	
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi								9,175,000	
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	38,10 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan lokal	1 laporan		9,175,000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								286,775,000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan ) Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	38,10 % 38 %	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Persentase Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi	100 Persen		10,800,000	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan ) Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	38,10 % 38 %	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Persentase Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi	100 Persen		264,575,000	

**Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan**  
**Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )  Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	38,10 %  38 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Persentase Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi	100 Persen		11,400,000	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								135,850,000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								77,200,000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang tertangani	100 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Jumlah Peta Kerentanan Pangan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Peta		77,200,000	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								58,650,000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang tertangani	100 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota sesuai analisa kebutuhan	100 %		58,650,000	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								34,804,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								34,804,000	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95 %	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	Jumlah jasa tim jejaring keamanan pangan dan penujian pangan segar sesuai analisa kebutuhan	2 Kali		29,100,000	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah jasa tim jejaring keamanan pangan dan penujian pangan segar sesuai analisa kebutuhan	2 Kali		5,704,000	
TOTAL													5,546,975,237	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang																
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil																
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil																
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,869,900,654	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										53,200,000	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,200,000			
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,000,000			
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah makan minum lembur yang tersedia sesuai aturan dan tepat waktu	5 Jenis 1 Dokumen 135 Dos	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	95 %		8,000,000			
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah makan minum lembur yang tersedia sesuai aturan dan tepat waktu	6 Jenis 1 Dokumen 135 Dos	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	95 %		3,000,000			
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah makan minum lembur yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	5 Jenis 1 Dokumen 135 Dos	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	95 %		5,000,000			
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,000,000			
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen hasil evaluasi yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	5 Jenis 1 Dokumen	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	95 %		4,000,000			
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,218,700,654	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan yang tersusun tetap waktu dan sesuai aturan	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,995,700,654			
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN jumlah makan minum rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan jumlah makan minum tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	15 Jenis 82 orang 800 dos 250 orang	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan yang tersusun tetap waktu dan sesuai aturan	95 %		50,000,000			
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan yang tersusun tetap waktu dan sesuai aturan	95 %		150,000,000			
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan yang tersusun tetap waktu dan sesuai aturan	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,000,000			
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan yang tersusun tetap waktu dan sesuai aturan	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,000,000			
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										27,000,000	
2	12	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Persentase barang dan asset yang terinventaris sesuai kebutuhan	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	27,000,000			
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										211,500,000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	Persentase aparatur yang disiplin dan Penyusunan laporan sesuai aturan	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,000,000			
2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Persentase aparatur yang disiplin dan Penyusunan laporan sesuai aturan	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000			



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil														
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Persentase aparatur yang disiplin dan Penyusunan laporan sesuai aturan	95 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,500,000	
2														
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah bimbingan tehknis yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Bimtek 0 Orang	Persentase aparatur yang disiplin dan Penyusunan laporan sesuai aturan	95 %		150,000,000	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								271,000,000	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Gedung kantor dalam Kondisi Baik	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Gedung kantor dalam Kondisi Baik	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,000,000	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Persentase Gedung kantor dalam Kondisi Baik	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,000,000	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	26 Dokumen	Persentase Gedung kantor dalam Kondisi Baik	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,000,000	
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Persentase Gedung kantor dalam Kondisi Baik	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,000,000	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Persentase Gedung kantor dalam Kondisi Baik	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188,000,000	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								215,000,000	
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	45,000,000	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	70,000,000	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100,000,000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								405,500,000	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terbayarkan tepat waktu	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,500,000	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	jumlah bangunan pemerintah yang fasilitasi komunikasi, sumber daya air, listrik, internet yang terpenuhi sesuai analisa kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 gedung 0 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terbayarkan tepat waktu	90 %		200,000,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terbayarkan tepat waktu	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200,000,000	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								468,000,000	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Persentase barang milik daerah yang terpeliharaan sesuai analisa kebutuhan	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	85,000,000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah aplikasi yang terupgrade sesuai versi yang berlaku Jumlah Pemeliharaan Komputer yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Aplikasi 15 Unit	Persentase barang milik daerah yang terpeliharaan sesuai analisa kebutuhan	90 %		18,000,000	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase barang milik daerah yang terpeliharaan sesuai analisa kebutuhan	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	350,000,000	
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	Persentase barang milik daerah yang terpeliharaan sesuai analisa kebutuhan	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,000,000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								1,493,000,000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								1,493,000,000	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang terdaftar dalam database	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100 Dokumen	Persentase tertibnya administrasi kependudukan kepemilikan KK, KTP dan SKPWNl	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil														
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terdaftar dalam database	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	100 Dokumen	Persentase tertibnya administrasi kependudukan kepemilikan KK, KTP dan SKPWNI	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,000,000,000	
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terdaftar dalam database	100 %	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	1000 Orang	Persentase tertibnya administrasi kependudukan kepemilikan KK, KTP dan SKPWNI	100 %		17,000,000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terdaftar dalam database	100 %	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Persentase tertibnya administrasi kependudukan kepemilikan KK, KTP dan SKPWNI	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	380,000,000	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase penduduk yang terdaftar dalam database	100 %	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10000 Dokumen	Persentase tertibnya administrasi kependudukan kepemilikan KK, KTP dan SKPWNI	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	85,000,000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								176,000,000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								176,000,000	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100 Dokumen	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32,000,000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil	100 %	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	90 %		144,000,000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								206,500,000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								171,500,000	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat	91,3% %	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah perangkat siak yang terpelihara	5 Jenis 1 aplikasi	Persentase data kependudukan yang akurat	89 %		41,500,000	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat	91,3% %	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah makan minum lembur yang tersedia sesuai analis kebutuhan Jumlah Perjalanan Dinas ke Kecamatan yang terbayarkan tepat waktu	12 Jenis 216 dos 50 kali	Persentase data kependudukan yang akurat	89 %		130,000,000	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								35,000,000	
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Persentase data kependudukan yang akurat	91,3% %	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	50 Dokumen	Persentase data kependudukan yang akurat	90 %		35,000,000	
TOTAL													6,745,400,654	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,451,887,986			
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							116,195,000			
	2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Renja,Renja Perubahan,Renstra dan Renstra Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan Tepat Waktu	4 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		70,045,000	
	2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,650,000	
	2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		5,400,000	
	2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		4,850,000	
	2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		5,400,000	
	2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun sesuai aturan dan Tepat Waktu	4 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		11,600,000	
	2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		14,250,000	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,308,145,486			
	2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji yang tepat waktu	0 Orang/bulan 12 Bulan	Persentase Pelayanan Keuangan	100 %		2,884,291,216	
	2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Persentase Pelayanan Keuangan	100 %		42,379,270	
	2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang tersedia tepat waktu	12 Dokumen	Persentase Pelayanan Keuangan	100 %		363,925,000	
	2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	Persentase Pelayanan Keuangan	100 %		9,450,000	
	2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang tersusun tepat waktu	3 Laporan	Persentase Pelayanan Keuangan	100 %		8,100,000	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,750,000			
	2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan BMD yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	Persentase Pelaksanaan BMD	100 %		2,750,000	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							153,925,000			
	2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga	44 Pasang	Persentase Administrasi Kepegawaian	100 %		20,250,000	
	2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan ANJAB,EVJAB, dan SKJ yang tersusun sesuai aturan tepat waktu	3 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian	100 %		31,650,000	
	2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen SKP tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian	100 %		2,025,000	
	2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah ASN yang ditingkatkan Sumber dayanya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang 0 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian	100 %		100,000,000	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							378,022,500			
	2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	1 Paket	Persetanse Administrasi Perkantor	100 %		4,938,000	
	2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Penyediaan Peralatan Komputer	34 Buah	Persetanse Administrasi Perkantor	100 %		3,840,000	
	2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	Persetanse Administrasi Perkantor	100 %		6,332,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Cetakan dan Pengandaan yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	4 Paket	Persetanse Administrasi Perkantor	100 %		16,000,000	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Surat Kabar/Majalah dan Tabloid	45 buah	Persetanse Administrasi Perkantor	100 %		19,500,000	
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah bahan/material untuk pameran pembangunan	4 Paket	Persetanse Administrasi Perkantor	100 %		7,412,500	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah	12 Bulan	Persetanse Administrasi Perkantor	100 %		320,000,000	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								163,800,000	
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas	2 Unit	Persentase Pengadaan Barang	100 %		60,000,000	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah pengadaan Meja dan Kursi Kerja	10 Buah	Persentase Pengadaan Barang	100 %		7,300,000	
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah peralatan cetak,Komputer PC dan Lattop Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (AC dan Sound System)	10 Unit 3 Unit	Persentase Pengadaan Barang	100 %		86,500,000	
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	10,000,000	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72,330,000	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah rekening layanan jasa telepon,internet,air dan listrik yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi	100 %		68,680,000	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %			Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi	100 %		3,650,000	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								256,720,000	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisis Kebutuhan	6 Unit	Persentase Pemeliharaan BMD	100 %		129,480,000	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18 Unit	Persentase Pemeliharaan BMD	100 %		10,450,000	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor	1 Paket	Persentase Pemeliharaan BMD	100 %		116,790,000	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA								314,973,600	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								314,973,600	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terselenggaranya penataan Desa	100 %	Jumlah Desa yang akan di mekarkan Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa 0 Desa	Jumlah Aparatur Desa	69 Orang		85,040,000	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terselenggaranya penataan Desa	100 %	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti sosialisasi Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	69 Orang 0 Desa	Jumlah Aparatur Desa	69 Orang		117,735,000	
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terselenggaranya penataan Desa	100 %	Jumlah Desa yang terfasilitasi Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Dokumen 0 Desa	Jumlah Aparatur Desa	69 Orang		112,198,600	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								48,634,000	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								48,634,000	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase kerjasama Desa	12 Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	0 Dokumen 3 Kawasan	Jumlah Desa yang melakukan Kerja Sama	12 Desa		48,634,000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								72,356,530,998	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								72,356,530,998	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Aparatur Desa yang terdaftar sebagai Peserta	612 Orang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %		1,952,967,688	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Naskah Rancangan Perbub yang tersusun dan tersosialisasi	0 Dokumen 11 Perbub	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %		178,887,000	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Aparatur Desa dan masyarakat yang dilatih Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	355 Orang 0 Dokumen	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %		199,365,000	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0 Dokumen	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,501,538,000	
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Desa yang dibina/Evaluasi Pengelolaan,Administrasi Keuangan Desa,Profil Desa dan administrasi Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	69 Desa 0 Dokumen	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %		126,723,870	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Aparatur Desa/Masyarakat yang mengikuti pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik desa Jumlah Aparatur Desa/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan/Penguatan Administrasi dan Pelaporan BUNDESMA Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BUNDESMA terbaik tingkat kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Monitoring Kawasan BUMDESMA Jumlah Penerima Bantuan Bagi Kelompok Usaha Mikro	69 Orang 24 Orang 9 Kecamatan 0 Dokumen 9 Kecamatan 44 Kelompok	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %		402,995,000	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	9 Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %		498,607,000	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	142 Orang 0 Dokumen	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %		266,890,000	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0 Dokumen	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %		80,672,440	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	13 Desa 0 Dokumen	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralai	147,885,000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							981,954,000		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							981,954,000		
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	90 %	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Pelatihan Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti Pelatihan Jumlah Lembaga Adat yang mengikuti pelatihan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah LPM yang mengikuti Pelatihan Jumlah RT/RW yang mengikuti Pelatihan	100 Orang 138 Orang 100 Orang 0 Lembaga 100 Orang 100 Orang	Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan	90 %		294,857,000	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0 Dokumen 100 Orang	Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan	90 %		58,150,000	

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	TOTAL	78,153,980,584	
--	-------	----------------	--

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.15.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan dan Pertanahan														
Sub Unit Organisasi : 2.15.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan dan Pertanahan														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							20,800,000		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							20,800,000		
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	62 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Berita Acara			Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	20,800,000	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							1,711,219,043		
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,711,219,043		
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	65,5 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Pendistribusian dan Pengkoordinasian Sertifikat Terlaksana Secara Efektif dan Efisien	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,711,219,043	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							20,800,000		
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							20,800,000		
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	20,800,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,388,040,593		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							60,693,000		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Persentase Laporan yang Akuntabel dan Selesai Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	27,780,000	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Laporan yang Akuntabel dan Selesai Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,960,000	
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Laporan yang Akuntabel dan Selesai Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,000,000	
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Laporan yang Akuntabel dan Selesai Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,390,000	
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Laporan yang Akuntabel dan Selesai Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,384,000	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Persentase Laporan yang Akuntabel dan Selesai Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,619,000	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Persentase Laporan yang Akuntabel dan Selesai Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,560,000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,865,314,193		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Persentase Serapan Anggaran Secara Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,410,558,393	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Persentase Serapan Anggaran Secara Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	183,472,400	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Laporan	Persentase Serapan Anggaran Secara Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	262,253,400	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dukumen	Persentase Serapan Anggaran Secara Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,030,000	
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	Persentase Serapan Anggaran Secara Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,000,000	
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							73,302,000		
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dukumen	Persentase Barang dan Asset Daerah yang Terinventarisasi Sesuai Aturan yang Berlaku	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	73,302,000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							353,570,000		
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Pegawai	Peresentase aparatur yang disiplin dalam melaksanakan tugas	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	186,500,000	
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Ls	Peresentase aparatur yang disiplin dalam melaksanakan tugas	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17,070,000	

## Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 2.15.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan dan Pertanahan

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
							Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Pegawai	Persentase aparaturnya yang disiplin dalam melaksanakan tugas	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	150,000,000	
2	15	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								245,868,400	
2	15	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Gedung	Jumlah bangunan pemerintah yang terfasilitasi sumber daya air dan listriknya secara optimal	3 Gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,100,000	
2	15	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Buah	Jumlah bangunan pemerintah yang terfasilitasi sumber daya air dan listriknya secara optimal	3 Gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,949,150	
2	15	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	37 Bacaan	Jumlah bangunan pemerintah yang terfasilitasi sumber daya air dan listriknya secara optimal	3 Gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	37,170,000	
2	15	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Kegiatan	Jumlah bangunan pemerintah yang terfasilitasi sumber daya air dan listriknya secara optimal	3 Gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17,649,250	
2	15	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Jumlah bangunan pemerintah yang terfasilitasi sumber daya air dan listriknya secara optimal	3 Gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	175,000,000	
2	15	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123,265,000	
2	15	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	123,265,000	
2	15	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								178,410,000	
2	15	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah bangunan pemerintah yang terfasilitasi sumber daya air dan listriknya secara optimal	3 Gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,050,000	
2	15	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah bangunan pemerintah yang terfasilitasi sumber daya air dan listriknya secara optimal	3 Gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	98,340,000	
2	15	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah bangunan pemerintah yang terfasilitasi sumber daya air dan listriknya secara optimal	3 Gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	34,000,000	
2	15	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah bangunan pemerintah yang terfasilitasi sumber daya air dan listriknya secara optimal	3 Gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	39,020,000	
2	15	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								392,958,000	
2	15	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Persentase kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	209,058,000	
2	15	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Persentase kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	38,900,000	
2	15	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Persentase kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	145,000,000	
2	15	01	2.13			Penataan Organisasi								94,660,000	
2	15	01	2.13	02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	94,660,000	
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								2,371,850,500	
2	15	02	2.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								203,759,500	
2	15	02	2.02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179,759,500	
2	15	02	2.02	04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150 Unit	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,000,000	
2	15	02	2.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								43,756,000	
2	15	02	2.03	03		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	6 Unit	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,756,000	
2	15	02	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								1,193,020,000	



Unit Organisasi : 2.15.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan dan Pertanahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7 Unit	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,041,000,000	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,520,000	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,500,000	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								20,660,000	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Persentase sinegritas pemangku kepentingan dalam kelancaran berlalu lintas	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,660,000	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								843,350,000	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Persentase kegiatan angkutan umum	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	843,350,000	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								67,305,000	
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,305,000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								134,736,530	
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota								11,899,530	
2	15	03	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga	100 %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam satu daerah sesuai kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,005,000	
2	15	03	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Terlaksananya sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam satu daerah sesuai kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,894,530	
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								27,343,000	
2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga	100 %	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Persentase masyarakat yang mengetahui aturan / kebijakan di bidang perhubungan	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,230,000	
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga	100 %	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Persentase masyarakat yang mengetahui aturan / kebijakan di bidang perhubungan	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,113,000	
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal								95,494,000	
2	15	03	2.08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga	100 %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Persentase alat penyeberangan terpelihara dan dikelola dengan baik	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,494,000	
TOTAL													10,647,446,666	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,350,924,694		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							39,029,000		
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 3 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,949,000	
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,911,000	
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,870,000	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,143,000	
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,836,000	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,150,000	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,170,000	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,452,664,694		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan SKPD	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,972,668,694	
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan SKPD	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,014,000	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan SKPD	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	361,602,000	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan SKPD	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,310,000	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan SKPD	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,070,000	
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,891,000		
2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Persentase Ketersediaan laporan aset	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,311,000	
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Persentase Ketersediaan laporan aset	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,580,000	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							87,510,000		
2	16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,510,000	
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							135,280,000		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi umum SKPD	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi umum SKPD	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,780,000	

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi umum SKPD	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							537,255,000		
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204,640,000	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	332,615,000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							96,295,000		
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Persentase Ketersedian Barang Milik daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,500,000	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Persentase Ketersedian Barang Milik daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,795,000	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							1,301,276,000		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,301,276,000		
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	94 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Persentase Ketersediaan Informasi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,190,000	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	94 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Persentase Ketersediaan Informasi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,790,000	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	94 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Persentase Ketersediaan Informasi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,240,000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	94 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0 Dokumen 1 Dokumen	Persentase Ketersediaan Informasi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,210,000	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	94 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	Persentase Ketersediaan Informasi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,116,508,000	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	94 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	Persentase Ketersediaan Informasi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,338,000	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							2,720,250,000		
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							2,505,690,000		
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang memanfaatkan e-government	100 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	84 Unit	Persentase Domain dan Sub Domain yang dimanfaatkan perangkat daerah yang disediakan diskominfoandi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,505,690,000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							214,560,000		
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase SKPD yang memanfaatkan e-government	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Persentase Pemanfaatan Aplikasi pada perangkat daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214,560,000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							76,340,000		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							76,340,000		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Pinrang	100 %	jumlah data /informasi pembangunan daerah yang tersedia dalam bentuk buku Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10 item 1 Kegiatan	Persentase Data Statistik Sektoral Terintegrasi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,830,000	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Pinrang	100 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun Jumlah Meta Data Statistik Sektoral yang tersedia dalam aplikasi	45 Dokumen 45 SKPD	Persentase Data Statistik Sektoral Terintegrasi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,510,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							61,430,000		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							61,430,000		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	persentase SKPD pengguna layanan tingkat kematangan keamanan informasi	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Persentase SKPD yang memilki sistem Keamnnan Data dan Informasi	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,430,000	
TOTAL													8,510,220,694	

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,163,654,091		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							45,211,000		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Cakupan tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,145,000	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,716,000	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,100,000	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,210,000	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,460,000	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Cakupan tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,580,000	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,240,339,601		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,947,306,001	
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	94,461,600	
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	194,352,000	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,220,000	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							147,370,000		
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	40,500,000	
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,720,000	
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		1,150,000	
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100,000,000	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							275,854,000		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,154,000	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28 Dokumen	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,700,000	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	250,000,000	
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,200,040,000		
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Cakupan pengadaan barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	43,040,000	
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Cakupan pengadaan barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	109,000,000	
2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 0 Unit	Cakupan pengadaan barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,048,000,000	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							101,094,490		

**Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**  
**Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	72,734,490	
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,800,000	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18,560,000	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								153,745,000	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah yang terbayarkan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	81,745,000	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah yang terbayarkan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13,000,000	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah yang terbayarkan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	59,000,000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								50,740,000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								50,740,000	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang	100 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	Cakupan Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32,580,000	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang	100 %	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	50 Unit Usaha	Cakupan Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18,160,000	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								70,555,000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								70,555,000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	100 Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit Usaha	Cakupan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang diperiksa dan diawasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32,655,000	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	100 Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	3 Unit Usaha	Cakupan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang diperiksa dan diawasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	37,900,000	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								47,581,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								47,581,000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing	100 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	Cakupan Pendidikan dan Latihan koperasi dalam wilayah kabupaten Pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	47,581,000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								75,450,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								75,450,000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase peningkatan kuantitas produk usaha koperasi	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam wilayah kabupaten Pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	75,450,000	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								112,130,000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								112,130,000	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	100 %	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100 Dokumen	cakupan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kabupaten pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12,000,000	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	cakupan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kabupaten pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	27,190,000	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	cakupan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kabupaten pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30,000,000	
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	100 %	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10 Orang	cakupan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kabupaten pinrang	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	42,940,000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								41,176,000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								41,176,000	

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

	TOTAL	5,561,286,091	
--	-------	---------------	--

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang																
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,644,094,805	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										55,625,000	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	70 %		10,540,000			
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	70 %		4,890,000			
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	70 %		5,265,000			
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	70 %		5,140,000			
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	70 %		5,640,000			
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	70 %		24,150,000			
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,324,228,405	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %		3,397,843,405			
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 item	persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %		425,258,000			
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Jasa	persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %		481,800,000			
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %		5,607,000			
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %		8,540,000			
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %		5,180,000			
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										13,500,000	
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %			Persentase Laporan Aset / Barang Milik Daerah Dalam Tingkat akurasi yang baik dan Tepat waktu	50 %		13,500,000			
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										145,455,000	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	137 Pasang	persentase aparatur yang disiplin mematuhi aturan	100 %		13,800,000			
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Kegiatan	persentase aparatur yang disiplin mematuhi aturan	100 %		6,655,000			
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Bimtek	persentase aparatur yang disiplin mematuhi aturan	100 %		125,000,000			
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										198,580,000	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan umum	80 %		10,000,000			
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Jenis Barang	persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan umum	80 %		13,580,000			
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan umum	80 %		175,000,000			
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										490,200,000	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Jenis Barang	persentase pengadaan barang	70 %		21,000,000			
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis Barang	persentase pengadaan barang	70 %		363,600,000			

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket pekerjaan	persentase pengadaan barang	70 %		105,600,000	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								133,805,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rekening	persentase jasa kantor	100 %		100,920,000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Jenis	persentase jasa kantor	100 %		32,885,000	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								282,701,400	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Kendaraan Dinas	persentase pemeliharaan barang	80 %		80,501,400	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis Barang	persentase pemeliharaan barang	80 %		36,000,000	
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Paket pekerjaan	persentase pemeliharaan barang	80 %		166,200,000	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								66,040,000	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								66,040,000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal	2357 Investasi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	potensi daerah	50 %		66,040,000	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								489,925,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								489,925,000	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	2900 Perizinan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	persentase penyelenggaraan promosi	100 %		43,300,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	2900 Perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen 4 Dokumen	persentase penyelenggaraan promosi	100 %		446,625,000	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								273,636,000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								273,636,000	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Pinrang	4,76 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Pelaku Usaha 1800 Non Usaha 2900 pelaku usaha	persentase peningkatan pengelolaan perizinan	70 %		189,336,000	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Pinrang	4,76 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	5 Kegiatan Usaha	persentase peningkatan pengelolaan perizinan	70 %		84,300,000	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								49,700,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								49,700,000	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal	2.042.064.013	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	70 Pelaku Usaha	persentase pengendalian	80 %		49,700,000	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								196,153,000	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								196,153,000	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota	90 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	Persentase Data dan Informasi Perizinan	90 %		196,153,000	
TOTAL													6,719,548,805	



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan														
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,544,449,308		
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							94,680,000		
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 Dokumen	Sinergitas dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	29,295,000	
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Sinergitas dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,250,000	
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Sinergitas dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,885,000	
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Sinergitas dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,000,000	
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Sinergitas dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,000,000	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersusun sesuai aturan dann tepat waktu	3 Laporan	Sinergitas dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,000,000	
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai aturandan tepat waktu	2 Dokumen	Sinergitas dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,250,000	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,644,718,748		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan seacara tepat waktu	12 Bulan	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,389,518,098	
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah Cetak penggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah iuran jaminan kesehatan Non ASN yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah makan minum Rapat/Tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan 12 Bulan 30 Non ASN 12 Bulan	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	43,256,750	
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan secara tepat waktu	19 jasa	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	185,263,900	
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	1 Laporan	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,750,000	
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah laporan keuangan semesteran tersusun secara akurat dan tepat waktu	1 Laporan	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,930,000	
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							23,330,000		
2	23	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah laporan RKBU-SKPD yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	1 Laporan	Terpenuhinya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,430,000	
2	23	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah jasa pengurus barang dan aset yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah laporan barang dan aset yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	2 jasa 1 Laporan	Terpenuhinya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18,900,000	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							219,550,000		
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah baju batik layanan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Pakaian olah raga yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	66 Baju 66 pasang	Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian secara optimal	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	52,800,000	
2	23	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian secara optimal	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,750,000	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Implementasi peraturan perundang-undangan	15 ASN	Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian secara optimal	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	150,000,000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							249,236,500		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia sesuai aturan dan tepat waktu	12 Bulan	Terpenuhinya layanan administrasi umum secara optimal	50 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	Terpenuhinya layanan administrasi umum secara optimal	50 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,796,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah bahan bacaan /surat kabar bulletin yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	Terpenuhinya layanan administrasi umum secara optimal	50 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,440,000	
2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah pengadaan bahan material pameran yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Paket	Terpenuhinya layanan administrasi umum secara optimal	50 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,000,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efesien	20 kegiatan	Terpenuhinya layanan administrasi umum secara optimal	50 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200,000,000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								41,000,000	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	4 unit	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah secara optimal	50 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	41,000,000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								171,864,060	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah surat yang terdistribusikan secara tepat waktu	200 surat	Terpenuhinya layanan administrasi jasa layanan kantor secara optimal	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,724,060	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah iuran rekening telepon yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah iuran TV kabel yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah rekening listrik yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terpenuhinya layanan administrasi jasa layanan kantor secara optimal	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	118,380,000	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah iuran retribusi sampah yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah jasa Front office yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah jasa pembersih yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan 12 Bulan 2 jasa 4 jasa	Terpenuhinya layanan administrasi jasa layanan kantor secara optimal	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	48,760,000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100,070,000	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah BBM, Oli, Suku cadang dan service kendaraan mobil Dinas /Operasional yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah jasa sopir kendaraan mobil dinas yang terbayarak secara tepat waktu Jumlah unit kendaraan dinas /operasional yang laik jalan	12 Bulan 1 jasa 7 unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	86,120,000	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13,950,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								1,389,024,670	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								478,255,610	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah bahan pustaka yang direstorasi Jumlah judul bahan pustaka yang dialihmediakan dalam bentuk digital	200 Eksampler 80 Buah	Meningkatnya mutu layanan pepustakaan yang sesuai standar	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17,502,150	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah pengunjung perpustakaan dititik layanan Terpeliharanyan aplikasi pengolahan perpustakaan	5000 pemustaka 1 Unit	Meningkatnya mutu layanan pepustakaan yang sesuai standar	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24,506,800	
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah pengadaan bahan pustaka koleksi budaya nusantara dan koleksi konten lokal yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 Eksampler	Meningkatnya mutu layanan pepustakaan yang sesuai standar	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,000,000	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina dan diasistensi tentang pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar perpustakaan Terlaksananya Lomba Perpustakaan Sekolah/Desa	12 Perpustakaan sekolah 12 Perpustakaan	Meningkatnya mutu layanan pepustakaan yang sesuai standar	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	28,943,860	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah peserta bimbingan teknis tenaga perpustakaan /pustakawan	30 peserta	Meningkatnya mutu layanan pepustakaan yang sesuai standar	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,840,000	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah pengadaan bahan pustaka (buku Umum Juntuk perpustakaan umum daerah	2000 Eksampler	Meningkatnya mutu layanan pepustakaan yang sesuai standar	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	300,000,000	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah bahan pustaka yang terkelola	2000 Eksampler	Meningkatnya mutu layanan pepustakaan yang sesuai standar	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,843,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan														
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah data perpustakaan yang tersedia	1 Database	Meningkatnya mutu layanan pepustakaan yang sesuai standar	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19,619,000	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							910,769,060		
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah jasa petugas layanan perpustakaan yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah kunjungan layanan perpustakaan keliling dititik layanan	12 Bulan 80 Kunjungan	Meningkatnya Survei Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	73.15 Nilai	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	199,259,060	
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah taman baca yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah taman baca yang direhab sesuai analisa kebutuhan	1 unit 1 unit	Meningkatnya Survei Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	73.15 Nilai	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	600,000,000	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah peserta lomba bercerita Tingkat SD sekabupaten Pinrang Terlasananya survey nilai tingkat kegemaran membaca	50 Siswa SD 1 kegiatan	Meningkatnya Survei Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	73.15 Nilai	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	64,215,000	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Jumlah Perpustakaan Desa Replikasi yang diberikan bimbingan teknis SPP dan TIK Jumlah Perpustakaan Desa yang dibina sebagai pusat berkegiatan masyarakat	2 Perpustakaan Desa 8 Perpustakaan Desa	Meningkatnya Survei Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	73.15 Nilai	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,270,000	
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	Terlaksananya Ekspo perpustakaan	1 kegiatan	Meningkatnya Survei Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	73.15 Nilai	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	27,025,000	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							18,564,250		
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							12,613,800		
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan	5 %	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan dalam bentuk elektronik Jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan ditemukan	10 Naskah kuno 5 Naskah Kuno	Tersedianya naskah kuno yang dilestarikan	5 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12,613,800	
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							5,950,450		
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	5 %	Jumlah bahan pustaka koleksi budaya nusantara yang terkelola	10 Eksampelan	Tersedianya naskah kuno dalam bentuk digital	50 eks	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,950,450	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							139,529,750		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							59,658,000		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	80 %	Jumlah arsip yang diklasifikasi sesuai dengan pola klasifikasi arsip	8500 Arsip	Tersedianya Arsip dinamis yang terkelola dengan baik	75 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	22,386,000	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	80 %	Jumlah data arsip yang terpelihara keamananya dari hama dan serangga	1 Depot arsip	Tersedianya Arsip dinamis yang terkelola dengan baik	75 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,040,000	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	80 %	Jumlah arsip OPD/Desa/kelurahan (Lembaga Pemrintah) yang diawasi pelaksanaan pengelolaan/penataan secara prosedural dan sistematis	15 Lembaga pemerintah	Tersedianya Arsip dinamis yang terkelola dengan baik	75 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	23,232,000	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							26,790,000		
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Pelaksanaan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	80 %	Jumlah data arsip OPD dan sekolah yang dikumpulkan	10 Lembar Arsip	Tersedianya Arsip statis yang terkelola dengan baik	50 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,630,000	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	80 %	Jumlah dokumen/arsip statis yang diakusisi	10 Lembar Arsip	Tersedianya Arsip statis yang terkelola dengan baik	50 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,160,000	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							53,081,750		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	80 %	Jumlah daftar arsip dimasukan dalam JIKN Jumlah sarana layanan informasi kearsipan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Daftar Arsip 2 Sarana	Tersedianya arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN	23 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	22,381,000	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	80 %	Jumlah OPD/Desa/Kelurahan(Lembaga Pemerintah)yang diasistensi dan dibina tentang tata kelola arsip yang sesuai standar kearsipan	15 Lembaga Pemerintah	Tersedianya arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN	23 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30,700,750	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							136,157,530		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							95,945,530		
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	37 %	Jumlah OPD/Desa/Kelurahan(Lembaga Pemerintah)yang dimonev untuk penilaian arsip yang akan dimusnahkan	15 Lembaga Pemerintah	Terlaksananya Retensi Arsip Daerah	5 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	23,258,000	

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	37 %	Jumlah data arsip OPD/Desa/Kelurahan yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun yang harus dimusnahkan  Jumlah Peraturan Bupati (Perbup)tentang kearsipan yang terusun sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	15 Lembaga Pemerintah 2 Perbup	Terlaksananya Retensi Arsip Daerah	5 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	72,687,530	
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota							40,212,000		
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	37 %	Jumlah arsip yang disahkan(Autentifikasi arsip)sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku	100879 Arsip	Tesedianya arsip daerah yang teruji legalitas dan keabsahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25,452,000	
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	37 %	Jumlah arsip yang dialihmediakan dalam bentuk elektronik	40000 Arsip	Tesedianya arsip daerah yang teruji legalitas dan keabsahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,760,000	
TOTAL													6,227,725,508	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan														
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,826,300,191		
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							64,826,900		
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	4 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,900,000	
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	4 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,198,000	
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	4 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,255,000	
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	4 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,614,000	
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	4 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,648,000	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	4 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12,535,500	
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	4 dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,676,400	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,779,508,791		
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	Persentase serapan anggaran sesuai target yang ditentukan	94 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,427,084,291	
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Persentase serapan anggaran sesuai target yang ditentukan	94 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	57,256,000	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Persentase serapan anggaran sesuai target yang ditentukan	94 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	269,592,000	
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase serapan anggaran sesuai target yang ditentukan	94 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,328,500	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Persentase serapan anggaran sesuai target yang ditentukan	94 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,248,000	
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13,386,000		
3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	laporan administrasi Barang milik daerah	1 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,626,000	
3	25	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	laporan administrasi Barang milik daerah	1 laporan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,760,000	
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							149,160,500		
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,150,000	
3	25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian tertatanya data administrasi kepegawaian	3 Dokumen 3 laporan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24,590,500	
3	25	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,420,000	
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							324,148,000		
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah alat komponen instalasi listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis 0 Paket	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	85 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,540,000	

**Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan**  
**Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan**

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
							Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	85 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,788,000	
3	25	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	85 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,820,000	
3	25	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	85 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	300,000,000	
3	25	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								144,800,000	
3	25	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang urusan pemerintah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	120,000,000	
3	25	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang urusan pemerintah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24,800,000	
3	25	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								202,865,000	
3	25	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	170,490,000	
3	25	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32,375,000	
3	25	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								147,605,000	
3	25	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	Persentase kondisi baik barang milik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	120,175,000	
3	25	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Persentase kondisi baik barang milik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000	
3	25	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Persentase kondisi baik barang milik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,500,000	
3	25	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Persentase kondisi baik barang milik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,930,000	
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								373,371,500	
3	25	03	2.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								225,841,500	
3	25	03	2.01	01		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Volume Produksi Perikanan Tangkap	15672 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	Jumlah Laporan data dan informasi sumber daya ikan	4 laporan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,875,000	
3	25	03	2.01	02		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap	15672 Ton	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	7 Unit	Jumlah Laporan data dan informasi sumber daya ikan	4 laporan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,317,500	
3	25	03	2.01	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap	15672 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	70 Unit	Jumlah Laporan data dan informasi sumber daya ikan	4 laporan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,649,000	
3	25	03	2.02			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								109,796,500	
3	25	03	2.02	01		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Volume Produksi Perikanan Tangkap	15672 Ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120 Orang	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	132 RTP	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,697,000	
3	25	03	2.02	02		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Volume Produksi Perikanan Tangkap	15672 Ton	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	132 RTP		37,099,500	
3	25	03	2.03			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								37,733,500	
3	25	03	2.03	02		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Volume Produksi Perikanan Tangkap	15672 Ton	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	TPI yang dikelola	1 buah	Kab. Pinrang, Suppa, Wiringtasi	37,733,500	
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								3,141,952,317	
3	25	04	2.01			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								26,044,000	
3	25	04	2.01	02		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	jumlah pelaku usaha perikanan yang terbit Izin usaha	6 orang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,044,000	
3	25	04	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								645,290,000	

**Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan**  
**Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan**

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
							Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	2.02	01		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok	Jumlah Produksi Kelompok Binaan	32084 ton	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,922,000	
3	25	04	2.02	02		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	Jumlah Produksi Kelompok Binaan	32084 ton		27,408,000	
3	25	04	2.02	04		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	Jumlah Produksi Kelompok Binaan	32084 ton	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454,960,000	
3	25	04	2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								2,470,618,317	
3	25	04	2.04	01		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Produktifitas hasil pengelolaan pembudidaya ikan	3.29 ton/Ha/thn		49,261,800	
3	25	04	2.04	02		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Produktifitas hasil pengelolaan pembudidaya ikan	3.29 ton/Ha/thn		1,430,837,817	
3	25	04	2.04	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	Produktifitas hasil pengelolaan pembudidaya ikan	3.29 ton/Ha/thn	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	609,180,000	
3	25	04	2.04	04		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	Produktifitas hasil pengelolaan pembudidaya ikan	3.29 ton/Ha/thn	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,934,500	
3	25	04	2.04	05		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3 Orang	Produktifitas hasil pengelolaan pembudidaya ikan	3.29 ton/Ha/thn	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	133,528,200	
3	25	04	2.04	06		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	10 Ha	Produktifitas hasil pengelolaan pembudidaya ikan	3.29 ton/Ha/thn		37,438,000	
3	25	04	2.04	07		Perencanaan, dan Pengembangan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemantauan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Orang	Produktifitas hasil pengelolaan pembudidaya ikan	3.29 ton/Ha/thn	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184,438,000	
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								499,435,000	
3	25	06	2.01			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								175,415,500	
3	25	06	2.01	01		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	1235 Ton	Jumlah laporan data dan informasi usaha dan pemasaran yang tersedia	4 laporan	jumlah tanda daftar pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan	9 buah		175,415,500	
3	25	06	2.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								65,332,000	
3	25	06	2.02	01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	1235 Ton	Jumlah Poklshar yang mendapat bimbingan dan penerapan persyaratan pengolahan dan pemasaran	8 kelompok	jumlah kelompok usaha pengolah dan pemasar yang dibina	8 klp		65,332,000	
3	25	06	2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								258,687,500	
3	25	06	2.03	02		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	1235 Ton	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	22 Pelaku Usaha	jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	8 jenis	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Lansirang, Semua Kelurahan	258,687,500	
TOTAL														9,841,059,008	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,421,808,269		
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							79,780,000		
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase laporan perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,340,000	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,715,000	
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,180,000	
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,918,000	
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,948,000	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Persentase laporan perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	23,679,000	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,096,502,444		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,485,351,184	
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	96,336,060	
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	497,735,200	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,640,000	
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,440,000	
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7,384,750		
2	19	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,761,875	
2	19	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,622,875	
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							193,497,000		
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24,000,000	
2	19	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,487,000	
2	19	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,010,000	
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	150,000,000	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							366,200,075		
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Persentase Laporan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,100,000	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Persentase Laporan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	28,675,075	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	Persentase Laporan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12,600,000	



**Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**  
**Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	Persentase Laporan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	37,250,000	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Persentase Laporan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276,935,000	
2	19	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Persentase Laporan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,640,000	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								916,306,000	
2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Jumlah pengadaan barang milik daerah	14 Jenis	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	697,806,000	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Jumlah pengadaan barang milik daerah	14 Jenis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	63,500,000	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Jumlah pengadaan barang milik daerah	14 Jenis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	155,000,000	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								134,838,000	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,650,000	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	88,200,000	
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,250,000	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32,738,000	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								627,300,000	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Jenis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	115,700,000	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Jenis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,600,000	
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Jenis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	350,000,000	
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Jenis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	150,000,000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,550,665,000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								1,000,665,000	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	90 %	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	35 Orang	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	23,190,000	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	90 %	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	29,640,000	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	90 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	35 Orang	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	22,190,000	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	90 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	70 Orang	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	925,645,000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								550,000,000	

**Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**  
**Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	10 Dokumen	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Organisasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	550,000,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								1,143,575,000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								47,377,000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	Jumlah Atlet/Cabor yang dibina dan dikembangkan	74 Atlet/Cabor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	47,377,000	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								978,322,000	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Kegiatan Olahraga Diselenggarakan	5 Kegiatan Olahraga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	116,480,000	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Kegiatan Olahraga Diselenggarakan	5 Kegiatan Olahraga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	572,042,000	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	60 Orang	Jumlah Kegiatan Olahraga Diselenggarakan	5 Kegiatan Olahraga	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	289,800,000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								104,499,000	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	Jumlah Atlet/Cabor yang dibina dan dikembangkan	5 Atlet/Cabor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	44,975,000	
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10 Pelatda	Jumlah Atlet/Cabor yang dibina dan dikembangkan	5 Atlet/Cabor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,800,000	
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	25 Orang	Jumlah Atlet/Cabor yang dibina dan dikembangkan	5 Atlet/Cabor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,000,000	
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	Jumlah Atlet/Cabor yang dibina dan dikembangkan	5 Atlet/Cabor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,724,000	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								13,377,000	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 Unit	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi diselenggarakan	3 Cabor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,377,000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								30,700,000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								30,700,000	
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase keterpuenuhan prinsip dasar kepramukaan	100 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	Jumlah Organisasi Yang Dibina	14 Organisasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,200,000	
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase keterpuenuhan prinsip dasar kepramukaan	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	Jumlah Organisasi Yang Dibina	14 Organisasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,500,000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								77,279,000	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								25,500,000	
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kunjungan Wisatawan	75.000 Orang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	6 Lokasi Wisata	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,500,000	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								40,000,000	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kunjungan Wisatawan	75.000 Orang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	6 Lokasi Wisata	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								11,779,000	
3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kunjungan Wisatawan	75.000 Orang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	22 Dokumen	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata yang tindaklanjuti	26 Jasa	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,779,000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								234,474,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								234,474,000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	1,72 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang dipasarkan di dalam dan luar negeri	4 Destinasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	223,834,000	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	1,72 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang dipasarkan di dalam dan luar negeri	4 Destinasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,640,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								137,959,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								96,925,000	

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

	TOTAL	9,596,460,269	
--	-------	---------------	--

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura														
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,356,859,441	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								141,900,000	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	53,665,000	
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,880,000	
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,880,000	
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,570,000	
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,580,000	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	43,090,000	
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,235,000	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,552,295,456	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,592,172,681	
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	510,487,775	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	433,125,000	
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,940,000	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,570,000	
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								120,657,565	
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13,055,000	
3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	107,602,565	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								347,705,000	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Orang	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	148,600,000	
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	49,105,000	
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	150,000,000	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								399,059,150	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19,739,150	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,500,000	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	43 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	23,820,000	

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	350,000,000	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								79,565,000	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,565,000	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,000,000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								432,144,620	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	16,940,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	319,104,620	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	96,100,000	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								283,532,650	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	263,952,650	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,580,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								2,427,040,700	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								2,427,040,700	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)	2149 Ton	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	Cakupan ketersediaan sarana pertanian yang disediakan	20 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,667,620,000	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)	2149 Ton	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	Cakupan ketersediaan sarana pertanian yang disediakan	20 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	759,420,700	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								19,712,820,000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								2,778,705,000	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	6,26 Ton/Ha	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	Cakupan ketersediaan sarana pertanian yang disediakan	20 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,243,700,000	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	6,26 Ton/Ha	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	Cakupan ketersediaan sarana pertanian yang disediakan	20 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,535,005,000	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								16,934,115,000	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	6,26 Ton/Ha	Jumlah Jaringan Irigasi (JITUT)Yang Terbangun Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	60 unit 60 unit	Cakupan ketersediaan sarana pertanian yang disediakan	20 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,382,357,000	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	6,26 Ton/Ha	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	122 unit	Cakupan ketersediaan sarana pertanian yang disediakan	20 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,883,988,000	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	6,26 Ton/Ha	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	45 unit	Cakupan ketersediaan sarana pertanian yang disediakan	20 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,667,770,000	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								501,495,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								501,495,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)	4345113 Rupiah	Jumlah luasan pengendalian dan penanggulangan bencana sesuai dengan analisis kebutuhan	107313 Ha	Jumlah luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/kota	107313 ha	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	422,840,000	
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)	4345113 Rupiah	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	107313 Ha	Jumlah luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/kota	107313 ha	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,655,000	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								102,958,000	
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								102,958,000	

## Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	108 %	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	Persentase Jumlah izin usaha pertanian yang sesuai standar	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,858,000	
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	108 %	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	Persentase Jumlah izin usaha pertanian yang sesuai standar	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,440,000	
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	108 %	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	12 Laporan	Persentase Jumlah izin usaha pertanian yang sesuai standar	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,660,000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								1,767,398,500	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								1,767,398,500	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok/tani penerima bantuan (%)	25 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 unit	Persentase jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	531,939,600	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok/tani penerima bantuan (%)	25 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	420 unit	Persentase jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	310,810,900	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok/tani penerima bantuan (%)	25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12 unit	Persentase jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	100 persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	924,648,000	
TOTAL													38,868,571,641	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.00 Dinas Peternakan dan Perkebunan Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.00 Dinas Peternakan dan Perkebunan														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,488,688,559		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							114,114,000		
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Presentase ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Padaidi	22,517,000	
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Presentase ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		8,031,000	
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Presentase ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		7,977,000	
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Presentase ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		9,256,000	
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Presentase ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		7,746,000	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Presentase ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		47,571,000	
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Presentase ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		11,016,000	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,291,474,259		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	100 %	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan sesuai ketentuan dan tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 55 Orang/bulan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %		4,971,494,599	
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %		91,599,660	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %		216,400,000	
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %		6,835,000	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %		5,145,000	
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							16,484,000		
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Peresentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100 %		1,319,000	
3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Peresentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100 %		15,165,000	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							240,572,000		
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	Jumlah Administrasi Kepegawaian daerah yang terlaksana	12 bulan		60,750,000	
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Jumlah Administrasi Kepegawaian daerah yang terlaksana	12 bulan		7,418,000	
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	Jumlah Administrasi Kepegawaian daerah yang terlaksana	12 bulan		22,404,000	
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Jumlah Administrasi Kepegawaian daerah yang terlaksana	12 bulan		150,000,000	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							225,016,300		
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum	100 %		2,320,300	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum	100 %		5,946,000	

## Kabupaten Pinrang

**Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.00 Dinas Peternakan dan Perkebunan**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum	100 %		3,950,000	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 Dokumen	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum	100 %		22,800,000	
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum	100 %		15,000,000	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum	100 %		175,000,000	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								319,707,000	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Presentase Ketercapaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	100 %		199,707,000	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Presentase Ketercapaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	100 %		57,500,000	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Presentase Ketercapaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	100 %		62,500,000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								134,185,000	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Presentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		7,640,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Presentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		97,800,000	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah paket penyediaan alat kebersihan kantor	12 bulan 4 Orang 3 Laporan 3 Paket	Presentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		28,745,000	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								147,136,000	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Presentase Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		128,376,000	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Presentase Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		18,760,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1,732,815,440	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								216,570,440	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Presentase Meningkatnya Produksi/Produktivitas nilai tambah dan daya saing komoditas p[eternakan dan perkebunan pertahun	9 %	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Meningkatnya Mutu dan Nilai Tambah	5 Laporan 25 %	Presentase meningkatnya Mutu dan Nilai Tambah	25 %		216,570,440	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								701,394,000	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Presentase Meningkatnya Produksi/Produktivitas nilai tambah dan daya saing komoditas p[eternakan dan perkebunan pertahun	9 %	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	7 VUB	Presentase meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan unggulan	2 %		289,855,000	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Presentase Meningkatnya Produksi/Produktivitas nilai tambah dan daya saing komoditas p[eternakan dan perkebunan pertahun	9 %	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	Presentase meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan unggulan	2 %		310,949,000	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Presentase Meningkatnya Produksi/Produktivitas nilai tambah dan daya saing komoditas p[eternakan dan perkebunan pertahun	9 %	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	Presentase meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan unggulan	2 %		100,590,000	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								369,140,000	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Presentase Meningkatnya Produksi nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan pertahun	9 %	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	5 Laporan	Presentase meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibi ternak dan tanaman pakan ternak	90 %		135,496,000	
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Presentase Meningkatnya Produksi nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan pertahun	9 %	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	3 Laporan	Presentase meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibi ternak dan tanaman pakan ternak	90 %		233,644,000	
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								445,711,000	



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.00 Dinas Peternakan dan Perkebunan														
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.00 Dinas Peternakan dan Perkebunan														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Presentase Meningkatnya Produksi nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan pertahun	9 %	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	0 Ton 25 Ton	Presentase meningkatnya jumlah ternak layak bibit yang dibudidayakan	50 %		318,814,000	
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Presentase Meningkatnya Produksi nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan pertahun	9 %	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	5 Laporan	Presentase meningkatnya jumlah ternak layak bibit yang dibudidayakan	50 %		126,897,000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								910,026,650	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								449,871,250	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	4 %	Jumlah ketersediaan vaksin ST19 dan antrax yang tersedia  Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 paket 0 Laporan 5 Laporan	Presentase menurunnya prevalence penyakit Helminthiasis dan Brucellosis	2 %		268,251,250	
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	4 %	Jumlah ketersediaan vaksin AI dan Obat Vitamin Ternak  Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 paket 0 Laporan 10 Laporan	Presentase menurunnya prevalence penyakit Helminthiasis dan Brucellosis	2 %		181,620,000	
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota								55,668,000	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	4 %	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	Presentase Meningkatnya Kesejahteraan pada Hewan	20 %		55,668,000	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								379,627,400	
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	4 %	Jumlah ketersedian obat/bahan kimia dan bahan material laboratorium  Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium  Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	5 Paket 0 Laporan 5 Laporan	Presentase meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	30 %		88,960,400	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	4 %	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan medik veteriner  Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner  Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 bulan 0 Laporan 10 Laporan	Presentase meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	30 %		290,667,000	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								24,860,000	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	4 %	Jumlah pemeriksaan ante mortem dan post mortem yang dilaksanakan  Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan  Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2200 ekor 0 Laporan 1 Laporan	Presentase meningkatnya kualitas produk hewan ASUH	40 %		24,860,000	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								103,497,600	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								103,497,600	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman perkebunan	4 %	Jumlah Anggota kelompok tani yang ikut pendampingan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan  Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan  Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	90 Orang 0 Ha 10 Ha	Presentase ketercapaian total luasan pengendalian hama	10 %		103,497,600	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								400,880,000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								400,880,000	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya Sumber Daya Petani Perkebunan dan Peternakan	30 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 klp	Presentase meningkatnya jumlah cakupan binaan kelompok tani	30 %		400,880,000	
TOTAL													9,635,908,249	

**Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.00 Dinas Peternakan dan Perkebunan**  
**Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT Pusat Kesehatan Hewan**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								32,500,000	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								32,500,000	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit				32,500,000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								53,081,880	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								53,081,880	
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4 Laporan				53,081,880	
TOTAL												85,581,880		

Unit Organisasi : 3.31.3.30.3.29.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral  
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.3.29.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN							4,490,000		
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota							4,490,000		
					Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah prosedur dan pesyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,490,000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							26,662,100		
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							19,262,100		
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	80 %	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	Persenatse Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,262,100	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang							7,400,000		
					Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	80 %	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	7 Dokumen	Persentase Gudang yang telah memiliki izin sesuai aturan	25 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,400,000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							1,733,499,000		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							889,780,000		
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	42 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	Persentase pemenuhan sarana perdagangan sesuai analisa kebutuhan	86.76 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	889,780,000	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							843,719,000		
					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	42 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Persentase pasar rakyat yang dikelola dengan standar mutu pasar sehat	95.83 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,719,000	
					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	42 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Persentase pasar rakyat yang dikelola dengan standar mutu pasar sehat	95.83 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	799,000,000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							57,350,000		
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							17,600,000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu	<9 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48 Laporan	Persentase laporan Ketersediaan Barang kebutuhan pokok yang penting yang disampaikan tepat waktu	100 %		17,600,000	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							20,750,000		
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu	<9 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48 Laporan			Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,750,000	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							19,000,000		
					Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu	<9 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	60 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,000,000	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							224,570,000		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							224,570,000		
					Pameran Dagang Lokal	Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)	-406,67 Milyar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	Persentase Produk lokal yang dipromosikan sebagai Produk komoditi bernilai ekspor	90.38 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	31,750,000	
					Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)	-406,67 Milyar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4 Pelaku Usaha	Persentase Produk lokal yang dipromosikan sebagai Produk komoditi bernilai ekspor	90.38 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192,820,000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							117,017,500		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							117,017,500		
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur	67 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1914 Unit	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda tera sah yang berlaku	92.42 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,942,500	
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur	67 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	680 Orang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda tera sah yang berlaku	92.42 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,075,000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							5,340,000		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							5,340,000		
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri Lokal yang diperdagangkan di Toko Swalayan	1,5 %	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	Peresentase Pemenuhan sosialisasi Peningkatan produk dalam negeri sesuai analisa kebutuhan	76 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,340,000	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,869,315,914		
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							41,445,000		

## Kabupaten Pinrang

**Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.3.29.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	26,500,000	
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,665,000	
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,250,000	
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,655,000	
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang yang berkualitas dan tepat waktu	100 %		3,255,000	
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,120,000	
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,100,477,714	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	96 %		4,766,585,894	
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	96 %		123,891,820	
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	96 %		197,600,000	
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	96 %		7,330,000	
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	96 %		5,070,000	
3	31	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16,725,000	
3	31	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Persenatse barang Milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang	100 %		16,725,000	
3	31	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								8,250,000	
3	31	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah sesuai aturan	100 %		8,250,000	
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								177,300,000	
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP Baik	100 %		27,300,000	
3	31	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP Baik	100 %		150,000,000	
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								489,565,000	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	90 %		5,235,000	
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung	5 item	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	90 %		5,400,000	
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	59,350,000	
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,580,000	
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	90 %		350,000,000	
3	31	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	90 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	55,000,000	
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								293,920,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 3.31.3.30.3.29.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral														
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.3.29.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	80,500,000	
3	31	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	11 Unit	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	49,870,000	
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	51,250,000	
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	103,800,000	
3	31	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,500,000	
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							260,535,000		
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan jasan penunjang Urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,250,000	
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan jasan penunjang Urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30,630,000	
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase kebutuhan layanan jasan penunjang Urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	222,655,000	
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							481,098,200		
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Persentase Kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	196,348,200	
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Persentase Kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	45,650,000	
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Persentase Kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	209,100,000	
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	80 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30,000,000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							1,514,190,000		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							1,514,190,000		
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60 %	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Cakupan bina kelompok pengrajin	11 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,845,000	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	Cakupan bina kelompok pengrajin	11 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	212,710,000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20 Dokumen	Cakupan bina kelompok pengrajin	11 %		25,000,000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100 Dokumen	Cakupan bina kelompok pengrajin	11 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,250,385,000	
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Cakupan bina kelompok pengrajin	11 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,250,000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							16,950,000		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							16,950,000		
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	7 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	530 Dokumen	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	90 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,150,000	

Unit Organisasi : 3.31.3.30.3.29.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral  
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.3.29.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							38,881,209,077		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							399,845,200		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	149,140,140	
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32,055,000	
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17,407,000	
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,809,000	
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17,738,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan/dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	138,710,060	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan/dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	29,986,000	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							15,143,737,911		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,452,844,381	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,608,786,300	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7550 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,023,565,900	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	28,751,530	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	29,789,800	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							79,822,000		
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	105 rencana	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,630,000	
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,192,000	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							521,306,650		
4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Persentase kualitas dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,996,000	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Persentase kualitas dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	69,000,000	
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Persentase kualitas dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,793,000	
4	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Persentase kualitas dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19,105,000	
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Persentase kualitas dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13,470,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah														
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah														
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	270 Orang	Persentase kualitas dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	127,942,650	
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	Persentase kualitas dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	280,000,000	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3,090,840,000		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,000,000	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	70,000,000	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230,000,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	67,500,000	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	496,650,000	
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266,820,000	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,658,840,000	
4	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,030,000	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							951,500,000		
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	650,000,000	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	97,500,000	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	204,000,000	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							11,398,705,810		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17,000,000	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,688,805,810	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	562,000,000	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	130,900,000	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,889,512,500		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	83 kendaraan/Unit	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,824,950,000	
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 mebel/Unit	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 peralatan/Unit	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	73,000,000	



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah														
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung/ruang	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,981,562,500	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							889,912,946		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	167,512,946	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	72,400,000	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,000,000	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	600,000,000	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							1,250,000,000		
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	840,000,000	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	330,000,000	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	80,000,000	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							573,594,060		
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,347,000	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,670,000	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,017,060	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,410,000	
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,150,000	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							692,432,000		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,821,000	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	93,425,000	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	429,186,000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							9,003,467,930		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							364,996,880		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	158,210,000	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	106,939,880	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	99,847,000	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								7,855,281,400	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,397,755,400	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,847,000	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	411,679,000	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								713,334,650	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 produk hukum	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	384,005,000	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	296,362,650	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 produk hukum	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,967,000	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								69,855,000	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,057,000	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,798,000	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1,629,575,700	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								324,084,000	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159,784,000	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,030,000	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,770,000	

**Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah**  
**Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.00 Sekretariat Daerah**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							358,944,000		
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	74,599,000	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan/dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	183,515,000	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan/dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100,830,000	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							769,369,000		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	125 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	568,572,000	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	125 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	103,486,000	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	97,311,000	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							177,178,700		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,128,700	
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,580,000	
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	95 Persen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,470,000	
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN							102,914,100		
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan							102,914,100		
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota	90 Persen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	102,914,100	
TOTAL													49,617,166,807	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							27,386,103,055		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							39,838,000		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	tersusunnya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	6 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18,860,000	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	tersusunnya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	6 laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,978,000	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,012,362,667		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,179,514,867	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 kegiatan	terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,452,000	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	801,875,800	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,520,000	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,000,000	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							175,000,000		
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	persentase terlaksananya jaminan keamanan barang milik daerah pada kantor DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	175,000,000	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							302,296,800		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	117 pasang	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	40,950,000	
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,910,000	
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,436,800	
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	250,000,000	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,199,590,000		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,000,000	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,010,000	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	39 Dokumen	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	374,080,000	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	296,500,000	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	500,000,000	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							94,440,000		
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	94,440,000	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							456,072,750		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	109,156,730	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	300,229,020	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang										
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD										
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	46,687,000	
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,264,745,450	
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD	98.30 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	terbayarnya jasa pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	502,055,450	
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD	98.30 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit 1 Unit	terbayarnya jasa pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000	
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD	98.30 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 50 Unit	terbayarnya jasa pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	42,370,000	
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD	98.30 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	terbayarnya jasa pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	710,320,000	
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								19,330,466,088	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 orang	terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18,627,466,088	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	240 pasang	terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	503,000,000	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200,000,000	
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD								511,291,300	
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	terlaksananya layanan administrasi DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	35,880,800	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	terlaksananya layanan administrasi DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,485,000	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	terlaksananya layanan administrasi DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	52,420,000	
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	terlaksananya layanan administrasi DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	417,505,500	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								15,752,926,400	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								1,168,209,000	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5,666,000	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	847,570,000	
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	189,940,000	
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	122,880,000	
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,153,000	
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran								371,322,300	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,665,000	
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,760,000	
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	148,507,300	
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	153,330,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang										
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD										
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0 Dokumen 1 Dokumen	terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12,020,000	
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25,040,000	
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								157,016,500	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	Terselenggaranya pengawasan pemerintahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	23,090,000	
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Terselenggaranya pengawasan pemerintahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,000,000	
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	Terselenggaranya pengawasan pemerintahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,878,000	
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Terselenggaranya pengawasan pemerintahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,970,000	
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	Terselenggaranya pengawasan pemerintahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,953,400	
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Terselenggaranya pengawasan pemerintahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,250,000	
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Terselenggaranya pengawasan pemerintahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,720,000	
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Terselenggaranya pengawasan pemerintahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	69,155,100	
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD								937,565,400	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Terlaksananya bimbingan teknis DPRD	1 Kegiatan	persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	764,840,000	
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah publikasi dan dokumentasi dewan yang tersedia	13 kegiatan	persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	149,555,000	
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	terlaksananya pengadaan kelompok pakar dan tim ahli	1 kegiatan	persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13,360,000	
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,810,400	
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								2,074,280,400	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang diakomodir	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang diakomodir	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,270,000	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang diakomodir	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,056,010,400	
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								22,250,000	
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Persentase terlaksananya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	22,250,000	
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah								4,500,000	
4 02 02 2.07 01	Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	terlaksananya pembahasan kerjasama daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,500,000	
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD								11,017,782,800	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	terfasilitasinya tugas DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,000,000,000	
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	terfasilitasinya tugas DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,636,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Kabupaten Pinrang**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	terfasilitasinya tugas DPRD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	16,146,800	
TOTAL									43,139,029,455	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Kabupaten Pinrang**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,351,059,576		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							91,663,000		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	12 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17,154,000	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	12 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,984,000	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	12 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9,020,000	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	12 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,189,000	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	12 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,204,000	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah dokumen yang dibuat	12 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	33,900,000	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah dokumen yang dibuat	12 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6,212,000	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,163,410,726		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah bulan pembayaran gaji yang terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 0 Orang/bulan	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang dibuat	14 Laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3,744,736,526	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah alat kelengkapan komputer yang tersedia Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah makan minum rapat yang tersedia Jumlah pengadaan/fotocopy yang tersedia Jumlah premi asuransi BPJS ketenagakerjaan yang terbayarkan	2 Jenis 37 jenis 0 Dokumen 500 dos 15000 lembar 16 orang	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang dibuat	14 Laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	65,174,300	
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan/SKPD Jumlah jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0 Dokumen 32 Jasa	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang dibuat	14 Laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	294,801,900	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	0 Laporan 1 Laporan	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang dibuat	14 Laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,703,000	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	13 Laporan	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang dibuat	14 Laporan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	41,995,000	
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							8,092,000		
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah laporan barang dan aset yang tersusun Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan 0 Laporan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8,092,000	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							229,777,000		
5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,000,000	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	27,000,000	
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	37,777,000	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	150,000,000	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							364,162,000		



**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,950,000	
5010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,592,000	
5010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,000,000	
5010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25,560,000	
5010120607	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14,060,000	
5010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	300,000,000	
50101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								95,301,250	
5010120702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2 Jenis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	44,000,000	
5010120705	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah jenis mebel kantor yang tersedia Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Jenis 0 Unit	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2 Jenis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,500,000	
5010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis 0 Unit	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2 Jenis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	34,801,250	
50101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								225,078,600	
5010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang tersedia	0 Laporan 300 surat	Persentase ketercapaian jasa layanan kantor	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	23,238,600	
5010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah iuran TV Kabel yang terbayarkan Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening kawat faksimile/internet yang terbayarkan Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarkan	1 iuran 6 orang 0 Laporan 1 rekening 1 rekening	Persentase ketercapaian jasa layanan kantor	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	104,580,000	
5010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Persentase ketercapaian jasa layanan kantor	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	97,260,000	
50101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								173,575,000	
5010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah bahan bakar minyak/gas yang tersedia Jumlah jasa sopir yang terbayarkan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan Jumlah STNK untuk kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan	2240 Liter 1 Kali 0 Unit 6 Unit 11 Unit	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	24 unit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	83,950,000	
5010120905	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah jenis mebel yang terpelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Jenis 0 Unit	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	24 unit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000	
5010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis 0 Unit	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	24 unit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,625,000	
5010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	0 Unit 1 gedung	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	24 unit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	75,000,000	
50102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								902,682,000	
50102201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								664,790,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023											
Kabupaten Pinrang											
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah  Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen 0 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	68,132,000		
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik  Jumlah kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan	0 Berita Acara 1 kegiatan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19,372,000		
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  Jumlah kegiatan forum SKPD/lintas SKPD yang dilaksanakan	0 Berita Acara 1 Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	143,149,000		
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	104,182,000		
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang tersedia  Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen 0 Usulan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	48,577,000		
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM D /RKPD)  Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	0 Dokumen 2 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	281,378,000		
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								76,910,000		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Analisis	Persentase ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4,760,000		
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah aplikasi data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan oleh SKPD  Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Aplikasi 43 Orang	Persentase ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	22,100,000		
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Persentase ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,050,000		
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								160,982,000		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Persentase penyusunan laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terlaksana	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	48,385,000		
5 01 02 2.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah yang tersusun  Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Dokumen 1 Kerja Sama	Persentase penyusunan laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terlaksana	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000		
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Persentase penyusunan laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terlaksana	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	102,597,000		
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								3,196,348,000		
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								849,775,000		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  Jumlah laporan kemiskinan dan SDGs yang tersusun	0 Dokumen 2 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	260,952,000		
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,021,000		
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah laporan monitoring bidang pemerintahan yang tersusun  Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	69,832,000		
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah laporan/dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun	2 Dokumen 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	43,075,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang										
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan						
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  Jumlah laporan perencanaan bidang pembangunan yang tersusun	0 Dokumen 1 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	198,005,000	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia  Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Kali 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,000,000	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia  Jumlah laporan monitoring bidang pembangunan manusia	0 Laporan 2 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	41,560,000	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah laporan bidang pembangunan manusia yang tersusun  Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	210,330,000	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								1,105,729,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah dokumen informasi pembangunan Kabupaten Pinrang  Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak rokok  Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 buku 1 Laporan 0 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan perekonomian dan SDA yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	405,841,000	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan bidang perekonomian yang disusun  Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan perekonomian dan SDA yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16,311,000	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah dokumen/laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif  Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan perekonomian dan SDA yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15,652,000	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha  Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan perekonomian dan SDA yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	377,110,000	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah dokumen koordinasi dan monev pembangunan ekonomi kreatif  Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen 0 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan perekonomian dan SDA yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	162,014,000	
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang diasistensi  Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan perekonomian dan SDA yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	28,390,000	
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Persentase dokumen perencanaan perekonomian dan SDA yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	57,749,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang										
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100 %	Jumlah dokumen dan peta pengembangan kawasan agropolitan yang tersusun  Jumlah dokumen pengembangan ekonomi kreatif  Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 dokumen 1 dokumen 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan perekonomian dan SDA yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	42,662,000	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan								1,240,844,000	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan wilayahahan yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	877,917,000	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	Persentase dokumen pembangunan bidang infrastruktur dan wilayahahan yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19,556,000	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100 %	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan wilayahahan yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,240,000	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100 %	Jumlah laporan DAK yang dihasilkan  Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan wilayahahan yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	94,509,000	
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100 %	Jumlah dokumen perencanaan terkait wilayahahan yang dihasilkan  Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	3 Dokumen 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan wilayahahan yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	40,282,000	
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan  Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait bidang wilayahahan	0 Laporan 4 Kali	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan wilayahahan yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,770,000	
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100 %	Jumlah laporan data terkait perumahan dan permukiman yang dihasilkan  Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayahahan	5 Laporan 0 Laporan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan wilayahahan yang digunakan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	167,570,000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								1,710,046,530	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								233,350,000	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Data	Persentase hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,000,000	
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	Persentase hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	213,350,000	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								563,046,000	
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	175,000,000	
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	144,166,000	
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	Persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	243,880,000	
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								541,363,530	
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	98,400,000	
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200,000,000	

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	242,963,530	
5 05 02 2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>								<b>372,287,000</b>	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	137,920,000	
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi  Jumlah lomba kretivitas dan inovasi masyarakat yang diselenggarakan	1 Laporan 1 lomba	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	88,735,000	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	94,862,000	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	45 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50,770,000	
<b>TOTAL</b>									<b>11,160,136,106</b>	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,909,053,010		
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							124,381,825		
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah dokumen perencanaan yang berhasil disusun tepat waktu	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia dan Memenuhi Ketentuan	9 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	35,347,570	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen rencana kerja yang berhasil disusun tepat waktu Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia dan Memenuhi Ketentuan	9 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,273,000	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen rencana kerja perubahan yang berhasil disusun tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia dan Memenuhi Ketentuan	9 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,208,220	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan anggaran yang berhasil disusun tepat waktu	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia dan Memenuhi Ketentuan	9 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,155,060	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran yang berhasil disusun tepat waktu Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia dan Memenuhi Ketentuan	9 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12,582,440	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang berhasil disusun tepat waktu	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia dan Memenuhi Ketentuan	9 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13,304,440	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja yang berhasil disusun tepat waktu dan sesuai aturan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 0 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia dan Memenuhi Ketentuan	9 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30,511,095	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,000,575,590		
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Administrasi terkait pelaksanaan tugas ASN terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100 %	Persentase Dokumen Terkait dengan Administrasi Terselesaikan Tepat Waktu dan Dalam Penatausahaan/Pengarsipan yang Baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	197,646,000	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase proses pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100 %	Persentase Dokumen Terkait dengan Administrasi Terselesaikan Tepat Waktu dan Dalam Penatausahaan/Pengarsipan yang Baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	671,139,710	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah dokumen Laporan akhir tahun SKPD tersusun dengan baik dan tepat waktu	1 Dokumen	Persentase Dokumen Terkait dengan Administrasi Terselesaikan Tepat Waktu dan Dalam Penatausahaan/Pengarsipan yang Baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,492,440	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah dokumen Laporan Bulanan dan semesteran tersusun dengan baik dan tepat waktu	17 Dokumen	Persentase Dokumen Terkait dengan Administrasi Terselesaikan Tepat Waktu dan Dalam Penatausahaan/Pengarsipan yang Baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	121,297,440	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							26,929,945		
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan barang milik Daerah SKPD terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Berhasil Tersusun Tepat Waktu	3 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,270,000	
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Barang milik Daerah SKPD yang tersusun denga baik dan tepat waktu	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Berhasil Tersusun Tepat Waktu	3 Dokumen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19,659,945	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							57,158,000		
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	persentase pengadaan pakaian baik dan pakaian olahraga terealisasi dengan baik	100 %	Persentase Administrasi Terkait Dengan Kepegawaian Terselesaikan Dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25,800,000	
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah dokumen terkait dengan administrasi kepegawaian berhasil disusun dengan baik dan tepat waktu	3 Dokumen	Persentase Administrasi Terkait Dengan Kepegawaian Terselesaikan Dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	22,158,000	
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase Pegawai yang dapat dimonitoring, dievaluasi dan nilai kinerjanya	0 Dokumen 100 %	Persentase Administrasi Terkait Dengan Kepegawaian Terselesaikan Dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7,150,000	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang berhasil disosialisasikan	1 Paket	Persentase Administrasi Terkait Dengan Kepegawaian Terselesaikan Dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %		2,050,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							31,770,000		

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi dengan baik	0 Paket  100 %	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Umum Ditindaklanjuti Dengan Baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10,000,000	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	persentase keterpenuhan atas kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Umum Ditindaklanjuti Dengan Baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21,770,000	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								135,000,000	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	persentase keterpenuhan atas kebutuhan peralatan dan mesin lainnya	100 %	Persentase Keterpenuhan Pengadaan Atas Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	135,000,000	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								533,237,650	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Jumlah surat surat masuk dan keluar terregistraasi secara baik dan sesuai penatausahaan kearsipan	0 Laporan 1000 Surat	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi Dengan Baik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	15,077,650	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	persentase terbayarkannya tagihan atas pemakaian kebutuhan listrik, komunikasi dan sumber daya air	100 %	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi Dengan Baik	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	518,160,000	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								132,655,061,834	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								255,993,000	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah dokumen KUA PPAS tersusun tepat waktu	2 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Tersusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	114,175,000	
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS tersusun tepat waktu	2 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Tersusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	106,300,000	
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah RKA SKPD yang dapat diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	43 SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Tersusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24,010,000	
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang dapat diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	43 Perubahan RKA SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Tersusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11,508,000	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								979,608,620	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	WTP Opini	Persentase Pengelolaan Kas Daerah terlaksana secara benar dan tepat waktu	100 %	Jumlah SKPD yang Proses Pengajuan Berkas Terkait Laporan Keuangannya Dapat Terselenggarakan Dengan Baik dan Benar	44 SKP	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	35,662,180	
5 02 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah  Jumlah SKPD yang dapat proses penatausahaan Pembiayaannya dalam kurun 1 tahun Anggaran	0 Dokumen 43 SKPD	Jumlah SKPD yang Proses Pengajuan Berkas Terkait Laporan Keuangannya Dapat Terselenggarakan Dengan Baik dan Benar	44 SKP	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	744,031,440	
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah SKPD yang berhasil diverifikasi penatausahaan keuangannya secara benar dan tepat waktu	43 SKPD	Jumlah SKPD yang Proses Pengajuan Berkas Terkait Laporan Keuangannya Dapat Terselenggarakan Dengan Baik dan Benar	44 SKP	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	199,915,000	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								131,419,460,214	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Verifikasi Bantuan Keuangan	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	WTP Opini	Persentase penyaluran bantuan keuangan dapat tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu	100 %	Persentase Bantuan Keuangan Dapat Tersalurkan Tepat Sasaran dan Tepat Waktu	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,419,460,214	
TOTAL									134,564,114,844	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,906,647,723	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								62,870,000	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		10,841,000	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		7,550,000	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah dokumen yang RKA-SKPD perubahan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		8,055,000	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah dokumen yang DPA-SKPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		8,720,000	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah dokumen yang DPA-SKPD Perubahan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		6,675,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu	4 Laporan	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	100 %		21,029,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,265,630,973	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	Administrasi Keuangan dan laporan Keuangan	100 %		3,977,564,973	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	Administrasi Keuangan dan laporan Keuangan	100 %		82,484,000	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Administrasi Keuangan dan laporan Keuangan	100 %		171,834,000	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Administrasi Keuangan dan laporan Keuangan	100 %		15,045,000	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	Administrasi Keuangan dan laporan Keuangan	100 %		18,703,000	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								26,121,000	
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	persentase jasa layanan dan laporan	100 %		26,121,000	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								627,592,000	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 Pasang	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %		52,200,000	
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %		10,722,000	
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %		24,377,000	
5	03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	280 Orang	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %		135,777,000	
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %		32,481,000	
5	03	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	225 Orang	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %		28,794,000	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %		151,305,000	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %		41,936,000	
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %		150,000,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								288,545,000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				7,500,000	



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				19,045,000	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen				12,000,000	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan				250,000,000	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								182,018,750	
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Jumlah barang milik daerah / asset yang bertambah / tersedia	15 Unit		33,000,000	
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah barang milik daerah / asset yang bertambah / tersedia	15 Unit		149,018,750	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								222,195,000	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		13,150,000	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		141,930,000	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		67,115,000	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								231,675,000	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Persentase terpeliharanya barang milik daerah, tersedia dan layak pakai untuk menunjang urusan/kegiatan dan pekerjaan	100 %		160,187,500	
5 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Paket	Persentase terpeliharanya barang milik daerah, tersedia dan layak pakai untuk menunjang urusan/kegiatan dan pekerjaan	100 %		10,000,000	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Persentase terpeliharanya barang milik daerah, tersedia dan layak pakai untuk menunjang urusan/kegiatan dan pekerjaan	100 %		42,447,500	
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase terpeliharanya barang milik daerah, tersedia dan layak pakai untuk menunjang urusan/kegiatan dan pekerjaan	100 %		19,040,000	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								998,656,655	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								260,071,530	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik  Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	250 Dokumen				213,883,530	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik  Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5349 Dokumen				46,188,000	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN								498,454,125	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik  Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen				79,105,375	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik  Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 SK KP				197,011,750	

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik  Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	7 Dokumen				222,337,000	
5 03 02 2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>								<b>184,983,000</b>	
5 03 02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik  Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen				33,080,000	
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik  Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen				151,903,000	
5 03 02 2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>								<b>55,148,000</b>	
5 03 02 2.04 06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik  Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen				31,491,000	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik  Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	11 Laporan				23,657,000	
5 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								<b>2,416,333,000</b>	
5 04 02 2.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>								<b>2,416,333,000</b>	
5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional	95 %	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang				1,545,393,000	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional	95 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan				870,940,000	
<b>TOTAL</b>									<b>9,321,637,378</b>	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,144,827,627	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								31,360,000	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Terlaksananya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	12 Dokumen		31,360,000	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,063,549,628	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		5,789,962,628	
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		118,187,000	
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		153,000,000	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		1,100,000	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan /Semesteran SKPD	2 Laporan	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		1,300,000	
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								13,600,000	
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %		13,600,000	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								438,175,000	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 pasang	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100 persen		28,350,000	
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100 persen		13,100,000	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Kegiatan	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100 persen		175,000,000	
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100 persen		21,725,000	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100 persen		200,000,000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								284,765,000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		2,940,000	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		2,205,000	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Kegiatan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		19,500,000	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 jenis	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		15,120,000	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Kegiatan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		245,000,000	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,015,209,999	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 persen		88,000,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 persen		278,649,999	
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 persen		648,560,000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								156,718,000	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1430 Laporan	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		2,040,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		91,728,000	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		62,950,000	
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								141,450,000	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	pemeliharaan barang	50 %		99,250,000	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	pemeliharaan barang	50 %		12,200,000	
6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	pemeliharaan barang	50 %		30,000,000	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								4,739,825,000	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								4,505,765,000	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	71 Laporan	terlaksananya pengawasan internal Pemerintah Daerah	70 laporan		1,756,390,000	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	70 Laporan	terlaksananya pengawasan internal Pemerintah Daerah	70 laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,404,360,000	
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20 lhp	terlaksananya pengawasan internal Pemerintah Daerah	70 laporan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,525,000	
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 LHP	terlaksananya pengawasan internal Pemerintah Daerah	70 laporan		156,040,000	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 LHP	terlaksananya pengawasan internal Pemerintah Daerah	70 laporan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	390,100,000	
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	terlaksananya pengawasan internal Pemerintah Daerah	70 laporan		224,430,000	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	terlaksananya pengawasan internal Pemerintah Daerah	70 laporan		476,920,000	
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								234,060,000	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 LHP	terlaksananya laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	12 Laporan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234,060,000	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								437,100,000	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								34,000,000	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	50 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	Terlaksananya Perumusan Kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	1 kegiatan		26,150,000	
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	50 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	Terlaksananya Perumusan Kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	1 kegiatan		7,850,000	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi								403,100,000	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	50 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 perangkat daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Zona Integritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	15 Laporan		78,020,000	
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	50 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Zona Integritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	15 Laporan		91,020,000	
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	50 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Zona Integritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	15 Laporan		156,040,000	

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

**Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat**  
**Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	50 %	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 OPD	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Zona Integritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	15 Laporan		78,020,000	
TOTAL									13,321,752,627	

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**

	TOTAL	6,574,024,160	
--	-------	---------------	--

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Bentengnge**

	TOTAL	521,000,000	
--	-------	-------------	--

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Penrang**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							149,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							106,900,020		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Terbarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	Terbarnya Biaya Jasa Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun		20,500,020	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jasa Administrasi keuangan yang terbarkan tepat waktu	1 Tahun	Terbarnya Biaya Jasa Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun		86,400,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							28,000,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasi sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efesien	1 Tahun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	3,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasi sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efesien	1 Tahun		3,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasi sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efesien	1 Tahun		22,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	100 %		6,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8,099,980		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Rekening yang terbarkan	12 Bulan	Tersedianya Bangunan Kantor yang Bersih dan Terpelihara, Serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan		3,599,980	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	Tersedianya Bangunan Kantor yang Bersih dan Terpelihara, Serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan		4,500,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							375,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							375,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittdalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittdalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	25,000,000	
TOTAL												524,000,000		



**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Salo**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							146,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							96,680,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	1 Tahun		15,430,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	1 Tahun		81,250,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							22,000,000		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	tersedianya aparaturn Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara Efektif dan Efisien	100 %		22,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,220,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasi sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efisien	1 Tahun		2,220,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6,500,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan sesuai Analisa Kebutuhan	100 %		6,500,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8,100,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	Tersedianya Bangunan Kantor Yang Bersih dan Terpelihara.Serta Pelayanan yang Terpenuhi	12 Bulan		3,600,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	Tersedianya Bangunan Kantor Yang Bersih dan Terpelihara.Serta Pelayanan yang Terpenuhi	12 Bulan		4,500,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10,500,000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	100 %	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	100 %		10,500,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							375,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							375,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittdalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittdalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	25,000,000	
TOTAL												521,000,000		

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Macorawalie**

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Jaya**

	TOTAL	521,000,000	
--	-------	-------------	--

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Sipatokkong**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							146,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							87,250,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	1 Tahun	12,748,000		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	1 Tahun	74,502,000		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							22,000,000		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara Efektif dan Efisien		22,000,000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							8,600,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasi sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efisien	1 Tahun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	8,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasi sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efisien	1 Tahun		600,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	Tersedianya Bangunan Kantor Yang Bersih dan Terpelihara,Serta Pelayanan yang Terpenuhi	12 Bulan		1,500,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	Tersedianya Bangunan Kantor Yang Bersih dan Terpelihara,Serta Pelayanan yang Terpenuhi	12 Bulan		4,500,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							22,150,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	Tersedia dan Terpeliharanya Kendaraan Operasional yang Baik	100 %		150,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	100 %	Tersedia dan Terpeliharanya Kendaraan Operasional yang Baik	100 %		22,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							375,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							375,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalem	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalem	50 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	25,000,000	
TOTAL												521,000,000		

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Sawitto**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							128,000,000		
7	01	01		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							85,410,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	1 Tahun		22,230,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	1 Tahun		63,180,000	
7	01	01		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							22,000,000		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara Efektif dan Efisien	100 %		22,000,000	
7	01	01		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,340,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasi sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efisien	1 Tahun		2,340,000	
7	01	01		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							9,800,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan sesuai Analisa Kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	5,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan sesuai Analisa Kebutuhan	100 %		4,800,000	
7	01	01		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8,100,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	Tersedianya Bangunan Kantor Yang Bersih dan Terpelihara, Serta Pelayanan yang Terpenuhi	12 Bulan		3,600,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	Tersedianya Bangunan Kantor yang Bersih dan Terpelihara, Serta Pelayanan yang Terpenuhi	12 Bulan		4,500,000	
7	01	01		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							350,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	Tersedia dan Terpeliharanya Kendaraan Operasional yang Baik	100 %		350,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							375,000,000		
7	01	03		2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							375,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam	50 %	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %		25,000,000	
TOTAL												503,000,000		

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Watang Sawitto**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Siparappe**

	TOTAL	539,000,000
--	-------	-------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,463,690,004	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							17,200,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 %	2,800,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 %	2,200,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 orang / kegiatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarangge 2,200,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 %	2,200,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Dokumen yang tersusun tepat waktu	5 orang / kegiatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarangge 2,200,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 %	2,800,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Dokumen yang dievaluasi tepat waktu	1 Dokumen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 %	2,800,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,179,626,619	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Tahun	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan 5,034,634,619	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Tahun	39,792,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Tahun	100,200,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	12 Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Tahun	2,800,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah  Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang tersusun Bulanan/Triwulan /Semesteran dengan akuntabel	12 Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Tahun	2,200,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,200,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen yang tersusun Bulanan/Triwulan /Semesteran dengan akuntabel	12 Bulan	Tersediannya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	2,200,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							75,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan  Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 LS 0 Orang	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Daerah	12 Bulan	75,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							115,153,000	

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**

	TOTAL	5,478,790,004	
--	-------	---------------	--



**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Pacongang**

	TOTAL	521,000,000	
--	-------	-------------	--

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Benteng Sawitto**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							146,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							46,568,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen			Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	14,768,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen			Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	31,800,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							25,850,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1. Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 LS 0 Paket	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	5,850,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutahan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan 0 Orang	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	20,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,670,000		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	630,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	2,040,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							15,325,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit			Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	4,200,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	11,125,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							55,587,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	3,087,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	52,500,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							375,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							375,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Paletang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	0 Unit 1 Ls	Terlaksananya Sarana Prasarana Infrastruktur dan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	Kab. Pinrang, Paletang, Benteng Sawito	350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Paletang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	1 Kegiatan	Terlaksananya Sarana Prasarana Infrastruktur dan Pemberdayaan Kelurahan	100 %		25,000,000	
TOTAL												521,000,000		

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Mamminasae**

	TOTAL	539,000,000	
--	-------	-------------	--

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Temmassarangne**

	TOTAL	521,000,000	
--	-------	-------------	--

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Laleng Bata**

	TOTAL	521,000,000	
--	-------	-------------	--

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Paleteang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Macinnae**

	TOTAL	539,000,000
--	-------	-------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,212,260,244			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							17,940,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase laporan Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	100 %	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	2,990,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Persentase laporan Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	100 %	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	2,990,000		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Persentase laporan Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	100 %	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	2,990,000		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Persentase laporan Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	100 %	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	2,990,000		
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %			Persentase laporan Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	100 %		2,990,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Persentase laporan Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	100 %	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	2,990,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,806,478,244			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	3,672,087,244		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Perkantoran sesuai Analisa Kebutuhan	12 Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	40,201,000		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	88,210,000		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	2,990,000		
		01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3 Laporan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	2,990,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7,420,000			
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang terlapor sesuai aturan dan tepat waktu	12 Dokumen	Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	7,420,000		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							73,150,000			
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun	2 Dokumen	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100 Persen		3,150,000		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang 0 Orang	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100 Persen		70,000,000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							82,745,000			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		1,475,000		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		1,750,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Ekslampe	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		2,520,000		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Terlaksananya kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan analisa kebutuhan	12 Bulan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		77,000,000		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							53,000,000			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	0 Unit 20 Unit	Persentase Pengadaan Barang	100 %		30,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Persentase Pengadaan Barang	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,000,000		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							43,017,000			

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang**

	TOTAL	4,222,120,244	
--	-------	---------------	--



**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Fakkie**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							149,237,000			
7	01	01		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							45,327,000			
7	01	01		2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	15,927,000		
7	01	01		2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	29,400,000		
7	01	01		2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,370,000			
7	01	01		2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	6,370,000		
7	01	01		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							30,180,000			
7	01	01		2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	1,450,000		
7	01	01		2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	1,080,000		
7	01	01		2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	27,650,000		
7	01	01		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							26,400,000			
7	01	01		2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	6,400,000		
7	01	01		2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	20,000,000		
7	01	01		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							39,460,000			
7	01	01		2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	2,205,000		
7	01	01		2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	37,255,000		
7	01	01		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,500,000			
7	01	01		2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	1,500,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							377,700,000			
7	01	03		2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							377,700,000			
7	01	03		2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Tiroang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang diadakan	100 %	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	370,000,000	
7	01	03		2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Tiroang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang diadakan	100 %	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	7,700,000	
TOTAL												526,937,000			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Marawi

	TOTAL	521,000,100
--	-------	-------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Mattiro Deceng**

	TOTAL	557,989,000	
--	-------	-------------	--

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Pammase**

	TOTAL	469,435,000
--	-------	-------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Samaturue**

	TOTAL	552,671,000	
--	-------	-------------	--

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tiroang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Tiroang**

	TOTAL	557,000,000
--	-------	-------------

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mattiro Bulu  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mattiro Bulu

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mattiro Bulu  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mattiro Bulu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Unsuran Pemerintahan Daerah	100 %	Tersusunnya Dokumen Analisa Jabatan	1 Kegiatan	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		8,800,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								12,151,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								12,151,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	100 %	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Terpenuhi	100 %	Tersusunnya Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2023	9 Desa		12,151,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								31,900,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								31,900,000	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran Desa	100 %	Jumlah Desa Yang Terkoordinis Dalam Pembinaan Dan Pengawasan	7 Desa	Persentase Ketercapaian Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		31,900,000	
TOTAL									3,038,619,228	



**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mattiwo Bulu**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Manarang**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									165,818,000	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									55,943,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhi	12 Bulan		55,943,000	
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									6,000,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	12 Bulan		6,000,000	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									28,200,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Secara Efektif Dan Efisiensi	100 %		3,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Perjalanan Dinas yang terkoordinasi Sesuai Analisa Kebutuhan Secara Efektif Dan Efisiensi	12 Bulan	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Secara Efektif Dan Efisiensi	100 %		25,200,000	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									75,675,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Rekening Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu	1 Gedung	Jumlah Jasa Kantor Terbayarkan Tepat Waktu	12 Bulan		3,675,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Jasa pelayanan Kantor Terbayarkan Tepat Waktu	12 Bulan	Jumlah Jasa Kantor Terbayarkan Tepat Waktu	12 Bulan		72,000,000	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									373,182,000	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									373,182,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Pembangunan Fisik Skala Kecil di tingkat Kelurahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat	50 %		350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terpenuhi	100 %	Persentase Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat	50 %		23,182,000	
TOTAL												539,000,000		

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mattiro Bulu**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Padaidi**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								165,812,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								54,802,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhi	12 Bulan		54,802,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6,000,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan		6,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22,600,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Secara Efektif Dan Efesiens	100 %		2,400,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Secara Efektif Dan Efesiens	100 %		20,200,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								82,410,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Rekening Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu	1 Rekening	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Secara Efektif Dan Efesiens	100 %		4,410,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Jasa pelayanan Kantor Terbayarkan Tepat Waktu	12 Bulan	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Secara Efektif Dan Efesiens	100 %		78,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								373,188,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								373,188,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Pembangunan Fisik Skala Kecil di tingkat Kelurahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat	50 %		350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terpenuhi	100 %	Persentase Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat	50 %		23,188,000	
TOTAL												539,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Suppa														
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Suppa														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,715,036,575		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							41,376,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dimutakhirkan	0 Dokumen 2 Dokumen	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	10,666,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA yang temutakhirkan	1 Kegiatan	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	5,155,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang temutakhirkan	0 Dokumen 1 Kegiatan	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	4,570,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA yang temutakhirkan	1 Kegiatan	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %		4,142,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang temutakhirkan	1 Kegiatan	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %		5,141,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Rencana Kerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Laporan 3 Dokumen	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	6,835,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang temutakhirkan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan 0 Laporan	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	4,867,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,145,756,575		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang temutakhirkan	1 Tahun	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana secara Efektif dan Efesien	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	2,997,080,675	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 3 Kegiatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana secara Efektif dan Efesien	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	60,998,900	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Laporan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan tepat waktu	0 Dokumen 1 Kegiatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana secara Efektif dan Efesien	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	77,326,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Laporan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan 1 LS	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana secara Efektif dan Efesien	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	10,351,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							18,712,000		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Persentase Barang dan Aset Daerah yang terinventarisasi	0 Laporan 12 Bulan	Persentase Ketercapaian Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	18,712,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah							90,582,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersediannya Pakaian Dinas ASN	0 Paket 1 LS	Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	9,000,000	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain Terlaksananya Laporan Pengolhan Administrasi Kepegawain	0 Dokumen 1 Kegiatan	Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	6,582,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase ASN yang meningkat kecakapan dan keterampilanya	0 Orang 10 Kegiatan	Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	75,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							218,713,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Persentase Pemenuhan Penerangan Gedung	0 Paket 12 Bulan	Persentase Peningkatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	2,376,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Suppa  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Suppa

	TOTAL	3,750,717,575
--	-------	---------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Suppa**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Watang Suppa**

Kode				Program/ Kegiatan		Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								164,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								51,697,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 1 Tahun	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	11,497,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Yang Baik	0 Dokumen 1 Tahun	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	40,200,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6,180,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	0 Laporan 1 Tahun	Persentase Ketercapaian Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Kelurahan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	6,180,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								24,200,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Presentase Pemenuhan Saran Pakaian Olahraga ASN	0 Paket 1 Ls	Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	4,200,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Presentase Aparatur Sipil Negara Yang Meningkatkan Kecakapan dan Keterampilannya	0 Orang 1 Tahun	Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	20,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								7,480,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0 Laporan 1 Tahun	Persentase Peningkatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	7,480,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Presentase Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 1 Tahun	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	10,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								63,943,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Layanan Rekening Listrik Yang Terbayarkan Tepat Waktu	0 Laporan 1 Tahun	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	3,528,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 1 Tahun	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	60,415,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								500,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit 1 Tahun	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik	100 %	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	500,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								375,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								375,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	0 Unit 1 LS	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kelurahan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0 Pokmas / Ormas 1 Kegiatan	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kelurahan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	25,000,000	
TOTAL													539,000,000	

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Suppa**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Tellumpanua**

	TOTAL	521,000,000	
--	-------	-------------	--

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mattiro Sompe  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mattiro Sompe

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,601,911,396		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							41,980,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu	7 Kegiatan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	2,950,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu	7 Kegiatan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	3,825,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu	7 Kegiatan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	3,475,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu	7 Kegiatan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	3,700,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu	7 Kegiatan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	3,850,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu	7 Kegiatan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	13,740,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu	7 Kegiatan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	10,440,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,211,021,396		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Tersedianya Pengadministrasian Keuangan dalam pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	2,056,795,396	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya Pengadministrasian Keuangan dalam pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	48,976,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	Tersedianya Pengadministrasian Keuangan dalam pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	87,000,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tersedianya Pengadministrasian Keuangan dalam pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	13,800,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	17 Laporan	Tersedianya Pengadministrasian Keuangan dalam pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	4,450,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							95,250,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian	3 Kegiatan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	5,250,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian	3 Kegiatan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	90,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							117,100,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	6,400,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	13,100,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	600,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	97,000,000	

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mattiro Sompe**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mattiro Sompe**



**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mattiro Sompe**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Pallameang**

	TOTAL	521,000,000	
--	-------	-------------	--

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mattiwo Sompe  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Langnga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Lanrisang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Lanrisang

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,688,000,708		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,706,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Penyampaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	6 Dokumen		2,006,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA yang termutakhirkan	1 Dokumen	Penyampaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	6 Dokumen		1,950,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun dan tepat waktu	1 Dokumen	Penyampaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	6 Dokumen		1,950,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %			Penyampaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	6 Dokumen		400,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Penyampaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	6 Dokumen		400,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Penyampaian Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	6 Dokumen	Penyampaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	6 Dokumen		2,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,318,892,708		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	2,177,730,708	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		39,552,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Honorarium Pelaksanaan Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		96,700,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		2,660,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	4 Doumen	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		2,250,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							12,720,000		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	12 Bulan	Jumlah tercapainya laporan barang milik daerah yang disusun	3 Laporan		12,720,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							55,360,000		
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Kepegawaian yang tersusun	12 bulan	Persentase pemenuhan perlengkapan Aparatur Sipil Negara sesuai analisa kebutuhan	20 ASN		360,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	6 Orang	Persentase pemenuhan perlengkapan Aparatur Sipil Negara sesuai analisa kebutuhan	20 ASN		55,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							96,780,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah gedung kantor yang memiliki instalasi listrik yang memadai	2 Bangunan	Persentase tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		380,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan	3 buah	Persentase tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		10,050,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Keikutsertaan Aparat Kecamatan dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 Kegiatan	Persentase tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		86,350,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							33,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah laporan barang milik daerah yang di susun	1 Ls	Jumlah tercapainya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Ls		33,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							27,642,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah yang terbayarkan listrik di kantor camat	12 Bulan	Jumlah terbayarnya listrik	12 Bulan		20,442,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah paket pembayaran jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	12 bulan	Jumlah terbayarnya listrik	12 Bulan		7,200,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							134,900,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	jumlah tercapainya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 Persen		32,850,000	

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Lanrisang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Lanrisang**

	TOTAL	2,700,690,708	
--	-------	---------------	--

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Lanrisang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Lanrisang**

	TOTAL	538,999,740	
--	-------	-------------	--

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023														
Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampanua														
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampanua														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,138,202,272		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							21,040,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 2 Dokumen	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	2,400,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	2,750,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	2,400,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	2,400,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen 0 Laporan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	11,090,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,720,263,272		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 12 Bulan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	3,547,502,272	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 Dokumen 12 Bulan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	49,665,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	120,196,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	2,900,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							19,380,000		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Presentase Barang dan Asset Daerah yang terinventarisasi sesuai aturan yang berlaku	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	19,380,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							126,700,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	11,700,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	0 Orang 15 Kali	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	115,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							116,486,300		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	presentase pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	1,166,300	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	presentase pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	1,520,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	0 Laporan 2 paket	presentase pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	113,800,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							47,125,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	0 Unit 5 unit	Pemenuhan Pengadaan barang kantor sesuai analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	8,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 buah 0 Unit	Pemenuhan Pengadaan barang kantor sesuai analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	14,125,000	

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampanua**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampanua**

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampanua**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Tonyamang**



**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampanua**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Teppo**

	TOTAL	658,787,500
--	-------	-------------

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampaanua  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0003 Kelurahan Benteng

	TOTAL	658,787,500
--	-------	-------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampanua**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0004 Kelurahan Maccirinna**

	TOTAL	658,787,500
--	-------	-------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Duampanua**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Duampanua**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,624,043,762		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,690,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	2,000,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Persentase Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	150,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	150,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	Persentase Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	560,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	Persentase Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	560,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Persentase Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	2,270,000	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,242,413,662		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Persentase Anggaran yang terealisasi tepat waktu dan kinerja administrasi keuangan terarah	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	4,129,468,862	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Persentase Anggaran yang terealisasi tepat waktu dan kinerja administrasi keuangan terarah	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	31,284,800	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Persentase Anggaran yang terealisasi tepat waktu dan kinerja administrasi keuangan terarah	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	79,350,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Anggaran yang terealisasi tepat waktu dan kinerja administrasi keuangan terarah	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	2,310,000	
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12,250,000		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Persentase Ketercapaian Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	12,250,000	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								65,842,000		
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Persentase pemenuhan Perengkapan Aparatur Sipil Negara sesuai analisa kebutuhan	100 %		842,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Persentase pemenuhan Perengkapan Aparatur Sipil Negara sesuai analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	65,000,000	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								39,110,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase peningkatan administrasi perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	780,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Persentase peningkatan administrasi perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	38,330,000	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72,187,300		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		42,927,300	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	29,260,000	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								186,550,800		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	34,110,800	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	2,440,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	150,000,000	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								7,865,100		
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								7,865,100		

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Duampanua  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Duampanua

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Usulan Musrembang Kecamatan Duapampanua yang terakomodir	40 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Persentase Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Duapampanua, Semua Kelurahan	7,865,100	
TOTAL									4,631,908,862	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Duampunua  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Lampa

	TOTAL	534,000,000
--	-------	-------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Duampanua**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pekkabata**

	TOTAL	534,000,000
--	-------	-------------

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Duampanua  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Tatae

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							164,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							41,665,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Tersediannya Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	11,665,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Tersediannya Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	30,000,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,000,000		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Tersediaya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	6,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							19,970,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersediannya Administrasi Umum Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	13,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Tersediannya Administrasi Umum Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	6,970,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							37,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Ls	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	7,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Ls	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	30,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							59,365,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	5,880,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	53,485,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							370,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							370,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Terlaksananya Sarana Prasarana Infrastruktur dan Pemberdayaan Kelurahan	1 Ls	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Terlaksananya Sarana Prasarana Infrastruktur dan Pemberdayaan Kelurahan	1 Ls	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	20,000,000	
TOTAL												534,000,000		



**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Duampanua**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bittoeng**

	TOTAL	533,265,000
--	-------	-------------

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Duampanua  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Data

	TOTAL	551,000,000
--	-------	-------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Batulappa**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Batulappa**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,278,436,788		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							33,775,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terselesaikan dengan baik dan Tepat Waktu	2 dokumen	Persentase terselesaikannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	10,005,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen RKA Tersusun dengan baik dan tepat waktu	1 dokumen	Persentase terselesaikannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	3,335,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	Persentase terselesaikannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	3,335,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 dokumen	Persentase terselesaikannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	3,385,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 dokumen	Persentase terselesaikannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	3,710,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 laporan	Persentase terselesaikannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	10,005,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,880,131,788		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	2,741,156,888	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terpenuhi sesuai aturan dan tepat waktu	12 bulan	persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	58,682,900	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Pelaksana Penatausahaan Keuangan terbayarkan dan tepat waktu	12 bulan	persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	68,720,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Akhir Tahun terselesaikan sesuai aturan dan tepat waktu	1 Laporan	persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	4,640,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Semesteran terselesaikan sesuai aturan dan tepat waktu	2 Laporan	persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	6,932,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							25,099,000		
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Persentase Tersusunnya Perencanaan Barang Milikdaerah sesuai kebutuhan	100 Peserta	persentase terlaksananya layanan administrasi barang pada perangkat daerahmilik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	3,335,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	persentase terlaksananya layanan administrasi barang pada perangkat daerahmilik daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	21,764,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							105,102,000		
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	15,102,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  Persentase Bimbingsa Teknis dilaksanakan sesuai kebutuhan	20 Orang 100 Peserta	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	90,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							126,560,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	persentase tersedianya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	2,560,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Perjalanan Dinas yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	12 bulan	persentase tersedianya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	124,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							36,708,500		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %			persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		8,250,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 ls	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		21,562,500	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %			persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		6,896,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							29,221,000		

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Batulappa**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Batulappa**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	2 rekening	persentase terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	4,851,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu	12 bulan	persentase terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	24,370,000	
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>41,839,500</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %			persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		35,276,500	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %			persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		6,563,000	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>9,520,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>9,520,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik	100 %	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan terlaksana dengan baik dan tepat waktu	1 Laporan	persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	9,520,000	
<b>TOTAL</b>									<b>3,287,956,788</b>	

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Batulappa**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Kassa**

	TOTAL	558,000,000	
--	-------	-------------	--

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cempa Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cempa														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,434,050,822		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,240,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya RKA Di Kecamatan Cempa	1 Dokumen 1 dokumen	Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	4,120,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA Di Kecamatan Cempa	1 Dokumen 1 dokumen	Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	4,120,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,470,050,022		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Cempa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 0 Orang/bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	12 bulan	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	2,253,566,022	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Tersedianya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN di Kecamatan Cempa	12 Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	12 bulan	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	128,764,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Cempa Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan 0 Dokumen	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	12 bulan	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	83,600,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan 1 dokumen	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	12 bulan	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	4,120,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							325,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas ASN Di Kecamatan Cempa	0 Paket 2 Kegiatan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	45,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan SDM Aparatur	0 Orang 12 Bulan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	280,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							312,700,000		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	1 Laporan 12 Bulan	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	312,700,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							199,550,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Meubeler yang diadakan sesuai analisa Kebutuhan di Kecamatan Cempa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Kegiatan 5 Unit	Jumlah meubeler, Jumlah peralatan mesin, Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Analisa Kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	69,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 kegiatan 3 Unit	Jumlah meubeler, Jumlah peralatan mesin, Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Analisa Kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	120,000,000	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	Jumlah meubeler, Jumlah peralatan mesin, Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Analisa Kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	10,550,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							61,555,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening Layanan Listrik dan Internet yang terbayarkan Tepat Waktu	1 Laporan 12 Bulan	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan, Jumlah Jasa Petugas Administrasi, Operator Komputer, Jasa Tenaga Pembersih dan Honor Kepala Lingkungan terbayarkan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	14,700,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 1 Laporan	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan, Jumlah Jasa Petugas Administrasi, Operator Komputer, Jasa Tenaga Pembersih dan Honor Kepala Lingkungan terbayarkan tepat waktu	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	46,855,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							56,955,800		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit 12 Bulan	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	12 bulan	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	52,755,800	

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cempa  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cempa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Tersedianya dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik						
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedia dan Terpeliharanya Gedung Kantor yang baik	1 Unit 12 Bulan	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	12 bulan	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	4,200,000	
TOTAL									3,434,050,822	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cempa  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Cempa

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							154,549,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							52,834,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN di Kelurahan Cempa	0 Dokumen 12 Bulan	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 bulan	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	23,934,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Kelurahan Cempa	0 Dokumen 12 Bulan	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 bulan	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	28,900,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							9,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas ASN Di Kecamatan Cempa	0 Paket 2 kegiatan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	9,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							8,900,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan ASN Di Kelurahan Cempa	1 Dokumen 1 Kegiatan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	1,080,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan di Kelurahan Cempa	1 Laporan 12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	7,820,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							14,350,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Meubeler yang diadkan sesuai analisa Kebutuhan di Kelurahan Cempa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Kegiatan 7 Unit	Jumlah meubeler yang diadkan sesuai analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	14,350,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							69,465,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening Layanan Listrik dan Internet yang terbayarkan Tepat Waktu	1 Laporan 12 Bulan	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadkan sesuai analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	1,470,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadkan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 1 Laporan	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadkan sesuai analisa kebutuhan	100 %	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	67,995,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							376,151,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							376,151,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Cempa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah sarana dan prasarana umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	2 Kegiatan	Tersedianya Infrastruktur dan Masyarakat yang Terampil	2 kegiatan	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	340,400,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Cempa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	Tersedianya Infrastruktur dan Masyarakat yang Terampil	2 kegiatan	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	35,751,000	
TOTAL													530,700,000	



**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Lembang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Lembang**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,329,060,322		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,290,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Laporan / Dokumen yang tersusun tepat waktu	2 Dokumen	Jumlah Dokumen/Laporan yang tersusun tepat waktu	8 Dokumen	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	570,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Laporan / Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	Jumlah Dokumen/Laporan yang tersusun tepat waktu	8 Dokumen	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	2,500,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	Jumlah Dokumen/Laporan yang tersusun tepat waktu	8 Dokumen	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	750,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	Jumlah Dokumen/Laporan yang tersusun tepat waktu	8 Dokumen	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	2,470,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,833,737,822		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Tercapainya Administrasi Keuangan yang baik	1 Tahun	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	3,722,772,822	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Terpenuhinya ATK, Makanan dan Minuman Rapat dan luran BPJS Non ASN	12 bulan	Tercapainya Administrasi Keuangan yang baik	1 Tahun	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	35,555,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Petausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jasa Administrasi Keuangan vg terbayarkan tepat waktu	12 bulan	Tercapainya Administrasi Keuangan yang baik	1 Tahun	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	72,400,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Tercapainya Administrasi Keuangan yang baik	1 Tahun		3,010,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13,500,000		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	terpenuhinya Jasa Pejabat Pengadaan, Pengurus dan Penyimpan Barang	12 Bulan	Terlaksananya Pengelolaan Aset dengan Baik	12 bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	13,500,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100,000,000		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	6 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	100,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							120,950,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai kebutuhan	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum	12 bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	2,250,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Perjalanan dinas yang terlaksana	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum	12 bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	118,700,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							56,017,500		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	5 Unit	Pengadaan Website	1 Paket	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	56,017,500	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							73,025,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah rekening Listrik dan Internet yg dibayarkan	12 bulan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	46,700,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	jumlah alat kebersihan dan jasa tenaga pembersih yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	26,325,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							125,540,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik	12 bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	92,250,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	tersedia dan terpeliharanya peralatan dan mesin dengan baik	12 bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	3,290,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	tersedia dan terpeliharanya gedung kantor dengan baik	12 bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	30,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							9,150,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							9,150,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	100 %	Jumlah kegiatan yang terkoordinasi sesuai analisa kebutuhan	1 Kegiatan	Tercapainya Pelaksanaan Musrembang Kecamatan	1 Kegiatan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	9,150,000	
TOTAL												4,338,210,322		

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Lembang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0001 Kelurahan Tadokkong**

	TOTAL	521,000,000
--	-------	-------------

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Lembang**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0002 Kelurahan Betteng**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								176,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								95,500,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Terpenuhinya ATK dan Makan Minum Rapat	12 bulan	Tercapainya Administrasi Keuangan yang baik	100 %		13,300,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jasa Administrasi Keuangan yg terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	Tercapainya Administrasi Keuangan yang baik	100 %	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	82,200,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Terpenuhinya Jasa pengurus barang pembantu	12 bulan	Terlaksananya Pengelolaan Aset dengan Baik	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	6,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								13,600,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah pakaian seragam yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	10 Buah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	3,600,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	1 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	10,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								4,900,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Terpenuhinya Bahan cetak dan pengadaan sesuai analisa kebutuhan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	1,500,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	3,400,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								47,500,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Meubelair yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Unit	Jumlah Pengadaan Barang yang tersedia	1 Tahun	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	5,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Unit	Jumlah Pengadaan Barang yang tersedia	1 Tahun	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	15,000,000	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Pengadaan Barang yang tersedia	1 Tahun	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	27,500,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								8,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	Jumlah rekening Listrik dan Internet yg dibayarkan	12 bulan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	2,500,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	jumlah alat kebersihan dan jasa tenaga pembersih yang terbayarkan tepat waktu	12 bulan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	6,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								370,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								370,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lembang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana umum yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	3 kegiatan	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat	100 %	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	350,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lembang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	1 kegiatan	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat	100 %	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	20,000,000	
TOTAL												546,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang														
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,055,085,481		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							25,025,000		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja yang tersusun tepat waktu	0 Dokumen 1 dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan	100 %		4,000,000	
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA yang tersusun tepat waktu	0 Dokumen 1 dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan	100 %		3,500,000	
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah dokumen RKA yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan	100 %		4,000,000	
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD jumlah dokumen DPA yang tersusun tepat waktu	0 Dokumen 1 dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan	100 %		3,000,000	
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah dokumen DPA perubahan yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan	100 %		3,525,000	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah dokumen LKJP LPD dan perjanjian kinerja yang tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen 0 Laporan	Persentase Dokumen Perencanaan	100 %		4,000,000	
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah dokumen evaluasi renja dan renstra yang tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen 0 Laporan	Persentase Dokumen Perencanaan	100 %		3,000,000	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,613,571,981		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah ASN yang terbayarkan gajinya tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN 0 Orang/bulan	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2,403,691,151	
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,660,830	
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah jasa keuangan yang terbayarkan tepat waktu	0 Dokumen 20 jasa	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	100 %		153,220,000	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen 0 Laporan	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	100 %		6,500,000	
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	100 %		5,500,000	
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13,560,000		
8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah jasa pengelolaan barang yang terbayarkan tepat waktu	2 jasa	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	100 %		13,560,000	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							106,850,000		
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah dokumen data kepegawaian yang tersusun Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen 0 Dokumen	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100 %		6,850,000	
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah sumber daya manusia aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	0 Orang 10 aparatur	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100 %		100,000,000	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							134,020,000		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah jenis penerangan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 jenis 0 Paket	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100 %		2,990,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Pinrang										
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	10 jenis	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100 %		3,380,000	
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	17 jenis	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100 %		20,000,000	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah program kegiatan yang terkoordinasikan	0 Laporan 5 program	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum SKPD	100 %		107,650,000	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34,890,000	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah peralatan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit 0 Unit	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %		34,890,000	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								54,755,000	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terdistribusi	0 Laporan 100 surat	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD	100 %		3,494,000	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	0 Laporan 24 rekening	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD	100 %		30,621,000	
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah jasa petugas administrasi yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 orang 0 Laporan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20,640,000	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72,413,500	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan	0 Unit 2 unit	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,783,500	
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah peralatan kantor yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan	6 unit	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	100 %		2,190,000	
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit 0 Unit	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,440,000	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								61,448,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								61,448,000	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	90 %	jumlah peserta pendidikan bela negara	40 orang	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100 %		46,050,000	
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	90 %	jumlah fasilitasi forum kebangsaan	1 kali	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100 %		15,398,000	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								1,287,612,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								1,287,612,000	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase cakupan sosialisasi pendidikan politik	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah jumlah pendidikan politik	0 Orang 12 kali	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik	100 %		86,812,000	
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase cakupan sosialisasi pendidikan politik	100 %	Jumlah bantuan keuangan parpol yang tersalurkan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 parpol 0 Laporan 12 Laporan	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik	100 %	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1,200,800,000	

**Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

	TOTAL	5,743,908,541	
--	-------	---------------	--